



**PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029**



Bappeda Labuhanbatu

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 1 TAHUN 2025

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6941);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LABUHANBATU

dan

BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
9. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.
15. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat

daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan RPJP Nasional dan RPJP Daerah.

- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program Pemerintah Daerah, yang mencakup gambaran secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 3

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan dalam jangka waktu Tahun 2025-2029.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RKPD yang memuat rencana kerangka ekonomi daerah, prioritas Pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RPJM DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJM Daerah meliputi:
 - a. Bab I pendahuluan;
 - b. Bab II gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. Bab III gambaran Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. Bab V visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. Bab VI strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - i. BAB IX Penutup
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
 - a. pengendalian pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD; dan
 - b. evaluasi indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB IV PERUBAHAN RPJM DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJM Daerah hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

MAYA HASMITA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu.

Nomor : 1 Tahun 2025

Tanggal : 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

HASAN HERI RAMBE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029 telah diselesaikan dengan baik. Dokumen perencanaan ini merupakan manifestasi komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Cerdas Bersinar.

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029 dibangun atas landasan filosofis Pancasila dan konstitusi, serta mempertimbangkan dinamika pembangunan nasional dan regional. Dokumen ini merupakan peta jalan strategis yang menjabarkan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan terintegrasi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Rumusan dokumen ini mempertimbangkan secara cermat dinamika pembangunan nasional dan regional, potensi wilayah, tantangan struktural, serta aspirasi masyarakat Labuhanbatu. Melalui perencanaan yang matang, implementasi yang konsisten, dan evaluasi berkelanjutan, kami yakin Kabupaten Labuhanbatu akan mampu mewujudkan cita-cita luhur pembangunan daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RPJMD ini, baik dari unsur pemerintah, akademisi, praktisi, maupun masyarakat. Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi rencana ini sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, sinergitas antar stakeholder, dan komitmen bersama untuk mewujudkan Labuhanbatu Cerdas Bersinar.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	9
1.3.1 Keterkaitan RPJMD dengan KLHS RPJMD.....	11
1.3.2 Keterkaitan RPJMD dengan RTRW.....	12
1.3.3 Keterkaitan RPJMD dengan RPIK.....	12
1.3.4 Keterkaitan RPJMD dengan Ripparkab.....	13
1.3.5 Keterkaitan RPJMD dengan RIPJPID	13
1.4 Maksud dan Tujuan	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II Gambaran Umum Daerah	16
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	17
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah.....	17
A Luas dan Batas Wilayah Administrasi	17
B Letak dan Kondisi Geografis.....	19
C Kondisi Topografi	19
D Kondisi Geologi.....	20
E Kondisi Hidrologi.....	20
F Kondisi Klimatologi	21
G Penggunaan Lahan.....	22
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam.....	22
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	23
2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	23
A Pangan	23
B Listrik.....	25
C Air	25
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas	26
A Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	27
B Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	28
C Emisi Gas Rumah Kaca.....	28
D Pengelolaan Sampah	29
2.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	30
2.1.7 Demografi.....	31
A Jumlah dan Struktur Penduduk.....	31
B Laju Pertumbuhan Penduduk.....	32

	C Kepadatan Penduduk	33
	D Piramida Penduduk.....	34
	E Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Usia	35
	F Proyeksi Penduduk menurut Kecamatan	36
	G Proyeksi Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan	37
	H Proyeksi Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan	38
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	39
2.2.1	Kesejahteraan Ekonomi.....	39
	A Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB.....	39
	B Kemiskinan.....	43
	C Indeks Gini	45
	D Tingkat Pengangguran Terbuka	45
	E Indeks Pembangunan Manusia.....	46
2.2.2	Kesehatan Untuk Semua	47
	A Usia Harapan Hidup	47
	B Prevalensi Stunting.....	48
2.2.3	Pendidikan Berkualitas yang Merata	49
	A Rata-Rata Lama Sekolah.....	49
	B Harapan Lama Sekolah	50
	C Literasi dan Numerasi	51
	D Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ..	52
2.2.4	Perlindungan Sosial yang Adaptif.....	53
2.2.5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	55
	A Indeks Kerukunan Umat Beragama.....	56
	B Indeks Pembangunan Kebudayaan.....	56
2.2.6	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	56
	A Indeks Pembangunan Keluarga.....	57
	B Indeks Perlindungan Anak.....	58
	C Indeks Pembangunan Gender	58
	D Indeks Pemberdayaan Gender	59
	E Indeks Ketimpangan Gender.....	60
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	61
2.3.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia	62
2.3.2	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi ..	63
	A Rasio PDRB Industri Pengolahan.....	64
	B Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum	65
	C Rasio Kewirausahaan	66
	D Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67
	E Indeks Inovasi Daerah.....	68
	F Jasa Keuangan	69
2.3.3	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	70
	A Energi Baru Terbarukan.....	71

2.3.4	Transformasi Digital	71
A	Indeks Masyarakat Digital.....	71
2.3.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.....	73
A	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).....	74
2.3.6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	76
A	Indeks Infrastruktur	76
B	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	77
C	Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau.....	77
D	Persentase Desa Mandiri	77
2.3.7	Stabilitas Ekonomi Makro	78
A	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	78
B	Tingkat Inflasi	79
2.4	Aspek Pelayanan Umum	81
2.4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	81
2.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial..	82
2.4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.....	83
A	Indeks Daya Saing Daerah	84
B	Angka Kriminalitas	85
2.4.4	Layanan Urusan Wajib Dasar	86
A	Pendidikan	86
B	Kesehatan	88
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	91
D	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	92
E	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	93
F	Sosial.....	94
2.4.5	Layanan Urusan Wajib Non Dasar	95
A	Tenaga Kerja.....	96
B	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	96
C	Pangan	97
D	Lingkungan Hidup.....	98
E	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99
F	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100
G	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	101
H	Perhubungan	101
I	Komunikasi dan Informatika	102
J	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	102

	K Penanaman Modal.....	104
	L Kepemudaan dan Olahraga.....	104
	M Kebudayaan.....	105
	N Perpustakaan.....	105
	O Kearsipan.....	106
2.4.6	Urusan Pilihan.....	107
	A Pariwisata.....	107
	B Kelautan dan Perikanan	108
	C Pertanian	109
	D Perdagangan	110
	E Perindustrian.....	111
2.4.7	Penunjang Pemerintah	111
	A Perencanaan Pembangunan.....	111
	B Keuangan.....	112
	C Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan	113
	D Pengawasan.....	113
	E Sekretariat Daerah.....	114
2.5	Gambaran Keuangan Daerah	115
2.5.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	118
2.5.2	Pendapatan Daerah	120
	A Pendapatan Asli Daerah	129
	B Pendapatan Transfer	139
	C Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	144
2.5.3	Belanja Daerah.....	145
2.5.4	Pembiayaan Daerah.....	159
2.5.5	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	163
2.5.6	Kebijakan Pendapatan Daerah	164
2.5.7	Kebijakan Belanja Daerah	165
2.5.8	Kebijakan Pembiayaan Daerah	168
2.5.9	Kerangka Pendanaan	168
2.5.10	Proyeksi Pendapatan Daerah.....	171
	A Pendapatan Asli Daerah (PAD)	175
	B Pendapatan Transfer	176
	C Lain-Lain Pendapatan yang Sah	177
	D Kebijakan Pendapatan Daerah	177
2.5.11	Proyeksi Belanja Daerah	180
	A Kebijakan Belanja Daerah	182
2.5.12	Proyeksi Pembiayaan Daerah	183
2.5.13	Kebijakan Pembiayaan Daerah	185
2.6	Permasalahan dan Isu Strategis	186
2.6.1	Isu Strategis.....	203
	A Isu Strategis Global	204
	B Isu Strategis Nasional	207
	C Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara.....	208
	D Isu Strategis Kabupaten Labuhanbatu	216

BAB III	Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan	222
3.1	Visi dan Misi.....	223
3.2	Tema Pembangunan, Strategi, dan Arah Kebijakan	240
3.3	Program Prioritas.....	250
3.4	Arah Pengembangan.....	264
3.4.1	Pengembangan Bioindustri.....	264
3.4.2	Pengembangan Pariwisata.....	265
BAB IV	Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	267
4.1	Program Perangkat Daerah	268
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	289
BAB V	Penutup	359
5.1	Kaidah Pelaksanaan	360
5.1.1	Konsistensi Perencanaan dengan Pendanaan	360
5.1.2	Kerangka Pengendalian	361
5.1.3	Mekanisme Perubahan	361
5.1.4	Transisi Pemerintahan.....	362
5.2	Mitigasi Risiko Pembangunan	362
5.3	Kesimpulan.....	363

DAFTAR TABEL

2.1	Administrasi Kecamatan Labuhanbatu	18
2.2	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Station Klimatologi Kabupaten Labuhanbatu	21
2.3	Penggunaan Lahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023	22
2.4	Capaian Indikator Ketahanan Air	26
2.5	Capaian Indikator Pengelolaan Sampah	29
2.6	Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Menurut Kelompok Umur	31
2.7	Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Menurut Kecamatan	32
2.8	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu	33
2.9	Distribusi Penduduk Kabupaten Labuhanbatu (Jiwa/Km ²)....	34
2.10	Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Usia	36
2.11	Proyeksi Penduduk menurut Kecamatan	36
2.12	Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Menurut Kecamatan	37
2.13	Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan	38
2.14	Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha	41
2.15	Distribusi PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha	42
2.16	Literasi dan Numerasi Kabupaten Labuhanbatu	51
2.17	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu	52
2.18	Capaian Indikator Jasa Keuangan	69
2.19	Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Labuhanbatu	72
2.20	Indikator Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	74
2.21	Realisasi Investasi PMDN menurut Sektor	75
2.22	Inflasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 menurut Kelompok Pengeluaran	80
2.23	Capaian Indikator Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	81
2.24	Capaian Indikator Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	83
2.25	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu	84
2.26	Capaian Kinerja Pendidikan	88
2.27	Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Labuhanbatu	89
2.28	Jumlah Dokter di Kabupaten Labuhanbatu	90
2.29	Capaian Kinerja Kesehatan	90
2.30	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	91
2.31	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	93
2.32	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	94
2.33	Capaian Kinerja Urusan Sosial	95

2.34	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja.....	96
2.35	Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	96
2.36	Capaian Kinerja Urusan Pangan	97
2.37	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup.....	98
2.38	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99
2.39	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	100
2.40	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	101
2.41	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan	101
2.42	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika	102
2.43	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	103
2.44	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal.....	104
2.45	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	104
2.46	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan.....	105
2.47	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan.....	106
2.48	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan.....	106
2.49	Capaian Kinerja Pariwisata	107
2.50	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	108
2.51	Capaian Kinerja Urusan Pertanian	109
2.52	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan	110
2.53	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian.....	111
2.54	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan.....	112
2.55	Capaian Kinerja Urusan Keuangan	112
2.56	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan	113
2.57	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan.....	114
2.58	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah	114
2.59	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu	121
2.60	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu	130
2.61	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Labuhanbatu	140
2.62	Target, Realisasi dan Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Labuhanbatu.....	144
2.63	Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Labuhanbatu	147
2.64	Surplus (Defisit) Riil Realisasi APBD dan SiLPA Kabupaten Labuhanbatu (Rp Miliar).....	160
2.65	Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu	174
2.66	Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Rp).....	181
2.67	Proyeksi Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Rp)	184

2.68	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu	187
2.69	Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintah.....	193
3.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029	234
3.2	Penyelarasan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara	239
3.3	Tema Pembangunan	241
3.4	Strategi dan Arah Kebijakan	242
3.5	Program Prioritas RPJMD	251
3.6	Produksi Kelapa Sawit Kabupaten Labuhanbatu (Ton)	264
3.7	Produksi Karet Kabupaten Labuhanbatu (Ton)	265
4.1	Program Perangkat Daerah	269
4.2	Indikator Kinerja Utama	290
4.3	Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara	291
4.4	Indikator Kinerja Daerah	301

DAFTAR GAMBAR

1.1	Hubungan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.....	10
1.2	Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektor Lainnnya	11
2.1	Peta Administratif Kabupaten Labuhanbatu	18
2.2	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu	24
2.3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	25
2.4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	27
2.5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	28
2.6	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Labuhanbatu (2024)	30
2.7	Piramida Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024	35
2.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (%)	40
2.9	PDRB Per Kapita Kabupaten Labuhanbatu (Rp Juta)	43
2.10	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Maret)	44
2.11	Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Poin) (Maret)	45
2.12	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Agustus)	46
2.13	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional	47
2.14	Usia Harapan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional	48
2.15	Prevalensi Stunting Kabupaten Labuhanbatu.....	49
2.16	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional	50
2.17	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional	51
2.18	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	54
2.19	Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Labuhanbatu	57
2.20	Indeks Perlindungan Anak (Poin).....	58
2.21	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Labuhanbatu	59
2.22	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Labuhanbatu	60
2.23	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Labuhanbatu	61
2.24	Angka Ketergantungan (Per 100 Penduduk).....	63
2.25	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (%).....	64
2.26	Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	65
2.27	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Labuhanbatu	66
2.28	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Labuhanbatu	67
2.29	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	68
2.30	Persentase Desa Mandiri (%)	78

2.31	Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	79
2.32	Angka Kriminalitas Kabupaten Labuhanbatu	85
2.33	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Labuhanbatu	87
2.34	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Labuhanbatu.....	87
2.35	Struktur Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Rp Miliar)	125
2.36	Derajat Kemandirian dan Rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Labuhanbatu	128
2.37	Realisasi PAD dan Komponen Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu	132
2.38	Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Labuhanbatu	135
2.39	Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Labuhanbatu	136
2.40	Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Labuhanbatu	137
2.41	Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Labuhanbatu	138
2.42	Realisasi dan Struktur Pendapatan Transfer Kabupaten Labuhanbatu	142
2.43	Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Labuhanbatu	143
2.44	Struktur Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu	150
2.45	Pergerakan Struktur Belanja Operasi Kabupaten Labuhanbatu (Rp Miliar)	153
2.46	Pergerakan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Labuhanbatu	156
2.47	Pergerakan Realisasi SiLPA Kabupaten Labuhanbatu	163
2.48	Isu Strategis Global Jangka Menengah	204
2.49	Isu Strategis Nasional	207
2.50	Isu Strategis Jangka Menengah Kabupaten Labuhanbatu	217



BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk menetapkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai menuju arah yang lebih baik. Perencanaan pembangunan sangat penting dan signifikan dalam menentukan arah perkembangan dan kemajuan bagi suatu daerah. Selain untuk menjadikan pembangunan lebih terarah, perencanaan pembangunan juga dapat berfungsi sebagai standar atau alat ukur untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Pentingnya perencanaan dalam pembangunan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga tanpa perencanaan yang baik, tujuan pembangunan yang dicita-citakan mustahil dapat tercapai. Salah satu indikasi perencanaan yang baik adalah mengacu atau berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun.

Salah satu bentuk perencanaan pembangunan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ketentuan mengenai penyusunan RPJMD tersebut, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam proses penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, komitmen adanya jaminan kesinambungan pembangunan daerah dan dukungan pencapaian pembangunan nasional sangat diperlukan. Oleh karena itu, keberadaan dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029 perlu dilakukan penyelarasan dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita serta 17 (Tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. Dengan demikian, penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029 harus diselaraskan dalam penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tahapan periode pertama RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2045. RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029 juga disusun dengan memperhatikan RTRW Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan kawasan strategis, serta indikasi program pemanfaatan ruang. RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029 juga mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Labuhanbatu untuk menjamin bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi,

mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Mengingat pentingnya dokumen RPJMD dalam proses perencanaan pembangunan daerah maka RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan yang strategis sebagai upaya untuk mewujudkan Labuhanbatu Cerdas Bersinar. Dengan demikian, keberadaan dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman dalam proses penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan penyusunan RKPD tahun 2026 hingga tahun 2029. Selain itu, dokumen RPJMD juga akan menjadi acuan bagi DPRD dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029 berpedoman pada sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis dan praktis. Adapun dasar hukum peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
 25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
 26. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249).
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77).
34. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 929).

35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
37. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33).
38. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16).
39. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2016).

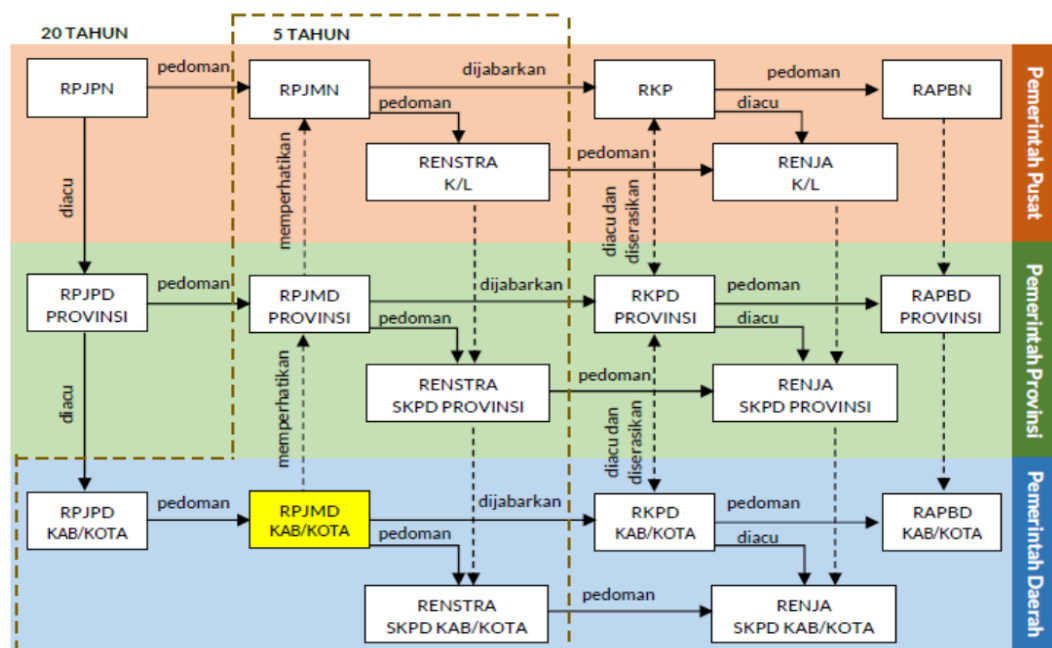
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik pada lingkup Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara maupun nasional. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, di samping berpedoman pada RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035, serta hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021–2026. Selain dokumen-dokumen perencanaan di atas, perlu juga memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, seperti agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025–2029 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Adapun keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

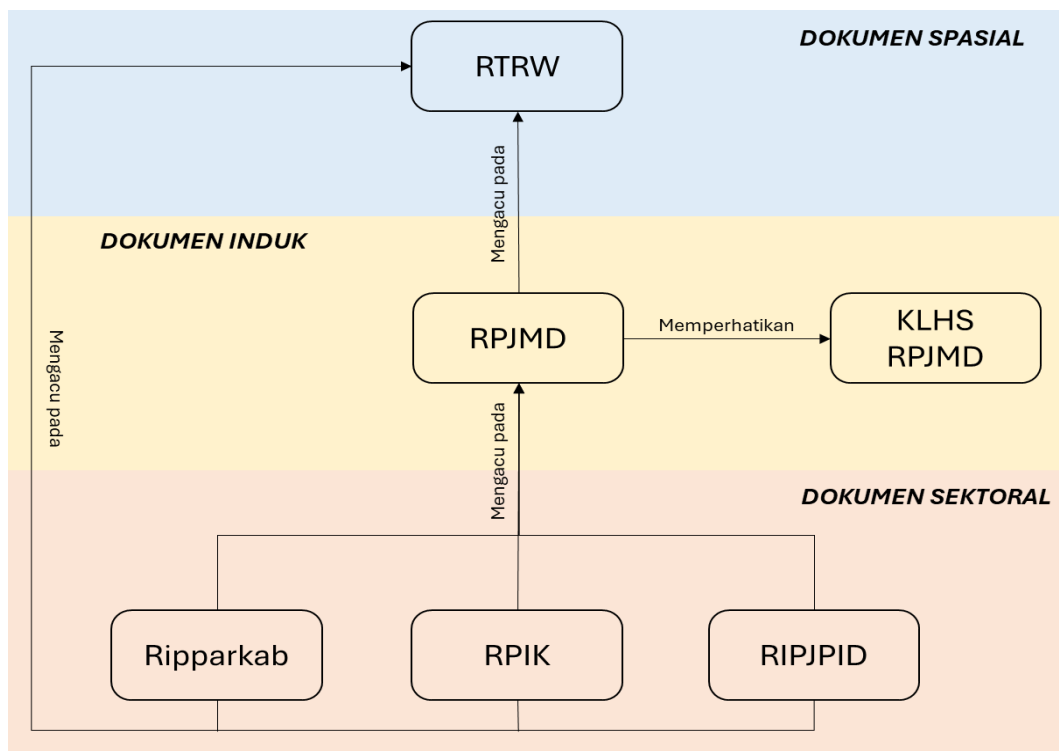


Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dokumen RPJMD menjadi acuan bagi beberapa dokumen turunan

(sektoral) lainnya. Ada pun hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan turunan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2 Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektor lainnya

1.3.1 Keterkaitan RPJMD dengan KLHS RPJMD

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) memiliki keterkaitan erat dengan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagai instrumen untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan dalam RPJMD dianalisis dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi sehingga potensi risiko dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hal ini bertujuan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. KLHS menjadi dasar penting dalam penyusunan RPJMD untuk memastikan bahwa target pembangunan daerah dapat dicapai tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Keterpaduan ini akan menghasilkan dokumen perencanaan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat,

tetapi juga adaptif terhadap isu-isu strategis lingkungan, seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan pencemaran.

1.3.2 Keterkaitan RPJMD dengan RTRW

RPJMD dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) memiliki hubungan sinergis karena keduanya merupakan dokumen strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah. RPJMD berfungsi sebagai pedoman pembangunan lima tahunan yang berbasis visi dan misi kepala daerah, sementara RTRW menjadi dasar pengaturan pemanfaatan ruang untuk menjamin keserasian antara pembangunan sektoral dan pengelolaan ruang. Tanpa keterpaduan keduanya, pembangunan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian tata ruang, seperti alih fungsi lahan yang tidak terkendali atau konflik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, RPJMD perlu disusun dengan merujuk pada RTRW agar arah pembangunan sesuai dengan struktur ruang dan pola ruang yang telah ditetapkan. Sinkronisasi ini akan memastikan bahwa program pembangunan daerah mendukung terwujudnya tata ruang yang berkelanjutan, tertib, dan berdaya saing, sekaligus mengurangi potensi permasalahan tata ruang di masa depan.

1.3.3 Keterkaitan RPJMD dengan RPIK

RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten) menjadi salah satu dokumen turunan penting yang harus selaras dengan RPJMD, khususnya dalam sektor industri sebagai penggerak ekonomi daerah. RPJMD memberikan arah kebijakan makro pembangunan, sementara RPIK lebih fokus pada strategi pengembangan sektor industri, mulai dari prioritas komoditas unggulan, penguatan daya saing industri lokal, hingga penyediaan infrastruktur pendukung. Sinergi antara RPJMD dan RPIK akan memperkuat sinergi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada potensi lokal. Perencanaan industri di daerah tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dengan visi pembangunan daerah yang lebih luas, baik dari sisi peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, maupun pengembangan kawasan industri berbasis potensi daerah.

1.3.4 Keterkaitan RPJMD dengan Ripparkab

Ripparkab (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten) merupakan dokumen strategis dalam pengembangan sektor pariwisata daerah. Keterkaitannya dengan RPJMD terletak pada kebutuhan akan sinkronisasi kebijakan agar pengembangan pariwisata menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi daerah. RPJMD memberikan arah pembangunan lintas sektor, sedangkan Ripparkab secara khusus menitikberatkan pada pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata. Pembangunan sektor pariwisata dapat dilaksanakan secara lebih terarah, konsisten, dan berkelanjutan dengan adanya penyelarasan antara dokumen RPJMD dengan Ripparkab. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program pariwisata mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian budaya, serta lingkungan.

1.3.5 Keterkaitan RPJMD dengan RIPJPID

RIPJPID (Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Iptek Daerah) memiliki keterkaitan strategis dengan RPJMD karena ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. RPJMD sebagai dokumen pembangunan daerah lima tahunan harus mengakomodasi arah kebijakan penguatan riset, inovasi, serta pemanfaatan teknologi yang diatur dalam RIPJPID. Pembangunan daerah dapat lebih efisien, produktif, dan adaptif terhadap perkembangan global. Keselarasan antara RPJMD dan RIPJPID akan memperkuat ekosistem inovasi daerah melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Integrasi ini akan membantu daerah menghadapi tantangan pembangunan berbasis data dan teknologi, memperkuat daya saing ekonomi, serta menciptakan solusi inovatif untuk berbagai permasalahan pembangunan daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu

Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah dan menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun kesepakatan, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2025-2029 yakni Labuhanbatu Cerdas Bersinar.

Sedangkan tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu untuk 5 (lima) tahun ke depan dan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan.
4. Sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.
5. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029 mengacu pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD yang terdiri atas 5 (lima) Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum daerah menjelaskan beberapa aspek, di antaranya adalah: (1) Aspek geografi dan demografi, (2) Aspek kesejahteraan masyarakat, (3) Aspek daya saing daerah, serta (4) Aspek pelayanan umum. Selain itu, gambaran umum daerah juga menjelaskan kondisi keuangan daerah dan berbagai permasalahan pembangunan serta isu-isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029 disertai dengan tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, diuraikan berbagai strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan Indikator program, serta target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Di samping itu, dijelaskan juga kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terkait target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan secara substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian serta evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.



BAB II

Gambaran Umum Daerah

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran mengenai kondisi letak, tata ruang, dan kependudukan di suatu daerah.

1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

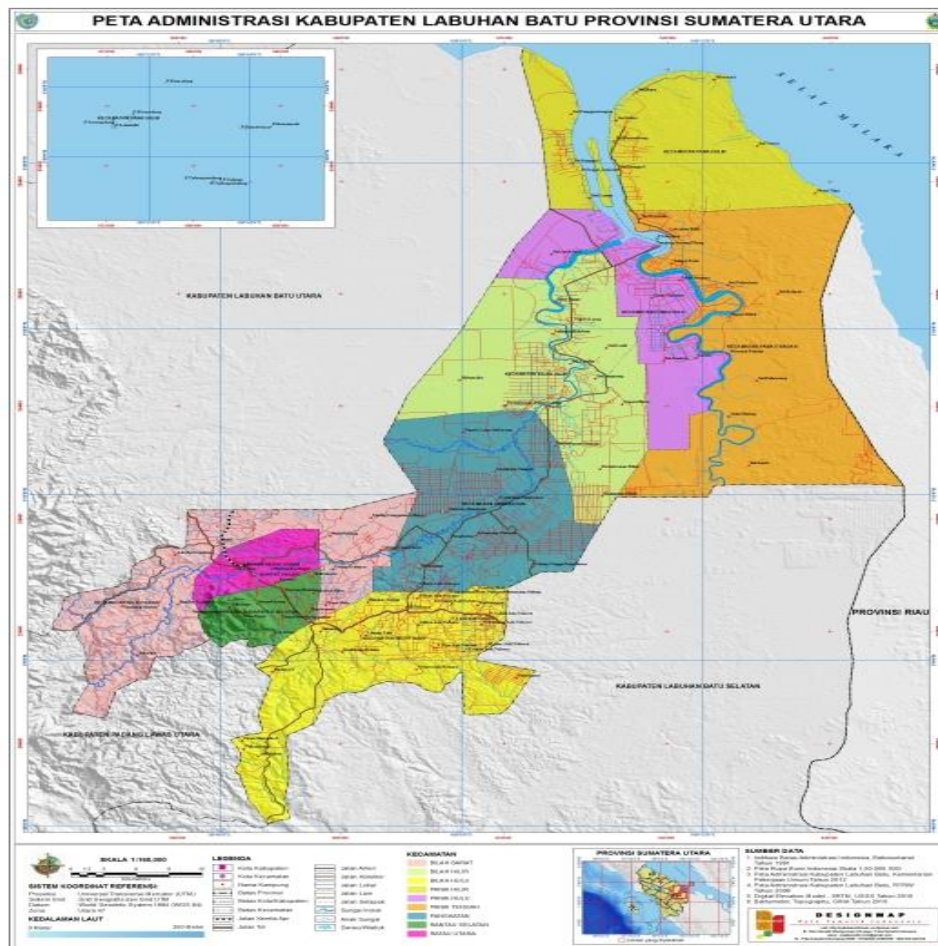
Aspek geografi meliputi gambaran mengenai lokasi, potensi pengembangan, dan kerentanan terhadap bencana pada wilayah perencanaan, untuk mengetahui karakteristik fisik wilayah yang sedang direncanakan.

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Labuhanbatu memiliki luas wilayah 2772.257 ha atau 2.772,57 km². Batas wilayah Kabupaten Labuhanbatu secara administratif adalah:

- Sebelah Utara Labuhanbatu berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Padang Lawas Utara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Peta administrasi Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: RTRW Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu dibagi atas wilayah pesisir dan non pesisir pantai dengan kode wilayah 12.10.02 dan memiliki total luas wilayah 2.772,57 ha atau 277.257 km². Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 9 kecamatan, 23 kelurahan, dan 75 desa. Berikut adalah rincian data administrasi wilayah Kabupaten Labuhanbatu

Tabel 2.1 Administrasi Kecamatan Labuhanbatu

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
			(Km ²)	(%)	Kelurahan	Desa
1	Bilah Hulu	Aek Nabara	385,02	13,89	24	24
2	Pangkatan	Pangkatan	271,13	9,78	7	7
3	Bilah Barat	Janji	291,05	10,50	10	10
4	Bilah Hilir	Negeri Lama	472,26	17,03	13	11
5	Panai Hulu	Tanjung Sarang Elang	225,98	8,15	7	7
6	Panai Tengah	Labuhan Bilik	584,56	21,08	10	9

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
			(Km ²)	(%)	Kelurahan	Desa
7	Panai Hilir	Sei Berombang	391,13	14,10	8	7
8	Rantau Selatan	Sioldengan	60,20	2,17	9	-
9	Rantau Utara	Rantauprapat	91,24	3,29	10	-
Kabupaten Labuhanbatu			2.772,57	100	98	75

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Panai Tengah adalah kecamatan terluas dengan persentase luasan 21,08 persen dari total luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Kecamatan Bilah Hilir sebesar 17,03 persen, dan Panai Hilir sebesar 14,10 persen.

B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Labuhanbatu terletak pada koordinat antara 1°41'-2°44' Lintang Utara (LU) dan 99°33'-100°22' Bujur Timur (BT) dan berada pada ketinggian 0-700 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Labuhanbatu terletak pada kawasan Pantai Timur pulau Sumatera. Selain itu juga mempunyai posisi yang sangat strategis karena dilintasi jalur antar provinsi dan berada di persimpangan antara Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

C. Kondisi Topografi

Kondisi topografi wilayah dapat dilihat dari dua jenis, yaitu ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Berdasarkan ketinggian lahan, Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari daerah dataran rendah dan perbukitan, wilayah yang terletak pada ketinggian 0-10 m di atas permukaan laut (DPL) seluas 172,770 (67,45%), 11-25 m di atas permukaan laut (DPL) seluas 72,697 ha (28,38%), 26-100 m di atas permukaan laut (DPL) seluas 49,67 ha (0,02%) dan lebih dari 100 m di atas permukaan laut (DPL) seluas 10,621 ha (4,15%).

Wilayah Kabupaten Labuhanbatu berada pada kemiringan antara 0-2% seluas 224.886 ha (87,80%), kemiringan antara 2-15% seluas 13.738 ha (5,36%), kemiringan antara 15-40% seluas 12.537 ha (4,89%) dan lebih dari 40% seluas 4,977 ha (1,94%). Kondisi kemiringan lahan ini berpengaruh terhadap pengembangan pembangunan fisik maupun perencanaan strategis

lainnya.

D. Kondisi Geologi

Kondisi geologi wilayah Kabupaten Labuhanbatu terdiri atas tekstur tanah halus seluas 205.404 ha (80,19%) dan tekstur tanah sedang seluas 50.734 ha (19,81%). Wilayah dengan kedalaman efektif antara 30-60 cm mencapai 69.019 ha (26,95%), kedalaman 60-90 cm mencapai 98.026 ha (38,27%), lebih dari 90 cm seluas 10.800 ha (4,22%) dan lahan gambut seluas 78.293 ha (30,57%). Kondisi geologi Labuhanbatu menurut jenisnya terdiri dari Alluvial seluas 115.519 ha (45,10%), Pasir Kerikil seluas 70.800 ha (27,64%), Batu Pasir seluas 31.051 ha (12,12%) dan Jenis lainnya seluas 38.767 ha (15,14%). Sedangkan menurut jenis tanah terdiri atas potsolik seluas 61.237 ha (23,91%), organosol seluas 180.936 ha (70,64%) dan jenis lainnya seluas 13.965 ha (5,45%).

E. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Labuhanbatu terdiri atas sungai besar dan sungai kecil. Dua Sungai besar, yaitu sungai Barumon dan Sungai Bilah dengan lebar 16m-250m, sedangkan sungai kecil adalah sebagai anak sungai. Muara dari kedua sungai besar tersebut adalah Selat Malaka dengan debit 97-195 m/det. Dengan kondisi ini, maka wilayah Labuhanbatu memiliki daerah tergenang secara periodik seluas $\pm 151,208$ ha atau 59,03% dan daerah yang tergenang terus menerus atau rawa seluas $\pm 5,210$ ha atau 2,03%. Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai besar/utama di Kabupaten Labuhanbatu tersebut, yaitu:

1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Barumon meliputi wilayah Kecamatan Panai Tengah.
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bilah meliputi Kecamatan Bilah Barat, Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah Hulu, Pangkatan, Bilah Hilir, Panai Hulu dan Panai Hilir.

Wilayah Labuhanbatu memiliki daerah yang tergenang secara periodik seluas $\pm 151,208$ ha atau 59,03% dan daerah yang tergenang terus menerus atau daerah rawa seluas $\pm 5,210$ ha atau 2,03 persen. Berdasarkan Daerah

Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten Labuhanbatu yaitu Sungai Barumon dan Sungai Bilah dengan lebar antara 16 m - 250 m, diperkirakan debit sungai tersebut di atas adalah 97 - 195 m/det.

F. Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi dapat diamati dari berbagai hal, beberapa di antaranya adalah curah hujan, suhu, dan kelembaban. Kabupaten Labuhanbatu termasuk daerah yang beriklim tropis, yang memiliki 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Secara umum rata-rata temperatur di Kabupaten Labuhanbatu adalah 28,60 dengan suhu maksimum 36,50 C dan suhu minimum 20,40 C. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Labuhanbatu didominasi pada bulan Januari, September dan Oktober seperti halnya wilayah lain di Pulau Sumatera. Selama tahun 2023, rata-rata hari hujan di Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 15,83 hari per bulan dengan rata-rata curah hujan 297,108 mm per bulan. Sedangkan, kelembaban rata-rata 77,93 persen dengan kelembaban tertinggi pada sore hari dan terendah pada pagi hari.

Tabel 2.2 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Station Klimatologi Kabupaten Labuhanbatu

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max
Januari/ <i>January</i>	21,0	28,4	35,2	52,0	77,4	99,0
Februari/ <i>February</i>	21,4	28,1	34,3	54,0	80,2	100,0
Maret/ <i>March</i>	21,7	29,3	35,9	50,0	75,8	100,0
April/ <i>April</i>	22,0	29,4	35,4	50,0	75,7	99,0
Mei/ <i>May</i>	21,8	29,9	35,9	51,0	75,9	99,0
Juni/ <i>June</i>	20,8	28,9	36,0	43,0	77,8	100,0
Juli/ <i>July</i>	21,8	29,9	36,5	44,0	73,6	99,0
Agustus/ <i>August</i>	21,7	29,2	36,5	44,0	76,6	99,0
September/ <i>September</i>	21,4	28,9	35,4	49,0	76,2	99,0
Oktober/ <i>October</i>	22,2	28,2	35,4	52,0	81,2	100,0
November/ <i>November</i>	22,0	28,1	34,4	55,0	81,0	100,0
Desember/ <i>December</i>	20,4	26,9	33,7	58,0	83,8	99,0

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

G. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Labuhanbatu meliputi kawasan lindung dan budidaya disesuaikan dengan RT/RW Kabupaten Labuhanbatu yang diatur dalam PERDA Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035.

Tabel 2.3 Penggunaan Lahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

No.	Guna Lahan	Luas (Ha)
1	Kawasan Perumahan	1.371
2	Kawasan Perdagangan dan Jasa	53,97
3	Kawasan Lindung	3.215
4	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	200

1.2.1 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Labuhanbatu diarahkan kepada pengembangan kawasan budidaya. Pengembangan kawasan budidaya diarahkan kepada Kawasan Peruntukkan Pertanian, Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit, Kawasan Perkebunan Karet, Kawasan Budidaya Perikanan, Kawasan Peruntukkan Industri, Kawasan Peruntukkan Permukiman dan Kawasan Peruntukkan Lainnya.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia. Dalam lingkup RTRW Kabupaten Labuhanbatu, pengarahan kawasan budidaya diarahkan untuk:

- Memberikan arahan pola ruang kawasan budidaya secara optimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan
- Memberikan arahan untuk menentukan prioritas pola ruang antara kegiatan budidaya yang berlainan
- Memberikan arahan bagi perubahan jenis pola ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu ke jenis lainnya.

Dalam RTRW Kabupaten Labuhanbatu, penentuan kawasan budidaya didasarkan pada:

- Kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelumnya dan menjadi limitasi bagi penetapan kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Labuhanbatu
- Kriteria kawasan budidaya menurut pedoman penyusunan rencana tata

ruang

- Hasil analisis kesesuaian lahan

1.3.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan konsep fundamental dalam mewujudkan keseimbangan dinamis antara pembangunan berkelanjutan dan pelestarian ekosistem. Konstruksi ini melampaui pendekatan konvensional pengelolaan lingkungan, menciptakan paradigma holistik yang mengintegrasikan secara sistematis kepentingan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlangsungan ekologis. Pendekatan komprehensif ini mensyaratkan pemahaman mendalam tentang kapasitas sistem alamiah dalam menyerap berbagai intervensi pembangunan, mengatur mekanisme regenerasi sumber daya alam, serta menjaga keseimbangan komponen ekosistem.

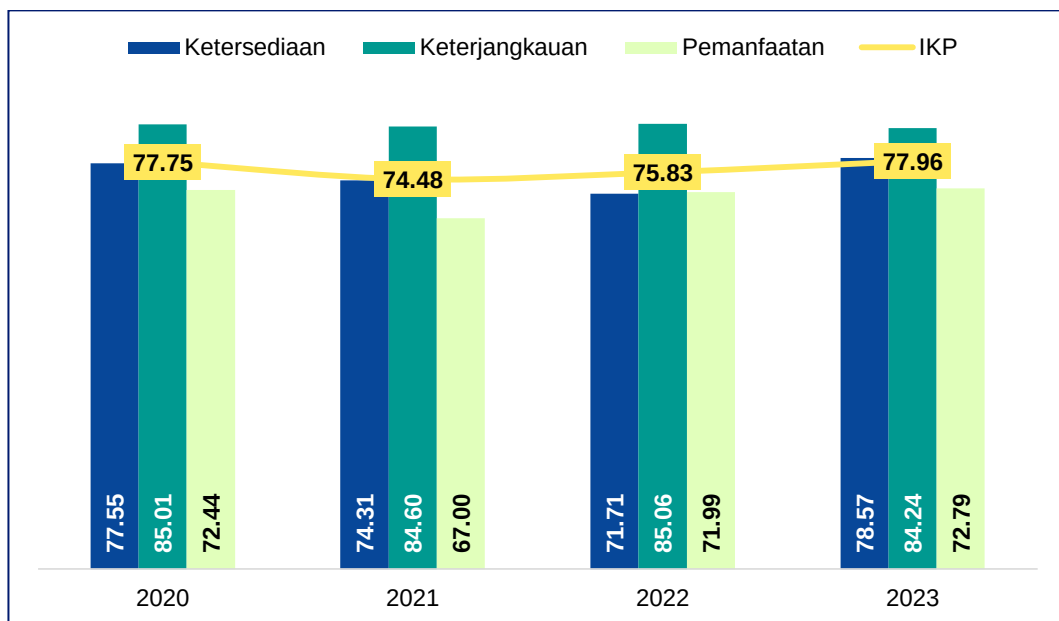
1.4.1 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan sistem infrastruktur nasional yang berkelanjutan, tangguh, dan berkeadilan. Konstruksi ketahanan ini tidak sekadar fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan mentransformasi paradigma pengelolaan sumber daya strategis menjadi ekosistem yang terintegrasi, inovatif, dan berbasis potensi lokal. Pendekatan komprehensif ini mensyaratkan redesain sistemik dalam tata kelola energi, sumber daya air, dan sistem pangan, yang tidak hanya menjamin ketersediaan, melainkan menciptakan mekanisme produksi, distribusi, dan pemanfaatan yang efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan.

A. Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator yang mengukur ketahanan pangan suatu daerah dengan menggunakan 3 aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan

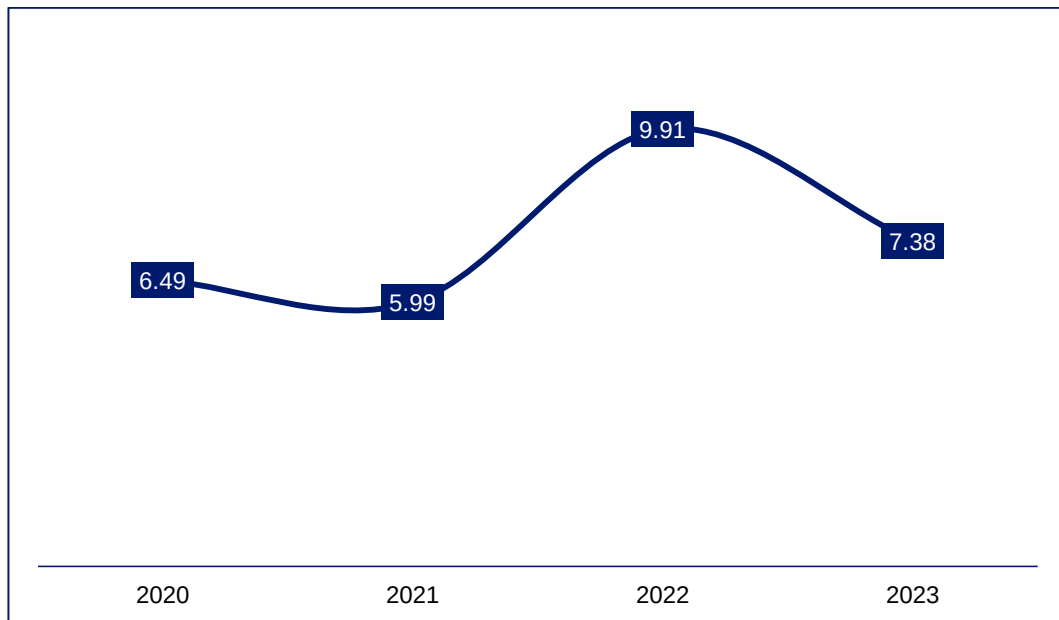
pangan. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan pada Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Gambar 2.2 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: Badan Pangan Nasional

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu cenderung meningkat dari 77,75 poin pada tahun 2020 menjadi 77,96 poin pada tahun 2023. Begitu juga dengan komponen penyusunnya, baik dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan cenderung meningkat selama tahun 2019 hingga 2023. Namun, perlu diperhatikan juga apakah distribusi pangan dapat dijangkau dan dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Untuk melihat kecukupan konsumsi pangan masyarakat, maka dapat dilihat dari indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*), yaitu indikator yang mengukur persentase penduduk suatu wilayah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi makanan minimum untuk hidup aktif dan sehat.



Gambar 2.3 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)

Sumber: BPS

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Labuhanbatu cenderung meningkat dari 6,49 persen pada tahun 2020 menjadi 7,38 persen pada tahun 2023. Jika dilihat jumlah penduduknya, maka terdapat sebanyak 37.907 orang yang belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi pangannya. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan agar seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangannya.

B. Listrik

Listrik adalah energi yang dihasilkan dari konversi sumber daya primer (batubara, gas, energi terbarukan, dll.) menjadi daya listrik melalui pembangkit, lalu didistribusikan untuk menyalakan peralatan, industri, dan infrastruktur. Ketersediaan listrik menjadi penting karena menyangkut aktivitas seluruh masyarakat.

C. Air

Air merupakan sumber daya alam berbentuk cair yang digunakan untuk konsumsi langsung (minum, sanitasi), pertanian, industri, dan ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa air sangat dibutuhkan oleh kelangsungan hidup masyarakat sehingga pemerintah harus bisa memastikan

ketersediaan air yang cukup.

Tabel 2.4 Capaian Indikator Ketahanan Air					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	0,30	0,30	0,30	0,30	N/A
Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman (%)	10,12	10,32	10,68	11,00	N/A

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Siperindu

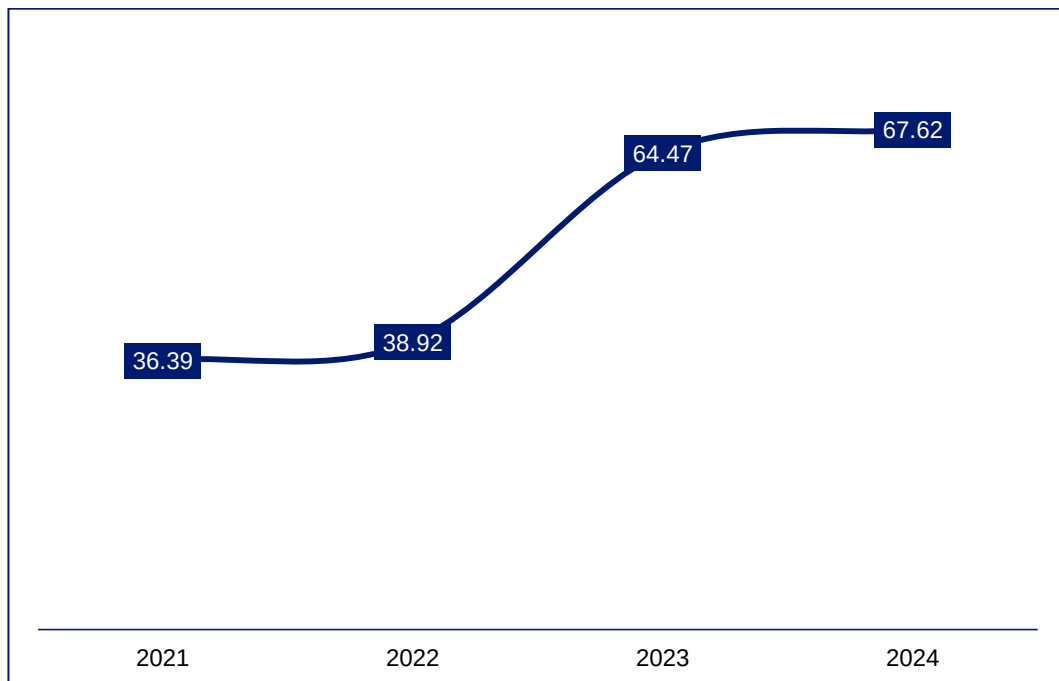
Kapasitas Air Baku selama tahun 2020-2023 sebanyak 0,30 m³/detik, di mana hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi penambahan kapasitas air untuk Kabupaten Labuhanbatu. Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman mengalami peningkatan dari 10,12 persen pada tahun 2020 menjadi 11,00 persen pada tahun 2024. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat hanya sekitar 11 persen rumah tangga saja yang memperoleh air minum yang aman untuk dikonsumsi, sementara mayoritas belum memperolehnya. Pemerintah perlu memastikan jaringan distribusi air yang aman kepada masyarakat agar seluruh masyarakat dapat memperoleh air minum aman, di mana hal ini penting karena menyangkut kesehatan masyarakat.

2.2.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan Hidup Berkualitas merujuk pada kondisi alam yang mampu mendukung kehidupan secara berkelanjutan, ditandai dengan udara bersih, air yang layak konsumsi, ekosistem yang seimbang, serta minimnya polusi dan kerusakan alam. Lingkungan seperti ini tidak hanya menjamin kesehatan manusia tetapi juga menjaga keanekaragaman hayati dan kestabilan iklim. Untuk mencapai lingkungan hidup yang berkualitas, maka pemerintah perlu menerapkan pembangunan berkelanjutan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, konservasi energi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga alam. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus berkolaborasi menerapkan kebijakan ramah lingkungan, teknologi hijau, dan gaya hidup berkelanjutan demi mewujudkan lingkungan hidup yang sehat untuk generasi saat ini dan mendatang.

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator komposit yang mengukur tingkat kualitas lingkungan suatu wilayah berdasarkan parameter udara, air, tutupan lahan, dan kualitas ekosistem. IKLH dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai alat evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan berkelanjutan.



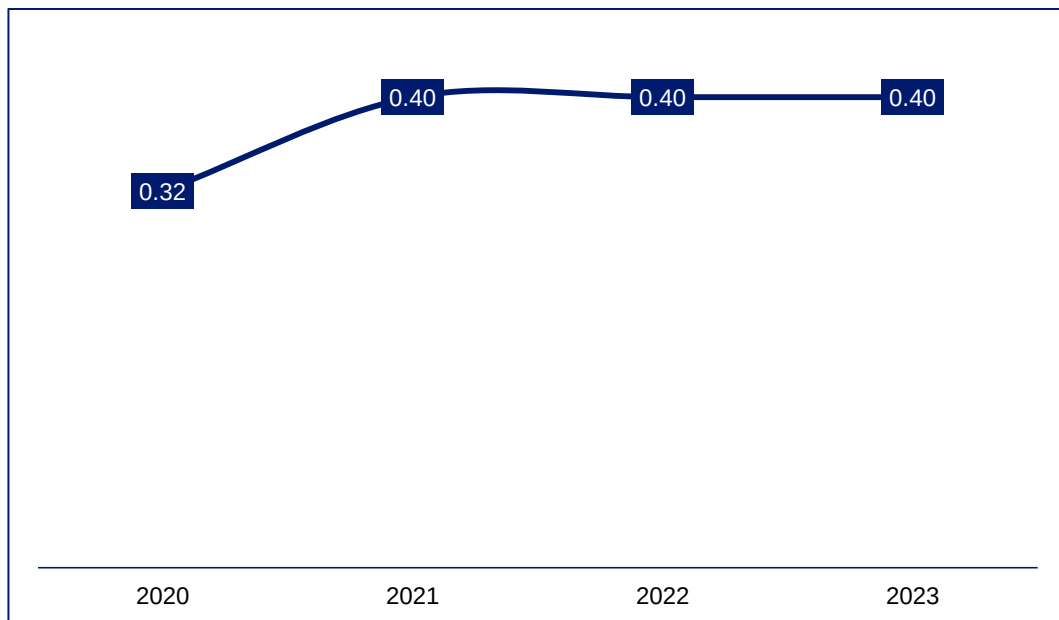
Gambar 2.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari 36,39 poin pada tahun 2021 menjadi 67,62 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas udara, air, dan tutupan lahan di Kabupaten Labuhanbatu semakin membaik. Namun perlu diingat bahwa hal ini masih menunjukkan banyak hal yang perlu diperhatikan terkait kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu mengelola lingkungannya dengan menurunkan polusi udara, memanfaatkan energi baru terbarukan, serta mengelola persampahan agar tidak mencemari lingkungan sehingga memitigasi potensi munculnya penyakit tertentu kepada masyarakat.

B. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman mengacu pada proporsi penduduk yang menggunakan fasilitas sanitasi dasar yang memenuhi standar kesehatan, seperti jamban dengan tangki septik yang terhubung ke sistem pengolahan limbah atau sarana sanitasi lain yang memisahkan kontak manusia dengan kotoran secara efektif. Akses ini sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan seperti diare, kolera, atau *stunting* akibat kontaminasi tinja.



Gambar 2.5 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Labuhanbatu hanya mencapai 0,40 persen hingga tahun 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah karena akan berakibat bagi kesehatan masyarakatnya. Pemerintah harus mendorong peningkatan akses sanitasi aman melalui berbagai program, seperti pembangunan infrastruktur sanitasi berkelanjutan yang inklusif terutama ke daerah-daerah yang terpencil.

C. Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah pelepasan gas-gas ke atmosfer yang memiliki sifat menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah

dari matahari. Gas-gas ini kemudian memerangkap panas di atmosfer Bumi, menyebabkan efek yang dikenal sebagai Efek Rumah Kaca. Setiap daerah dituntut untuk mengurangi emisi GRK melalui penggunaan energi baru terbarukan, bahan bakar ramah lingkungan, dan pelaksanaan pembangunan hijau

D. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan proses terpadu yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir limbah dengan prinsip mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang (3R). Pengelolaan dimulai dari pemisahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga, dilanjutkan dengan pengumpulan terjadwal menggunakan armada khusus, kemudian diangkut ke tempat pengolahan seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Metode pengolahannya beragam, mulai dari composting untuk sampah organik, daur ulang plastik/kertas hingga teknologi modern seperti *waste to energy*. Capaian kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

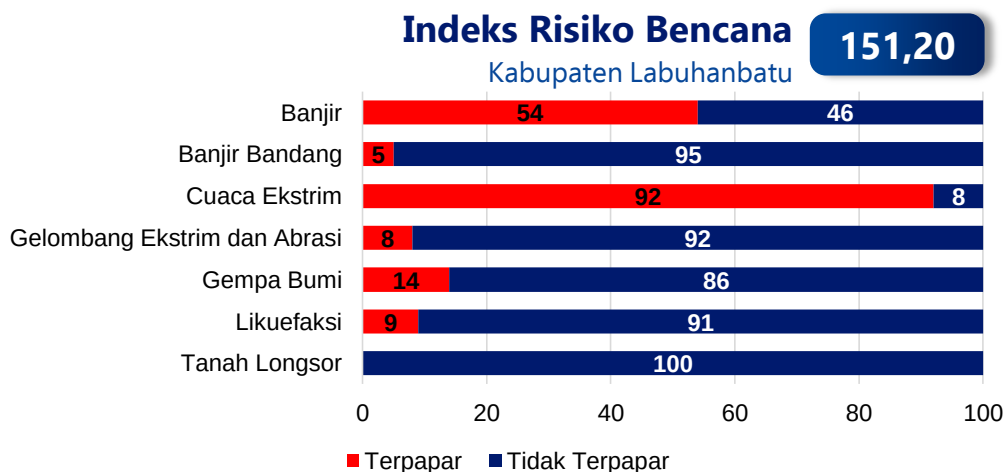
Tabel 2.5 Capaian Indikator Pengelolaan Sampah					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15,40	22,90	24,90	15,30	N/A
Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	0,65	0,90	1,70	2,00	N/A

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kabupaten Labuhanbatu sebesar 15,40 persen pada tahun 2020 menurun menjadi 15,30 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah masih belum optimal. Proporsi RT dengan layanan penuh pengumpulan sampah meningkat dari 0,65 persen pada tahun 2020 menjadi 2,00 persen pada tahun 2023. Indikator ini merupakan rumah tangga yang telah menghasilkan sampah dan mendapatkan layanan pengumpulan sampah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah di Kabupaten Labuhanbatu.

2.2.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bencana dapat didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam mau pun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Berdasarkan sumber dan penyebabnya, bencana dapat dibagi dua, yaitu bencana alam dan bencana non alam. Yang termasuk dalam bencana alam adalah segala jenis bencana yang sumber, perilaku dan faktor penyebab/pengaruhnya berasal dari alam. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung api, kekeringan, angin ribut dan tsunami adalah contoh-contoh bencana alam.



Gambar 2.6 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Labuhanbatu (2024)

Sumber: BNPB

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 sebesar 124,98 poin dengan kategori tinggi. Secara spesifik, bencana yang paling berdampak pada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu adalah cuaca ekstrem yang berdampak pada 92 persen masyarakat Labuhanbatu, kemudian Banjir yang berdampak pada 54 persen masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia, Kabupaten

Labuhanbatu pada tahun 2023 mengalami 13 kejadian bencana yang terdiri dari 4 kejadian banjir dan 9 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kejadian banjir tersebut disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan banjir di beberapa wilayah dan diperparah oleh luapan air sungai. Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh cuaca ekstrim sehingga menyebabkan kebakaran di beberapa wilayah.

2.2.7 Demografi

Demografi adalah studi tentang penduduk yang dilihat dari ukuran (jumlah), struktur/komposisi, persebaran keruangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, struktur dan persebaran penduduk yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi di suatu wilayah tertentu.

D. Jumlah dan Struktur Penduduk

Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Struktur penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang disajikan berikut ini didasarkan pada kelompok umur.

Tabel 2.6 Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Menurut Kelompok Umur					
Kelompok Usia	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	47.326	47.394	47.658	48.200	48.660
5-9	48.068	48.243	48.581	47.450	47.300
10-14	46.273	46.487	46.896	47.100	47.350
15-19	46.787	46.784	47.051	46.120	45.940
20-24	45.128	44.876	44.759	45.639	45.870
25-29	44.751	45.004	45.388	44.500	44.280
30-34	40.714	41.162	41.746	42.879	43.510
35-39	37.389	37.927	38.617	38.840	39.390
40-44	33.596	34.198	34.891	35.500	36.090
45-49	28.509	29.223	30.060	31.198	32.040
50-54	23.083	23.744	24.498	25.760	26.740
55-59	18.881	19.552	20.304	20.630	21.290
60-64	14.336	14.954	15.641	16.310	16.950
65-69	9.631	10.214	10.806	11.520	12.140
70-74	5.068	5.562	6.114	6.840	7.440
75+	4.359	4.658	5.014	5.160	5.610
Total	493.899	499.982	508.024	513.646	520.600

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel tersebut, kelompok umur penduduk terbanyak adalah 0-4 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 48.660 jiwa, kemudian kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 47.300 jiwa, dan penduduk usia 10-14 tahun sebanyak 47.350 jiwa. Sementara, penduduk paling sedikit pada kelompok umur 75+ tahun sebanyak 5.610 jiwa, kemudian 70-74 tahun sebanyak 7.440 jiwa, dan kelompok umur 65-69 tahun sebanyak 12.149 jiwa. Penduduk usia produktif di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 sebanyak 352.100 jiwa dan penduduk usia non produktif sebanyak 168.500 jiwa. Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan distribusinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Menurut Kecamatan

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	Distribusi (%)
Bilah Hulu	64.416	64.949	65.729	66.516	67.134	12,90
Pangkatan	37.766	38.229	38.841	39.285	39.796	7,65
Bilah Barat	39.953	40.422	41.049	41.521	42.041	8,08
Bilah Hilir	59.370	60.094	61.053	61.751	62.550	12,02
Panai Hulu	38.028	38.359	38.836	39.299	39.679	7,62
Panai Tengah	41.143	41.767	42.557	43.027	43.703	8,40
Panai Hilir	42.761	43.300	44.008	44.509	45.102	8,66
Rantau Selatan	73.977	75.395	77.126	77.936	79.452	15,26
Rantau Utara	96.485	97.467	98.825	99.982	101.088	19,42
Total	493.899	499.982	508.024	513.826	520.545	100,00

Sumber: BPS

Berdasarkan data dari BPS dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak berada pada Kecamatan Rantau Utara sebanyak 101.088 jiwa atau sebesar 19,42 persen dari total penduduk, kemudian Kecamatan Rantau Selatan sebanyak 79.452 orang atau sebesar 15,26 persen dari total penduduk, dan Kecamatan Bilah Hulu sebanyak 67.134 orang atau sebesar 12,90 persen dari total penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk, terutama wilayah yang padat penduduk perlu menjadi perhatian bagi pemerintah agar menyediakan fasilitas publik yang memadai sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

E. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang

menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan dalam dokumen ini adalah metode geometrik.

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Bilah Hulu	-1,30	0,83	1,20	1,20	0,93
Pangkatan	10,50	1,23	1,60	1,14	1,30
Bilah Barat	-4,01	1,17	1,55	1,15	1,25
Bilah Hilir	12,12	1,22	1,60	1,14	1,29
Panai Hulu	-6,42	0,87	1,24	1,19	0,97
Panai Tengah	-0,46	1,52	1,89	1,10	1,57
Panai Hilir	13,35	1,26	1,64	1,14	1,33
Rantau Selatan	-8,19	1,92	2,30	1,05	1,95
Rantau Utara	-3,40	1,02	1,39	1,17	1,11
Total	-0,06	1,23	1,61	1,14	1,31

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

Secara total, laju pertumbuhan penduduk relatif meningkat dari -0,06 persen pada tahun 2020 menjadi 1,31 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk terbesar berada pada Kecamatan Rantau Selatan sebesar 1,95 perse, sementara laju pertumbuhan penduduk terendah berada pada Kecamatan Bilah Hulu sebesar 0,93 persen.

F. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk menggambarkan seberapa banyak jumlah penduduk pada satu satuan luas dari suatu wilayah. Dari 9 Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, Pada tahun 2024, jumlah penduduk Labuhanbatu sebanyak 520.545 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 203,23 jiwa per km².

Tabel 2.9 Distribusi Penduduk Kabupaten Labuhanbatu (Jiwa/Km²)

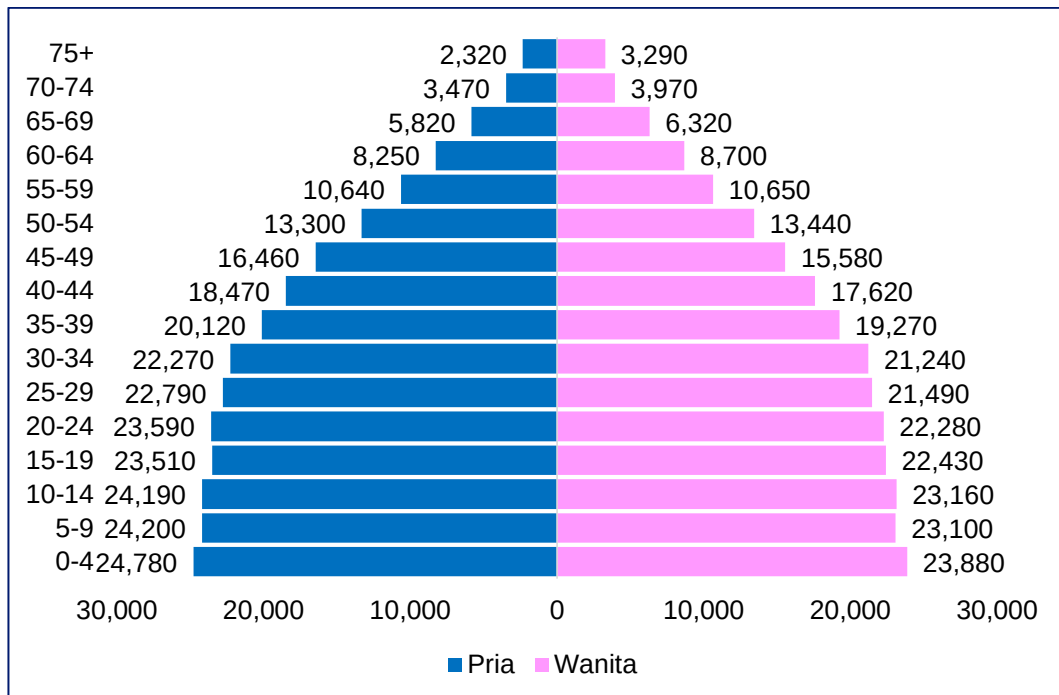
Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Bilah Hulu	219,68	221,50	224,16	226,84	228,95
Pangkalan	106,24	107,54	109,27	110,52	111,95
Bilah Barat	196,83	199,14	202,23	204,56	207,12
Bilah Hilir	137,80	139,48	141,71	143,33	145,18
Panai Hulu	137,63	138,83	140,55	142,23	143,60
Panai Tengah	85,05	86,34	87,97	88,95	90,34
Panai Hilir	125,02	126,60	128,67	130,13	131,87
Rantau Selatan	1.150,14	1.172,19	1.199,10	1.211,69	1.235,26
Rantau Utara	857,87	866,60	878,68	888,97	898,80
Total	192,83	195,20	198,34	200,61	203,23

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

Kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat berada pada Kecamatan Rantau Selatan sebanyak 1.235,26 jiwa/km² dan Rantau Utara sebanyak 898,80 jiwa/km². Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah perlu memastikan apakah fasilitas yang tersedia sudah memenuhi kebutuhan setiap penduduknya, terutama di wilayah yang padat penduduk. Pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan tempat tinggal, terutama di wilayah yang sangat padat penduduk.

G. Piramida Penduduk

Piramida penduduk adalah suatu representasi grafis yang menggambarkan komposisi penduduk suatu wilayah berdasarkan usia dan jenis kelamin pada suatu waktu tertentu. Piramida penduduk tersusun dari dua diagram batang yang saling berlawanan, di mana sumbu vertikal mewakili kelompok usia (dari muda di bagian bawah hingga tua di bagian atas), dan sumbu horizontal mewakili jumlah atau persentase populasi, dengan sisi kiri untuk populasi laki-laki dan sisi kanan untuk populasi perempuan.



Gambar 2.7 Piramida Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

Piramida Penduduk Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 membentuk pola ekspansif yang menandakan bahwa angka kelahiran di Kabupaten Labuhanbatu meningkat dan penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk lansia. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa penduduk pria dan wanita relatif seimbang pada setiap kelompok usia. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu harus memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memenuhi kebutuhan penduduk pada setiap kelompok usia. Fasilitas pendidikan harus tersedia mengingat angka kelahiran yang cukup tinggi, begitu juga fasilitas kesehatan agar seluruh masyarakat dapat merasakannya, serta memastikan ketersediaan lapangan kerja ke depannya untuk memenuhi tenaga kerja yang kemungkinan akan meningkat di masa mendatang.

H. Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Usia

Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Usia

Kelompok Usia	2025	2026	2027	2028	2029
0-4	50.671	50.906	51.135	51.351	51.556
5-9	46.701	47.129	47.660	48.295	49.032
10-14	46.753	46.604	46.453	46.311	46.180
15-19	46.469	46.372	46.293	46.227	46.155
20-24	45.953	45.930	45.879	45.811	45.756
25-29	44.660	44.719	44.828	44.960	45.087
30-34	43.528	43.677	43.744	43.768	43.797
35-39	40.535	41.012	41.493	41.951	42.343
40-44	36.895	37.466	38.004	38.521	39.044
45-49	32.320	33.056	33.765	34.448	35.104
50-54	27.012	27.771	28.563	29.369	30.173
55-59	22.117	22.722	23.344	23.996	24.680
60-64	17.477	18.044	18.587	19.115	19.652
65-69	12.397	12.952	13.535	14.136	14.719
70-74	8.038	8.473	8.877	9.272	9.677
75+	5.517	5.952	6.428	6.927	7.435
Total	527.043	532.785	538.590	544.458	550.390

Sumber: BPS (diolah, 2024)

Penduduk Kabupaten Labuhanbatu diproyeksikan meningkat dari 527.043 jiwa pada tahun 2025 menjadi 550.390 jiwa pada tahun 2029 atau meningkat sebanyak 23.347 jiwa selama 5 tahun.

I. Proyeksi Penduduk menurut Kecamatan

Proyeksi penduduk Kabupaten Labuhanbatu menurut kecamatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan data historis jumlah penduduk, Total Fertility Rate (TFR), Age Specific Fertility Rate (ASFR), dan usia harapan hidup. Hasil proyeksi penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Proyeksi Penduduk menurut Kecamatan

Kecamatan	2025	2026	2027	2028	2029
Bilah Hulu	68.252	68.996	69.747	70.507	71.276
Pangkalan	40.266	40.704	41.148	41.597	42.048
Bilah Barat	42.585	43.049	43.518	43.992	44.472
Bilah Hilir	63.351	64.041	64.739	65.444	66.157
Panai Hulu	40.319	40.758	41.202	41.651	42.105
Panai Tengah	44.113	44.594	45.080	45.571	46.068
Panai Hilir	45.642	46.139	46.642	47.150	47.664
Rantau Selatan	79.952	80.824	81.704	82.594	83.494
Rantau Utara	102.563	103.680	104.810	105.952	107.106

Kecamatan	2025	2026	2027	2028	2029
Total	527.043	532.785	538.590	544.458	550.390

Sumber: BPS (diolah, 2024)

Penduduk Kabupaten Labuhanbatu diproyeksikan meningkat dari 527.043 orang pada tahun 2025 menjadi 550.390 orang pada tahun 2029. Penduduk paling banyak berada pada Kecamatan Rantau Utara sebanyak 107.106 orang, sementara penduduk paling sedikit berada pada Kecamatan Pangkatan sebanyak 42.048 orang. Dengan adanya proyeksi ini, diharapkan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menjadikannya sebagai landasan untuk perencanaan pembangunan selama 5 tahun ke depan agar setiap kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat terpenuhi dengan baik.

J. Proyeksi Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan

Proyeksi kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu merupakan banyaknya penduduk persatuan luas yang digunakan sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk. Kepadatan penduduk diproyeksikan berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan luas wilayah masing-masing kecamatan. Hasil proyeksi kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

Tabel 2.12 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Menurut Kecamatan

Kecamatan	2025	2026	2027	2028	2029
Bilah Hulu	68,252	68,996	69,747	70,507	71,276
Pangkatan	40,266	40,704	41,148	41,597	42,048
Bilah Barat	42,585	43,049	43,518	43,992	44,472
Bilah Hilir	63,351	64,041	64,739	65,444	66,157
Panai Hulu	40,319	40,758	41,202	41,651	42,105
Panai Tengah	44,113	44,594	45,080	45,571	46,068
Panai Hilir	45,642	46,139	46,642	47,150	47,664
Rantau Selatan	79,952	80,824	81,704	82,594	83,494
Rantau Utara	102,563	103,680	104,810	105,952	107,106
Total	527,043	532,785	538,590	544,458	550,390

Sumber: BPS (diolah, 2024)

Kepadatan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu diproyeksikan meningkat dari 527,043 jiwa/km² pada tahun 2025 menjadi 550,390 jiwa/km² pada tahun 2029. Pada tahun 2029 penduduk terpadat berada pada

Kecamatan Rantau Utara sebanyak 107,106 jiwa/km² . Kemudian di Kecamatan Rantau Selatan sebanyak 83,494 jiwa/km², serta di Kecamatan Bilah Hulu sebanyak 71,276 jiwa/km². Sementara, proyeksi kepadatan terkecil terjadi di Kecamatan Pangkatan sebesar 42,048 jiwa/km², kemudian kecamatan Pantai Hulu sebesar 42,105 jiwa/km², serta Kecamatan Bilah Barat sebesar 44,472 jiwa/km².

K. Proyeksi Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan

Proyeksi penduduk di Kabupaten Labuhanbatu menurut jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki di suatu wilayah. Sedangkan proyeksi penduduk menurut rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang berusia produktif dengan penduduk yang berusia non produktif. Hasil proyeksi penduduk menurut jenis kelamin dan rasio ketergantungan di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
Laki-Laki	269.246	269.733	272.587	275.470	278.383
Perempuan	257.797	263.052	266.003	268.989	272.008
Sex Ratio	104,44	102,54	102,47	102,41	102,34
0-14	144.125	144.639	145.248	145.957	146.768
15-64	356.966	360.769	364.500	368.166	371.791
65+	25.952	27.377	28.840	30.335	31.831
Dependency Ratio	47,65	47,68	47,76	47,88	48,04

Sumber: BPS (diolah, 2024)

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki meningkat sebanyak 9.137 jiwa dalam waktu 5 tahun. Sementara penduduk perempuan meningkat lebih besar, yaitu sebanyak 14.211 jiwa. Namun, secara total pada tahun 2029 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 278.383 jiwa lebih besar dibandingkan penduduk perempuan sebanyak 272.008 jiwa. Berdasarkan kondisi tersebut, maka sex ratio diproyeksikan menurun dari 104,44 per 100 penduduk menjadi 102,34 per 100 penduduk. Artinya jumlah penduduk laki-laki dan perempuan semakin seimbang.

Angka ketergantungan adalah rasio yang menunjukkan jumlah

individu dalam kelompok usia non-produktif (biasanya dianggap sebagai anak-anak dan lansia) dibandingkan dengan jumlah individu dalam kelompok usia produktif (dewasa yang bekerja). Angka ini digunakan untuk mengukur beban ekonomi yang ditanggung oleh populasi usia kerja dalam mendukung populasi yang tidak bekerja. Angka ketergantungan diproyeksikan meningkat dari 47,65 per 100 orang penduduk pada tahun 2025 menjadi 48,08 per 100 orang penduduk. Angka ini relatif stabil selama 5 tahun, dimana hal ini menunjukkan hingga tahun 2029 terdapat kurang lebih sebanyak 48 orang penduduk non produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

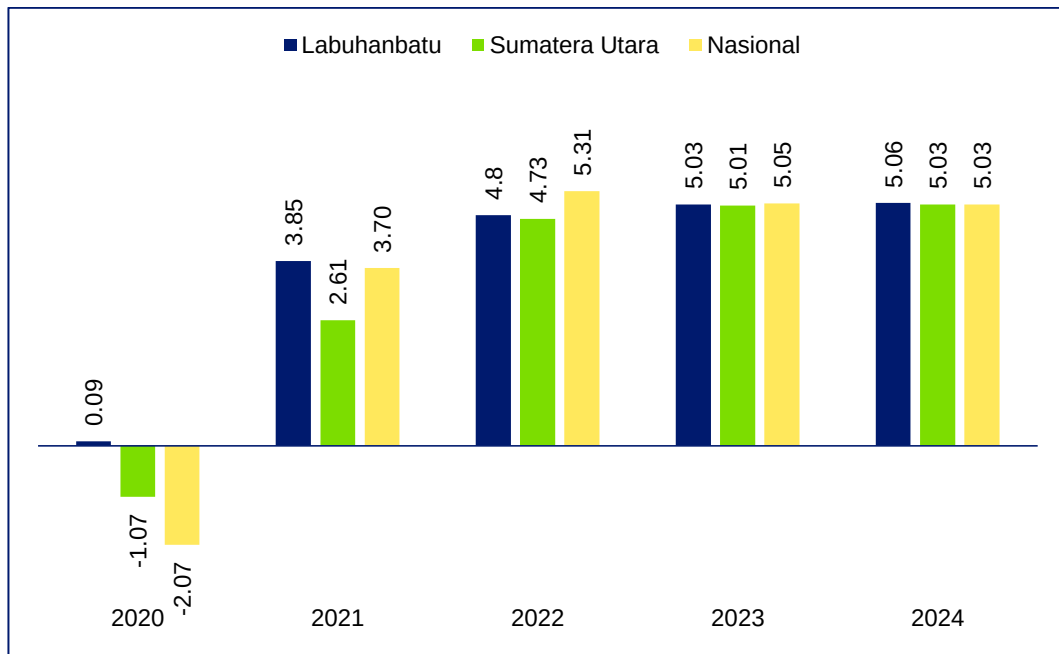
Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi di mana kebutuhan dasar terpenuhi, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, listrik, air bersih, perumahan layak, serta stabilitas ekonomi. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas hidup, sosial, dan lingkungan.

1.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, memiliki stabilitas finansial, dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Konsep ini melampaui sekadar pertumbuhan PDB, dengan menekankan pada pemerataan, ketahanan, dan kualitas hidup masyarakat.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran yang menggambarkan tingkat perubahan output ekonomi suatu negara atau daerah dalam periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam persentase. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan melihat perubahan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari satu periode ke periode berikutnya. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Gambar 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (%)

Sumber: BPS

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu meningkat pasca covid-19 dari 0,09 persen pada tahun 2020 menjadi 5,05 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu dimulai sejak pandemi covid mampu mengungguli pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara dan nasional, namun sejak tahun 2022 hingga 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu lebih rendah dibandingkan nasional. Pada tahun 2024, Kabupaten Labuhanbatu berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Labuhanbatu mampu mendorong produktivitas sektor-sektor perekonomiannya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,20	6,30	7,31	4,70	4,27
Pertambangan dan Penggalian	-1,23	8,99	6,04	3,29	4,02
Industri Pengolahan	-0,61	3,21	3,31	4,54	2,99
Pengadaan Listrik dan Gas	5,35	3,09	5,81	3,60	4,55
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,21	2,26	5,62	6,75	3,31
Konstruksi	-5,72	2,99	0,60	6,21	6,11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,40	3,28	5,07	6,85	9,03
Transportasi dan Pergudangan	-2,10	-0,97	8,66	5,70	4,05
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,44	-0,16	7,59	5,47	5,41
Informasi dan Komunikasi	4,74	4,46	6,87	4,07	4,52
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,73	2,56	3,65	3,89	3,24
Real Estate	1,49	0,25	5,21	3,08	6,36
Jasa Perusahaan	0,76	-0,62	4,99	3,85	3,66
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,03	0,39	-0,09	3,89	9,43
Jasa Pendidikan	2,96	1,29	3,91	3,42	8,48
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1,37	-1,30	2,70	4,85	6,23
Jasa Lainnya	-3,61	3,33	7,04	5,37	6,58
Laju Pertumbuhan	0,09	3,85	4,80	5,03	5,06

Sumber: BPS

Pada tahun 2024 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu paling besar berasal dari Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, yaitu sebesar 9,43 persen, kemudian Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,03 persen, kemudian Jasa Pendidikan sebesar 8,48 persen. Sementara, sektor perekonomian dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah adalah Sektor Industri Pengolahan sebesar 2,99 persen, kemudian Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,24 persen, dan Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,31 persen.

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha pada Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Distribusi PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha

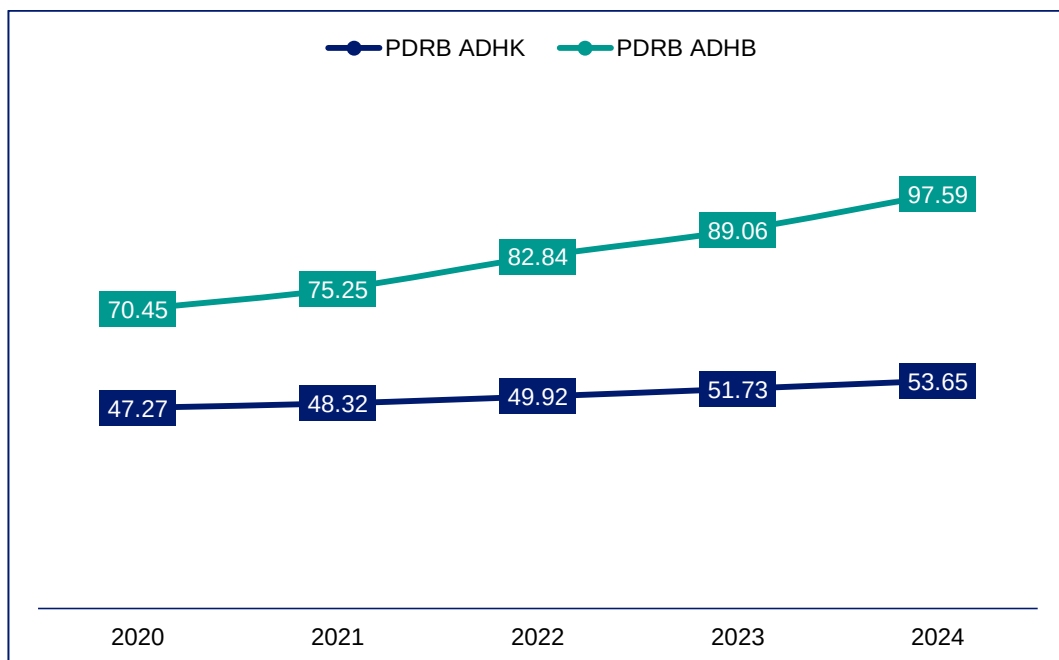
Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,43	25,86	26,99	27,96	29,22
Pertambangan dan Penggalian	0,65	0,67	0,68	0,68	0,64
Industri Pengolahan	34,73	34,70	34,24	33,76	32,25
Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Konstruksi	8,60	8,32	8,05	8,17	7,78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,81	17,50	17,59	17,57	17,81
Transportasi dan Pergudangan	1,79	1,68	1,70	1,73	1,67
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,43	1,32	1,31	1,28	1,23
Informasi dan Komunikasi	0,70	0,69	0,68	0,65	0,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,16	1,12	1,11	1,08	1,02
Real Estate	2,81	2,67	2,55	2,38	2,24
Jasa Perusahaan	0,18	0,17	0,17	0,17	1,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,22	2,98	2,68	2,46	2,44
Jasa Pendidikan	1,83	1,71	1,63	1,54	1,52
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,47	0,43	0,41	0,40	0,38
Jasa Lainnya	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
Distribusi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS

Sektor yang berkontribusi paling besar bagi perekonomian Kabupaten Labuhanbatu adalah Sektor Industri pengolahan sebesar 32,25 persen pada tahun 2024. Namun, kontribusi sektor ini cenderung menurun selama 5 tahun terakhir. Kemudian, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kontributor terbesar kedua, di mana pada tahun 2024 mencapai 29,22 persen dan kontribusinya meningkat selama 5 tahun terakhir. Sektor perekonomian dengan kontribusi terbesar ketiga adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang pada tahun 2024 mencapai 17,81 persen, namun kontribusi sektor ini cenderung menurun selama 5 tahun terakhir. Hal ini perlu diperhatikan bagi pemerintah, terutama pada Sektor Industri Pengolahan karena setiap daerah didorong untuk melakukan hilirisasi produk agar mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah, namun sektor terkait justru mengalami penurunan kontribusi terhadap perekonomian. Pemerintah perlu memperhatikan faktor yang menjadi masalah pada industri dan mendorong pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah dengan

memanfaatkan sumber daya alam yang ada, serta menarik investor untuk membangun industri di daerah.

Untuk melihat perkembangan pendapatan masyarakat secara makro, dapat dinilai dari PDRB Per Kapita. PDRB Per Kapita adalah ukuran yang melihat berapa besar PDRB yang dihasilkan oleh setiap masyarakat dalam satu waktu. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.9 PDRB Per Kapita Kabupaten Labuhanbatu (Rp Juta)

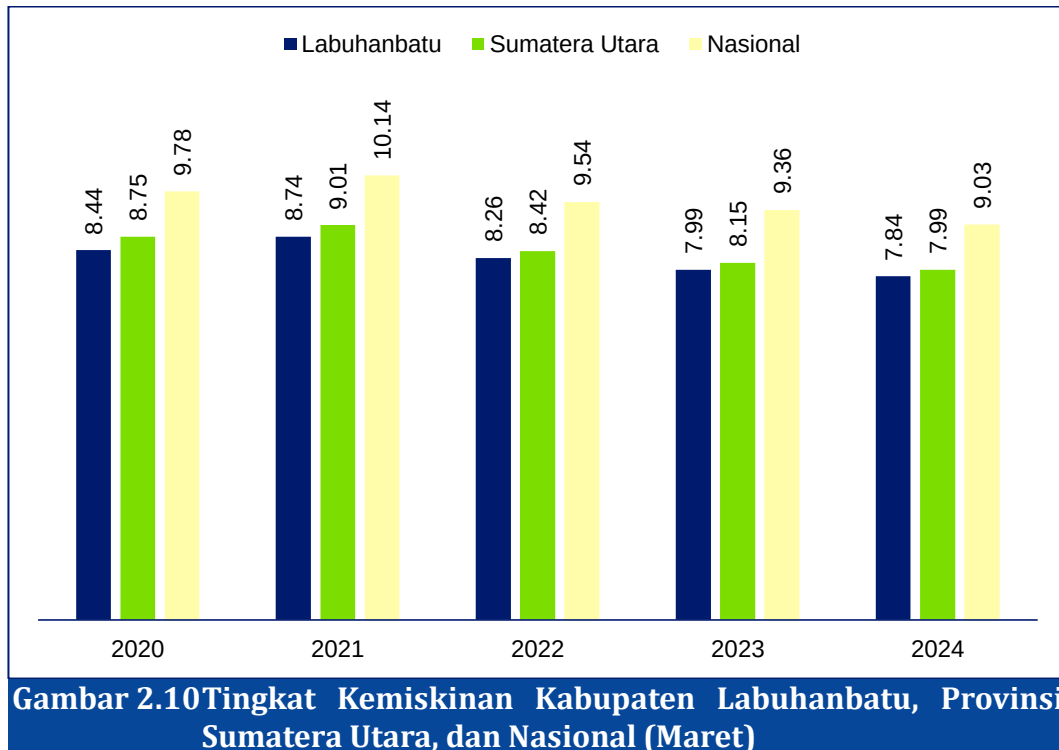
Sumber: BPS

PDRB Per Kapita baik ADHB maupun ADHK mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa secara umum pendapatan setiap masyarakat mengalami peningkatan, di mana hal ini menunjukkan bahwa perekonomian setiap masyarakat semakin membaik. Namun, perlu diperhatikan bahwa indikator ini memasukkan seluruh penduduk pada usia berapa pun ke dalam perhitungannya. Pemerintah juga perlu memperhatikan terkait ketimpangan pendapatan antar masyarakat untuk memastikan pendapatan yang meningkat tersebut dirasakan oleh masyarakat secara inklusif atau hanya pada kalangan tertentu saja.

B. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi

untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tingkat kemiskinan diukur dari berapa banyak penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

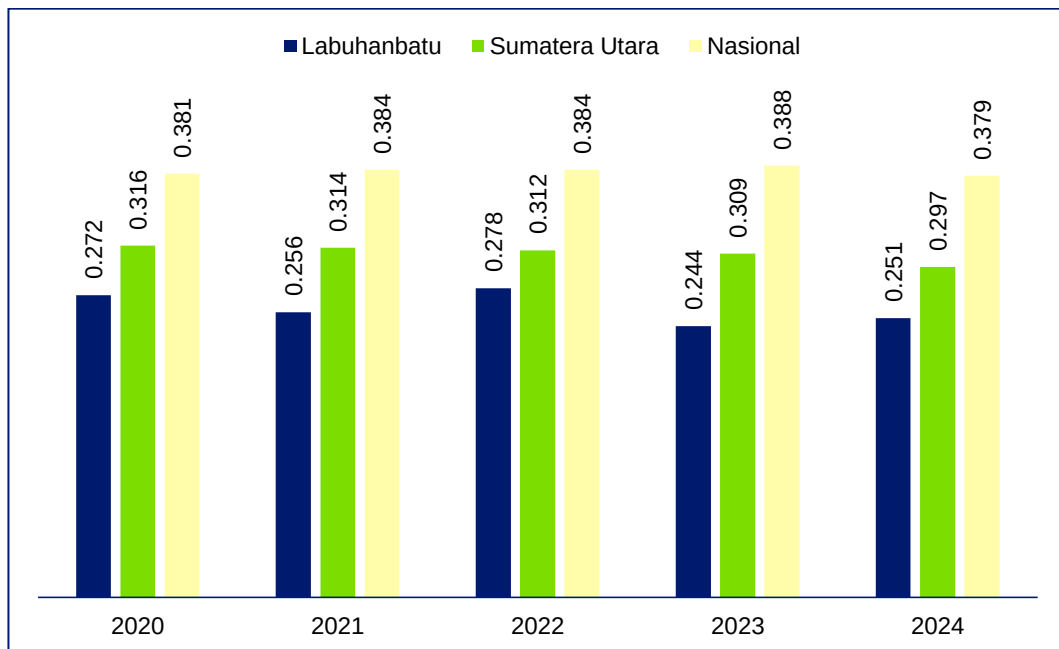


Sumber: BPS

Tingkat kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu cenderung menurun dari 8,44 persen pada tahun 2020 menjadi 7,84 persen pada tahun 2024. Capaian ini bahkan lebih baik dibandingkan provinsi dan nasional yang masih berada di sekitar angka 8 persen. Namun, angka tersebut sebenarnya masih tergolong tinggi. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu mengevaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan mengingat masih tingginya angka kemiskinan. Pemerintah perlu mengidentifikasi penduduk miskin secara menyeluruh dan permasalahannya sehingga bantuan yang diberikan menjadi tepat sasaran dan membantu menangani permasalahan kemiskinannya.

C. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator makro ekonomi menggambarkan kesejahteraan suatu wilayah dengan mengukur ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan di suatu wilayah tertentu, dengan kata lain indeks ini mengukur ketimpangan antar penduduk berpendapatan rendah dengan penduduk berpendapatan tinggi. Hasil perhitungan berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati satu maka semakin parah ketimpangan di wilayah tersebut.



Gambar 2.11 Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Poin) (Maret)

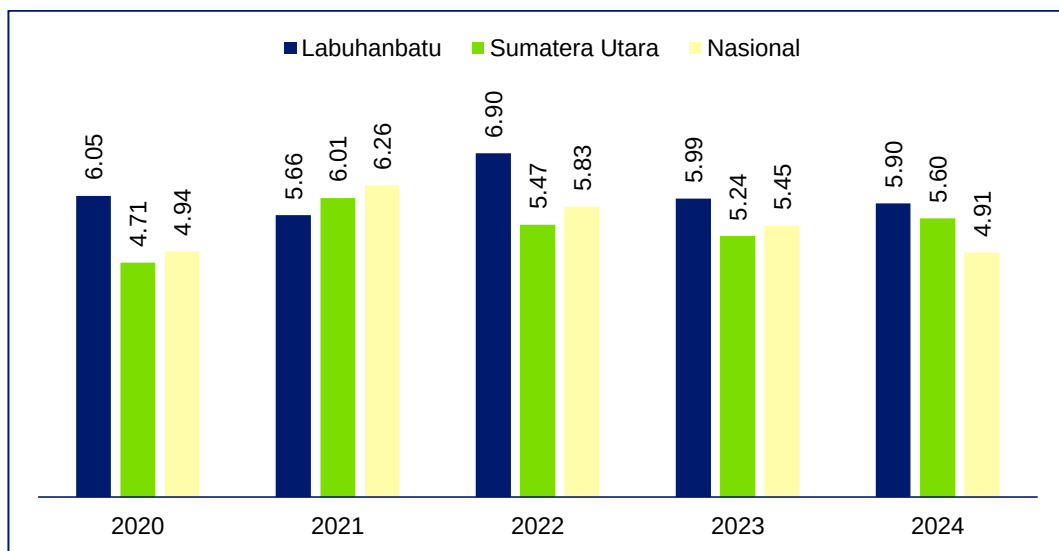
Sumber: BPS

Dilihat dari gambar di atas, Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu menurun dan tetap berada di bawah 0,4. Capaian ini lebih baik dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pada kurun waktu 5 tahun terakhir ketimpangan di kabupaten Labuhanbatu masih relatif rendah, di mana distribusi pendapatan cukup merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15

sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Labuhanbatu menurun dari tahun 2020-2024 dengan jumlah pengangguran yang fluktuatif. Tingkat pengangguran terbuka memberikan gambaran tentang sejauh mana individu-individu dalam populasi usia kerja mengalami pengangguran dan mencari kerja. TPT adalah indikator penting dalam menganalisis kesehatan pasar tenaga kerja dan kondisi ekonomi suatu wilayah.



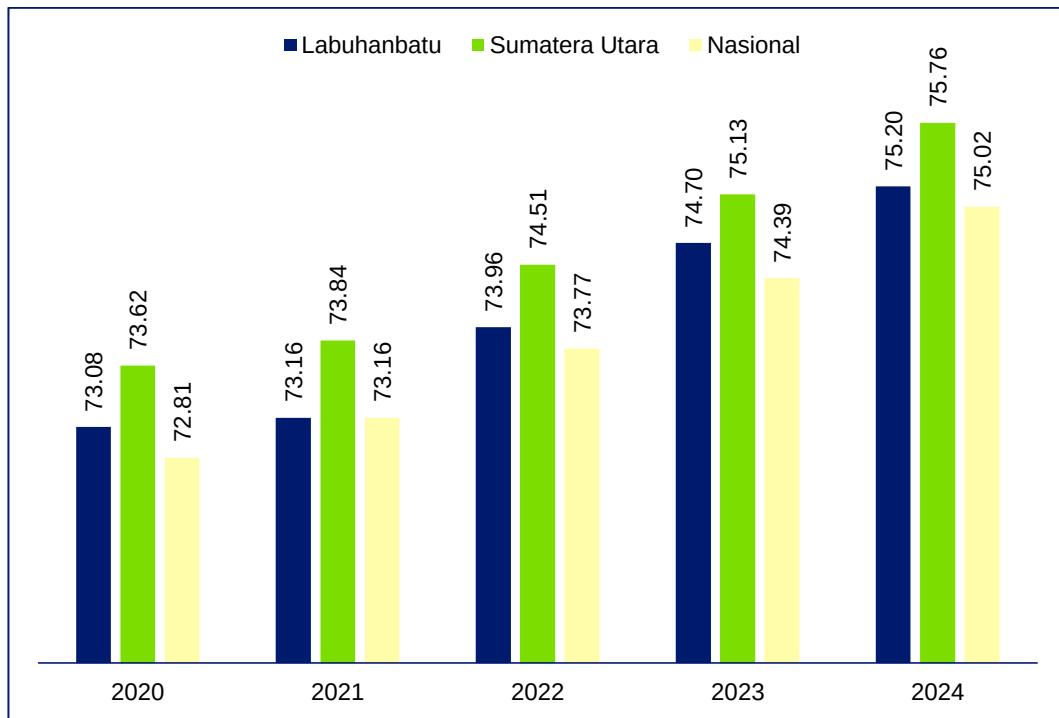
Gambar 2.12 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Agustus)

Sumber: BPS

Tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Labuhanbatu sebesar 6,05 persen cenderung meningkat hingga tahun 2023 mencapai 5,90 persen. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 juga melebihi rata-rata kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

E. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM diukur dari aspek pendidikan (rata-rata dan harapan lama sekolah), kesehatan (Usia Harapan Hidup), dan ekonomi (pengeluaran per kapita). Perkembangan IPM Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Gambar 2.13 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional

Sumber: BPS

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari 73,08 poin pada tahun 2020 menjadi 75,20 poin pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa secara komposit telah terjadi peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta ekonomi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah perlu memastikan pembangunan pendidikan dan kesehatan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat agar kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.

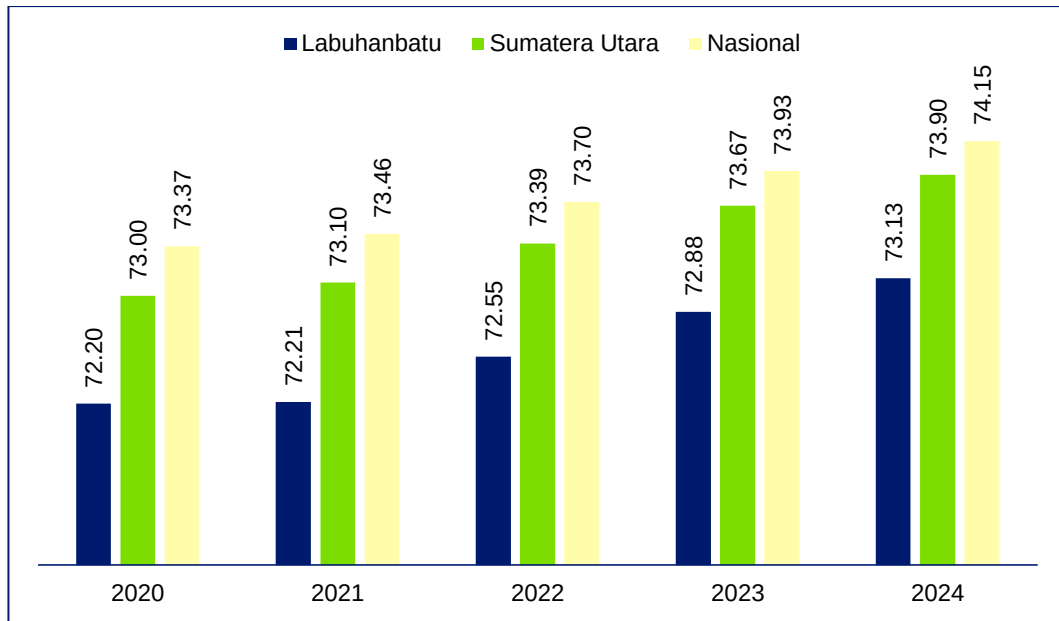
2.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan untuk Semua menekankan hak setiap individu atas layanan kesehatan berkualitas tanpa diskriminasi, diwujudkan melalui *Universal Health Coverage* (UHC), akses merata ke fasilitas kesehatan primer, dan pendekatan preventif, seperti imunisasi serta pencegahan stunting.

A. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di

lingkungan masyarakatnya.



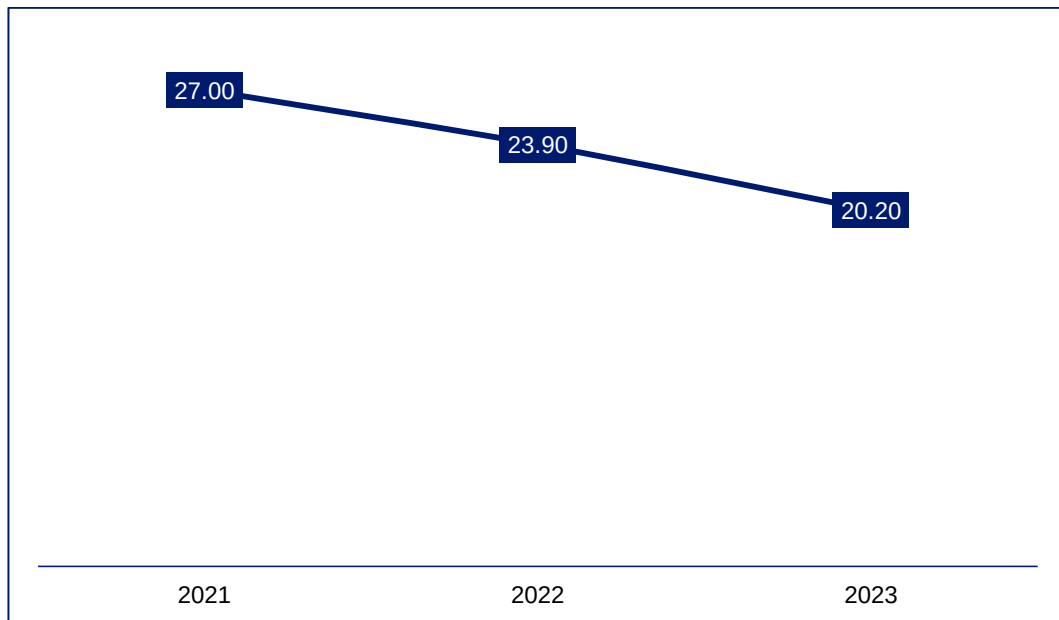
Gambar 2.14Usia Harapan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional

Sumber: BPS

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020 sebesar 72,20 tahun dan meningkat menjadi 73,13 tahun pada tahun 2023. Angka Harapan Hidup Kabupaten Labuhanbatu meningkat dalam rentang waktu 2020-2023, menunjukkan adanya peningkatan derajat kehidupan di Kabupaten Labuhanbatu. Meskipun mengalami peningkatan, angka Harapan Hidup di Kabupaten Labuhanbatu relatif lebih rendah dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Nasional, serta Kabupaten/kota di sekitar.

B. Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting mencerminkan persentase Balita dengan tinggi badan di bawah standar usia akibat malnutrisi kronis, yang berdampak jangka panjang pada perkembangan kognitif dan produktivitas. Stunting diangkat menjadi permasalahan nasional mengingat cukup banyaknya Balita yang mengalami stunting. Prevalensi stunting pada Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.15 Prevalensi Stunting Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: Dinas Kesehatan

Prevalensi Stunting Kabupaten Labuhanbatu mengalami penurunan hingga tahun 2023 mencapai 20,20 persen. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan bahwa masih banyak Balita yang mengalami stunting atau kekurangan gizi di Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu memastikan bahwa layanan kesehatan ibu dan anak, kesadaran orang tua dalam memberikan gizi seimbang, dan distribusi pangan bergizi dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

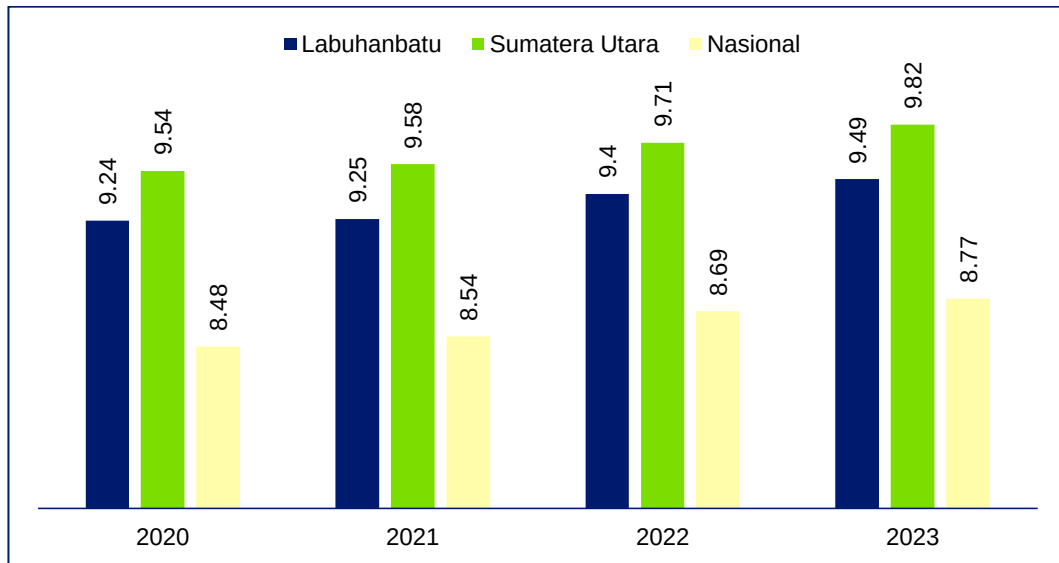
1.3.1 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan Berkualitas yang Merata merupakan fondasi pembangunan berkelanjutan yang menjamin akses setara terhadap pembelajaran inklusif dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Pemerintah memperkuat infrastruktur pendidikan, kurikulum yang relevan, serta dukungan teknologi digital, pendidikan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan daya saing SDM.

A. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 adalah 9,49 tahun.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Labuhanbatu memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya pada tahun 2020-2023, yang menunjukkan kecenderungan yang positif.



Gambar 2.16 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional

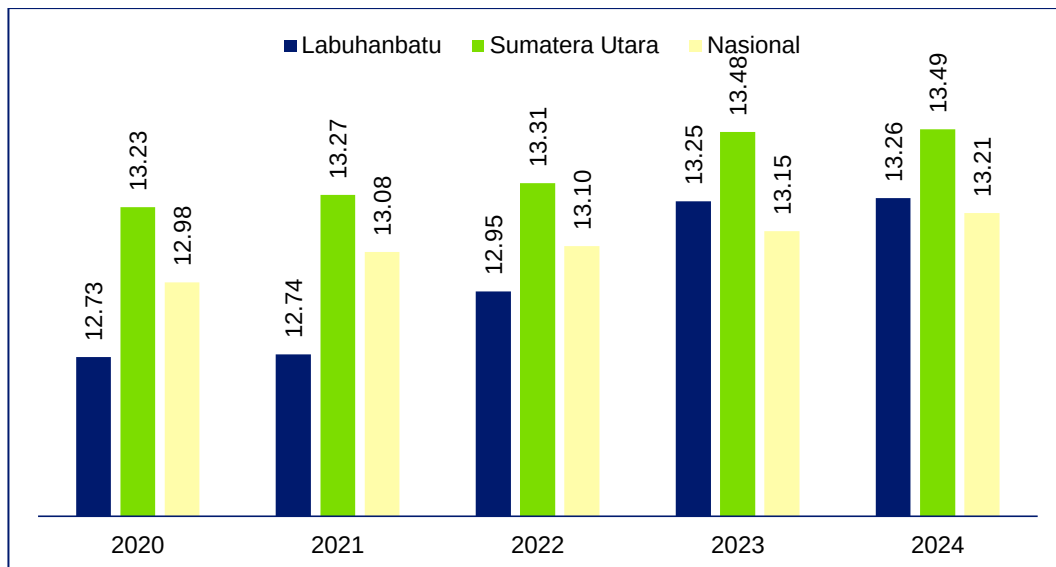
Sumber: BPS

Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada pembahasan terkait IPM, rata-rata lama sekolah Kabupaten Labuhanbatu masih tergolong cukup rendah jika dibandingkan dengan angka maksimum RLS (15 Tahun). Nilai RLS yang rendah menunjukkan persoalan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Rata-rata lama sekolah yang sudah mencapai nilai 9 tahun menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Labuhanbatu sudah menempuh pendidikan formal hingga SMP/Sederajat atau sudah memenuhi pendidikan wajib dasar 9 tahun.

B. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikut sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun.



Gambar 2.17Harapan Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional

Sumber: BPS

Pada tahun 2020, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu sebesar 12,73 tahun meningkat hingga tahun 2024 mencapai 13,26 tahun yang berarti lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak di Kabupaten Labuhanbatu adalah 13 tahun atau lulus pendidikan Diploma I. capaian tersebut setara dengan capaian Provinsi dan mengungguli capaian Nasional.

C. Literasi dan Numerasi

Literasi adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa (lisan, tulisan, isyarat) untuk memahami, menafsirkan, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai konteks, sementara Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep dan keterampilan matematika dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Perkembangan literasi dan numerasi pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

Tabel 2.16 Literasi dan Numerasi Kabupaten Labuhanbatu

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Literasi SD	N/A	N/A	N/A	47,14	N/A
Literasi SMP	N/A	N/A	N/A	50,14	N/A
Numerasi SD	N/A	N/A	N/A	34,64	N/A

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Numerasi SMP	N/A	N/A	N/A	34,10	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan

Kemampuan literasi di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 untuk pendidikan SD sebesar 47,14 poin, pendidikan SMP sebesar 50,14 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi di Kabupaten Labuhanbatu masih dalam kategori sedang dalam hal memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu. Kemampuan numerasi di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 untuk pendidikan SD sebesar 34,64 poin, pendidikan SMP sebesar 34,10 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan numerasi di Kabupaten Labuhanbatu masih dalam kategori sedang dalam hal berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat menyelesaikan masalah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu mendorong peningkatan literasi dan numerasi siswa melalui peningkatan kualitas tenaga pengajar, ekosistem pembelajaran yang adaptif berbasis teknologi, serta sarana dan prasarana yang berkualitas untuk menunjang aktivitas pembelajaran.

D. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Dalam meningkatkan kapasitas SDM di suatu daerah perlu didukung oleh peningkatan wawasan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Peningkatan ini dapat didukung oleh tersedianya perpustakaan sebagai wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuannya. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi dan kemampuan membaca di kalangan masyarakat suatu daerah. Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

Tabel 2.17 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu

UPLM		2022	2023
UPLM 1	Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,0014	0,2397
UPLM 2	Pemerataan Koleksi Perpustakaan	0,8656	0,1561
UPLM 3	Pemerataan Tenaga Perpustakaan	0,0000	0,1378
UPLM 4	Tingkat Kunjungan Pustaka	0,3941	0,0427

UPLM 5	Perpustakaan Ber-SNP	1,6964	1,0000
UPLM 6	Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan	0,2462	1,0000
UPLM 7	Jumlah Pemustaka	0,5206	1,0000
IPLM		53,20	51,09

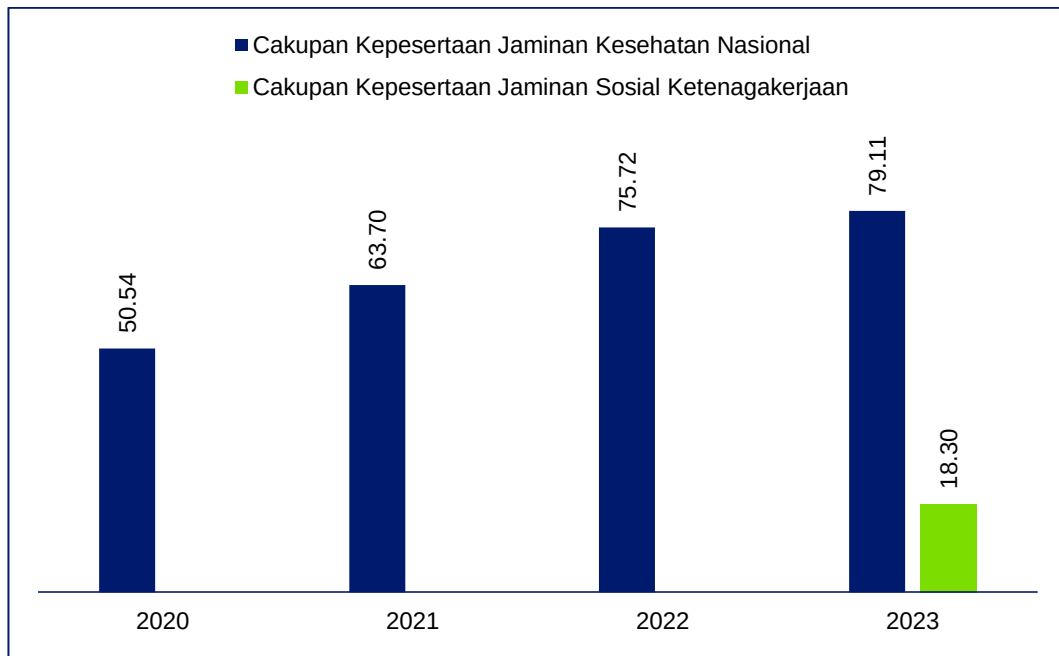
Sumber: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indonesia

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menurun dari 53,20 poin pada tahun 2022 menjadi 51,09 poin pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan nilai dari unsur penyusunnya, yaitu UPLM (Pemerataan koleksi perpustakaan) dari 0,8656 poin menjadi 0,1561 poin. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan koleksi buku di perpustakaan hanya mampu memenuhi sebesar 15 persen dari standar yang telah ditentukan. Selain itu, UPLM 4 (Tingkat kunjungan pustaka) juga menurun dari 0,3941 poin menjadi 0,0427 poin. Hal ini berarti bahwa kunjungan masyarakat ke perpustakaan menurun menjadi 4,27 persen dari standar yang telah ditentukan. Semakin rendahnya minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan menyebabkan penurunan pada unsur tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya buku digital sehingga masyarakat merasa tidak perlu untuk berkunjung ke perpustakaan.

Di samping itu, terdapat beberapa indikator yang meningkat hingga memenuhi standar yang telah ditentukan, yaitu UPLM 6 (Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan) dan UPLM7 (Jumlah Pemustaka). Hal ini mengindikasikan bahwa banyak masyarakat yang menghimbau orang lain untuk meningkatkan literasinya dengan berkunjung ke perpustakaan dan membaca. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan.

1.4.1 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial yang Adaptif mengacu pada sistem jaminan sosial yang mampu merespons dinamika risiko dan kebutuhan masyarakat, termasuk guncangan ekonomi, bencana alam, atau krisis kesehatan, seperti pandemi.



Gambar 2.18 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)

Sumber: BPJS

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional meningkat dari 50,54 persen pada tahun 2020 menjadi 79,11 persen pada tahun 2023. Sementara, pada tahun 2023 Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hanya mencapai 18,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya masyarakat yang belum berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program jaminan kesehatan agar seluruh layanan kesehatan dapat dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, rendahnya jaminan sosial ketenagakerjaan juga dapat disebabkan oleh beberapa perusahaan belum mengikuti peraturan yang berlaku atau banyaknya tenaga kerja yang bergerak bekerja di sektor informal. Pemerintah harus menghimbau perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta, serta menjangkau tenaga kerja informal agar turut serta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah harus memastikan program jaminan kesehatan dan sosial berjalan dengan baik, terutama responsif terhadap kelompok rentan (lansia, disabilitas, pekerja informal), serta integrasi dengan layanan kesehatan. Pendekatan berbasis teknologi dan kolaborasi sehingga mewujudkan perlindungan sosial adaptif dan menjadi jaring pengaman yang

efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan.

1.5.1 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama maslahat merupakan paradigma transformatif dalam memahami spiritualitas yang melampaui ritualistik formal, melainkan mengejawantahkan nilai-nilai agama sebagai instrumen penciptaan kemaslahatan universal. Pendekatan ini memosisikan agama tidak sekadar sebagai sistem keyakinan individual, namun sebagai kekuatan transformatif yang mendorong kesejahteraan kolektif, meneguhkan etika sosial, dan menghasilkan kontribusi positif bagi pembangunan kemanusiaan. Beragama maslahat mensyaratkan pemahaman teologis yang inklusif, dialogis, dan berbasis pada prinsip-prinsip kemanusiaan universal, yang mampu menjembatani keragaman dan menciptakan harmoni sosial.

Berkebudayaan maju merupakan manifestasi dinamis dari kemampuan masyarakat untuk mengintegrasikan warisan kultural dengan inovasi progresif, menciptakan ruang di mana tradisi dan modernitas berdialog secara produktif. Perspektif ini tidak sekadar menghargai khazanah budaya sebagai warisan statis, melainkan memaknainya sebagai Modal dinamis untuk pengembangan peradaban. Kebudayaan maju ditandai dengan kapasitas adaptasi tinggi, keterbukaan terhadap perubahan, kemampuan kritis, serta komitmen untuk terus-menerus melakukan rekonstruksi nilai-nilai kultural yang lebih bermakna dan kontekstual dengan tantangan zaman.

A. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan instrumen pengukuran sistematis yang menggambarkan kualitas interaksi, toleransi, dan harmoni antar umat beragama dalam suatu wilayah. Indikator ini tidak sekadar menghitung frekuensi interaksi, melainkan mengukur kedalaman pemahaman, sikap saling menghormati, dan kapasitas dialog konstruktif di antara berbagai kelompok keagamaan.

B. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen analitik komprehensif yang mengukur dinamika dan kualitas transformasi kebudayaan dalam konteks pembangunan nasional. Metrik ini tidak sekadar menilai aspek kuantitatif, melainkan mengeksplorasi dimensi kualitatif perkembangan budaya yang mencakup kapasitas inovasi, kreativitas, dan resiliensi masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman. Indeks kerukunan umat beragama (IKUB) di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 sebesar 78,34. Hal ini menunjukkan bahwa indeks utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan umat beragama di Kabupaten Labuhanbatu sehingga menggambarkan kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, menghormati dengan keyakinan masing-masing.

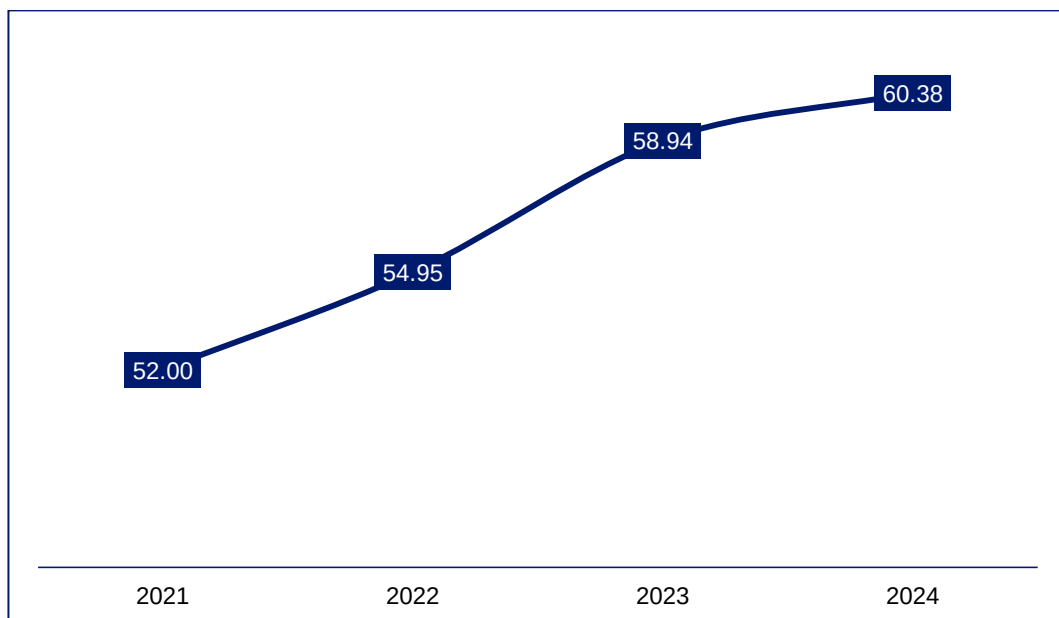
1.6.1 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif merupakan tiga pilar penting dalam membangun masyarakat yang maju dan berkeadilan. Keluarga berkualitas dicirikan oleh pemenuhan kebutuhan dasar, pola pengasuhan yang baik, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang memadai. Kesenjangan gender diwujudkan melalui penghapusan diskriminasi, peningkatan partisipasi perempuan di berbagai sektor, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar semua individu. Sementara itu, masyarakat inklusif menekankan penerimaan terhadap keberagaman, termasuk penyandang disabilitas, kelompok marginal, dan minoritas, dengan

memastikan mereka memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan.

A. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks pembangunan keluarga merupakan indikator untuk melihat pencapaian pembangunan kualitas keluarga yang disusun dari 3 indikator, yaitu indeks ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Capaian indeks pembangunan keluarga pada Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



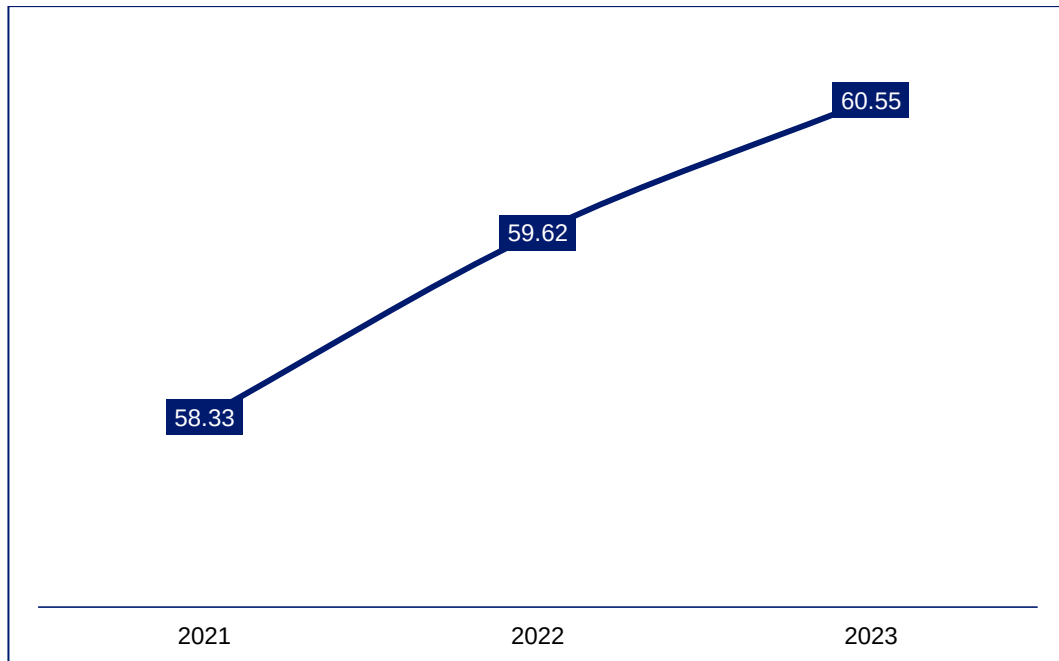
Gambar 2.19 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Indeks pembangunan keluarga Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari 54,95 poin menjadi 58,94 poin dari tahun 2022 ke tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa pembangunan kualitas keluarga di Kabupaten Labuhanbatu semakin baik. Untuk meningkatkan pembangunan keluarga, maka pemerintah dapat meningkatkan keterampilan parenting pada orang tua melalui edukasi parenting pra-nikah, peningkatan akses layanan gizi kepada keluarga, akses pendidikan dan pekerjaan yang inklusif, serta memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran terkhusus masyarakat yang kurang mampu.

B. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator komprehensif untuk mengukur tingkat pemenuhan hak dan perlindungan anak di suatu wilayah. Perlindungan anak memiliki tujuan memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung.



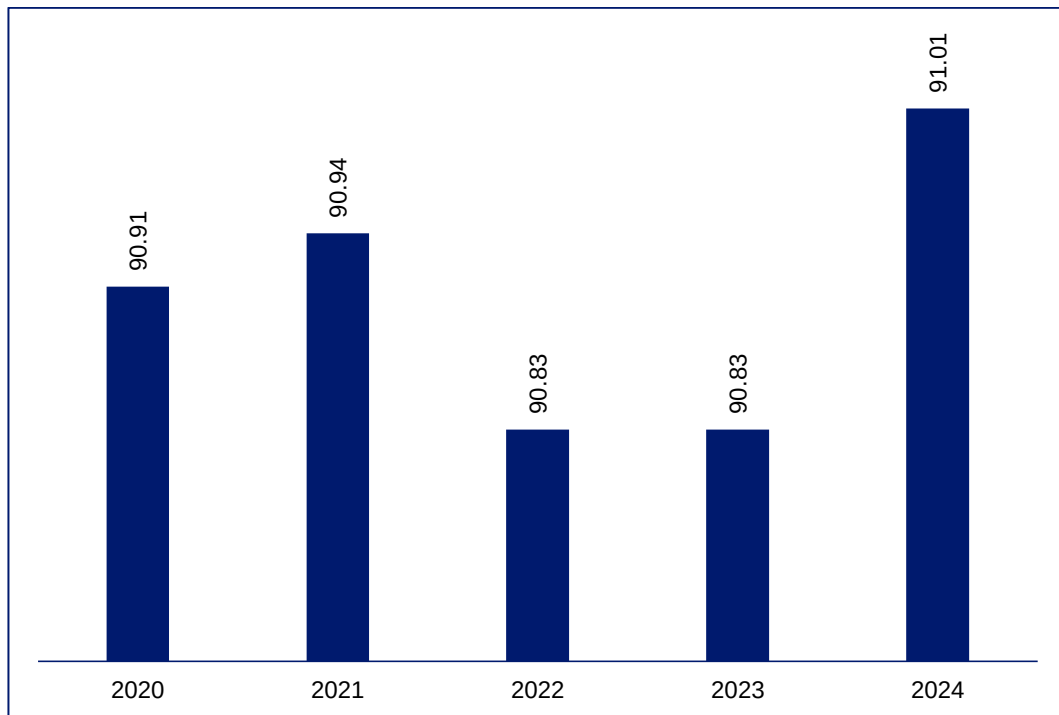
Gambar 2.20Indeks Perlindungan Anak (Poin)

Sumber: KemenPPA

Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari 58,33 poin pada tahun 2021 menjadi 60,55 poin pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan signifikan dalam pemenuhan hak-hak dasar anak dan efektivitas sistem perlindungan anak. Pemerintah harus meningkatkan regulasi dan kebijakan terkait perlindungan anak sehingga anak-anak merasa aman dan nyaman dari tindakan negatif.

C. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender menggambarkan kesetaraan akses pembangunan atau IPM antar penduduk perempuan dengan penduduk laki-laki. Semakin besar angka IPG, maka semakin setara akses pembangunan antar perempuan dengan laki-laki. Perkembangan IPG Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



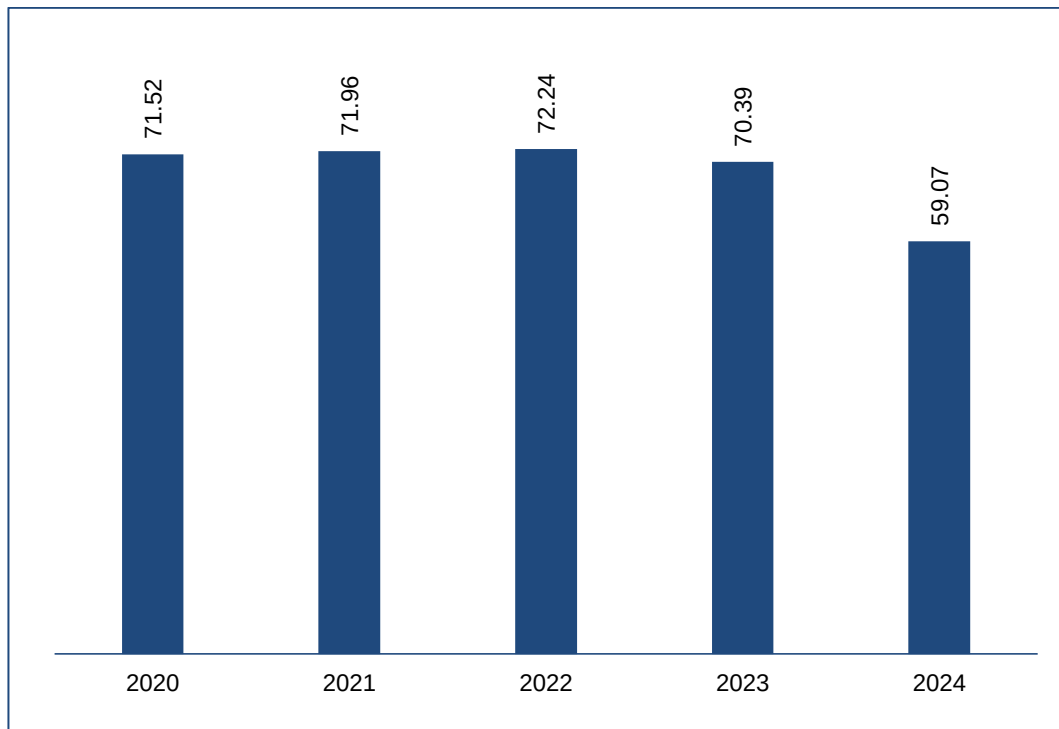
Gambar 2.21 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: BPS

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari 90,94 poin pada tahun 2021 menjadi 91,01 poin pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya kesetaraan akses pembangunan dari segi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang dirasakan oleh penduduk perempuan. Pemerintah ke depannya harus memastikan bahwa diskriminasi terhadap gender semakin berkurang sehingga fasilitas dasar, seperti pendidikan dan kesehatan juga semakin dirasakan oleh penduduk perempuan.

D. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender menggambarkan seberapa besar kontribusi wanita dari segi ketenagakerjaan serta keterlibatan politik dalam pembangunan ekonomi. Perkembangan IPG Kabupaten Labuhanbatu selama sebagai berikut:



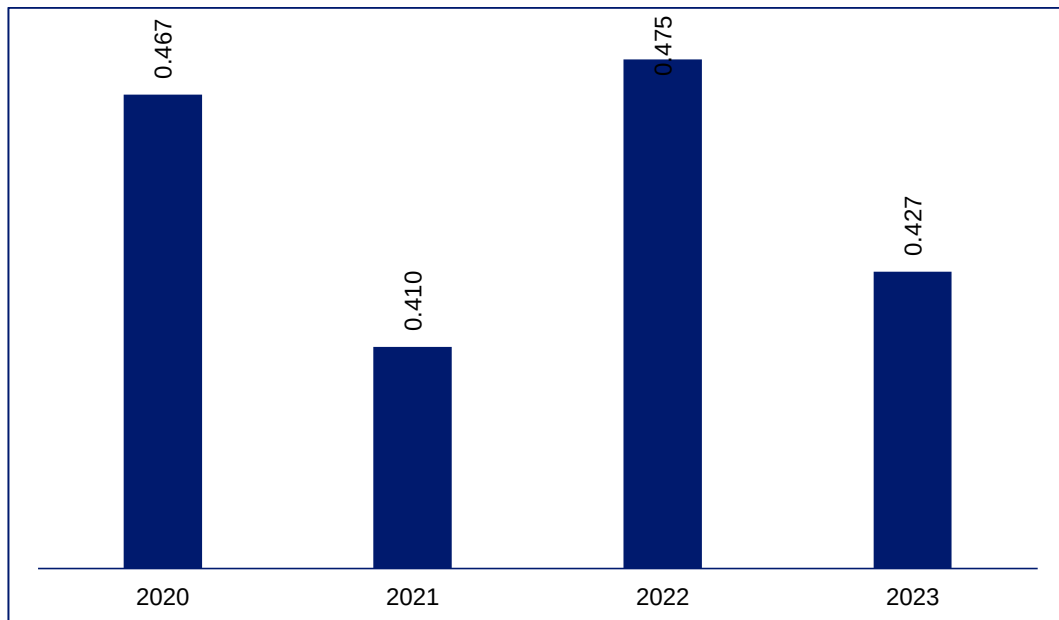
Gambar 2.22 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: BPS

Indeks Pemberdayaan Gender kabupaten Labuhanbatu cenderung menurun dari 71,52 poin pada tahun 2020 menjadi 59,07 poin pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa keterlibatan penduduk perempuan dalam pembangunan ekonomi semakin berkurang. Pemberdayaan kepada penduduk perempuan perlu ditingkatkan agar mereka terlibat dalam pembangunan daerah.

E. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender mencerminkan secara komprehensif mengenai akses penduduk perempuan terhadap pembangunan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, dan keterlibatan dalam pembangunan daerah. Indeks Ketimpangan Gender mengukur ketimpangan gender dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Gambar 2.23 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: BPS

Indeks Ketimpangan Gender berfluktuasi cenderung meningkat dari 0,398 poin pada tahun 2019 menjadi 0,427 poin pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan cenderung meningkat.

F. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah suatu ukuran komposit yang memberikan gambaran mengenai tingkat kemajuan dan kesejahteraan pemuda di suatu wilayah. Indeks Pembangunan Pemuda memiliki 5 domain dalam pengukurannya, meliputi 1) Pendidikan; 2) Kesehatan dan Kesejahteraan; 3) Lapangan dan Kesempatan Kerja; 4) Partisipasi dan Kepemimpinan; dan 5) Gender dan Diskriminasi.

2.2.1 Aspek Daya Saing Daerah

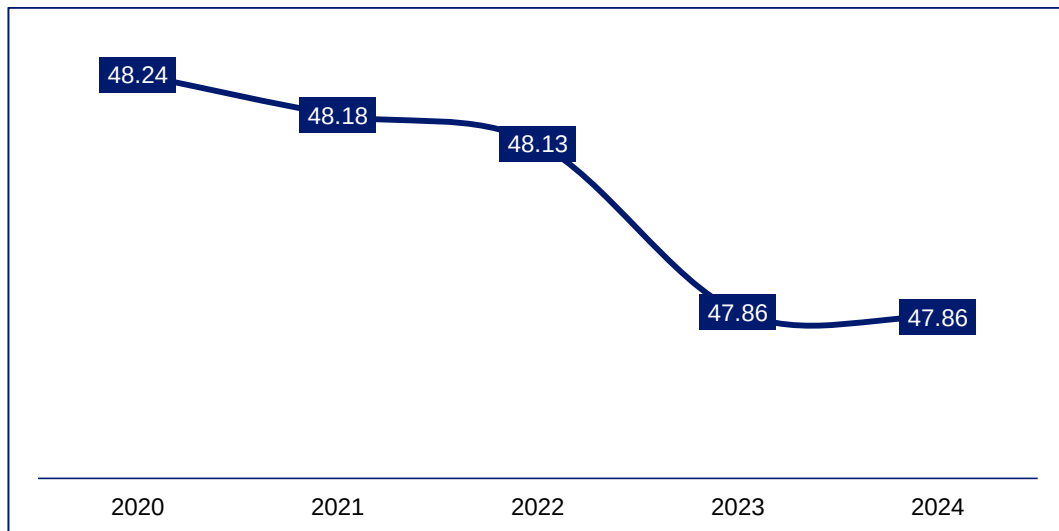
Daya saing daerah merupakan konstruksi kompleks yang mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan ekosistem pembangunan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi sumber daya manusia, infrastruktur, dan modal sosial. Konstelasi daya saing dibangun melalui interaksi dinamis antara kapasitas kelembagaan pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan adaptasi terhadap

perubahan lingkungan strategis. Fondasi utama daya saing terletak pada kemampuan daerah mengembangkan keunggulan kompetitif yang membedakannya dari wilayah lain melalui inovasi berkelanjutan, pengembangan klaster industri unggulan, dan penciptaan nilai tambah dari potensi sumber daya lokal yang dimiliki.

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia merupakan konstruksi kompleks yang mencerminkan kapasitas fundamental sebuah wilayah untuk mengembangkan potensi manusia secara komprehensif dan berkelanjutan. Konsep ini melampaui sekadar pengukuran kuantitatif seperti tingkat pendidikan, melainkan melibatkan transformasi sistemik yang mencakup pembangunan kapabilitas intelektual, keterampilan adaptif, kreativitas inovatif, dan karakter unggul yang mampu berkompetisi dalam lanskap global yang semakin dinamis dan kompleks. Pembangunan daya saing sumber daya manusia mensyaratkan pendekatan holistik yang terintegrasi, mulai dari sistem pendidikan yang responsif, pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan pasar, hingga penciptaan ekosistem yang mendorong pertumbuhan potensi individual dan kolektif.

Angka ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan indikator demografis kunci yang menggambarkan beban ekonomi penduduk usia produktif dalam menanggung beban penduduk usia tidak produktif dalam suatu wilayah. Metrik ini dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun), yang direpresentasikan dalam persentase. Semakin tinggi angka ketergantungan menunjukkan beban ekonomi yang semakin berat bagi kelompok usia produktif yang berimplikasi signifikan terhadap struktur ekonomi, sistem jaminan sosial, dan kebijakan pembangunan daerah.



Gambar 2.24Angka Ketergantungan (Per 100 Penduduk)

Sumber: BPS (Diolah, 2025)

Gambar tersebut menunjukkan tren penurunan angka ketergantungan (*dependency ratio*) dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan perubahan struktural demografis yang signifikan dalam periode lima tahun tersebut. Meskipun penurunan terlihat gradual, setiap penurunan angka ketergantungan memiliki signifikansi strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Semakin banyaknya penduduk usia produktif, maka semakin banyaknya *supply* angkatan kerja yang tersedia untuk membangun daerah.

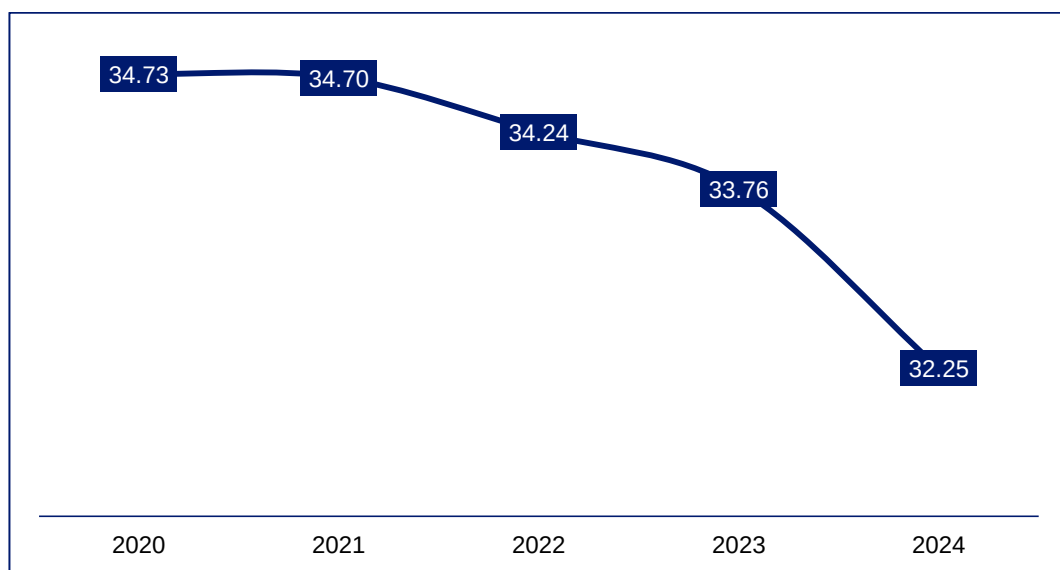
2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan produktivitas ekonomi merupakan simpul strategis dalam arsitektur pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ekosistem inovasi dikonstruksikan melalui pendekatan sistemik yang memadukan peran perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan pemerintah dalam menciptakan platform kolaborasi pengembangan pengetahuan dan teknologi. Infrastruktur inovasi yang komprehensif mencakup pembangunan pusat penelitian, insentif pengembangan riset terapan, fasilitasi transfer teknologi, dan penciptaan ruang-ruang kreativitas yang memungkinkan lahirnya solusi inovatif untuk persoalan pembangunan daerah. Produktivitas ekonomi diartikan secara holistik sebagai kemampuan sistemik untuk mentransformasi potensi sumber daya menjadi nilai ekonomi yang lebih

tinggi melalui inovasi berkelanjutan. Strategi peningkatan produktivitas difokuskan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, akselerasi adopsi teknologi digital, pengembangan klaster industri berbasis keunggulan kompetitif daerah, dan penciptaan rantai nilai yang memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pendekatan ini mensyaratkan investasi berkelanjutan dalam pengembangan kompetensi SDM, penciptaan insentif bagi inovator lokal, dan pembangunan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. Keberhasilan implementasi strategi iptek dan inovasi diukur dari kemampuan daerah dalam menciptakan produk-produk bernilai tambah tinggi, meningkatkan daya saing ekonomi, serta mentransformasi struktur ekonomi dari berbasis sumber daya menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi.

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan menggambarkan kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap perekonomian daerah. Sektor ini menjadi sektor utama yang berkontribusi bagi perekonomian daerah selama ini. Sektor Industri Pengolahan terus didorong agar mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.



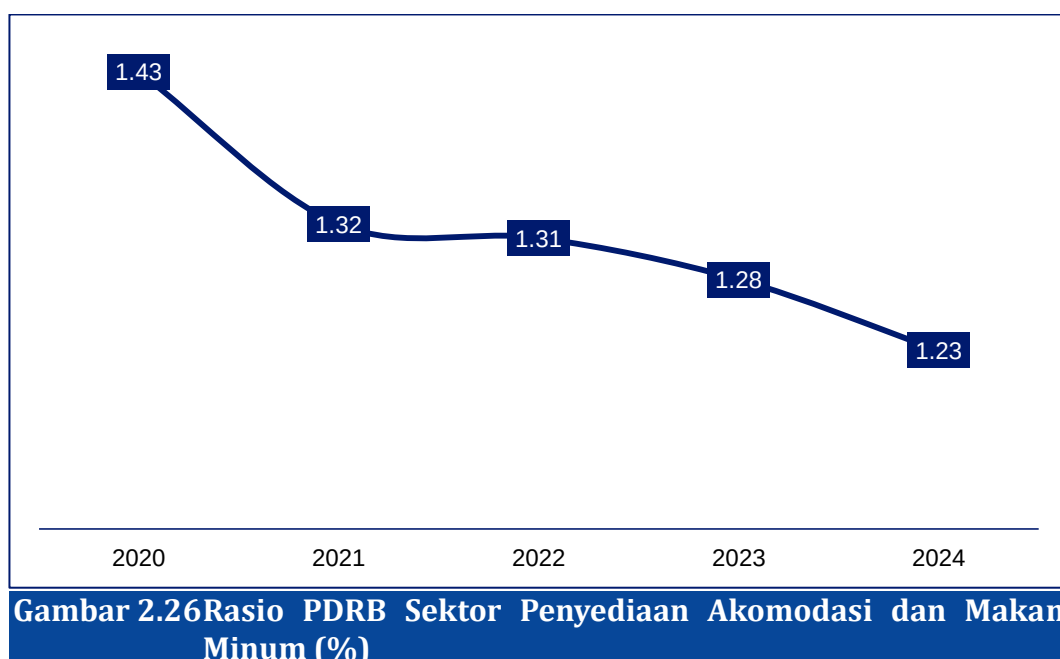
Gambar 2.25 Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)

Sumber: BPS

Data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi industri pengolahan mengalami penurunan terhadap perekonomian daerah. Pada tahun 2020 kontribusi Sektor Industri Pengolahan sebesar 34,73 persen menurun menjadi 32,25 persen pada tahun 2024. Penurunan ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah mengingat Kabupaten Labuhanbatu perlu mendorong hilirisasi produk-produk daerah agar memberikan nilai tambah yang berdaya saing sehingga diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah perlu meningkatkan investasi pada Sektor Industri dan memberdayakan SDM yang tersedia agar mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah.

B. Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum

Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum menjadi indikator yang menunjukkan kontribusi Sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah. Hal ini karena pariwisata berkaitan dengan konsumsi turis terhadap akomodasi (penginapan, hotel, dan lain-lain) serta makan minum (café, rumah makan, restoran, dan lain-lain). Sektor Pariwisata menjadi sektor yang penting karena merupakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sektor ini memiliki *multiplier effect* yang berdampak pada usaha sekitar.



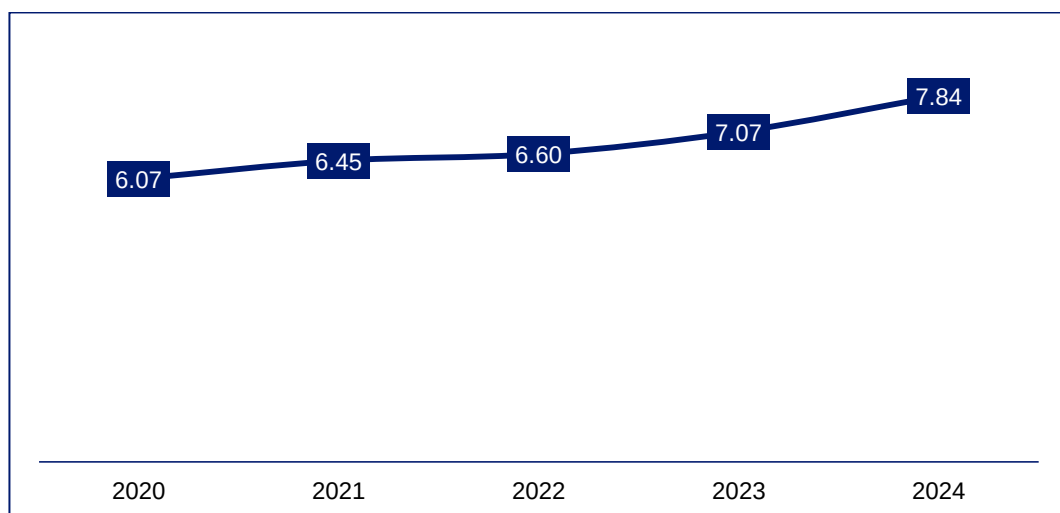
Sumber: BPS

Kontribusi sektor ini mengalami penurunan dari 1,43 persen pada

tahun 2020 menjadi 1,23 persen pada tahun 2024. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya daya tarik pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu sehingga menurunkan kunjungan wisatawan ke daerah. Kurangnya destinasi wisata dan promosi dapat menjadi penyebab kurangnya daya tarik pariwisata. Pemerintah perlu meningkatkan daya saing destinasi wisata, melalui pembangunan destinasi wisata pada daerah potensial dan melakukan promosi yang berkelanjutan agar meningkatkan kesadaran turis domestik dan asing untuk berkunjung ke daerah.

C. Rasio Kewirausahaan

Daya saing ekonomi daerah dapat diukur dari pertumbuhan wirausaha di daerahnya. Wirausaha adalah individu yang membangun usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi pencari kerja. Dalam mengukur pertumbuhan wirausaha di suatu daerah, maka dapat dilihat dari rasio kewirausahaan. Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan antara penduduk yang berusaha sendiri dan memiliki setidaknya 1 orang buruh/karyawan terhadap seluruh angkatan kerja. Perkembangan rasio kewirausahaan Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Gambar 2.27 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Labuhanbatu

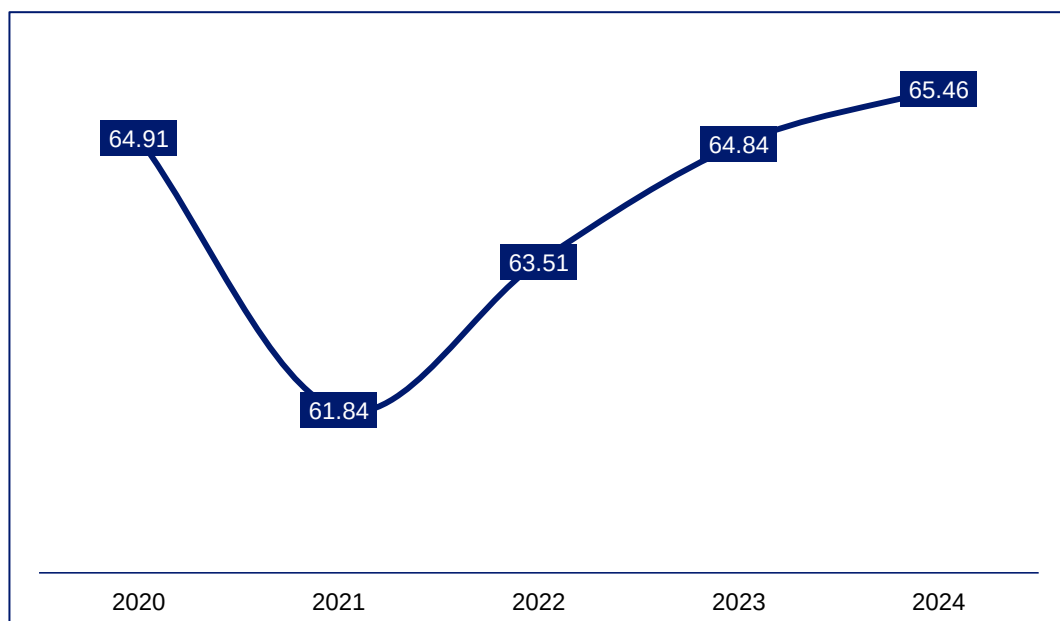
Sumber: BPS (diolah, 2025)

Data tersebut menunjukkan bahwa rasio kewirausahaan meningkat dari 6,07 persen pada tahun 2020 menjadi 7,07 persen pada tahun 2023. Hal

ini menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan wirausaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat. Pemerintah juga harus memberikan dukungan baik berupa modal, perizinan, atau bantuan lainnya agar masyarakat semakin berminat untuk membangun usaha. Peningkatan wirausaha juga diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga setiap masyarakat secara inklusif dapat bertumbuh secara ekonomi.

D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator makro yang digunakan untuk melihat kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah. Tingginya TPAK menandakan bahwa ketersediaan angkatan kerja di suatu daerah semakin banyak. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan penduduk yang bekerja dan sedang menganggur/mencari kerja dengan seluruh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Perkembangan TPAK di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Gambar 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Labuhanbatu

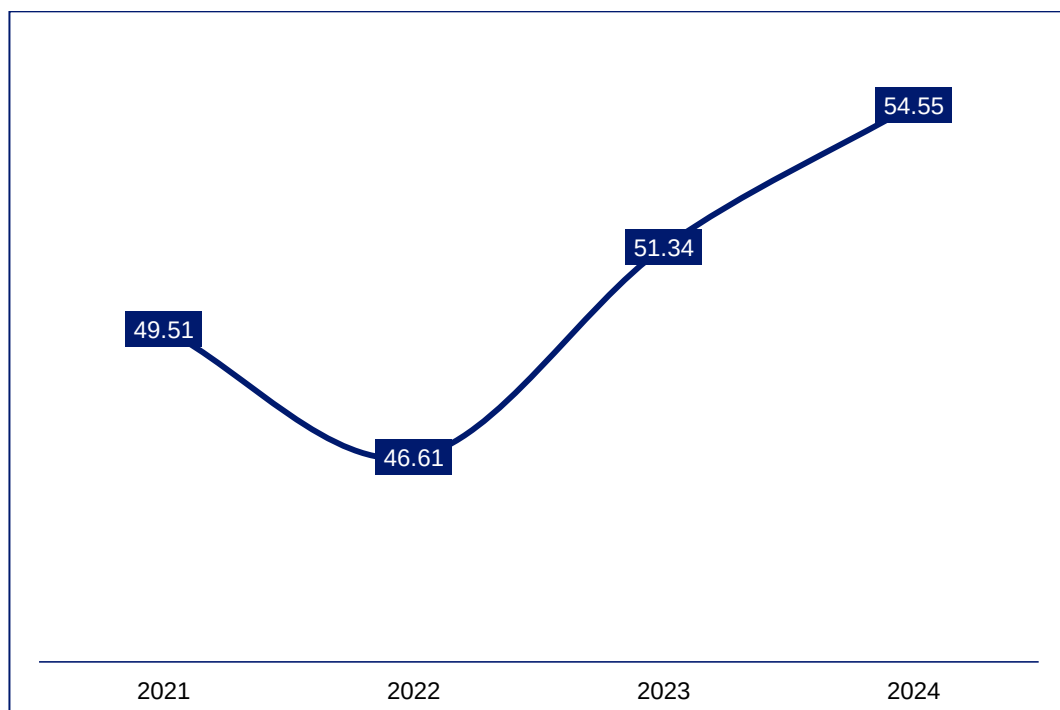
Sumber: BPS

Data pada gambar tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan

TPAK dari 64,91 persen pada tahun 2020 menjadi 61,84 persen pada tahun 2021, lalu kembali meningkat hingga mencapai 65,46 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa terjadi peningkatan ketersediaan angkatan kerja di Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah perlu menyikapi peningkatan tersebut dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang tersedia melalui pelatihan dan pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM yang tersedia di Kabupaten Labuhanbatu sehingga dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dan berkontribusi bagi kemajuan daerah.

E. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah indikator komprehensif yang mengukur kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan, mengadopsi, dan menerapkan inovasi untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.29Indeks Inovasi Daerah (Poin)

Sumber: Kemendagri

Indeks Inovasi Daerah meningkat dari 49,51 poin pada tahun 2021 menjadi 54,55 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin inovatifnya layanan yang dihasilkan oleh perangkat daerah di Kabupaten

Labuhanbatu. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu harus tetap mendorong setiap perangkat daerah untuk menghasilkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat luas. Peningkatan kapasitas dan keterampilan ASN perlu ditingkatkan agar menghasilkan terobosan-terobosan/program yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.

E. Jasa Keuangan

Jasa keuangan merujuk pada seluruh aktivitas dan layanan yang berhubungan dengan pengelolaan uang dan aset. Sektor ini mencakup berbagai lembaga dan produk, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, lembaga pembiayaan, dan investasi. Jasa keuangan berfungsi sebagai perantara dalam memfasilitasi arus modal antara pihak yang memiliki surplus (investor) dan pihak yang membutuhkan sumber pendanaan (peminjam atau pengusaha). Selain itu, sektor ini juga memiliki peran penting dalam mengelola risiko, menciptakan likuiditas, dan mendukung stabilitas ekonomi melalui berbagai instrumen finansial.

Tabel 2.18 Capaian Indikator Jasa Keuangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	1,16	1,12	1,11	1,08	1,03
Indeks Akses Keuangan Daerah (Poin)	N/A	N/A	4,13	4,18	4,29
Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB ADHB (%)	0,09	0,11	0,10	0,10	0,16
Total Kredit/PDRB ADHB (%)	0,18	0,18	0,21	0,21	0,22
Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan (Rp miliar)	N/A	186,19	80,42	87,41	48,73

Sumber: BI (diolah, 2025) & BPS

Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan cenderung menurun dari 1,16 persen pada tahun 2020 menjadi 1,03 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin menurunnya aktivitas perekonomian pada sektor keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya kebutuhan masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan produk-produk keuangan di daerah. Rendahnya kontribusi tersebut juga disebabkan oleh kurangnya ketersediaan lembaga keuangan di Kabupaten Labuhanbatu. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk

menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (*supply side*) dan permintaan (*demand side*) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. IKAD Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2022 sebesar 4,13 poin meningkat hingga tahun 2024 mencapai sebesar 4,29 poin, di mana hal ini berarti kinerja inklusi keuangan Kabupaten Labuhanbatu berada dalam kategori “Hampir Unggul”.

Total Dana Pihak ketiga terhadap PDRB ADHB mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat dari tahun 2020 sebesar 0,09 menjadi sebesar 0,16 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa total dana pihak ketiga PDRB ADHB mengalami peningkatan selama 5 tahun. Total kredit/PDRB ADHB cenderung meningkat dari tahun 2020 sebesar 0,18 persen menjadi sebesar 0,22 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa rasio total kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan Kabupaten Labuhanbatu semakin meningkat. Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan (Rp miliar) merupakan total transaksi jual dan beli yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu secara rata-rata dalam setahun. Nilai transaksi saham menurun dari Rp 186,19 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 48,73 miliar pada tahun 2024, hal ini menandakan bahwa aktivitas masyarakat dalam pasar modal di mana dalam hal ini pasar sekunder semakin menurun. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui program peningkatan literasi keuangan atau dapat berkolaborasi dengan pihak lembaga keuangan untuk menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait produk-produk keuangan.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru menjadi strategi kunci dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dengan memadukan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Ekonomi Hijau berfokus pada pengurangan emisi karbon melalui transisi energi terbarukan seperti PLTS dan PLTB, penerapan sistem pertanian presisi, serta pengembangan kota

hijau dengan transportasi ramah lingkungan. Sementara itu, Ekonomi Biru memanfaatkan potensi kelautan secara berkelanjutan melalui ekowisata bahari, perikanan berbasis kuota, dan bioteknologi kelautan untuk mengurangi tekanan pada ekosistem pesisir. Integrasi kedua konsep ini terlihat dalam inisiatif seperti budidaya rumput laut yang sekaligus menyerap karbon dan meningkatkan pendapatan nelayan, atau pembangkit angin lepas pantai yang menghasilkan energi bersih.

A. Energi Baru Terbarukan

Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah pilar utama untuk transisi menuju sistem energi yang bersih, berkelanjutan, dan mandiri di masa depan. EBT memberikan solusi untuk mengatasi krisis perubahan iklim sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dengan memanfaatkan kekuatan alam seperti matahari, angin, dan air. Dalam mendorong peningkatan pemanfaatan EBT, maka pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu menggali potensi PLT-EBT yang ada di daerah serta meningkatkan investasi untuk PLT-EBT.

2.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam seluruh aspek ekonomi, pemerintahan, dan masyarakat untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas layanan. Transformasi digital menjadi kunci daya saing di era ekonomi berbasis pengetahuan. Proses ini tidak sekadar menggantikan sistem manual menjadi digital, tetapi juga mengubah pola pikir, budaya kerja, dan model bisnis agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

A. Indeks Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat Digital mengukur kondisi adaptasi teknologi di suatu daerah. Indeks ini disusun oleh 4 pilar, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan di mana masing-masing pilar memiliki sub pilar penyusunnya juga. Apabila indeks ini semakin meningkat, maka mencerminkan semakin tingginya adaptasi digital

di suatu daerah. Pada Kabupaten Labuhanbatu, penilaian indeks masyarakat digital sebagai berikut:

Tabel 2.19 Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Labuhanbatu							
Pilar	2022	2023	2024	Sub Pilar	2022	2023	2024
Infrastruktur dan Ekosistem	46,51	59,57	56,52	Akses dan Adopsi Teknologi	44,44	61,21	64,23
				Ekosistem Pembelajaran	48,57	52,72	45,88
				Digitalisasi Pemerintah	-	70,30	65,33
Keterampilan Digital	65,20	62,43	60,29	Komplementaritas	67,08	64,75	61,09
				Pengenalan	69,14	63,54	61,75
				Keamanan TIK	59,43	59,13	58,09
Pemberdayaan	27,55	27,28	29,67	Konsumen/ Pengguna	33,79	34,14	34,92
				Penjual/ Penyedia	21,31	20,43	24,43
Pekerjaan	29,76	38,43	35,98	Permintaan	47,31	53,65	56,66
				Penawaran	12,22	23,21	15,29
Indeks Masyarakat Digital					42,01	46,76	45,78

Sumber: Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa indeks masyarakat digital meningkat dari 42,01 poin pada tahun 2022 menjadi 46,76 poin pada tahun 2023, lalu menurun pada tahun 2024 menjadi 45,78 poin. Infrastruktur dan ekosistem mencerminkan pembangunan dan penerapan teknologi di daerah. Jika dilihat dari sub-pilarnya, Akses dan Adopsi Teknologi mengalami peningkatan setiap tahunnya mencapai 64,23 poin. Hal ini berarti bahwa semakin banyak masyarakat, bisnis, dan institusi yang memperoleh akses dan menggunakan teknologi dalam aktivitasnya. Sementara, sub-pilar Ekosistem Pembelajaran menurun menandakan bahwa semakin menurunnya adopsi teknologi pada sekolah di Kabupaten Labuhanbatu. Begitu juga dengan Digitalisasi Pemerintah, di mana hal ini mengindikasikan bahwa semakin kurangnya implementasi teknologi dalam pemerintahan.

Keterampilan Digital mencerminkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan perangkat digital, memahami informasi, dan mencari informasi secara digital, serta memahami risiko dalam penggunaannya. Pada tahun 2024 sub-pilar dari Pilar Keterampilan Digital mengalami penurunan menunjukkan bahwa adanya penurunan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi.

Pilar Pemberdayaan mencerminkan tingkat penggunaan teknologi

baik dari segi produksi dan konsumsi. pada Pilar Pekerjaan mencerminkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang membutuhkan keahlian digital dan ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian digital. Kedua sub-pilar penyusunnya mengalami peningkatan, hal ini menandakan bahwa adanya keselarasan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dengan keahlian digital di Kabupaten Labuhanbatu. Sub-Pilar Konsumen/Pengguna dan Penjual/Penyedia meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya aktivitas konsumtif dan produktif masyarakat dengan memanfaatkan teknologi.

Pilar Pekerjaan menunjukkan ketersediaan dan kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan keahlian di bidang teknologi. Pada Sub-Pilar Permintaan terjadi peningkatan, sementara Sub-Pilar Penawaran terjadi penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan keahlian teknologi semakin meningkat, sementara ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian teknologi semakin menurun.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global adalah proses dinamis yang menghubungkan sistem ekonomi nasional dengan perdagangan internasional, menciptakan jejaring ekonomi yang saling tergantung dan terintegrasi. Konsep ini mencakup upaya strategis untuk mengoptimalkan potensi domestik sekaligus memanfaatkan peluang pasar global melalui berbagai instrumen kebijakan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi.

Tabel 2.20 Indikator Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)	23,43	23,44	23,16	23,27	23,14
Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	38,35	40,02	41,56	N/A	N/A
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	17,81	17,50	17,59	17,57	17,96

Sumber: BPS

Pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB di Kabupaten Labuhanbatu mengalami fluktuasi namun cenderung menurun dari tahun 2020 sebesar 23,43 persen menurun menjadi 23,14 persen pada tahun 2024. Sementara, Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB meningkat dari 38,35 persen pada tahun 2020 menjadi 41,56 persen pada tahun 2022. Namun, pada masa mendatang diharapkan kontribusi PMTB semakin menurun, sementara Ekspor Barang dan Jasa meningkat. Penurunan tersebut bukan berarti mengharapkan penurunan nilai PDRB-nya, namun hanya kontribusinya saja yang bergeser ke Ekspor Barang dan Jasa. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari 17,81 persen pada tahun 2020 menjadi 17,96 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa aktivitas perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu semakin banyak dari Sektor Perdagangan. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat memberikan dukungan pada Sektor Perdagangan melalui pembangunan sentra perdagangan, peningkatan infrastruktur untuk distribusi produk, memberdayakan pelaku UMKM, serta memfasilitasi UMKM daerah dengan kemudahan ekspor.

A. Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan investasi yang ditanamkan oleh investor domestik, baik perorangan maupun badan usaha pada suatu daerah. Perkembangan realisasi investasi PMDN menurut sektor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Realisasi Investasi PMDN menurut Sektor

Sektor		2022		2023	
		Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	(01-2020) Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI	19	159.008,20	21	155.902,90
	Total	19	159.008,20	21	155.902,90
Industri Makanan	(10-2020) Industri Makanan	10	103.477,00	10	87.538,80
	Total	10	103.477,00	10	87.538,80
Industri Karet dan Plastik	(22-2020) Industri Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik	1	356,90	1	299,40
	Total	1	356,90	1	299,40
Listrik, Gas dan Air	(35-2020) Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin			1	0,00
	Total			1	0,00
Konstruksi	(42-2020) Konstruksi Bangunan Sipil	1	1.600,00	6	608,50
	(43-2020) Konstruksi Khusus			2	554,00
	Total	1	1.600,00	8	1.162,50
Perdagangan dan Reparasi	(46-2020) Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	13	3.134,50	17	633,00
	(47-2020) Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor	18	1.617,00	10	344,50
	(45-2020) Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	14	4.153,40	16	339,90
	Total	45	8.904,90	43	1.317,40
Hotel dan Restoran	(56-2020) Penyediaan Makanan dan Minuman	3	700,10	6	2.886,90
	Total	3	700,10	6	2.886,90
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	(52-2020) Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan	1	0,00	5	2.092,00
	(61-2020) Telekomunikasi			1	0,00
	(49-2020) Angkutan Darat dan Angkutan melalui Saluran Pipa			1	0,00
	Total	1	0,00	7	2.092,00
Jasa Lainnya	(85-2020) Pendidikan				
	(86-2020) Aktivitas Kesehatan Manusia	2	36,70	4	409,10
	(70-2020) Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen	1	167,40	1	5,90
	(74-2020) Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya			1	5,00
	(78-2020) Aktivitas Ketenagakerjaan			1	5,00
	(93-2020) Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya			1	1.836,80
	(59-2020) Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik			3	0,00
	Total	3	204,10	11	2.261,80
Total		83	274.251,20	108	253.461,70

Sumber: BKPM NSWI

Berdasarkan data yang diperoleh dari NSWI, investasi PMDN

mengalami penurunan dari Rp 274.251,20 juta pada tahun 2022 menjadi Rp 253.461,70 juta pada tahun 2023, namun jumlah proyek meningkat dari 83 proyek menjadi 108 proyek. Pada tahun 2023 investasi terbesar pada Sektor Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan, dan kegiatan YBDI sebesar Rp 155.902,90 juta dengan jumlah proyek sebanyak 21 proyek, kemudian Sektor Industri Makanan sebesar Rp 87.538,80 juta dengan jumlah proyek sebanyak 10 proyek.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Konsep pusat pertumbuhan ekonomi tidak lagi dipahami secara dikotomis, melainkan sebagai sistem terintegrasi yang saling mendukung dan memberdayakan. Wilayah perkotaan bukan sekadar sebagai konsentrasi infrastruktur dan aktivitas ekonomi, melainkan sebagai simpul transformasi yang mampu mendorong akselerasi pembangunan wilayah sekitarnya. Pendekatan ini mensyaratkan strategi pengembangan yang holistik yang menempatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai modal utama penciptaan nilai ekonomi berkelanjutan. Wilayah perkotaan berperan sebagai katalis transformasi ekonomi, menciptakan ekosistem inovasi, menyediakan akses pasar, dan mengembangkan infrastruktur pendukung, sementara wilayah pedesaan menjadi sumber daya strategis dengan potensi produksi, keragaman komoditas, dan modal sosial budaya.

A. Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat ketersediaan, kapasitas, dan kualitas dari berbagai fasilitas fisik yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial suatu wilayah. Indeks ini mengkombinasikan data dari berbagai sektor utama seperti transportasi (jalan, tol, rel, bandara, pelabuhan), energi (kelistrikan, jaringan gas), telekomunikasi (jaringan broadband, tower sinyal), air bersih, dan sanitasi. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran objektif dan terukur tentang kelengkapan infrastruktur yang dimiliki, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membandingkan pencapaian antarwilayah atau memantau

perkembangan dari waktu ke waktu.

B. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

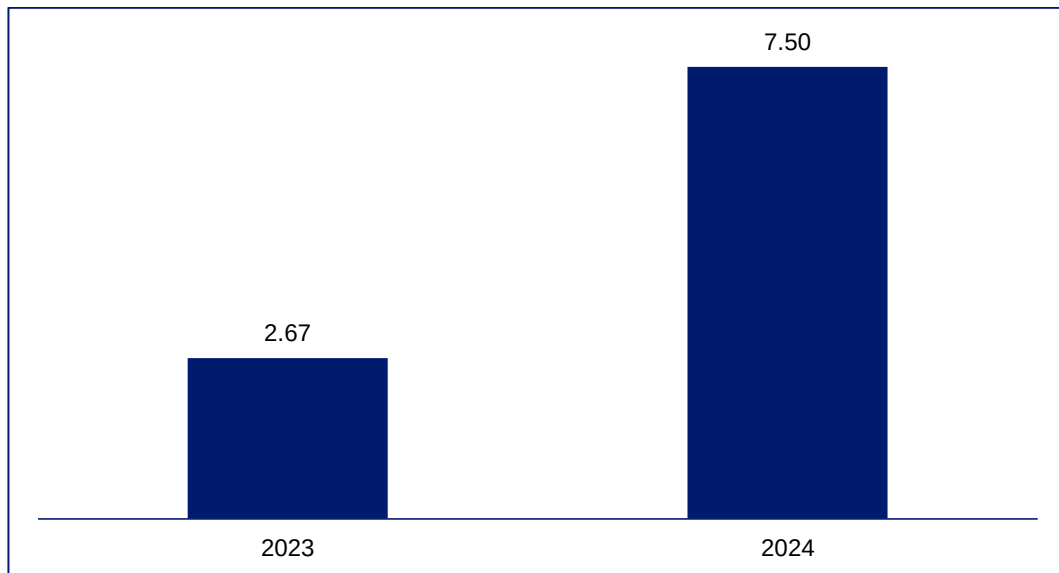
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah suatu ukuran kualitatif yang menilai persepsi dan tingkat kepuasan pengguna (masyarakat atau pelaku usaha) terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh suatu infrastruktur. Indeks ini bersifat subjektif dan berfokus pada pengalaman langsung dari masyarakat.

C. Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau

Akses terhadap hunian layak dan terjangkau merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya peningkatan kualitas hidup rumah tangga. Hunian yang layak tidak hanya memberikan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan sosial ekonomi penghuninya. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau dijelaskan bahwa rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

D. Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah konsep pemberdayaan wilayah pedesaan yang mengintegrasikan potensi lokal, sumber daya manusia, dan lingkungan untuk mencapai kemandirian ekonomi, sosial, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, desa tidak lagi dipandang sebagai wilayah tertinggal, melainkan sebagai pusat pengembangan inovasi dan produktivitas berbasis kearifan lokal. Konsep desa mandiri mencakup pengembangan ekonomi produktif melalui pemberdayaan UMKM, optimalisasi potensi pertanian dan sumber daya alam, penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan, dan pengembangan infrastruktur sosial-ekonomi.



Gambar 2.30 Persentase Desa Mandiri (%)

Sumber: Kemendes

Persentase Desa Mandiri meningkat sejak tahun 2023 hingga tahun 2024 mencapai 7,50 persen atau sebanyak 18 desa berstatus mandiri di Kabupaten Labuhanbatu. Desa mandiri harus ditingkatkan melalui pemanfaatan dana desa dan pengelolaan yang optimal untuk membangun dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada setiap desa.

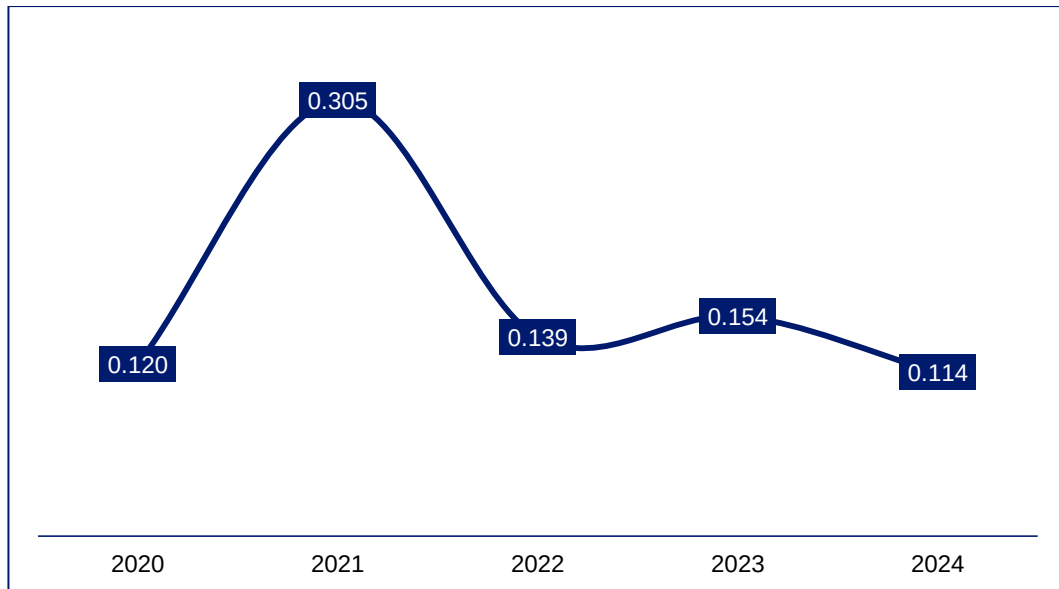
2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas Ekonomi Makro adalah kondisi fundamental perekonomian yang ditandai dengan keseimbangan berbagai indikator makro ekonomi untuk menjamin pertumbuhan berkelanjutan, meminimalkan gejolak, dan menciptakan lingkungan kondusif bagi investasi dan pembangunan

A. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator fundamental yang menggambarkan kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan daerah dalam menghimpun potensi pendapatan asli daerah. Indikator ini bukan sekadar ukuran penerimaan pajak, melainkan refleksi kompleks dari dinamika ekonomi, kapasitas administrasi perpajakan, dan efektivitas kebijakan fiskal daerah. Konstruksi rasio pajak mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah, kualitas koordinasi antar-stakeholder perpajakan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan

potensi ekonomi lokal menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan.



Gambar 2.31 Rasio Pajak terhadap PDRB (%)

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Diolah, 2024)

Rasio Pajak terhadap PDRB masih sangat kecil selama 5 tahun terakhir berada pada angka di jauh di bawah 1 persen. Hal ini menandakan bahwa pajak yang diterima oleh daerah berkontribusi sangat kecil bagi perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu meningkatkan penerimaan pajaknya melalui optimalisasi dan penggalian potensi pajak daerah.

B. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah fenomena ekonomi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam periode tertentu, yang menyebabkan penurunan daya beli uang. Secara sederhana, dengan jumlah uang yang sama, masyarakat akan mendapatkan lebih sedikit barang/jasa dibanding sebelumnya.

Tabel 2.22 Inflasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2023	IHK November 2024	IHK Desember 2024	Inflasi m to m	Inflasi y to y
Makanan, Minuman, dan Tembakau	104,56	108,31	110,75	2,25	5,92
Pakaian dan Alas Kaki	111,31	110,01	114,02	3,65	2,43
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	103,12	101,83	101,86	0,03	-1,22
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	106,45	106,8	107,1	0,28	0,61
Kesehatan	109,36	112,24	112,24	~0	2,63
Transportasi	113,76	114,16	114,25	0,08	0,43
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	101,92	101,74	101,74	~0	-0,18
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	110,43	113,44	113,18	-0,23	2,49
Pendidikan	100,54	100,54	100,54	~0	~0
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	109,84	111,92	111,98	0,05	1,95
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	119,11	126,72	126,52	-0,16	6,22
Umum (Headline)	106,85	109,03	110,44	1,29	3,36

Sumber: BPS

Inflasi di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 sebesar 3,36 persen, di mana inflasi terbesar berasal dari Kelompok Pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 6,22 persen dan Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 5,92 persen. Pemerintah daerah perlu memperhatikan hal tersebut mengingat cukup tingginya angka inflasi yang berada di atas 2 persen. Pemerintah perlu menjaga kestabilan harga barang-barang kebutuhan pokok dengan memastikan ketersediaan barang yang cukup dan distribusi yang merata ke seluruh wilayah.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Aspek-aspek ini menjadi tolok ukur kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik.

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif merupakan fondasi fundamental dalam mewujudkan sistem administrasi negara yang modern, transparan, dan responsif terhadap dinamika perubahan. Konsep ini tidak sekadar membangun mekanisme birokrasi yang efisien, melainkan mentransformasi paradigma tata kelola pemerintahan menjadi ekosistem kelembagaan yang mampu menghasilkan kebijakan berkualitas, berorientasi pada kepentingan publik, dan senantiasa berkomitmen pada prinsip-prinsip integritas. Pendekatan komprehensif ini mensyaratkan pembangunan sistem yang terintegrasi, di mana setiap komponen birokrasi difungsikan sebagai instrumen pelayanan publik yang akuntabel, berkinerja tinggi, dan memiliki kemampuan adaptasi terhadap kompleksitas tantangan pembangunan.

Tabel 2.23 Capaian Indikator Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	N/A	C	C	CC	B
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Poin)	N/A	2,10	1,85	2,94	2,94
Indeks Pelayanan Publik (Poin)	2,51	2,89	3,20	3,29	3,88
Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Integritas Nasional (Poin)	N/A	60,18	70,98	74,32	65,47

Sumber: KemenPAN-RB, *jaga.id*

Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan dari C menjadi B selama tahun 2021-2024. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu semakin baik dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengalami peningkatan dari 2,10 poin pada tahun 2021 menjadi 2,94 poin pada tahun 2024. Hal ini

mengindikasikan bahwa penerapan digitalisasi pada sistem pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu semakin baik. Namun, masih diperlukan peningkatan kualitas aplikasi dan situs pemerintah sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan pemerintah dengan baik. Indeks Pelayanan Publik meningkat dari 2,51 poin pada tahun 2020 menjadi 3,88 poin pada tahun 2024. Indeks Pelayanan Publik adalah ukuran terhadap pelayanan yang diberikan pemerintahan untuk publik. Hal ini menandakan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin baik. Indeks Integritas Nasional meningkat dari 60,18 dengan status “Rentan” pada tahun 2021 menjadi 74,32 dengan status “Waspada”, namun pada tahun 2024 menurun menjadi 65,47 poin dengan status “Rentan” kembali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya persepsi masyarakat secara keseluruhan terhadap integritas pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan sistem pemerintahannya menjadi lebih transparan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat tanpa. Peningkatan sistem digital, transparansi anggaran, dan peningkatan profesionalitas ASN dalam memberikan pelayanan kepada publik menjadi faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan yang bermartabat, berkeadaban, dan berkeadilan. Konstruksi ini melampaui pendekatan prosedural konvensional, menciptakan ekosistem hukum dan demokrasi yang secara substantif mampu menjamin perlindungan hak-hak fundamental warga negara, menegakkan supremasi hukum, dan membangun mekanisme keamanan yang komprehensif. Pendekatan holistik ini mensyaratkan transformasi sistemik dalam berbagai dimensi, mulai dari reformasi kelembagaan, penguatan sistem peradilan, hingga pembangunan kesadaran hukum dan demokratis yang bermakna. Hukum tidak lagi dipahami sekadar sebagai instrumen regulasi, melainkan

sebagai instrumen keadilan sosial yang mampu menjembatani berbagai kepentingan dan meresolusi konflik secara konstruktif.

Tabel 2.24 Capaian Indikator Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Capaian Aksi HAM (%)	N/A	N/A	47,33	80,97	N/A
Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Rasa Aman (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: SatpolPP

Persentase penegakan Perda di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 100,00 persen, hal ini menandakan bahwa aparaturnya penegak hukum di Kabupaten Labuhanbatu terus bekerja maksimal dalam menjaga keamanan dan kenyamanan publik. Persentase Capaian Aksi HAM meningkat dari 47,33 persen pada tahun 2022 menjadi 80,97 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat keberhasilan dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau program yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan HAM.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gantar kawasan merupakan konstruksi strategis komprehensif yang melampaui pendekatan konvensional keamanan nasional, mencerminkan kemampuan fundamental suatu negara untuk membangun sistem pertahanan dinamis dan diplomasi proaktif dalam lanskap geopolitik global yang semakin kompleks dan tidak pasti. Konsep ini tidak sekadar fokus pada kapasitas militer, melainkan mengintegrasikan secara sistematis instrumen diplomatik, pertahanan, ekonomi, teknologi, dan soft power dalam kerangka penciptaan stabilitas kawasan yang berkelanjutan.

A. Indeks Daya Saing Daerah

Daya saing daerah dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi, dan sumber daya manusia. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Perhitungan IDSD didasarkan pada empat komponen, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Pada tahun 2023 perhitungan terjadi perubahan perhitungan IDSD untuk kabupaten/kota. Hasil evaluasi IDSD Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

Tabel 2.25 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Aspek	Pilar	2023	2024
Lingkungan Pendukung	Institusi	3,78	4,22
Lingkungan Pendukung	Infrastruktur	2,26	3,49
Lingkungan Pendukung	Adopsi TIK	4,46	4,68
Lingkungan Pendukung	Stabilitas Ekonomi Makro	2,81	3,68
SDM	Kesehatan	3,87	3,82
SDM	Keterampilan	3,52	3,82
Pasar	Pasar Produk	2,04	2,42
Pasar	Pasar Tenaga Kerja	2,91	2,79
Pasar	Sistem Keuangan	1,03	2,23
Pasar	Ukuran Pasar	4,52	4,54
Ekosistem Inovasi	Dinamisme Bisnis	2,99	3,75
Ekosistem Inovasi	Kapabilitas Inovasi	1,84	1,74
IDSD		3,00	3,43

Sumber: BRIN

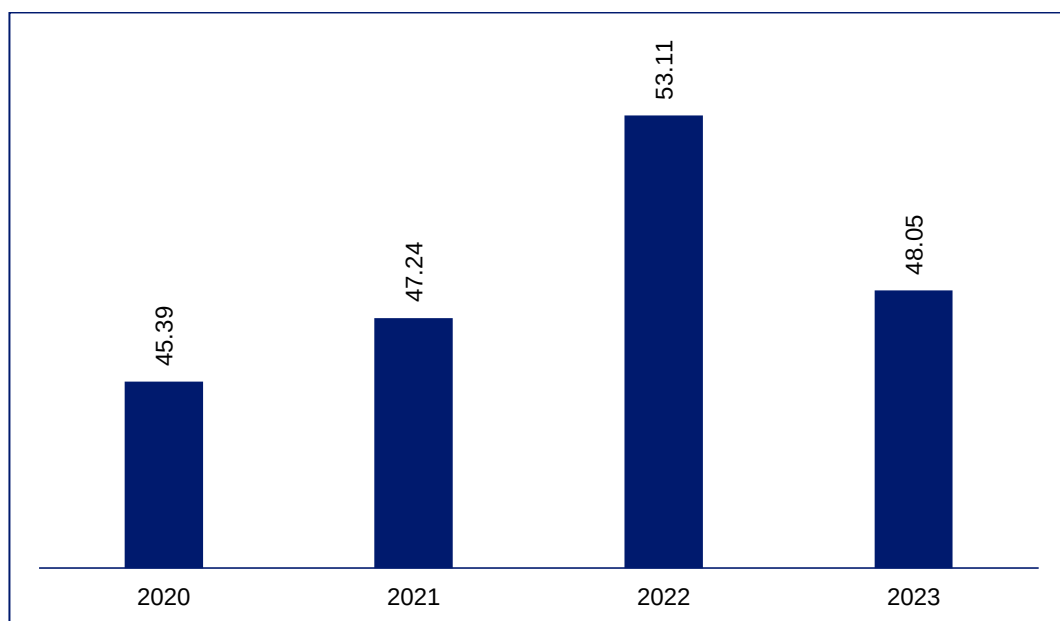
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pilar yang memiliki nilai tertinggi pada IDSD Kabupaten Labuhanbatu adalah Ukuran Pasar sebesar 4,54 poin. Ukuran Pasar berdampak pada produktivitas sehingga ketika semakin besar ukuran pasar maka semakin tinggi peluang pelaku bisnis dalam mengeksplorasi skala ekonomi. Ukuran pasar menguatkan struktur industri sehingga meningkatkan nilai tambah. Capaian yang tinggi ini mengindikasikan bahwa skala ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu sangat baik dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya. Kemudian, Adopsi TIK sebesar 4,68 poin. Adopsi TIK mengukur tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada Kabupaten Labuhanbatu. Angka yang tinggi mengindikasikan bahwa infrastruktur

jaringan telekomunikasi serta pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Labuhanbatu sudah sangat baik dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Namun, yang menjadi permasalahan dalam Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah Kapabilitas Inovasi dengan nilai sebesar 1,74 poin. Pilar Kapabilitas Inovasi mencerminkan kualitas dan kuantitas riset dan inovasi daerah. Capaian rendah ini menunjukkan bahwa masih kluangnya inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu mendorong minat masyarakat untuk melakukan inovasi melalui dukungan berupa pendanaan dan fasilitas untuk riset dan inovasi.

B. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan tingkat atau risiko penduduk terkena tindak kriminal atau kejahatan. Angka kriminalitas diukur dari jumlah kejahatan yang terjadi dalam setahun per 10.000 penduduk. Angka kriminalitas menunjukkan berapa banyak penduduk yang terkena tindak kriminal dalam satu tahun dari 10.000 penduduk. Perkembangan angka kriminalitas pada Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.32Angka Kriminalitas Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: BPS (diolah, 2024)

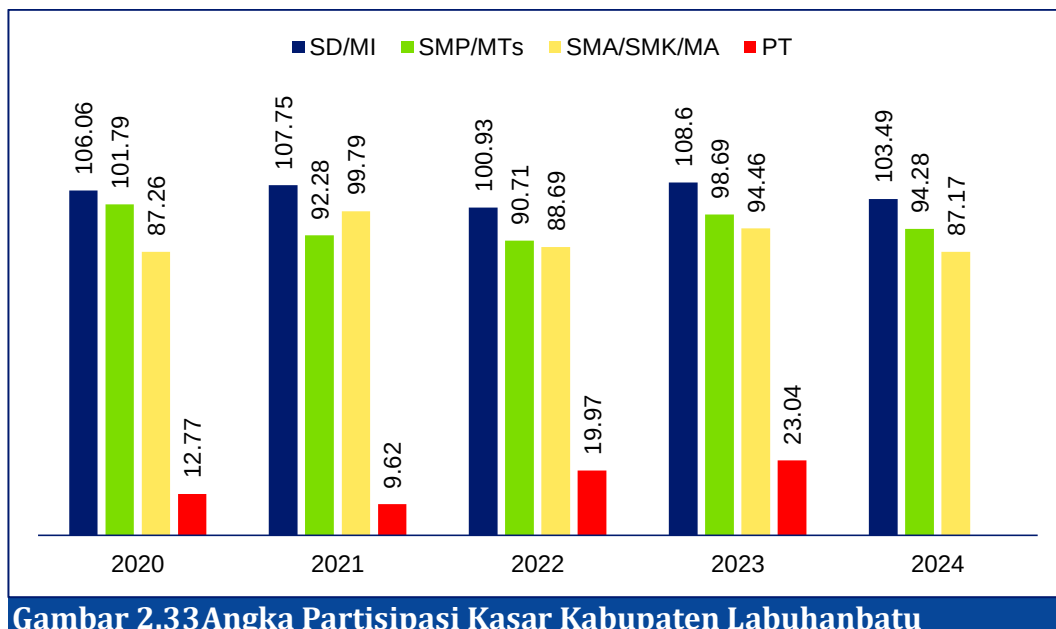
Berdasarkan data tersebut, angka kriminalitas Kabupaten Labuhanbatu cenderung meningkat dari 45,39 per 10.000 penduduk pada tahun 20250 menjadi 48,05 per 10.000 penduduk pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 48 orang dari 10.000 penduduk yang berpotensi mengalami tindak pidana. Tingkat kriminalitas di Kabupaten Labuhanbatu yang semakin meningkat dapat mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi.

2.4.4 Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan wajib dasar merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan sistem pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan sosial. Konstruksi layanan ini mencerminkan komitmen negara untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat dalam aspek fundamental kehidupan, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan pelayanan administratif publik. Pendekatan komprehensif ini tidak sekadar membangun mekanisme pelayanan administratif, melainkan mentransformasi sistem layanan menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, pengurangan kesenjangan sosial, dan akselerasi pembangunan berkelanjutan. Filosofi dasar layanan urusan wajib adalah menjamin setiap masyarakat memperoleh akses layanan berkualitas tanpa diskriminasi, menciptakan ruang kesetaraan dalam memperoleh hak-hak dasar.

A. Pendidikan

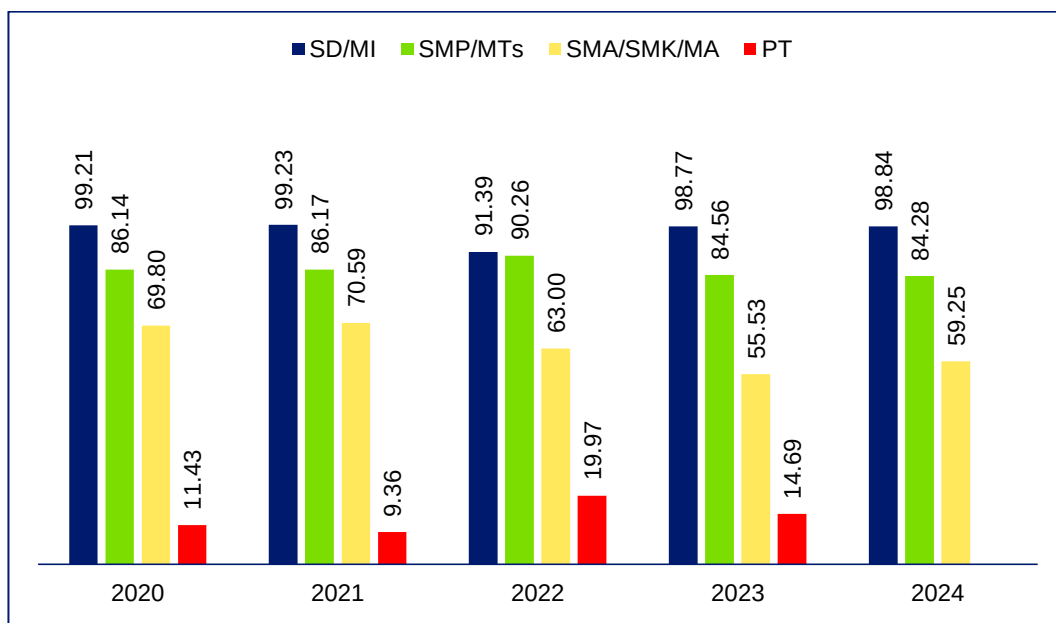
Pendidikan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Pembangunan dari segi pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti sekolah, tenaga pendidik, teknologi, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan wawasan, serta keahlian sehingga dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan industri di masa depan.



Gambar 2.33Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: BPS

Berdasarkan gambar tersebut, dalam jangka waktu 2020-2024, Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan SD/MI menurun dari 106,06 persen menjadi 103,49 persen. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami peningkatan dari 101,79 persen menjadi 94,28 persen. Pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA menurun dari 87,26 persen menjadi 87,17 persen. Namun, pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi mengalami peningkatan dari 12,77 persen menjadi 23,04 persen pada tahun 2023.



Gambar 2.34Angka Partisipasi Murni Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: BPS

Angka Partisipasi Murni untuk seluruh jenjang pendidikan mengalami penurunan selama tahun 2020-2024. Pada jenjang pendidikan SD/MI, APM menurun dari 99,21 persen menjadi 98,84 persen. Begitu juga dengan pendidikan SMP/MTs yang menurun dari 86,14 persen menjadi 84,28 persen. Pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA juga menurun dari 69,80 persen menjadi 59,25 persen. Sementara pada jenjang Perguruan Tinggi meningkat dari 11,43 persen menjadi 14,69 persen pada tahun 2023. Capaian kinerja urusan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.26 Capaian Kinerja Pendidikan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	12,27	14,12	11,12	10,49	11,48
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	63,13	69,42	64,28	63,54	N/A

Sumber: BPS (diolah, 2024), Dinas Pendidikan, & Dinas Tenaga Kerja

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi sedikit menurun dari 12,27 persen pada tahun 2020 menjadi 11,48 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya masyarakat berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini disebabkan oleh masih adanya masyarakat yang kurang berminat untuk menempuh pendidikan tinggi setelah SMA dan menjadi tenaga kerja. Selain itu, terdapat beberapa masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi di Kabupaten Labuhanbatu mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dari tahun 2020 sebesar 63,13 persen menjadi sebesar 63,54 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang sedang bekerja tidak sesuai dengan bidang keahlian.

B. Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek penting dalam menciptakan SDM yang

berkualitas. Dengan adanya masyarakat yang sehat, maka daya pikir masyarakat juga semakin baik sehingga mampu mendorong produktivitas daerah. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan, serta tenaga kesehatan yang profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Jumlah Rumah Sakit Tahun 2020-2024 di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27 Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Labuhanbatu					
Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Bilah Hulu	2	-	-	-	-
Pangkatan	-	-	-	-	-
Bilah Barat	-	-	-	-	-
Bilah Hilir	-	-	-	-	-
Penai Hulu	1	-	-	-	-
Penai Tengah	-	-	-	-	-
Penai Hilir	-	-	-	-	-
Rantau Selatan	2	2	2	2	2
Rantau Utara	4	3	4	4	3
Labuhanbatu	9	5	6	6	5

Sumber: BPS

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Labuhanbatu mengalami penurunan dari tahun 2020 berjumlah 9 Rumah Sakit menjadi 5 Rumah Sakit pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan terdapatnya rumah sakit yang sudah tutup atau tidak aktif hingga tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu memperhatikan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa infrastruktur pendukung, serta sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali.

Jumlah Dokter Tahun 2020-2024 di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28 Jumlah Dokter di Kabupaten Labuhanbatu

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Bilah Hulu	18	14	16	17	21
Pangkatan	8	7	7	7	3
Bilah Barat	20	29	17	17	17
Bilah Hilir	7	6	6	5	12
Penai Hulu	4	4	2	2	4
Penai Tengah	3	3	3	2	7
Penai Hilir	5	3	3	3	7
Rantau Selatan	133	117	109	74	44
Rantau Utara	83	47	54	52	33
Labuhanbatu	281	230	217	179	148

Sumber: BPS

Jumlah dokter di Kabupaten Labuhanbatu mengalami penurunan dari tahun 2020 sebanyak 281 Dokter menjadi 148 Dokter di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkurangnya jumlah dokter yang berada di Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap wilayah memiliki jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang mencukupi kebutuhan sesuai dengan standar yang berlaku.

Capaian kinerja kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29 Capaian Kinerja Kesehatan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	34,85	110,69	91,44	56,49	N/A
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	42,39	37,06	37,37	44,22	N/A
Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	97,13	86,32	90,60	89,40	N/A

Sumber: Dinas Kesehatan dan BPJS

Angka Kematian Ibu menurun dari 34,85 per 100.000 KH pada tahun 2020 menjadi 56,49 per 100.000 KH pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya pelayanan kesehatan ibu sehingga perlu didukung oleh ketersediaan peralatan kesehatan dalam membantu persalinan ibu melahirkan. Kemudian, prevalensi stunting di Kabupaten Labuhanbatu juga menurun dari 27 persen pada tahun 2021 menjadi 20,20 persen pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa terlaksananya program pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi balita dan kesadaran orang

tua untuk memberikan gizi yang baik kepada anaknya. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) meningkat dari 42,39 persen pada tahun 2020 menjadi 44,22 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya penanganan kasus TBC. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk menyediakan dan mengatasi permasalahan TBC, selain itu berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) menurun dari 97,13 persen pada tahun 2020 menjadi 89,40 persen pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa pengobatan medis yang dilakukan untuk mengatasi TBC semakin kurang efektif dalam mengobati pasien TBC. Maka dari itu, perlu upaya untuk menyediakan peralatan dokter dan penyediaan obat yang ampuh untuk mengobati masyarakat yang terdampak kasus TBC.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi berbagai kegiatan terkait infrastruktur dan pengaturan tata kota. Di dalamnya termasuk pembangunan jalan, jembatan, transportasi umum, sistem drainase, pengelolaan air, dan penataan ruang perkotaan serta pedesaan. Pekerjaan umum mencakup pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, seperti jalan raya, jembatan, dan saluran air. Sementara itu, penataan ruang berkaitan dengan perencanaan tata kota yang mencakup zonasi, penggunaan lahan, regulasi bangunan, dan pengembangan wilayah.

Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jalan dalam Kondisi Baik (%)	42,26	45,00	42,34	54,16	49,54
Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	N/A	N/A	N/A	13,25	N/A
Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak (%)	90,37	94,34	93,68	91,88	N/A
Akses Rumah Tangga terhadap Sanitas Layak (%)	79,06	81,50	80,36	84,79	88,70

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki beberapa indikator

meliputi persentase jalan dalam kondisi baik, persentase saluran irigasi dalam kondisi baik, konsumsi listrik per kapita serta kapasitas air baku. Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Labuhanbatu cenderung meningkat dari tahun 2020 sebesar 42,26 persen menjadi 54,16 persen pada tahun 2023, namun menurun pada tahun 2024 menjadi 49,54 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perawatan dan perbaikan jalan telah terimplementasi dengan baik sehingga meningkatkan panjang jalan dengan kondisi baik, namun penurunan rasio jalan dalam kondisi baik di tahun 2024 perlu menjadi perhatian pemerintah agar terus melakukan perbaikan dan perawatan jalan secara berkelanjutan. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 13,25 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perbaikan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu agar air terdistribusi dengan baik untuk aktivitas pertanian di Kabupaten Labuhanbatu.

Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Layak mengalami peningkatan dari 90,37 persen pada tahun 2020 menjadi 94,34 persen pada tahun 2021, lalu menurun hingga tahun 2023 menjadi 91,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen rumah tangga memiliki akses air minum layak di Kabupaten Labuhanbatu. Namun, yang menjadi perhatian adalah sisa rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum layak. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu mengidentifikasi rumah tangga mana yang belum memperoleh akses tersebut serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahannya. Sementara, Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Sanitasi Layak mengalami peningkatan dari 79,06 persen pada tahun 2020 menjadi 88,70 persen pada tahun 2024. Pemerintah perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi layak melalui pembangunan sanitasi kepada seluruh rumah tangga yang belum memperoleh akses.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melibatkan upaya pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan bagi seluruh lapisan

masyarakat. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah aspek penting dalam perkembangan dan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Aspek ini meliputi berbagai hal terkait dengan tempat tinggal, penyediaan perumahan yang terjangkau, aman, dan nyaman, serta pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Layak Huni (%)	66,20	70,78	66,45	69,71	N/A
Persentase Luas Kawasan Kumuh (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah Layak Huni adalah tempat tinggal yang memenuhi standar kebutuhan dasar manusia, melampaui sekadar konstruksi fisik dan mencakup dimensi kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan martabat penghuninya. Bukan sekadar bangunan, rumah layak huni merepresentasikan ruang hidup yang memberikan perlindungan, kesehatan, dan pengembangan potensi individu serta keluarga. Kriteria utamanya meliputi struktur bangunan yang kuat dan tahan bencana, memiliki akses air bersih dan sanitasi yang memadai, ventilasi udara yang sehat, pencahayaan alami yang cukup, serta luas ruang yang proporsional untuk setiap penghuninya. Secara sosial, rumah layak huni juga harus memberikan privasi, akses ke fasilitas umum, dan berada di lingkungan yang aman dari bencana, serta dekat dengan sarana pendidikan dan kesehatan. Persentase Rumah Layak Huni berfluktuasi dari 66,20 persen pada tahun 2020 menjadi 69,71 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya tempat tinggal yang belum layak untuk ditinggali oleh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah perlu menguatkan program terkait rehabilitasi rumah tidak layak huni agar memberikan tempat tinggal yang layak kepada masyarakat sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat untuk bertempat tinggal.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan tanggung jawab penting pemerintah untuk memastikan

keamanan dan kenyamanan hidup bagi seluruh masyarakat.

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	75,00	77,00	79,00	80,00	N/A
Persentase Kasus Narkoba (%)	N/A	N/A	N/A	64,95	N/A
Persentase Ormas yang Dibina (%)	N/A	N/A	N/A	4,00	N/A

Sumber: Kesbangpol, Satpol PP

Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya merupakan ukuran yang menilai keamanan masyarakat ketika berjalan sendiri di area atau lingkungan tempat tinggalnya. Pada tahun 2023 sebanyak 80 persen penduduk merasa aman ketika berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Persentase kasus narkoba pada tahun 2023 sebesar 64,95 persen. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar kasus kriminad I Kabupaten Labuhanbatu terkait narkoba. Pemerintah harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui penguatan dan pengawasan terhadap jaringan sindikat narkoba agar menurunkan kasus narkoba di Kabupaten Labuhanbatu. Persentase Ormas yang dibina pada tahun 2023 sebesar 4,00 persen, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak Ormas yang belum mendapatkan pembinaan di Kabupaten Labuhanbatu. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM merupakan persentase yang mengukur ketercapaian program atau aksi yang berkaitan dengan HAM di Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahun 2022, persentase capaian pelaksanaan aksi HAM sebesar 47,33 persen meningkat pada tahun 2023 mencapai 80,97 persen.

F. Sosial

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terkhusus yang kurang mampu maka pemerintah menerapkan berbagai program perlindungan sosial. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat untuk merasakan seluruh pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Capaian kinerja perlindungan sosial sebagai berikut:

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Sosial

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kesejahteraan Sosial (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	N/A	N/A	N/A	0,003	N/A
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	N/A	36,33	38,66	40,08	N/A

Sumber: Dinas Tenaga Kerja & BPJS Ketenagakerjaan

Persentase disabilitas bekerja di sektor formal di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 sebesar 0,003 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya proporsi disabilitas yang bekerja pada sektor formal dari seluruh angkatan kerja yang tergolong disabilitas. PMKS yang memperoleh bantuan sosial meningkat dari 36,33 persen pada tahun 2021 menjadi 40,08 persen pada tahun 2023. Capaian ini masih menunjukkan bahwa masih banyaknya PMKS yang belum memperoleh bantuan sosial sehingga ke depannya pemerintah perlu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

2.4.5 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Layanan urusan wajib non dasar merupakan konstruksi sistemik pelayanan publik yang melampaui kebutuhan fundamental. Konsep ini mengintegrasikan instrumen pelayanan yang bersifat pengembangan dan pemberdayaan di luar layanan dasar esensial, mencakup aspek-aspek strategis yang mendorong akselerasi pembangunan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat, dan penciptaan ekosistem inovasi berkelanjutan.

A. Tenaga Kerja

Urusan tenaga kerja meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, perlindungan hak-hak pekerja, serta pengembangan sumber daya manusia.

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Lulusan Perguruan Tinggi (%)	12,27	14,12	11,12	10,49	11,48

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, BPS (diolah, 2024)

Rasio lulusan Perguruan Tinggi cenderung menurun dari 12,27 persen pada tahun 2020 menjadi 11,48 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menandakan bahwa semakin berkurangnya minat masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini juga dapat disebabkan oleh banyaknya masyarakat berpendidikan tinggi yang migrasi ke luar daerah.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan upaya untuk meningkatkan posisi, hak, dan kesejahteraan perempuan serta memberikan perlindungan kepada anak-anak dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Kedua isu ini sering dihubungkan karena perempuan dan anak-anak seringkali berada dalam posisi yang rentan dan dapat menjadi korban berbagai bentuk ketidaksetaraan dan kekerasan. Capaian indikator kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
TPAK Perempuan (%)	47,32	43,06	43,73	44,53	47,66
Indeks Perlindungan Khusus Anak (Poin)	N/A	68,85	69,68	76,70	N/A
Jumlah kasus KDRT (kasus)	15	3	3	27	N/A

Sumber: BPS & Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan cenderung meningkat dari 47,32 persen pada tahun 2020 menjadi 44,66 persen pada tahun 2024. TPAK Perempuan merupakan perbandingan antara penduduk perempuan yang bekerja dan menganggur/sedang mencari kerja dibandingkan seluruh penduduk perempuan usia produktif. Peningkatan ini

mengindikasikan bahwa semakin sedikitnya perempuan yang termasuk bukan angkatan kerja karena memilih mengurus rumah tangga atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai dan memantau tingkat perlindungan anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus. IPKA meningkat dari 68,85 poin pada tahun 2021 menjadi 76,70 poin pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi dan kebijakan terkait perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus semakin banyak dibentuk sehingga setiap anak rentan (disabilitas, terlantar, dan sebagainya) dapat terlindungi dari aktivitas perundungan, diskriminasi, dan sejenisnya. Jumlah kasus KDRT pada Kabupaten Labuhanbatu cenderung meningkat dari 15 kasus pada tahun 2020 menjadi 27 kasus pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kurang harmonisnya keluarga yang terdapat pada Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu mengupayakan untuk menurunkan kasus tersebut melalui pembinaan keluarga sebelum menikah atau pun edukasi parenting, serta menyediakan layanan khusus permasalahan rumah tangga agar setiap masyarakat lebih harmonis dalam berumah tangga.

C. Pangan

Urusan pangan melibatkan berbagai aspek penting yang berkaitan dengan produksi, distribusi, keamanan, dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Aspek ini meliputi beberapa bidang utama yang harus dikelola oleh pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik bagi seluruh masyarakat.

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Pangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	N/A	71,30	81,10	85,00	N/A
Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	84.292,74	72.104,00	59.458,56	62.093,22	N/A

Sumber: Dinas Pangan

Skor pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan di

Kabupaten Labuhanbatu. Skor PPH meningkat dari 71,30 poin pada tahun 2021 menjadi 85,00 poin pada tahun 2023. Peningkatan Skor PPH menandakan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat menjadi lebih beragam dan seimbang, artinya masyarakat semakin tidak bergantung pada satu jenis makanan saja. Ketersediaan pangan utama adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dan juga impor yang diterima di Kabupaten Labuhanbatu. Ketersediaan pangan utama cenderung menurun dari 84.292,74 ton pada tahun 2020 menjadi 62.093,22 ton pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkurangnya supply pangan utama di Kabupaten Labuhanbatu

D. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kerangka yang menyediakan sumber daya untuk kehidupan dan memberikan layanan ekosistem yang vital, seperti penyediaan oksigen, penyaringan air dan keanekaragaman hayati. Indikator yang menjadi fokus perhatian pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam mengelola urusan lingkungan hidup meliputi penanganan dan pengurangan sampah. Capaian kinerja urusan Lingkungan hidup tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	N/A	24,05	24,26	24,70	N/A
Indeks Kualitas Udara	N/A	76,85	82,98	83,94	N/A
Indeks Kualitas Air	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas tutupan lahan mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2021 sebesar 24,05 meningkat menjadi 24,70 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan sudah meningkat setiap tahunnya. Indeks Kualitas Udara meningkat dari 76,85 poin pada tahun 2021 menjadi 83,94 poin pada tahun 2023. Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai polusi udara. Hal ini menandakan bahwa semakin baiknya penanganan polusi udara di Kabupaten Labuhanbatu. Indeks Kualitas Air merupakan metode yang digunakan untuk

mengetahui karakteristik mutu yang dibutuhkan untuk pemanfaatan tertentu dari sumber-sumber air.

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyebaran penduduk di Kabupaten Labuhanbatu saat ini masih belum merata. Dari 9 Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, Pada tahun 2023, Jumlah penduduk Labuhanbatu sebanyak 513.826 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 201 jiwa per km².

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Rantau Utara yaitu 99.982 jiwa dengan kepadatan 889 jiwa per km² sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pangkatan sebanyak 39.285 dengan kepadatan penduduk 111 jiwa per km². Kecamatan Rantau Selatan merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan penduduk 1.212 jiwa per km² dan Kecamatan Panai Tengah merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 89 jiwa per km².

Capaian kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk yang memiliki KK	139.900	141.962	344.173	148.626	N/A
Jumlah penduduk yang memiliki akte perkawinan	4.745	12.153	101.191	102.654	N/A
Rasio penduduk memiliki KK	2,95	8,56	29,40	69,06	N/A
Jumlah penduduk yang memiliki Akte Kelahiran	165.885	173.527	145.721	173.020	N/A
Jumlah Penduduk	504.876	499.982	508.024	513.826	N/A
Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 Penduduk	32,86	34,71	28,68	33,60	N/A

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu

Jumlah penduduk yang memiliki KTP pada tahun 2023 mencapai 95,72 persen. Dari seluruh jumlah penduduk yang memiliki Kartu Keluarga di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023, tercatat jumlah penduduk yang memiliki akte perkawinan sebanyak 101.191 atau bertambah sebanyak 89.036 dari tahun 2023. Rasio penduduk memiliki KK meningkat dari 19,17 persen menjadi 69,06 persen selama tahun 2020-2023. Kepemilikan akte

kelahiran per 1000 penduduk adalah jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran/jumlah penduduk x 1.000 jiwa. Rasio kepemilikan akte kelahiran cenderung meningkat dari 31,71 per 1.000 jiwa menjadi 33,60 per 1.000 jiwa selama tahun 2020-2023.

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat dari pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat desa. Indikator yang dapat mencerminkan antara lain pengelolaan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Organisasi Tingkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa. Capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Desa Membangun	0,6524	0,6605	0,6748	0,6980	0,7072

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks desa membangun merupakan indikator yang mengukur pembangunan desa melalui tiga indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Indeks Desa Membangun Kabupaten Labuhanbatu meningkat setiap tahunnya dari 0,6524 poin pada tahun 2020 menjadi 0,7072 poin pada tahun 2024. Meskipun hingga tahun 2024 masih dalam kategori berkembang, capaian pada tahun 2024 sudah mendekati kategori maju. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya upaya pemerintah dalam meningkatkan status desanya. Persentase desa mandiri di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 sebesar 2,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya desa yang berstatus mandiri mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. Namun, Indeks Desa Membangun tidak lagi digunakan pada tahun 2025 dan digantikan dengan Indeks Desa.

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan instrumen fundamental dalam manajemen pembangunan demografis yang berkelanjutan. Pendekatan komprehensif ini tidak sekadar berfokus pada pengaturan kuantitas penduduk, melainkan menciptakan ekosistem pembangunan kualitas sumber daya manusia yang holistik.

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Total Fertility Rate (Rata-Rata Anak Per Wanita)	2,47	N/A	2,47	2,35	2,33
Rasio Akseptor KB (%)	81,99	83,87	45,42	55,62	64,53

Sumber: BPS (Diolah, 2025)

Total Fertility Rate mengalami penurunan dari 2,47 pada tahun 2020 menjadi 2,33 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk berjalan dengan baik. Sementara itu, rasio akseptor KB mengalami penurunan dari 81,99 persen pada tahun 2020 menjadi 64,53 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menandakan penurunan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan program KB. Meskipun demikian, jika dilihat berdasarkan jumlah pasangan usia subur, jumlahnya mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa adanya penurunan keinginan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan atau berumah tangga.

H. Perhubungan

Aspek pelayanan umum lainnya adalah bidang perhubungan. Kinerja pelayanan bidang perhubungan di Kabupaten Labuhanbatu antara lain peningkatan pengawasan jalan dan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Konektivitas (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase kepemilikan KIR (%)	100	100	100	100	N/A
Pemasangan rambu-rambu (%)	0	0	0	0	N/A

Sumber: Dinas Perhubungan

Persentase kepemilikan KIR di Kabupaten Labuhanbatu mengalami

peningkatan untuk segi kuantitasnya sehingga sudah semua memiliki KIR dari tahun 2020-2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah angkutan umum dinas perhubungan yang sudah lulus uji KIR. Pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Labuhanbatu masih belum dilakukan dari tahun 2020-2023. Hal ini menunjukkan belum adanya keseriusan dinas perhubungan untuk melakukan pemasangan rambu-rambu. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan / akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda.

I. Komunikasi dan Informatika

Bidang komunikasi dan informatika berperan penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan serta memberikan akses pelayanan terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu.

Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan layanan telekomunikasi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Cakupan layanan telekomunikasi merupakan persentase dari luas cakupan telekomunikasi terhadap luas wilayah. Indikator ini menggambarkan seberapa luas akses telekomunikasi dapat dirasakan oleh masyarakat Labuhanbatu.

J. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi menjadi bagian dari struktur ekonomi yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan warga terutama di kalangan masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah, dan prinsip kolaborasi menjadi landasan. Pentingnya peranan koperasi tecermin dalam dukungannya terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM atau sektor usaha informal merupakan bentuk ekonomi masyarakat yang mampu bertahan ketika sektor ekonomi formal tidak mampu memberikan lapangan

pekerjaan. Capaian kinerja koperasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	N/A	N/A	N/A	0,28	N/A
Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Koperasi Aktif (%)	32,45	35,35	35,35	32,87	N/A
Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Proporsi jumlah UKM non pertanian (%)	N/A	N/A	N/A	94,74	N/A

Sumber: Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian

Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB pada tahun 2023 sebesar 0,28 persen. Hal ini menandakan bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Labuhanbatu masih kecil. Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Labuhanbatu mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat dari tahun 2020 sebesar 32,45 persen menjadi 32,87 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya minat masyarakat terhadap koperasi di Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahun 2023 terdapat sebesar 94,74 persen UKM yang bergerak di bidang pertanian.

K. Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi adalah salah satu cara untuk mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Semakin mudah proses investasi, maka semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan dan semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Capaian kinerja urusan penanaman modal tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan investasi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah investor PMDN berskala nasional (Perusahaan)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah investor PMA berskala nasional (Perusahaan)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: BPS (diolah, 2024)

Jumlah investor PMDN berskala nasional merupakan investor dalam negeri yang memberikan investasi modal di Kabupaten Labuhanbatu. Jumlah investor PMA berskala nasional adalah investor asing yang memberikan investasi modalnya di Kabupaten Labuhanbatu.

L. Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga memiliki peran penting bagi pembangunan suatu wilayah. Pemuda berperan dalam pembangunan dan memberdayakan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu, sementara olahraga menjadi suatu daya tarik pariwisata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu.

Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	50	49	49	49	N/A
Persentase Wirausaha Muda (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

Persentase organisasi pemuda yang aktif adalah organisasi yang membutuhkan sarana prasarana untuk generasi muda sebagai cara mengaktualisasikan diri secara positif yang di sediakan oleh pemerintah.

Persentase wirausaha muda merupakan pemuda yang bekerja menjadi wirausaha di Kabupaten Labuhanbatu. Cakupan pelatih yang bersertifikasi merupakan pelatih cabang olahraga yang ada di Kabupaten Labuhanbatu memiliki sertifikasi.

M. Kebudayaan

Pemerintah harus hadir dalam upaya-upaya pembangunan di bidang kebudayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelestarian dan pengembangan kawasan cagar budaya, benda dan situs yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu. Capaian kinerja urusan 105 kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan merupakan peninggalan budaya berupa benda, situs ataupun kawasan yang harus dilestarikan untuk menjaga budaya di Kabupaten Labuhanbatu.

N. Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Dengan adanya perpustakaan menjadikan sebuah sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan. Perpustakaan menjadi suatu akses informasi bagi masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu. Capaian kinerja urusan Perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengunjung Perpustakaan (Orang)	6.799	3.062	4.316	19.850	N/A
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat (Orang)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip

Jumlah pengunjung perpustakaan di Labuhanbatu cenderung mengalami sedikit penurunan dari tahun 2020 sebanyak 6.799 jiwa, menurun hingga 3.062 jiwa pada tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 19.850 jiwa pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan masih kurangnya minat masyarakat mengunjungi perpustakaan. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat merupakan banyaknya pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat di Kabupaten Labuhanbatu.

O. Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan dalam bentuk fisik dan non fisik yang dibuat dan diterima oleh lembaga pemerintah. Tujuan kearsipan adalah untuk menyimpan sumber informasi dan sebagai alat pengawasan dalam perencanaan, perumusan kebijakan, pengembangan dan berbagai hal. Capaian Indikator Urusan Kearsipan sebagai berikut:

Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (%)	56,80	63,64	72,70	72,70	N/A

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2023.

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 56,80 persen menjadi sebesar 72,70 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Labuhanbatu semakin membaik. Namun ketersediaan SDM yang handal dan professional perlu ditingkatkan lagi.

2.4.6 Urusan Pilihan

Urusan pilihan tidak sekadar sebagai mekanisme administratif, melainkan sebagai filosofi pembangunan yang memberi ruang otonomi daerah untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayahnya. Pendekatan komprehensif ini mensyaratkan kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan sistematis terhadap potensi strategis wilayah, mengembangkan inovasi daerah, dan menciptakan pembangunan yang responsif terhadap karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan geografis spesifik lokalitasnya.

A. Pariwisata

Kabupaten Labuhanbatu memiliki destinasi wisata yang indah dan berpotensi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi bagi daerah. Pariwisata berkaitan erat dengan ketersediaan akomodasi (penginapan, perhotelan, dan sejenisnya) dan sektor makan minum (restoran, café dan sebagainya) karena sektor tersebut mendukung daya tarik pariwisata sehingga kontribusi sektor pariwisata dapat diukur menggunakan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Capaian kinerja urusan Pariwisata tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.49 Capaian Kinerja Pariwisata

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Orang)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: BPS & Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata

Tamu asing Hotel Berbintang adalah jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang Kabupaten Labuhanbatu. Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata. Persentase PAD sektor pariwisata merupakan persentase pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu yang diperoleh dari sektor pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terus berupaya untuk menggali potensi dan pengembangan wisata daerah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

B. Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor strategis dan potensial. Sektor ini tidak hanya mencakup kegiatan penangkapan ikan di laut, tetapi juga meliputi budidaya perikanan (akuakultur), pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, wisata bahari, serta jasa-jasa terkait kelautan.

Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Nelayan (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Proporsi PDRB Sub-Sektor Perikanan	0,55	0,51	0,49	0,48	N/A
Produksi Perikanan (ton)	4.443,55	1.611,47	6.772,44	9.316,05	9.634,57
Konsumsi Ikan/Kapita (kg/kapita)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu, & Dinas Kelautan dan Perikanan

Proporsi PDRB Subsektor perikanan pada tahun 2020 sebesar 0,55 persen menurun pada tahun 2023 menjadi 0,48 persen. Hal ini menandakan bahwa semakin menurunnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Labuhanbatu. Produksi ikan di Kabupaten Labuhanbatu cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 4.443,55 ton meningkat menjadi sebanyak 9.634,57 ton pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya produksi perikanan yang dihasilkan oleh nelayan di Kabupaten Labuhanbatu. Peningkatan produksi komoditas baik pertanian, mau pun perikanan harus dimanfaatkan dengan baik oleh Kabupaten Labuhanbatu karena komoditas tersebut merupakan sumber pangan masyarakat dan dapat diolah menjadi produk yang bernilai tambah untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

C. Pertanian

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah pondasi penting bagi ketahanan pangan dan ekonomi suatu wilayah karena menyediakan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer bagi kehidupan manusia. Sektor pertanian dan perkebunan tidak hanya menyediakan makanan dan bahan mentah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mendukung perekonomian pedesaan dan memelihara lingkungan alam. Selain potensi pertanian dan kehutanan di Kabupaten Labuhanbatu juga memiliki potensi di subsektor kelautan dan perikanan bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pendapatan, dan pemenuhan kebutuhan makanan masyarakat. Capaian kinerja urusan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Petani (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	24,43	25,86	26,99	27,96	29,48
Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Rp juta/kapita)	95,45	121,51	135,90	150,39	165,43
Produksi Padi (ton)	60.930	72.553	94.098	103.489	N/A
Produksi Beras (ton)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Konsumsi Beras/Kapita (kg/kapita)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: BPS (diolah, 2024 & Dinas Pertanian

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2020 sebesar 24,43 persen menjadi 29,48 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya potensi yang ada di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga dapat memberikan peningkatan kontribusi pada PDRB di Kabupaten Labuhanbatu setiap tahunnya. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2020 sebesar Rp 95,45 juta per kapita menjadi sebesar Rp 165,43 juta per kapita pada tahun 2024. Hal ini

menunjukkan bahwa secara garis besar output yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun ke tahun. Produksi padi di Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2020 sebanyak 60.930 ton meningkat menjadi sebanyak 103.488,70 ton pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya produksi padi didukung dengan peningkatan lahan di Kabupaten Labuhanbatu.

D. Perdagangan

Perdagangan adalah suatu aktivitas menghasilkan ekonomi yang berdaya saing berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan kapasitas pasar dan perdagangan dengan mengarahkan perhatian pada peningkatan kontribusi di sektor perdagangan. Perdagangan dalam hal ini diharapkan bukan hanya beraktivitas di ruang lingkup daerah atau daerah sekitar namun juga mencapai aktivitas ekspor ke luar negeri. Capaian kinerja urusan Perdagangan tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	N/A	N/A	N/A	75	N/A

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok pada tahun 2023 sebesar 75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 barang kebutuhan pokok relatif stabil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terus melakukan pengawasan terkait ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok di daerah. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan harga sehingga setiap masyarakat dapat membeli dan mengonsumsinya secara merata.

E. Perindustrian

Industri merupakan sektor ekonomi yang bergerak di bidang pengolahan barang dari bahan mentah menjadi barang jadi. Sektor ini berperan penting bagi kemajuan suatu daerah. Namun, untuk meningkatkan peran sektor industri pengolahan maka diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang mumpuni untuk mendukung pengembangan industri, serta tenaga kerja yang terampil di bidang pengolahan.

Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Jumlah IKM (%)	N/A	N/A	N/A	0,98	N/A

Sumber: BPS & Dinas Perdagangan dan perindustrian

Saat ini aktivitas perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu masih bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung serta ketersediaan tenaga kerja yang trampil menjadi hambatan bagi sektor industri pengolahan.

2.4.7 Penunjang Pemerintah

Urusan penunjang pemerintah adalah aspek-aspek atau fungsi-fungsi administratif dan operasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi-fungsi ini tidak langsung berhubungan dengan pelayanan publik yang bersifat esensial, tetapi sangat penting untuk memastikan bahwa semua proses dalam penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efisien dan efektif.

A. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah proses yang melibatkan perumusan rencana strategis untuk pengembangan suatu wilayah atau negara. Urusan ini meliputi identifikasi kebutuhan, menetapkan tujuan, mengalokasikan sumber daya, dan menentukan tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan pembangunan. Capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut:

Tabel 2.54 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda

Berdasarkan tabel tersebut, dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Kabupaten Labuhanbatu, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW sudah lengkap. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terus melakukan tanggungjawab dan tugasnya dalam hal perencanaan agar pelaksanaan pembangunan berjalan secara terstruktur sehingga mampu mempercepat pembangunan daerah yang inklusif.

B. Keuangan

Keuangan daerah merujuk kepada segala hal yang terkait dengan pengolahan keuangan di tingkat pemerintahan daerah yang mencakup pendapatan, pengeluaran, investasi dan perencanaan keuangan untuk pembiayaan berbagai program dan pelayanan publik di tingkat lokal. Capaian kinerja urusan Keuangan Daerah tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.55 Capaian Kinerja Urusan Keuangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
RoA BUMD (%)	N/A	-6,12	-3,05	N/A	N/A
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (Level)	N/A	WDP	WTP	WTP	N/A

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (diolah 2024)

RoA BUMD pada tahun 2021 hingga tahun 2022 bernilai negatif. Dalam hal ini, BUMD yang dimiliki oleh Kabupaten Labuhanbatu hanya satu badan usaha, yaitu Pudam Tirta Bina. Nilai RoA negatif tersebut mengindikasikan bahwa BUMD Kabupaten Labuhanbatu belum bisa menghasilkan keuntungan bersih hingga tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa kurang optimalnya pemanfaatan aset yang dimiliki oleh BUMD dalam

menghasilkan laba bersih. Opini BPK terhadap keuangan merupakan pendapat dari BPK tentang keuangan yang digunakan atas dasar pengeluaran Kabupaten Labuhanbatu. Hasil evaluasi sejak tahun 2022-2023 menunjukkan nilai WTP, hal ini harus dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

C. Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan

Kepegawaian merupakan aspek penting bagi penyelenggaraan pemerintah. Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan Sumber Daya Manusi yang berkualitas untuk dapat bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Capaian indikator Urusan Kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

Tabel 2.56 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal merupakan ASN yang melanjutkan ataupun mengikuti pelatihan formal. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural merupakan para pejabat ASN yang melanjutkan pendidikan ataupun mengikuti pelatihan struktural selama menjabat.

D. Pengawasan

Pengawasan adalah proses memantau, mengevaluasi, dan memastikan bahwa kegiatan atau operasi berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan peraturan yang telah ditetapkan. Capaian kinerja pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks MCP KPK (Poin)	N/A	N/A	N/A	74,56	N/A
Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Inspektorat

Indeks MCP KPK pada tahun 2023 mencapai 74,56 poin. MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Persentase tindak lanjut temuan merupakan hasil temuan yang dilakukan oleh pengawas yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Persentase pelanggaran pegawai merupakan persentase banyaknya pegawai yang melanggar norma ataupun aturan-aturan yang berlaku.

E. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah. Dalam hal ini sekretariat daerah berkaitan dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian kinerja Urusan Sekretariat Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.58 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi SAKIP (Poin)	N/A	CC	CC	CC	B

Sumber: Sekretariat Daerah

Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari CC pada tahun 2021 menjadi B pada tahun 2024. SAKIP adalah sistem integrasi dari proses perencanaan, penganggaran hingga pelaporan kinerja instansi pemerintah, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu semakin mampu menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat (outcome) bagi masyarakat.

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

Pemerintah daerah menyusun perencanaan dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus mencapai target-target pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya pemerintah dihadapkan kepada sumber daya yang terbatas sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien, termasuk aspek keuangan daerah. Keuangan daerah menjadi salah satu sumber daya yang sangat penting dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia, maka pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah berbasis otonomi daerah yang efektif dan efisien.

Prinsip otonomi daerah memberikan wewenang daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki keuangan untuk melakukan pengelolaan daerah secara efektif dan efisien dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Manajemen keuangan daerah meliputi pengelolaan terhadap pendapatan, belanja, pembiayaan serta kinerja keuangan daerah secara umum. Dalam hal mewujudkan manajemen keuangan daerah yang baik, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berupaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan menyeluruh terhadap kondisi keuangan daerah sehingga dapat merumuskan strategi yang tepat dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, menyusun rencana belanja yang lebih baik serta memanfaatkan pembiayaan daerah yang lebih tepat sasaran.

Keuangan daerah yang akan dibahas lebih lanjut pada bab ini merupakan segala bentuk hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dalam bentuk uang yang dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Manajemen keuangan daerah menjadi aspek yang sangat penting dalam rangka memastikan penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik. Prinsip pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan mengedepankan tata kelola

keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah agar kekayaan yang dimiliki daerah dapat digunakan dengan efektif dan efisien, serta untuk mendistribusikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambaran umum keuangan daerah memberikan analisis terhadap kondisi keuangan daerah. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran terkait dengan kapasitas kemampuan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan daerah. Analisis keuangan daerah dimulai dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja anggaran dan pendapatan daerah di masa lalu, melihat pola serta efektivitas belanja pemerintah. Selain itu analisis yang dilakukan juga memberikan gambaran pola pembiayaan yang dilakukan untuk mengelola defisit atau surplus anggaran yang terjadi di masa lalu.

Hasil evaluasi keuangan daerah dijadikan sebagai fundamental bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam mempersiapkan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) selama periode 2025 – 2029 mendatang. Perencanaan APBD dilakukan sebagai pedoman dalam mengevaluasi kapasitas daerah yang akan dipergunakan untuk melakukan perencanaan aktivitas belanja program-program pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan berbasis kepada output dan outcome dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu juga memberikan informasi pengelolaan keuangan di masa lalu secara terbuka pada bab keuangan daerah. Kondisi keuangan daerah di masa lalu akan disajikan secara ringkas agar pemerintah dan masyarakat dapat mengevaluasi dan memperoleh gambaran pengelolaan keuangan daerah yang lebih mudah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berupaya untuk memberikan gambaran kondisi keuangan

sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja keuangan di masa lalu. Prinsip transparan digunakan untuk memperoleh evaluasi dan masukan yang konstruktif dari masyarakat sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan ke depan. Selain itu, analisis dan gambaran keuangan yang di masa lalu akan membantu Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam mengambil keputusan yang tepat, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat. Gambaran keuangan daerah akan menguraikan capaian kinerja pelaksanaan keuangan daerah sekurang-kurangnya lima tahun sebelum dokumen perencanaan ini disusun.

Dalam upaya memahami kemampuan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu, sistematika pada bab ini akan dimulai dengan memberikan gambaran kinerja keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah yang akan digunakan sebagai dasar dalam membangun proyeksi APBD di masa yang akan datang. Sistematika dalam analisis gambaran keuangan Kabupaten Labuhanbatu dimulai dengan mengevaluasi kinerja keuangan masa lalu, menguraikan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan yang menggambarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah yang akan digunakan sebagai dasar pendanaan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2025 - 2029.

Dalam upaya memperoleh gambaran keuangan Kabupaten Labuhanbatu di masa lalu, maka perlu dievaluasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya lima tahun sebelum periode perencanaan ini dipersiapkan. Gambaran keuangan masa lalu akan membahas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2020 sampai dengan 2024. Evaluasi yang dilakukan akan memberikan gambaran dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu sehingga dapat diperoleh gambaran rata-rata pertumbuhan serta penyerapan APBD dalam penyelenggaraan pemerintahan pada periode 2020 - 2024. Gambaran kinerja

keuangan masa lalu akan menjadi salah satu fundamental yang digunakan pemerintah dalam menyusun proyeksi serta kemampuan keuangan daerah selama periode perencanaan RPJMD 2025 – 2029. Analisis kinerja keuangan masa lalu meliputi evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan APBD yang meliputi pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah.

Analisis keuangan di masa lalu akan memberikan informasi terkait efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Pemerintah daerah juga dapat memperoleh gambaran pola belanja dari tahun ke tahun, sehingga dapat mengevaluasi terkait penyerapan dan pengalokasian anggaran untuk mencapai target pembangunan daerah serta pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah perlu melakukan peninjauan terhadap pengelolaan anggaran ke area menjadi prioritas daerah ke depannya. Evaluasi belanja juga membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan penguatan anggaran untuk memberikan peningkatan atas kualitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Uraian berikut memberikan gambaran umum terkait dengan kinerja pelaksanaan APBD masa lalu Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang akan menjadi dasar untuk memproyeksikan kemampuan keuangan daerah selama periode RPJMD 2025 - 2029.

2.5.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengalokasikan sumber daya keuangan daerah yang terbatas secara tepat sasaran agar dapat mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Indikator utama yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja APBD adalah melalui realisasi anggaran yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan melalui APBD. Realisasi terhadap pendapatan daerah menjadi salah satu evaluasi strategis dimana pendapatan akan digunakan untuk membiayai belanja daerah selama tahun berjalan. Apabila daerah memperoleh kesulitan untuk mencapai realisasi pendapatan daerah, maka belanja daerah juga akan sulit untuk dicapai sesuai dengan

perencanaan yang dilakukan. Pendapatan daerah menjadi dasar yang sangat penting dalam pengalokasian sumber daya daerah yang tersedia dalam menjalankan program-program pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah dalam upaya memberikan gambaran atas keuangan daerah yang telah terlaksana. Kinerja pendapatan dievaluasi berdasarkan realisasi pendapatan yang dicapai dari perencanaan yang telah dilakukan. Analisis terhadap APBD dilakukan terhadap realisasi terhadap pendapatan daerah, penyerapan dan efisiensi belanja daerah serta aktivitas pembiayaan daerah yang telah dilakukan selama periode 2020 – 2024.

Analisis pendapatan daerah dilakukan dengan mengevaluasi hasil capaian dari realisasi pendapatan daerah sebagaimana rencana target pendapatan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis ini meliputi sumber-sumber pendapatan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kabupaten Labuhanbatu berupaya untuk mengidentifikasi potensi dan kendala dalam pengelolaan pendapatan daerah sekaligus memberikan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan menyampaikan kemampuan daerah dalam memperoleh dan menghasilkan pendapatan daerah untuk mendukung aktivitas belanja daerah demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan. Analisis ini juga berkaitan dengan tingkat kemandirian daerah dan ketergantungan daerah dalam pengelolaan daerah secara otonomi.

Dari sisi belanja daerah, realisasi atas belanja daerah mencerminkan penyerapan atas anggaran belanja pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang menunjukkan tingkatan perwujudan atas program-program pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan pada tahun berjalan. Penyerapan belanja yang baik akan memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi serta perwujudan standar pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. Analisis terhadap belanja akan memberikan pola melalui struktur pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja daerah, baik dalam

penganggaran maupun realisasinya. Gambaran belanja ini akan memberikan transparansi terkait dengan penggunaan anggaran Kabupaten Labuhanbatu selama menjalankan program pembangunan. Kondisi ini akan menjadi dasar dalam memproyeksikan rencana belanja daerah serta struktur belanja daerah berdasarkan kinerja masa lalu yang menjadi dasar belanja lima tahun ke depan.

Analisis APBD tahap selanjutnya dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pembiayaan daerah. Analisis pembiayaan daerah berupaya untuk menunjukkan bagaimana kondisi keuangan, seperti defisit ataupun surplus anggaran yang kemudian dapat ditutupi atau tidak melalui pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran. Analisis pembiayaan daerah memberikan peluang bagi daerah untuk bergerak secara agresif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Surplus pembiayaan daerah menunjukkan daya serap daerah untuk belanja daerah yang melebihi pendapatan daerah. Pembiayaan daerah juga menunjukkan kemampuan daerah dalam memperoleh pendanaan untuk menutupi defisit anggaran yang mungkin terjadi. Manajemen pembiayaan daerah dapat menjadi pengelolaan risiko dalam hal pengelolaan pendapatan dan belanja Kabupaten Labuhanbatu.

Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Labuhanbatu disusun dengan mengevaluasi kinerja keuangan daerah selama periode 2020 - 2024. Evaluasi APBD Kabupaten Labuhanbatu dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sistematis diuraikan berdasarkan analisis pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

2.5.2 Pendapatan Daerah

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimulai dengan mengevaluasi pendapatan daerah. Pendapatan daerah menjadi unsur utama dari APBD yang menentukan kapasitas keuangan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan program pembangunan berdasarkan kapasitas daerah dalam merealisasikan anggaran pendapatan daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah

sekaligus memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat. Analisis pendapatan daerah memberikan gambaran kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber-sumber keuangan yang dibutuhkan untuk membiayai program penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah melakukan evaluasi terhadap pendapatan daerah untuk memperoleh permasalahan serta upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah yang tidak memberikan beban besar kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri sesuai dengan peraturan pemerintah sekurang-kurangnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Analisis APBD melalui pendapatan daerah dilakukan dengan mengevaluasi perkembangan target dan realisasi pendapatan daerah di masa lalu. Selain itu evaluasi kinerja berdasarkan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengevaluasi struktur pendapatan daerah sehingga diperoleh gambaran tentang perkembangan pendapatan daerah, meliputi kemandirian daerah dalam menghasilkan pendapatan dan membiayai program-programnya serta ketergantungan daerah pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Hasil evaluasi terhadap kinerja pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020 – 2024 dalam hal target dan realisasi serta pertumbuhan pendapatan daerah dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.59 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Tahun	Target (Rp Miliar)	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi (Rp Miliar)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2020	1.315,98	-	1.177,76	-	89,50
2021	1.363,42	3,61	1.342,11	13,95	98,44
2022	1.328,21	-2,58	1.251,24	-6,77	94,21
2023	1.469,27	10,62	1.418,20	13,34	96,52

Tahun	Target (Rp Miliar)	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi (Rp Miliar)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2024	1.534,97	4,47	1.256.58	-11,40	81,86

Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2020-2024 menunjukkan kinerja capaian yang terus membaik dari waktu ke waktu. Pada tahun 2024 terjadi penurunan pencapaian kinerja yang belum optimal dengan tingkat capaian kinerja sebesar sebesar 81,86% dari tahun sebelumnya sebesar 96,52%. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada masa tersebut mengalami kesulitan dalam mencapai target pendapatan daerah. Sejak dilakukannya penyesuaian dalam perencanaan APBD, capaian kinerja pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 membaik dengan pencapaian di atas 94,00% setiap tahunnya. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang sempat mencapai titik 98,44% dari target pendapatan daerah kemudian terjadi penurunan pencapaian kinerja yang cukup signifikan pada tahun 2024 mencapai titik 81,86% dikarenakan belum optimalnya pengelolaan sumber pendapatan asli daerah. Rata-rata pencapaian kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2024 berada pada tingkat 92,11% per tahunnya. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat optimis mampu meningkatkan pendapatan daerah selama lima tahun ke depan agar semakin baik lagi.

Gambaran umum pendapatan daerah dari kemampuan daerah dalam menyusun penetapan target mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada awal periode evaluasi tahun 2023 menetapkan target pendapatan daerah, yaitu mencapai Rp 1,47 Triliun dengan pencapaian kinerja 96,52%. Pencapaian kinerja yang cukup tinggi sehingga Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu meningkatkan kembali Target pendapatan daerah pada tahun 2024 mencapai Rp 1,53 Triliun dengan pertumbuhan target pendapatan daerah mencapai 4,47% dari tahun sebelumnya, Namun realisasi pendapatan daerah belum optimal dan hanya memperoleh persentase capaian kinerja sebesar 81,86% menurun dari persentase capaian kinerja tahun 2023 yang semula sebesar 96,52%.

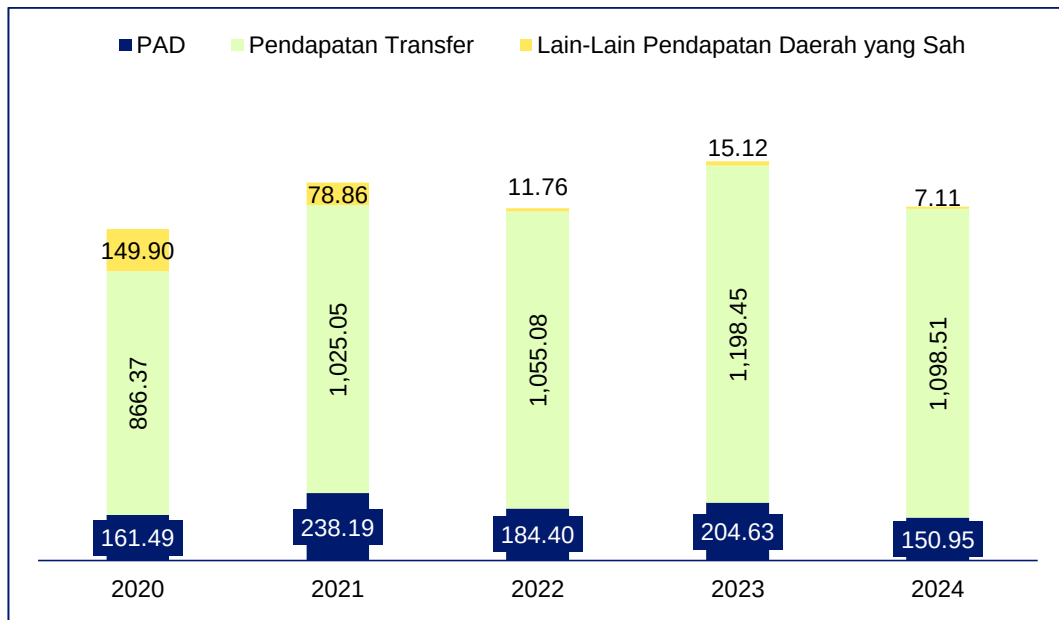
Realisasi pendapatan daerah juga memperoleh pergerakan yang relatif senada dengan pergerakan dari target pendapatan daerah selama periode 2020 sampai dengan tahun 2023. Namun pada tahun 2024 realisasi berada pada tingkat rendah sebesar Rp 1,26 Triliun yang sebelumnya pada tahun 2023 sebesar Rp 1,42 Triliun. Penurunan ini disebabkan oleh kurang optimalnya realisasi pendapatan dari retribusi dan pajak daerah serta ketidakpastian ekonomi yang tinggi pada masa tersebut. Meskipun demikian, pada tahun sebelumnya terjadi akselerasi pendapatan daerah yang meningkat sampai dengan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah sebesar 6,84% namun jika memperhitungkan tahun 2024 rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah menjadi 2,28%. Perbedaan yang signifikan terjadi karena adanya penurunan besar pada realisasi pendapatan daerah pada tahun 2024.

Evaluasi target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu periode 2020-2024 menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah sudah cukup baik namun di tahun terakhir mengalami kendala belum optimalnya realisasi pendapatan daerah yang belum sesuai dari target yang diharapkan terjadi peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya. Dalam upaya mendorong peningkatan dan pertumbuhan target serta realisasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, diperlukan inovasi yang lebih baik lagi dari pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terutama untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah dan kemandirian daerah. Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah ke depannya, melalui rancangan RPJMD periode 2025-2029 perlu memprioritaskan inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan aset daerah secara optimal.

Dalam upaya memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait dengan pendapatan daerah maka perlu dilakukan evaluasi untuk melihat struktur pendapata daerah di Kabupaten Labuhanbatu. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa struktur pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dengan

mengevaluasi struktur pendapatan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat mengevaluasi sumber-sumber pendapatan yang perlu dioptimalkan dalam menciptakan kemandirian daerah dan peningkatan realisasi pendapatan daerah. Pemerintah dapat mengevaluasi dan menyusun perencanaan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Realisasi pendapatan yang menurun diharapkan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat memberikan strategi dan inovasi untuk mendorong percepatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Gambaran umum terkait dengan pencapaian realisasi pendapatan di Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan kecenderungan bahwa pendapatan daerah cenderung mengalami fluktuasi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Namun pada tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga pemerintah berupaya menganalisis struktur pendapatan daerah dalam upaya mencari strategi untuk membangun upaya peningkatan realisasi pendapatan, salah satunya melalui analisis terhadap struktur pendapatan pada masing-masing komponen penyusun pendapatan daerah. Struktur yang digunakan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang keuangan daerah yang menekankan struktur pendapatan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat atau daerah lain dalam bentuk pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



Gambar 2.35 Struktur Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Rp Miliar)

Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Struktur pendapatan Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2020 – 2024 terpusat pada pendapatan transfer. Pendapatan transfer mengacu kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) ataupun Dana Alokasi Khusus (DAK) serta pendapatan transfer dari pemerintah daerah lainnya. Rata-rata pendapatan transfer dalam struktur pendapatan daerah terhadap target mencapai sebesar 94,37% dengan kisaran antara 86,97% sampai dengan 99,22%. Dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp 1,01 Triliun dari target pendapatan transfer sebesar Rp 1,26 Triliun.

Struktur pendapatan selanjutnya adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan komponen pendapatan yang sumber utamanya berasal dari kemampuan Kabupaten Labuhanbatu dalam menghasilkan pendapatan atas hasil wewenang dan kegiatan operasional yang dimilikinya. Hasil analisis selama lima tahun menunjukkan adanya kecenderungan penurunan struktur PAD dari tahun ke tahun. Secara struktur PAD tahun 2020 persentase capaian kinerja mencapai 71,50% dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 161,49 miliar dari target pendapatan transfer sebesar Rp 225,87 Miliar.

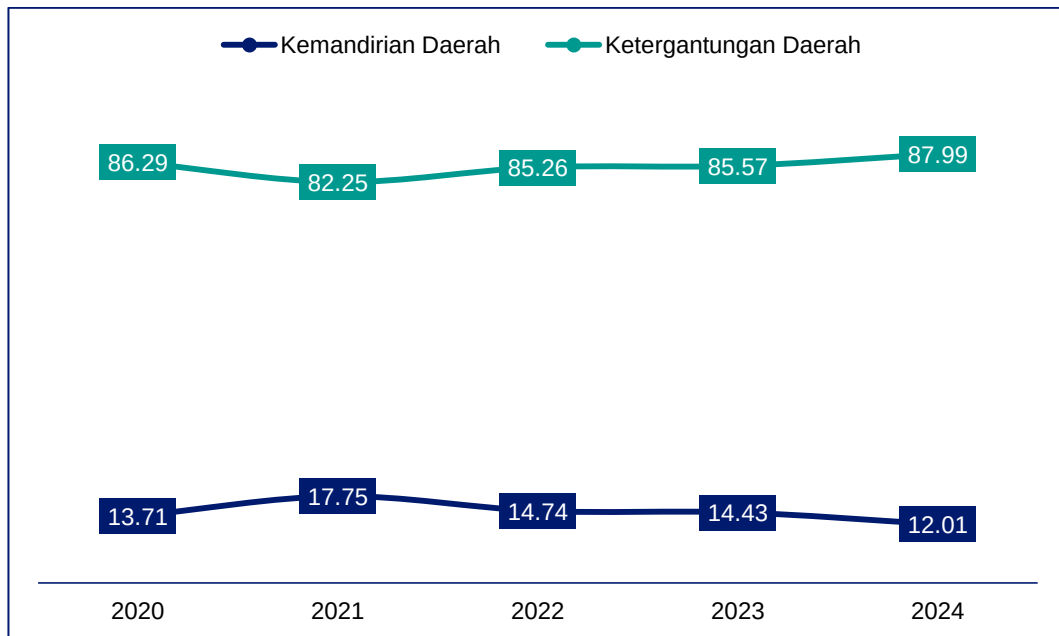
Kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 dengan realisasi mencapai Rp 238,19 Miliar dari target Rp 239,69 Miliar sehingga mencapai persentase kinerja sebesar 99,38%. Namun di tahun-tahun berikutnya capaian kinerja pendapatan asli daerah cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2024 menurun cukup signifikan dengan persentase capaian kinerja sebesar 59,46% dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 150,95 Miliar dari target sebesar Rp 253,86 Miliar. Gambaran realisasi dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuasi namun cenderung menurun pada perolehan PAD Kabupaten Labuhanbatu.

Struktur pendapatan daerah yang terakhir adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tidak melakukan prioritas terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan lain-lain. Terdapat kecenderungan bahwa pendapatan dengan sumber lain-lain pendapatan yang sah semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 struktur pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah realisasinya mencapai Rp 149,90 Miliar dengan target sebesar Rp 134,81 Miliar capaian kinerja berada pada tingkat 111,20%. Kemudian di tahun berikutnya pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kembali menurunkan target terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah hingga tahun 2023 mencapai Rp 15,00 Miliar dengan realisasi yang diperoleh sebesar Rp 15,12 Miliar. namun demikian, pada tahun 2024 pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kembali sedikit meningkatkan target lain-lain pendapatan yang sah menjadi sebesar Rp 18,00 Miliar namun realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp 7,11 miliar atau setara dengan capaian kinerja sebesar 39,53% . Secara umum belum terdapat konsistensi perolehan pendapatan dari lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berupaya untuk menggali potensi lain-lain pendapatan yang sah untuk mendorong pendapatan daerah dan meningkatkan kapasitas daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan ke depannya.

Analisis struktur pendapatan daerah juga memberikan gambaran terhadap evaluasi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi

daerah. Kabupaten Labuhanbatu mengevaluasi derajat kemandirian dan rasio ketergantungan daerah dalam mengevaluasi kemandirian keuangan pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis otonomi daerah. Kabupaten Labuhanbatu mengukur kemampuan daerah dalam membiayai program kegiatan daerah secara mandiri sebagai fokus utama penilaian kemandirian daerah. Pemerintah menganalisis tingkat ketergantungan daerah terhadap pendanaan dari eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya. Analisis derajat kemandirian daerah ditunjukkan oleh proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan. Sedangkan untuk rasio ketergantungan daerah ditunjukkan dari proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan.

Derajat kemandirian daerah dan rasio ketergantungan daerah merupakan ukuran yang sifatnya saling melengkapi atau komplementer dari struktur pendapatan daerah. Derajat kemandirian daerah atau disebut juga derajat kemandirian fiskal berlandaskan kepada kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD dari total pendapatan daerah. Sebaliknya, rasio ketergantungan daerah berdasarkan kepada nilai pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan terhadap total pendapatan yang mampu dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun. Semakin besar angka pada derajat kemandirian daerah akan mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang semakin baik. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi pendapatan transfer maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi pendapatan transfer yang rendah.



Gambar 2.36 Derajat Kemandirian dan Rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu (Diolah, 2025)

Klasifikasi terhadap derajat kemandirian daerah atau kemandirian fiskal daerah dibagi ke dalam empat kelompok utama, yaitu klasifikasi belum mandiri dengan nilai 0,00 sampai dengan 0,25; klasifikasi menuju kemandirian dengan nilai 0,25 sampai dengan 0,50; klasifikasi mandiri dengan nilai 0,50 sampai dengan 0,75; dan klasifikasi sangat mandiri dengan nilai 0,75 sampai dengan 100,00. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Labuhanbatu memiliki kecenderungan mengalami penurunan selama periode 2020 sampai dengan 2024 dengan rasio kemandirian bergerak dari 13,71 % pada tahun 2020 menjadi 12,01 % pada tahun 2024. Saat ini, Kabupaten Labuhanbatu masih berada dalam kategori belum mandiri. Kondisi ini secara bertahap menjadi prioritas daerah untuk mengupayakan peningkatan potensi dan realisasi pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sehingga ke depannya tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Labuhanbatu dapat mengalami peningkatan. Struktur kemandirian daerah memiliki tren cenderung negatif dengan rata-rata sebesar 14,53 persen. Meskipun demikian, perlu menjadi perhatian bahwa penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2022 dan pada tahun 2024 sehingga di harapkan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu harus

memberikan strategi dan inovasi yang baik sehingga bisa meningkatkan derajat kemandirian daerah.

Sebagai counterpart dari kemandirian daerah, analisis keuangan daerah juga memberikan gambaran terkait dengan rasio ketergantungan daerah. Rasio ketergantungan daerah menunjukkan ketergantungan Kabupaten Labuhanbatu dalam menyelenggarakan pemerintahan terhadap pendapatan yang bersumber dari eksternal. Pada tahun 2020 rasio ketergantungan daerah mencapai tingkat 86,29 poin dan di tahun berikutnya cenderung meningkat hingga pada tahun 2024 menjadi 87,99. Meskipun tingkat ketergantungan daerah sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 82,25 poin, namun ada kecenderungan ketergantungan daerah pada pembiayaan eksternal yang meningkat pada tahun-tahun ke depan. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memprioritaskan strategi ke depan untuk mengurangi ketergantungan dari pendanaan eksternal dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Gambaran pendapatan daerah perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam terkait dengan realisasi pada setiap struktur pendapatan daerah. Evaluasi dilakukan dengan memperoleh pola terhadap pergerakan dan pertumbuhan realisasi masing-masing struktur pendapatan daerah. Analisis dilanjutkan secara spesifik yang membahas kinerja pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

A. Pendapatan Asli Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis otonomi daerah, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyelenggaraan pemerintahan diharapkan didukung dengan kemampuan daerah menghasilkan PAD yang akan menjadi penggerak utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada publik. Sebagaimana sebelumnya telah diuraikan, PAD berkaitan erat dengan kemandirian daerah yang juga menjelaskan penurunan ketergantungan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan

pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya.

Kabupaten Labuhanbatu akan berupaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber PAD agar dapat mencapai tingkat kemandirian daerah yang lebih baik. Sumber PAD antara lain diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut merupakan gambaran capaian kinerja PAD Kabupaten Labuhanbatu selama

Tabel 2.60 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu

Tahun	Target	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan	Capaian
	(Rp Miliar)	Target (%)	(Rp Miliar)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
2020	225,87	-	161,49	-	71,50
2021	239,69	6,12	238,19	47,50	99,38
2022	214,87	-10,35	184,40	-22,58	85,82
2023	246,36	14,66	204,63	10,97	83,06
2024	253,86	3,05	150,95	-26,23	59,46

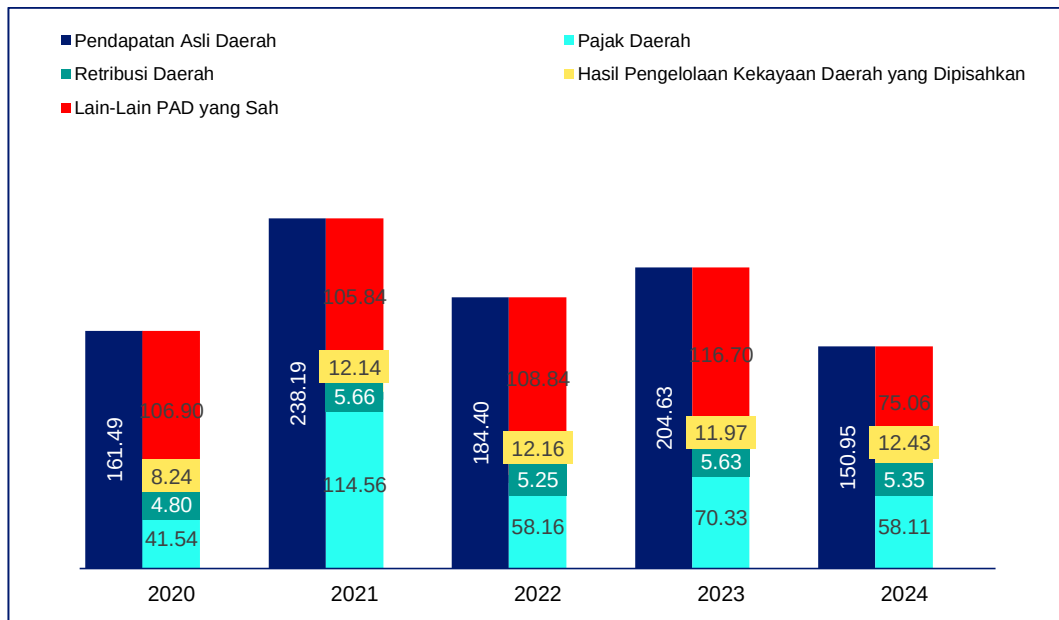
Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu didasarkan kepada potensi-potensi PAD yang dapat diperoleh oleh pemerintah melalui retribusi, pajak, pengelolaan perusahaan milik daerah serta perolehan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2020 pencapaian kinerja PAD melalui realisasi terhadap target yang dicapai hanya mencapai angka 71,50%. Pemerintah tetap berkomitmen pada penetapan target PAD yang mencapai Rp 239,69 Miliar pada tahun 2021. Pencapaian pada tahun 2021 ini mendapatkan capaian kinerja yang cukup tinggi sebesar 99,38% dengan realisasi PAD yang diperoleh sebesar Rp 238,19 Miliar. Hasil ini mengindikasikan bahwa realisasi pencapaian target yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan kemampuan daerah. Namun, pada tahun berikutnya mengalami terjadi peningkatan hingga tahun 2023 dengan persentase capaian kinerja sebesar 83,06% dengan realisasi yang diperoleh sebesar Rp 204,63 Miliar dari target pendapatan asli daerah sebesar Rp 246,36 Miliar. Pada tahun 2023 target realisasi pendapatan asli daerah kembali mengalami

peningkatan menjadi sebesar Rp 253,86 Miliar namun demikian, realisasi yang diperoleh mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp 150,95 Miliar dengan capaian kinerja realisasi berdasarkan target sebesar 59,46%. hal ini memunculkan pertanyaan terkait penetapan target yang terlalu tinggi atau sulitnya mencapai realisasi penerimaan daerah sebagaimana ditargetkan serta pendapatan asli daerah dari retribusi, pajak, pengelolaan perusahaan milik daerah dan juga perolehan kekayaan daerah yang dipisahkan belum optimal.

Evaluasi terhadap realisasi PAD menunjukkan bahwa selama periode 2020 sampai dengan tahun 2024, realisasi PAD cenderung mengalami pertumbuhan realisasi. Namun pada tahun 2024 realisasi PAD mengalami penurunan yang signifikan dari Rp 204,63 Miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 150,95 Miliar. Sehingga Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu diharapkan dapat memberikan strategi serta inovasi yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah dari sumber potensi PAD yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam upaya memperoleh gambaran lebih dalam terkait dengan realisasi capaian pendapatan asli daerah (PAD), perlu dievaluasi sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu periode 2020-2024. Komponen PAD berdasarkan amanat peraturan daerah bersumber dari: 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Evaluasi struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu di masa lalu hingga sekarang dirangkum dalam gambar berikut:



Gambar 2.37 Realisasi PAD dan Komponen Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Realisasi Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020 mendapatkan sumber utama dari lain-lain PAD yang sah dengan proporsi sebesar 66,20% sebesar Rp 106,90 Miliar dari target anggaran sebesar Rp 148,56 Miliar. Kemudian di tahun 2021 Realisasi PAD mendapatkan sumber utama dari Pajak Daerah dengan proporsi 48,09% sebesar Rp 114,55 Miliar dari target pajak daerah sebesar Rp 113,83 Miliar dibandingkan dengan lain-lain PAD yang sah sebesar 44,44% terhadap PAD. hal ini menunjukkan banyaknya potensi pajak daerah yang bisa diperoleh di Kabupaten Labuhanbatu. Namun di tahun berikutnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu memiliki persentase proporsi yang diperoleh lebih banyak bersumber dari lain-lain PAD yang sah sebesar 59,02% pada tahun 2022 dengan nominal realisasi Rp 108,84 Miliar dari target Rp 105,00 Miliar, kemudian di tahun 2023 mencapai 57,03% dengan nominal reaslisasi sebesar Rp 116,70 Miliar dari target Rp 110,00 Miliar dan pada tahun 2024 kembali menurun dengan proporsi sebesar 49,73% dengan nominal realisasi sebesar Rp 75,06 Miliar dari target sebesar Rp 150,94 Miliar. Kontribusi lain-lain PAD yang sah masih menjadi sumber utama PAD dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Namun demikian realisasi yang

diperoleh pada tahun terakhir hanya sekitar 50% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa ditahun terakhir pemerintah Kabupaten Labuhanbatu belum optimal dalam mengembangkan pendapatan asli daerah sehingga harus dapat memberikan strategi yang dapat menghasilkan PAD dari potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Labuhanbatu yang belum terkelola dengan baik.

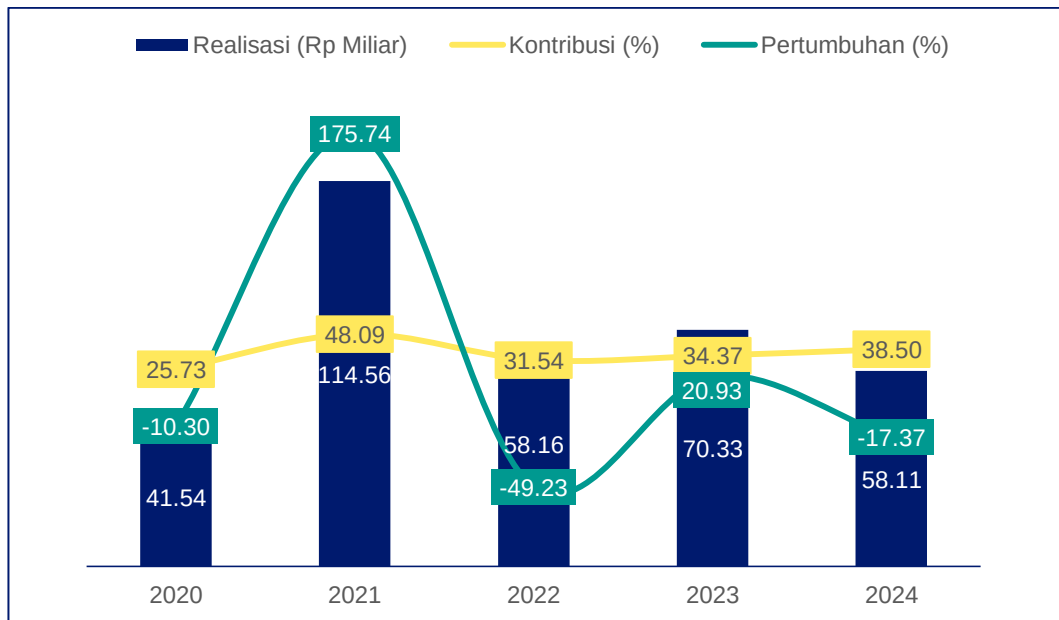
Analisis struktur PAD menunjukkan bahwa penurunan PAD yang terjadi pada tahun 2024 berasal dari dua faktor utama, yaitu penurunan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan sebanyak Rp 41,64 Miliar pada tahun 2024 dari tahun sebelumnya. Serta dari pajak daerah mengalami penurunan sebesar Rp 12,22 Miliar pada tahun 2024 dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu belum optimal dalam menggali potensi PAD yang berasal dari lain-lain PAD yang sah serta belum mengoptimalkan pendapatan dari pajak daerah. Perkembangan PAD pada tahun 2024 menunjukkan terjadi penurunan realisasi PAD dari sebelumnya pada tahun 2021 realisasi sebesar Rp 238,19 Miliar menurun cukup signifikan menjadi Rp 150,95 Miliar pada tahun 2024. Hasil evaluasi secara struktural menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2023 sebesar Rp 116,70 Miliar menurun menjadi Rp 75,06 Miliar pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa belum optimalnya Kabupaten Labuhanbatu meningkatkan bahkan mempertahankan kinerja pendapatan daerah melalui pengelolaan lain-lain PAD yang sah. Permasalahan penurunan lainnya terdapat pada sumber pajak daerah yang teridentifikasi dari tahun 2023 sebesar Rp 70,33 Miliar menurun menjadi sebesar Rp 58,11 Miliar pada tahun 2024. Dengan demikian, hasil penerimaan pajak daerah yang belum optimal dan masih tidak stabi penerimaan setiap tahunnya bagi kabupaten Labuhan batu, sehingga perlunya pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat menyusun strategi agar pendapatan daerah melalui pajak daerah dapat lebih dioptimalkan.

Hasil evaluasi secara struktural menunjukkan pergeseran struktur

pendapatan yang signifikan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Pada tahun 2021, struktur pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah mencapai 48,09% disertai dengan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 44,44%. Pergeseran pada tahun 2023 menunjukkan bahwa struktur PAD yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp 108,84 Miliar menjadi Rp 116,70 Miliar pada tahun 2023, namun terjadi penurunan kembali pada tahun berikutnya menjadi Rp 75,06 Miliar pada tahun 2024.

Realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah menunjukkan pergerakan yang relatif stabil baik secara struktur maupun nilai realisasi. Realisasi retribusi daerah pada tahun 2020 mencapai Rp 4,80 Miliar yang bergerak mencapai Rp 5,35 Miliar pada tahun 2024. Secara struktur, retribusi daerah berada pada tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 2,90% dari periode 2020 sampai dengan 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah mencapai pertumbuhan yang lambat dalam hal mengoptimalkan potensi retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ke depannya perlu menggali dan mengoptimalkan segala bentuk retribusi daerah yang dapat mendorong pendapatan asli daerah.

Dalam upaya memperoleh gambaran penerimaan pada masing-masing struktur PAD, analisis keuangan daerah dilanjutkan dengan mengevaluasi target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Labuhanbatu. Evaluasi terhadap kinerja penerimaan daerah dari pajak daerah dirangkum sebagai berikut:



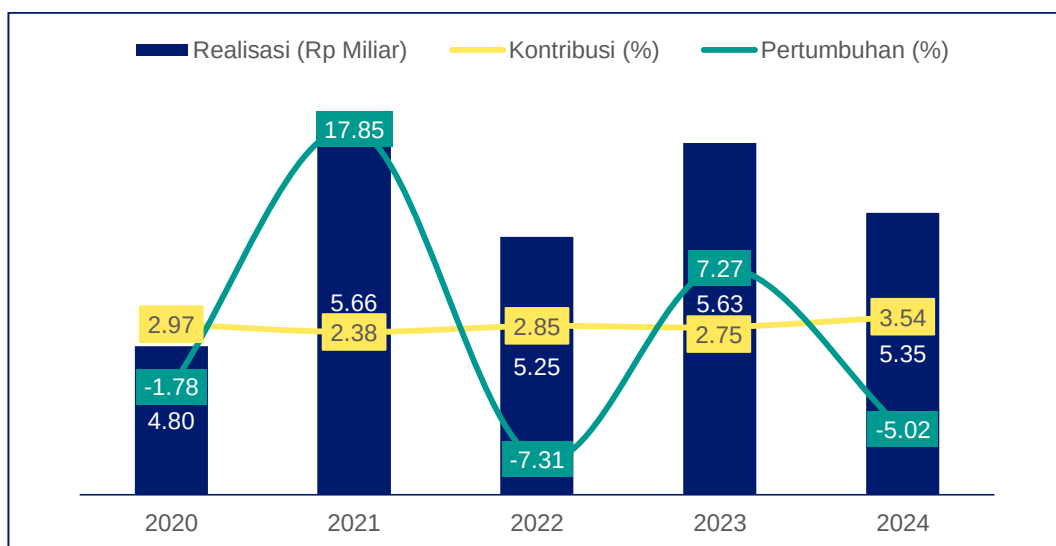
Gambar 2.38 Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Kontribusi pajak daerah Kabupaten Labuhanbatu bergerak dengan tren pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2020, kontribusi pajak daerah sebesar Rp 41,54 Miliar yang tumbuh signifikan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp 114,56 Miliar namun di tahun berikutnya terjadi penurunan pajak daerah yang cukup signifikan mencapai Rp 58,16 Miliar pada tahun 2022 kemudian pada tahun 2023 sedikit meningkat mencapai Rp 70,33 Miliar dan pada tahun 2024 pajak daerah kembali menurun mencapai Rp 58,11 Miliar di Kabupaten Labuhanbatu. Rata-rata pertumbuhan pendapatan yang berasal dari pajak daerah mencapai 35,65% per tahun dengan asumsi pertumbuhan yang merata di setiap tahunnya. Dalam praktiknya, terdapat tren fluktuatif terhadap pendapatan pajak daerah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pergerakan struktur PAD yang berasal dari pajak daerah mengalami kecenderungan penurunan sejak tahun 2021, kontribusi pajak daerah sebagai struktur utama dari PAD mengalami penurunan yang digantikan oleh struktur pendapatan lain. Gambaran dari sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu selanjutnya berasal dari retribusi daerah. Retribusi

daerah mengacu kepada pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Secara rata-rata pertumbuhan tingkat kontribusi pajak daerah per tahunnya sebesar 8,39% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Perkembangan retribusi dan pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Labuhanbatu dirangkum sebagai berikut:

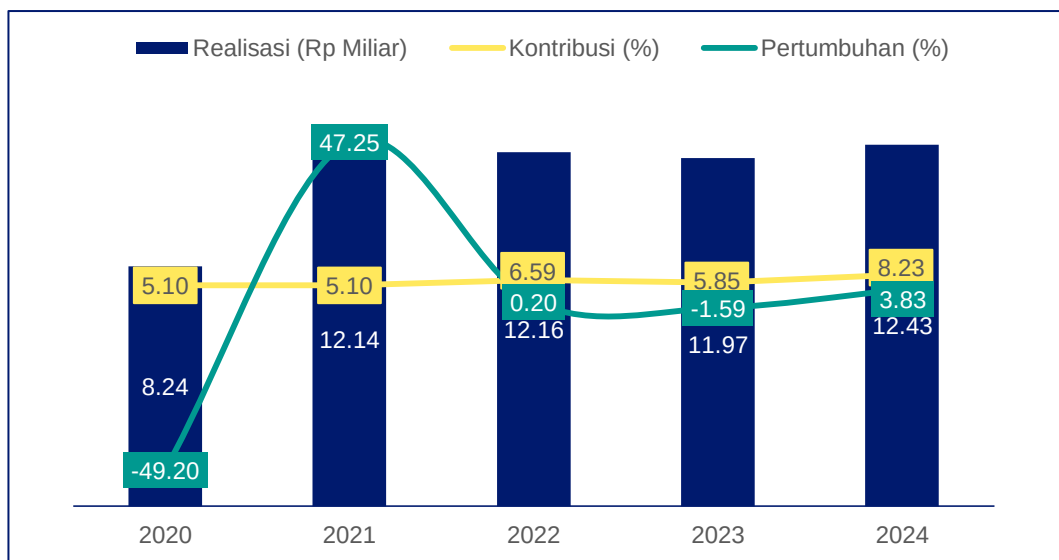


Gambar 2.39 Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Pergerakan realisasi retribusi Kabupaten Labuhanbatu secara rata-rata berada pada tingkat Rp 5,34 Miliar selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Realisasi retribusi bergerak dari Rp 4,80 Miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 5,35 Miliar pada tahun 2024. Secara umum pergerakan ini relatif melambat dalam hal pencapaian pertumbuhan retribusi daerah. Pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,71% per tahun. Dari sisi kontribusi struktur pendapatan retribusi terhadap PAD secara keseluruhan, cenderung terjadi fluktuasi namun cenderung sedikit meningkat. Kontribusi retribusi daerah yang sebelumnya berada pada proporsi 2,97% pada tahun 2020 meningkat menjadi 3,54% pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memiliki tugas untuk menggali potensi dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pendapatan retribusi daerah.

Kabupaten Labuhanbatu memiliki sumber PAD lain yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 6,17% selama periode 2020-2024. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Swasta. Pemerintah melakukan penyertaan modal untuk memperoleh laba yang dapat menjadi bagian dari pendapatan daerah. Rincian perkembangan realisasi dan pertumbuhan sumber pendapatan ini dirangkum sebagai berikut:



Gambar 2.40 Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Labuhanbatu

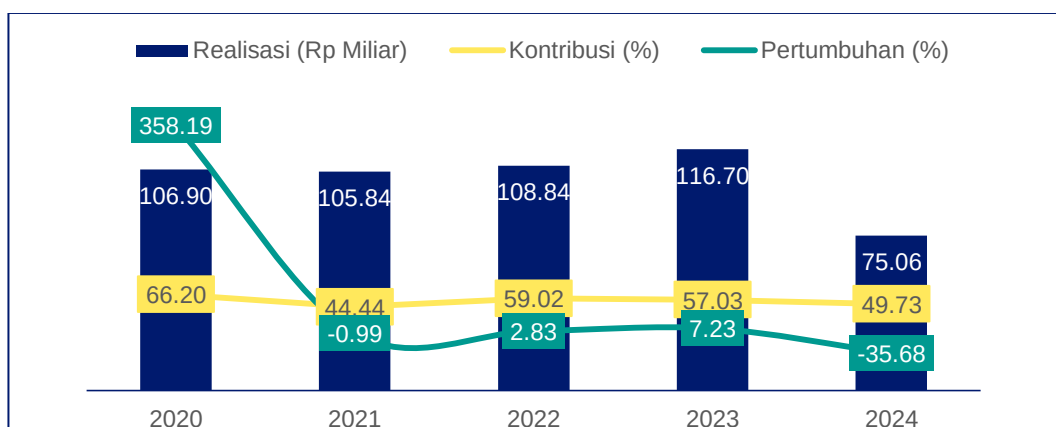
Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD Kabupaten Labuhanbatu yang berasal dari bagian laba hasil penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) yang ada dan menjadi kepemilikan dari pemerintah kabupaten dan penyertaan terhadap perusahaan swasta. Hasil evaluasi pendapatan daerah dari sumber ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah peningkatan di tahun 2021 mengalami kecenderungan stagnan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 yang berada pada kisaran Rp 12,00 Miliar. Evaluasi realisasi pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama periode 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan cenderung meningkat dari sebelumnya pada

tahun 2020 sebesar Rp 8,24 Miliar menjadi Rp 12,14 Miliar pada tahun 2021 kemudian cenderung stagnan hingga tahun 2024 mencapai sebesar Rp 12,43 Miliar dari hasil penyertaan modal tersebut dan bergerak menuju stabilitas.

Gambaran pergerakan struktur pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan cenderung bergerak meningkat dari sebelumnya sebesar 5,10% pada tahun 2020 meningkat menjadi 8,23% pada tahun 2024. Peningkatan signifikan terjadi di tahun terakhir dari kontribusi 5,85% pada tahun 2023 menjadi 8,23% pada tahun 2024. Sejak tahun 2021, struktur dari jenis pendapatan yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mulai bergerak menuju kondisi yang relatif stabil. Pada tahun 2021 struktur pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan berada pada titik terendah, yaitu 5,10% dan bergerak menjadi 8,23% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan baiknya strategi dari pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sehingga mampu meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah dengan baik.

Sumber PAD terakhir yang memberikan kontribusi terbesar pada pengelolaan keuangan Kabupaten Labuhanbatu dan menggantikan dominasi pajak daerah adalah penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah dengan kontribusi rata-rata sebesar 55,28% per tahun selama periode 2020-2024. Kontribusi sumber pendapatan ini bergerak secara dinamis sejak tahun 2021. Hasil evaluasi terhadap Hasil Pengelolaan Lain-Lain PAD yang Sah dirangkum sebagai berikut:



Gambar 2.41 Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Pergerakan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah mengalami pergerakan yang relatif stabil dari tahun 2020 hingga tahun 2023, Namun demikian terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024. Realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2020 mencapai Rp 106,90 Miliar meningkat menjadi sebesar Rp 116,70 Miliar pada tahun 2023, kemudian pendapatan lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan cukup signifikan menjadi Rp75,06 Miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Labuhanbatu diharapkan dapat menggali potensi pendapatan lain-lain PAD yang sah secara optimal pada tahun berikutnya sehingga dapat mendorong realisasi secara signifikan.

Pergerakan struktur pendapatan lain-lain PAD yang sah terhadap PAD menunjukkan fluktuasi cenderung terjadi penurunan kontribusi, dari sebelumnya 66,20% pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 49,73% pada tahun 2024. Titik tertinggi dari proporsi pendapatan lain-lain PAD yang sah mencapai 66,20% pada tahun 2020. Secara rata-rata struktur pendapatan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2020 hingga tahun 2024 berada pada tingkat 55,28% per tahun. Hal ini menunjukkan peranan penting dari pendaptan lain-lain PAD yang sah sebagai sumber penghasilan utama Kabupaten Labuhanbatu.

B. Pendapatan Transfer

Struktur utama pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu masih mengutamakan pendapatan transfer selama periode 2020 sampai dengan 2024 dengan rata-rata kontribusi sebesar 81,24% per tahun. Kabupaten Labuhanbatu masih memiliki ketergantungan yang cukup besar dari pendapatan transfer untuk membiayai program daerah dan memberikan layanan prima kepada masyarakat. Pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pemerintah pusat memberikan pendapatan transfer dalam bentuk dana perimbangan (dana transfer umum dan dana transfer khusus), dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah bersumber dari pendapatan bagi hasil kerjasama dengan daerah lain dan

bantuan keuangan yang diberikan oleh daerah lain. Evaluasi terhadap pencapaian pendapatan transfer di Kabupaten Labuhanbatu dirangkum sebagai berikut:

Tabel 2.61 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Labuhanbatu

Tahun	Target	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan	Capaian
	(Rp Miliar)	Target (%)	(Rp Miliar)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
2020	955,31	-	866,37	-	90,69
2021	1.036,24	8,47	1.025,05	18,32	98,92
2022	1.098,33	5,99	1.055,08	2,93	96,06
2023	1.207,91	9,98	1.198,45	13,59	99,22
2024	1.263,10	4,57	1.198,45	-8,34	86,97

Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

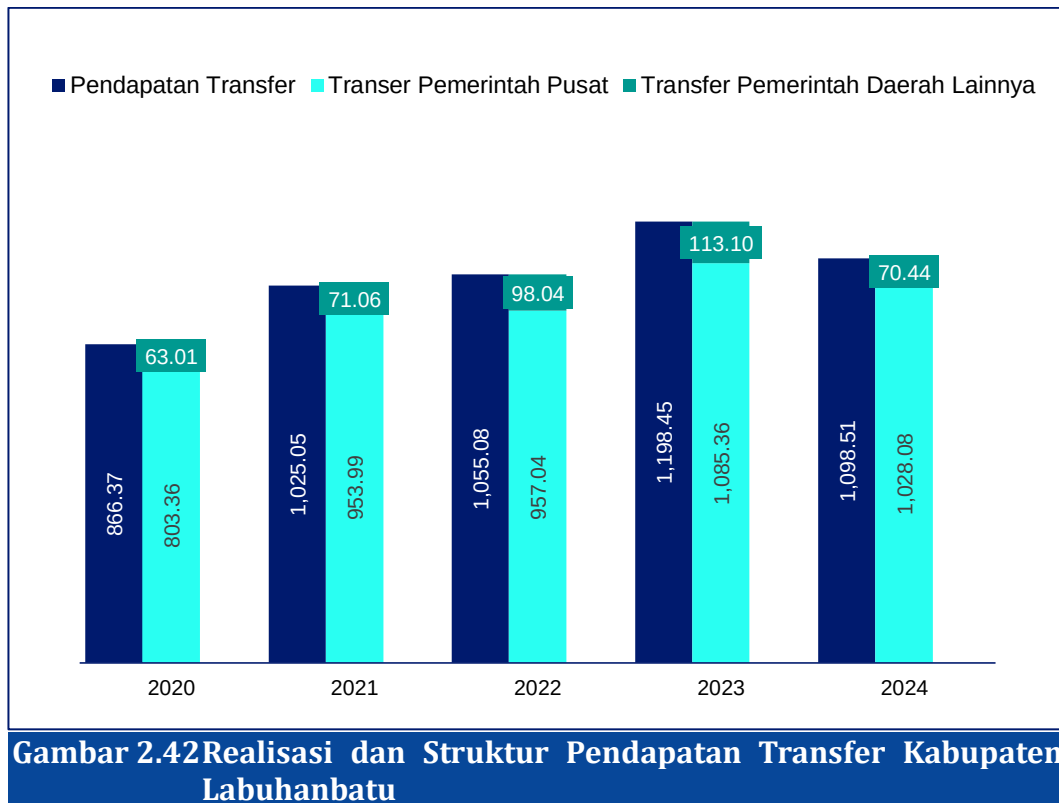
Kabupaten Labuhanbatu menyusun rencana anggaran pendapatan daerah yang menekankan kepada sumber pendapatan transfer. Perencanaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas daerah dan perolehan transfer yang diterima oleh daerah dari tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan target daerah terhadap pendapatan transfer tidak terlepas dari realisasi periode sebelumnya yang mengindikasikan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Kabupaten Labuhanbatu masih bersumber dari bantuan pendapatan transfer, terutama pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat dan Kabupaten Labuhanbatu masih melihat pentingnya pemberian bantuan pendapatan transfer untuk menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berupaya mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan dukungan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Penetapan target pendapatan daerah dari pendapatan transfer bergerak secara positif dari tahun ke tahun, Sejak tahun 2020 penetapan target pendapatan transfer mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan target sebesar 7,25% per tahun. Target pendapatan transfer meningkat dari sebelumnya tahun 2020 sebesar Rp 955,31 Miliar menjadi Rp 1.263,10 Miliar pada tahun 2024. Meskipun pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menetapkan target pendapatan daerah dari pendapatan

transfer yang cenderung meningkat, namun komitmen daerah untuk menggali potensi daerah dalam bentuk PAD tetap ditingkatkan. Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan daerah dengan mengoptimalkan pendapatan dari berbagai sumber pendapatan daerah.

Realisasi pada pendapatan transfer yang diterima oleh Kabupaten Labuhanbatu secara umum sejalan dengan penetapan target pendapatan yang telah disusun. Selama periode 2020 – 2023 capaian kinerja pendapatan transfer memiliki tren positif dengan rentang 90,69% - 99,22% realisasi pendapatan transfer di Kabupaten Labuhanbatu cenderung mengalami peningkatan dari Rp 866,37 Miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 1.198,45 Miliar pada tahun 2023. Namun demikian di tahun 2024 terjadi penurunan capaian kinerja yang cukup signifikan menjadi sebesar 86,97% dengan target sebesar Rp 1.263,10 Miliar mendapatkan realisasi sebesar Rp 1.098,45 Miliar. Hal ini menunjukkan bahwa dengan target yang meningkat setiap tahunnya namun realisasi yang didapatkan dari pendapatan transfer tahun 2024 menurun dari realisasi pendapatan transfer pada tahun 2023, sehingga Pemerintah masih memerlukan dukungan pendapatan transfer untuk mengoptimalkan pelaksanaan program-program strategis dan prioritas pembangunan daerah. penurunan pencapaian kinerja pada tahun terakhir diharapkan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berupaya semaksimalnya untuk mengelola pendapatan dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu.

Struktur pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada periode 2020 sampai dengan tahun 2024 bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan, dan transfer pemerintah pusat lainnya dan transfer pemerintah daerah lainnya. Gambaran struktur pendapatan transfer di Kabupaten Labuhanbatu dirangkum sebagai berikut:



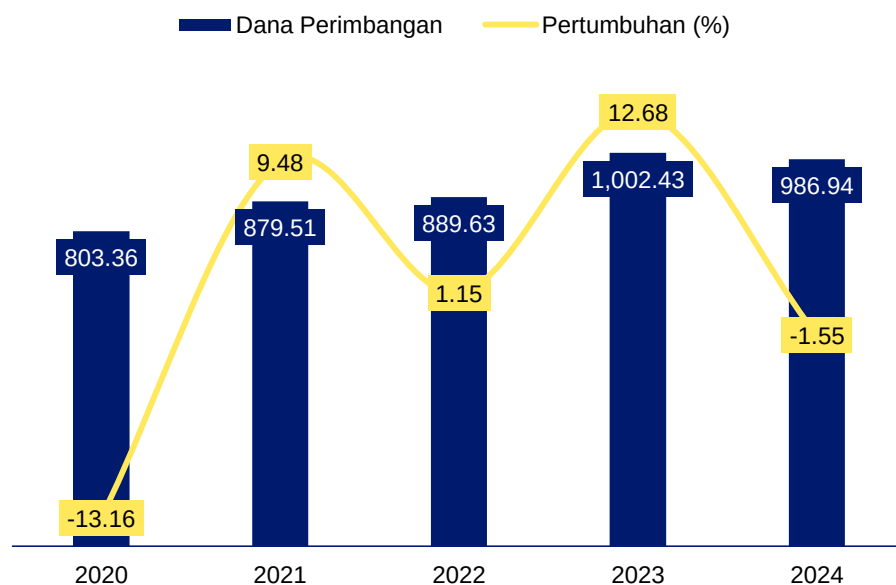
Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Gambar di atas mengindikasikan terdapat kecenderungan peningkatan realisasi pendapatan transfer dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dari tahun 2020, pendapatan transfer cenderung mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023, namun sedikit menurun di tahun 2024. Realisasi pendapatan transfer dari tahun 2020 meningkat dari Rp 866,37 Miliar menjadi Rp 1.198,45 Miliar atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,11% per tahun, namun di tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 1.098,51 Miliar pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan semakin terbatasnya realisasi pendapatan transfer sehingga peran pendapatan transfer belum optimal untuk mendorong PAD.

Evaluasi struktur pendapatan transfer mengarah kepada penilaian tiga komponen pendapatan transfer, yaitu dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya dan transfer pemerintah daerah lainnya. Struktur utama dari pendapatan transfer selama periode 2020 – 2024 bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dengan rata-rata sebesar 92,13% per tahun. Struktur lainnya adalah transfer pemerintah pusat

lainnya dengan rata-rata sebesar 4,86% dan transfer pemerintah daerah lainnya dengan rata-rata sebesar 2,82% per tahun dalam periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terbagi atas dua komponen utama yang meliputi Dana Transfer Umum, dan Dana Transfer Khusus. Untuk Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Evaluasi karakteristik dari pendapatan transfer dana perimbangan di Kabupaten Labuhanbatu selama periode pengelolaan 2020 - 2024 dirangkum sebagai berikut:



Gambar 2.43 Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Sumber pendapatan utama dari Kabupaten Labuhanbatu adalah pendapatan transfer dalam bentuk dana perimbangan. Pada tahun 2020 pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mendapatkan realisasi dana perimbangan sebesar Rp 803,36 Miliar. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan

realisasi dana perimbangan sebesar 9,48%, kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami pertumbuhan sebesar 1,15% dan di tahun 2023 kembali meningkat secara signifikan sebesar 12,68% dengan tingkat pendapatan sebesar Rp 1.002,43 Miliar. Namun demikian, di tahun terakhir pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi dana perimbangan menjadi sebesar Rp 986,94 Miliar dengan pertumbuhan menurun sebesar -1.55%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah pusat melalui dana perimbangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ditahun terakhir mengalami penurunan untuk Kabupaten Labuhanbatu.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi dapat berupa dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai perundang-undangan. Sumber pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah. Realisasi dan pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dalam hal ini diwakilkan oleh pendapatan hibah di Kabupaten Labuhanbatu dirangkum sebagai berikut:

Tabel 2.62 Target, Realisasi dan Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Labuhanbatu

Tahun	Target (Rp Miliar)	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi (Rp Miliar)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2020	134,81	-	149,90	-	111,20
2021	87,49	-35,10	78,86	-47,39	90,13
2022	15,00	-82,86	11,76	-85,09	78,37
2023	15,00	0,00	15,12	28,63	100,80
2024	18,00	20,00	7,11	-52,95	39,53

Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Struktur pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kabupaten Labuhanbatu adalah pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Karakteristik utama dari kedua sumber pendapatan dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah realisasinya yang tidak dapat diprediksi dalam proses perencanaan pendapatan daerah. Realisasi Kabupaten Labuhanbatu atas pendapatan hibah terjadi hanya pada periode 2020 – 2021

sebesar 78,64 Miliar dan turun menjadi 2,8 Miliar pada tahun 2021. Namun demikian di tahun berikutnya tidak ada realisasi yang dicapai dari sumber pendapatan ini sehingga pencapaian kinerja nol persen pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Namun setiap tahunnya tetap mendapatkan pendapatan lainnya dengan realisasi cenderung menurun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Realisasi pendapatan lainnya pada tahun 2020 sebesar 71,26 Miliar yang kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 76,06 Miliar. namun demikian di tahun berikutnya terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar menjadi sebesar 11,75 Miliar pada tahun 2022 dan kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 7,11 Miliar pada tahun 2024. Rp 11,76 Miliar pada tahun 2022 dan Rp 15,12 Miliar pada tahun 2023. Target dari pendapatan lainnya sebesar Rp 15,00 Miliar untuk tahun 2022 sampai dengan 2023, dan ditahun berikutnya target kembali di tingkatkan menjadi Rp 18,00 Miliar pada tahun 2024.

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerimaan pendapatan hibah tidak dapat diprediksi secara spesifik selama periode penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memperoleh pendapatan lainnya untuk kategori pendapatan lain-lain tersebut.

2.5.3 Belanja Daerah

Pendapatan daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah administrasi Kabupaten Labuhanbatu. Belanja daerah menjadi aktivitas pembiayaan dalam melaksanakan agenda pemerintahan di daerah dengan menyelaraskan belanja dengan pelaksanaan program pembangunan daerah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan

sasaran pembangunan yang akan ditetapkan untuk pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 - 2029. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas serta efisiensi belanja yang berbasis terhadap kinerja program daerah. Kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah pencapaian kinerja berorientasi hasil kerja.

Dasar pedoman penyelenggaraan penyusunan APBD Kabupaten Labuhanbatu khususnya pada penyelenggaraan belanja daerah didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Pemerintah juga mempersiapkan anggaran belanja tidak terduga yang merupakan pengeluaran anggaran dari APBD untuk keperluan darurat, termasuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi dalam perencanaan pembangunan sebelumnya. Selain itu, belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau pemerintah desa, yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan daerah pada masa lalu, analisis belanja daerah dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi realisasi kebijakan pembelanjaan selama periode 2020 – 2024. Hasil gambaran keuangan ini akan digunakan

sebagai dasar untuk menyusun rencana Belanja Daerah dalam RPJMD 2025 – 2029. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui kapasitas pendanaan guna mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya memperoleh gambaran kinerja keuangan daerah masa lalu, analisis belanja daerah dilakukan dengan tujuan memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan selama kurun waktu periode 2020 – 2024 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah di masa perencanaan RPJMD 2025 – 2029 dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan daerah. Target dan Realisasi belanja daerah di Kabupaten Labuhanbatu periode 2020 – 2024 dirangkum sebagai berikut:

Tabel 2.63 Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Labuhanbatu					
Tahun	Target	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan	Capaian
	(Rp Miliar)	Target (%)	(Rp Miliar)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
2020	1.347,15	-	1.187,86	-	88,18
2021	1.377,94	2,29	1.266,14	6,59	91,89
2022	1.413,95	2,61	1.301,84	2,82	92,07
2023	1.503,83	6,36	1.418,29	8,95	94,31
2024	1569,49	4,37	1.242,14	-12,42	79,14

Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Evaluasi anggaran dan realisasi belanja Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan variasi yang signifikan dalam pencapaian target keuangan serta pertumbuhan realisasi dan kinerja capaian. Pada tahun 2020, target belanja ditetapkan sebesar Rp 1.347,15 Miliar dengan realisasi sebesar Rp 1.187,86 Miliar. Pada tahun 2020, capaian kinerja belanja daerah atau penyerapan anggaran adalah sebesar 88,18%. Kemudian meningkat di setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp 1.418,29 Miliar dengan capaian kinerja sebesar 94,31%. Namun demikian terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2024 dengan target belanja yang ditetapkan sebesar Rp 1.569,49 Miliar namun realisasinya sebesar Rp 1.242,14 Miliar. Hal ini berdampak pada capaian penyerapan anggaran belanja yang hanya mencapai angka 79,14% dari perencanaan yang

dilakukan. Kurangnya penyerapan anggaran menunjukkan bahwa program-program penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak didukung dengan belanja yang memadai sehingga dapat mengakibatkan kekhawatiran target pembangunan daerah tidak dapat dicapai sebagaimana mestinya.

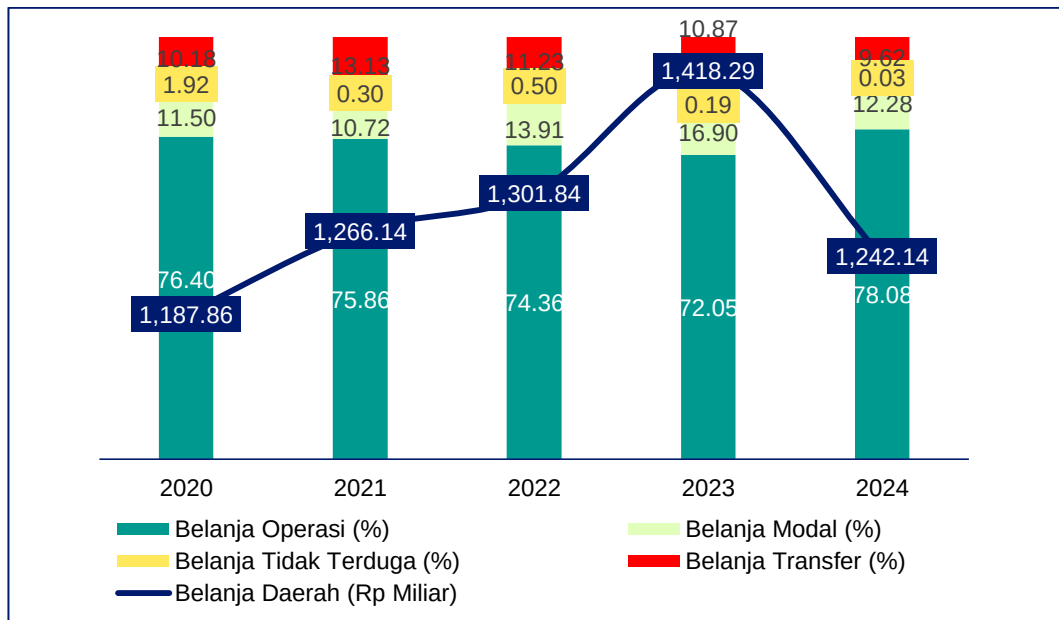
Perencanaan dan realisasi belanja Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 mencatat perbaikan signifikan dengan target yang meningkat sebesar 6,36% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 1.377,94 Miliar, namun realisasi yang terjadi sebesar Rp 1.266,14 Miliar. Peningkatan ini menghasilkan capaian penyerapan anggaran yang semakin baik dengan mencapai angka 94,31%. Realisasi penyerapan anggaran belanja ini juga menjadi penyerapan tertinggi dalam periode yang dianalisis. Tren peningkatan target dan realisasi berlanjut dari tahun 2020 sampai dengan 2024, meskipun dengan laju pertumbuhan yang lebih moderat. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi penyerapan anggaran belanja dengan pencapaian sebesar 79,14% dan realisasi sebesar Rp 1.242,14 Miliar.

Hasil evaluasi gambaran belanja daerah pada tahun 2024 menunjukkan penurunan realisasi penyerapan belanja daerah. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan target sebesar 4,37% menjadi Rp 1.569,49 Miliar. Di sisi lain, realisasi penyerapan anggaran terjadi penurunan yang cukup signifikan dengan tahun sebelumnya mencapai -12,42% menjadi Rp 1.242,14 Miliar. Kondisi ini menjadi penurunan capaian penyerapan anggaran dari tren data tahunan yang di analisis. Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan target dari tahun ke tahun, realisasi dan capaian kinerja menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Namun di tahun terakhir terjadi penurunan angka capaian kinerja disebabkan dengan realisasi yang belum optimal tidak sesuai dengan target menjadi tahun dengan tantangan terbesar dalam pencapaian target keuangan.

Penetapan target belanja pada pengelolaan APBD Kabupaten Labuhanbatu periode tahun 2020 – 2024 menunjukkan bahwa secara umum tingkat penetapan target belanja daerah Kabupaten Labuhanbatu berada pada rata-rata 5 tahun terakhir sebesar Rp 1.442,47 Miliar per tahun dengan realisasi rata-rata sebesar Rp 1.283,25 Miliar dengan penyerapan anggaran

belanja rata-rata sebesar 89,12%. Dari sisi target pemerintah Kabupaten Labuhanbatu setiap tahunnya menaikkan target belanja daerah namun realisasi penyerapan anggarannya pada tahun terakhir yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kemampuan penyerapan anggaran masih perlu dioptimalkan sehingga perencanaan APBD dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran. Hasil gambaran realisasi belanja Kabupaten Labuhanbatu periode 2020 – 2024 masih berada pada tingkat rata-rata sebesar 89,12% yang memerlukan efektivitas penyusunan anggaran belanja daerah untuk membiayai program-program pemerintah daerah, meskipun angka ini sudah cukup tinggi.

Komponen belanja daerah Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, mencakup empat kategori utama: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan bagian terbesar dari anggaran daerah, digunakan untuk mendanai kegiatan operasional sehari-hari pemerintah daerah. Kategori ini mencakup pengeluaran untuk gaji pegawai, perawatan aset, serta pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Belanja modal diarahkan untuk investasi dalam aset tetap, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Sementara itu, belanja tidak terduga disiapkan untuk mengatasi kejadian atau keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi, seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya. Belanja transfer meliputi alokasi dana yang ditransfer ke pemerintah desa atau entitas lain dalam bentuk bantuan keuangan. Dengan komposisi ini, belanja daerah dirancang untuk memastikan bahwa semua aspek kebutuhan operasional, investasi jangka panjang, tanggap darurat, dan bantuan keuangan terpenuhi secara efektif dan efisien. Gambaran struktur belanja daerah di Kabupaten Labuhanbatu dirangkum sebagai berikut:



Gambar 2.44 Struktur Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Gambaran umum realisasi belanja dan struktur belanja pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola pengeluaran pemerintah serta peningkatan belanja pemerintah dari Waktu ke waktu namun terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024. Realisasi belanja daerah pada Kabupaten Labuhanbatu mengalami fluktuasi cenderung sedikit meningkat namun di tahun terakhir terjadi lonjakan penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020 sebesar Rp 1.187,86 Miliar meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp 1.418,29 Miliar namun demikian di tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar Rp 1.242,14 Miliar. Pola pergerakan belanja ini menunjukkan manajemen anggaran yang adaptif dan fokus yang kuat pada pemulihan dan stabilitas ekonomi. Analisis gambaran realisasi belanja dan struktur belanja Kabupaten Labuhanbatu pada tahun terakhir menggambarkan adaptasi anggaran yang kurang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan operasional.

Struktur belanja daerah terdapat beberapa bagian yaitu belanja operasi, belanja transfer, belanja modal dan belanja tidak terduga. Adapun Belanja Operasi secara konsisten menjadi komponen terbesar, menunjukkan fokus yang kuat pada operasional penyelenggaraan pemerintahan dan

kebutuhan berkelanjutan untuk mendukung fungsi pemerintahan. Rata-rata kontribusi belanja operasi terhadap belanja daerah sebesar 75,35%, Belanja operasi bergerak dari 76,40% kontribusinya terhadap belanja daerah pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 72,05% pada tahun 2023 kontribusinya terhadap belanja daerah, namun demikian di tahun 2024 terjadi pergerakan peningkatan yang cukup signifikan dengan kontribusi terhadap belanja daerah menjadi sebesar 78,08%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi belanja operasi yang mengalami pergerakan fluktuasi yang cukup signifikan di tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan prioritas pada keberlanjutan belanja operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu.

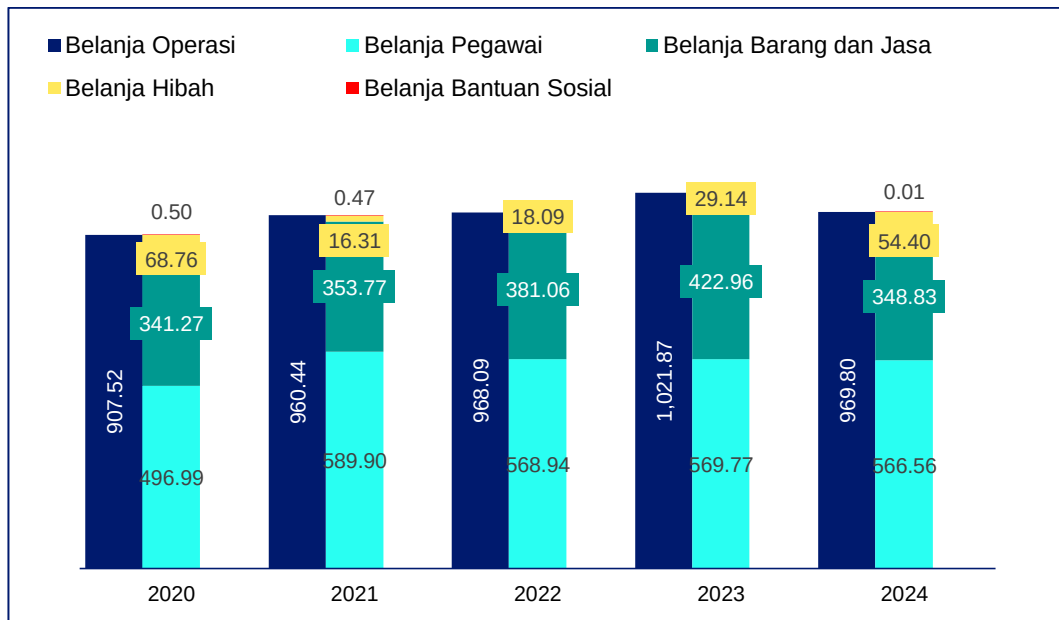
Evaluasi terhadap struktur belanja modal menunjukkan fluktuasi signifikan dengan penurunan realisasi belanja terbesar pada tahun terakhir. Kontribusi belanja modal terhadap belanja daerah sebesar 11,50% pada tahun 2020 sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 10,72% kontribusinya terhadap belanja daerah dan di tahun berikutnya mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023 menjadi 16,90% kontribusi terhadap belanja daerah yang merupakan kontribusi terbesar selama periode 2020 sampai dengan 2024. Namun demikian terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun 2024 menjadi sebesar 12,28% dengan nominal Rp 152,58 Miliar. Pergerakan realisasi belanja modal mengindikasikan penyesuaian strategi investasi sesuai dengan kebutuhan infrastruktur dan kondisi ekonomi. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menggunakan belanja modal untuk melakukan investasi pada pembangunan infrastruktur dalam melakukan percepatan pembangunan.

Struktur persentase kontribusi Belanja Tidak Terduga mengalami variasi yang fluktuatif terhadap belanja daerah cenderung menurun, pada tahun 2020 mendapatkan kontribusi sebesar 1,92% yang kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,30% dan sedikit meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar 0,50% namun demikian di tahun berikutnya terjadi penurunan yang signifikan hingga pada tahun 2024 persentase kontribusi belanja tidak terduga terhadap belanja daerah sebesar 0,03%. Secara umum

rendahnya realisasi belanja tidak terduga menunjukkan pengelolaan risiko di Kabupaten Labuhanbatu yang semakin baik sehingga tidak banyak pengeluaran di luar perencanaan yang harus dilakukan. Secara praktis, tidak dapat dievaluasi kecenderungan pergerakan dari belanja tidak terduga karena sifatnya yang di luar perencanaan, namun data historis menunjukkan adanya penurunan dengan laju 65,83% per tahun. Secara struktur realisasi belanja tidak terduga berada pada rentang 0,03% sampai dengan 1,92% dari total belanja daerah dengan rata-rata sebesar 0,59%. Kondisi ini mencerminkan rendahnya pengeluaran atas kejadian tidak terduga di Kabupaten Labuhanbatu.

Struktur belanja dalam bentuk belanja transfer juga menunjukkan fluktuasi pada tahun 2020 sebesar 10,18% kontribusi belanja transfer terhadap belanja daerah yang kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar 13,13% terhadap belanja daerah, namun demikian di tahun berikutnya kembali mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 kontribusi belanja transfer terhadap belanja daerah menjadi sebesar 9,62%. Secara umum realisasi belanja transfer bergerak secara melambat dengan laju penurunan sebesar 0,30% per tahun selama periode 2020 sampai dengan 2024. Dari sisi struktur, belanja transfer berada pada rata-rata sebesar 11,00% dengan rentang antara 9,62% sampai dengan 13,13%.

Struktur belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan. Realisasi belanja Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2020 – 2024 difokuskan kepada empat jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Pergerakan realisasi belanja pada komponen belanja tersebut dirangkum sebagai berikut:



Gambar 2.45 Pergerakan Struktur Belanja Operasi Kabupaten Labuhanbatu (Rp Miliar)

Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran belanja untuk mendukung kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang memberi manfaat dalam satu periode akuntansi. Struktur dari belanja operasi di Kabupaten Labuhanbatu dikelompokkan ke dalam empat kategori belanja, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Secara umum terlihat bahwa Belanja Pegawai menjadi struktur utama dari belanja operasi. Pada tahun 2020, realisasi belanja pegawai mencapai Rp 496,99 Miliar, kemudian terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp 589,90 Miliar dengan adanya penyesuaian anggaran pada awal pandemi COVID-19. Pada tahun berikutnya lebih stabil cenderung mengalami sedikit penurunan hingga pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp 566,56 Miliar mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai meskipun ada sedikit pergerakan penurunan anggaran.

Secara rata-rata belanja pegawai berada pada tingkat Rp 558,43 Miliar per tahun selama periode 2020 sampai dengan 2024 kecenderungan stabil mengarah kepada penurunan jumlah penyerapan belanja pegawai sebesar 3,33% per tahun. Secara struktur, belanja pegawai menjadi sumber belanja

operasi dominan dengan rata-rata sebesar 57,83% dengan rentang antara 54,76% sampai dengan 61,42%.

Realisasi belanja barang dan jasa menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dalam rentan tahun 2020 sampai dengan 2023 namun terjadi penurunan realisasi belanja barang dan jasa yang cukup signifikan pada tahun 2024. Pencapaian realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2020 sebesar Rp 341,27 Miliar kemudian meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp 422,96 Miliar. Namun di tahun berikutnya terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp 348,83 Miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya investasi dalam pengadaan barang dan jasa untuk mendukung operasional dan berbagai kegiatan strategis pemerintah dalam mempercepat pemulihan setelah pandemi COVID-19 dan mendorong percepatan pertumbuhan di Kabupaten Labuhanbatu. Secara struktur, terdapat kecenderungan peningkatan kontribusi belanja barang dan jasa yang konsisten meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan bahwa semakin berkurangnya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam belanja barang dan jasa.

Struktur belanja hibah mengalami perubahan besar dalam kurun Waktu pelaksanaan APBD 2020 sampai dengan 2024. Pada tahun 2020, realisasi belanja hibah adalah Rp 68,76 Miliar. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menurunkan pengeluaran yang signifikan pada tahun 2021 atas belanja hibah yang menjadi Rp 16,31 Miliar atau menurun sampai dengan 76,29% pada tahun tersebut. penurunan tersebut mengalami peningkatan di tahun berikutnya dengan realisasi belanja hibah pada tahun 2022 sebesar Rp 18,09 Miliar kemudian di tahun 2023 sebesar Rp 29,14 Miliar dan di tahun 2024 terjadi peningkatan cukup signifikan menjadi sebesar Rp 54,40 Miliar. Perubahan besar ini mencerminkan penyesuaian dalam program hibah sesuai dengan prioritas tahunan yang juga menyesuaikan dengan situasi ekonomi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu setiap tahun.

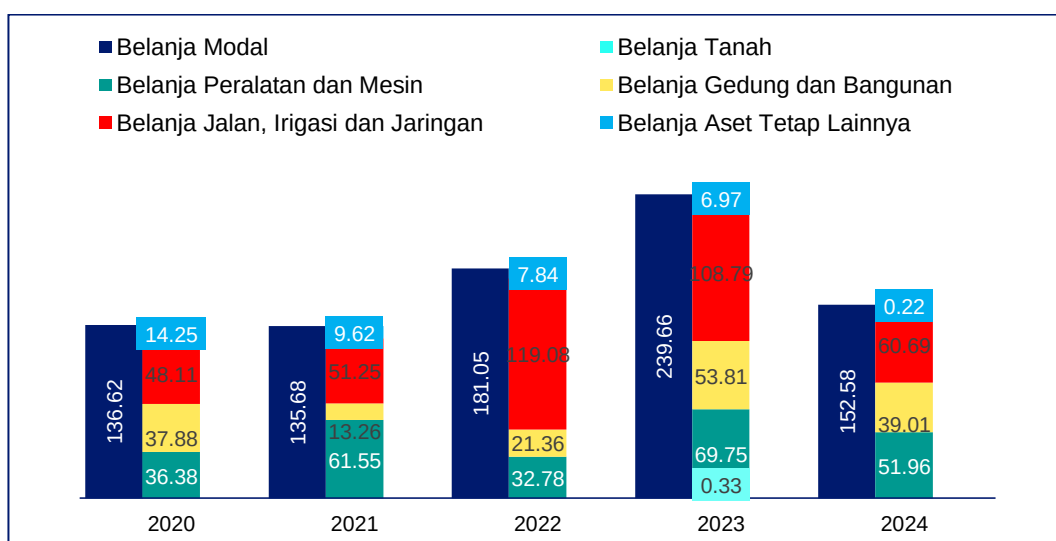
Secara struktural gambaran realisasi Belanja Bantuan Sosial memiliki

alokasi yang cukup kecil selama periode 2020 sampai dengan 2024, dengan realisasi sebesar Rp 0,50 Miliar pada tahun 2020 dan turun menjadi Rp 0,47 Miliar pada tahun 2021. Tidak ada realisasi belanja bantuan social tahun 2022 dan 2023 namun di tahun 2024 terdapat belanja bantuan sosial yang cukup kecil sebesar Rp 0,01 Miliar. Secara struktur, belanja bantuan sosial berada pada tingkat kurang dari 1,00% dengan realisasi 28,49% pada tahun 2020, 11,13% pada tahun 2021, dan 20,08% pada tahun 2024 dan tidak ada belanja bantuan social pada tahun 2022 dan tahun 2023. Prioritas yang sangat rendah pada kategori belanja ini mencerminkan kebijakan yang lebih fokus pada program-program dengan dampak lebih besar dalam skala operasional atau perencanaan yang lebih strategis.

Gambaran umum realisasi dan struktur belanja operasi menunjukkan bahwa pemerintah memiliki strategi pengelolaan anggaran yang adaptif, menyesuaikan alokasi sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang berubah. Fluktuasi dalam berbagai kategori belanja mencerminkan respon terhadap kondisi eksternal seperti pandemi, serta penyesuaian kebijakan untuk mendukung operasional dan program-program strategis. Konsistensi dalam Belanja Pegawai dan peningkatan dalam Belanja Barang dan Jasa mengindikasikan fokus yang kuat pada keberlanjutan operasional dan investasi dalam pengadaan barang dan jasa yang esensial untuk mendukung berbagai aktivitas pemerintahan. Fluktuasi dalam Belanja Hibah menunjukkan fleksibilitas dalam mendukung program-program tertentu sesuai dengan prioritas tahunan, sementara alokasi minimal untuk Belanja Bantuan Sosial mencerminkan strategi yang lebih terfokus pada program dengan dampak lebih besar dan luas. Hasil evaluasi kinerja belanja operasi tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menegaskan bahwa dengan penurunan realisasi dari belanja pegawai serta barang dan jasa Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kelangsungan dan efisiensi fungsi-fungsi pemerintahan meskipun menghadapi ketidakpastian dan permasalahan ekonomi.

Struktur belanja daerah selanjutnya adalah belanja modal. Belanja modal, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang ditujukan untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal mencakup lima kategori utama: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tanah melibatkan pengeluaran untuk pembelian atau pengadaan lahan yang dapat dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan. Belanja peralatan dan mesin mencakup pengeluaran untuk perolehan alat dan mesin yang diperlukan untuk mendukung operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Belanja bangunan dan gedung mencakup pengeluaran untuk pembangunan atau perolehan bangunan dan gedung. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan mencakup pengeluaran untuk pembangunan dan perbaikan jalan, sistem irigasi, dan jaringan infrastruktur lainnya. Belanja modal aset tetap lainnya mencakup pengeluaran untuk perolehan aset tetap lainnya yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Pergerakan penggunaan belanja untuk kegiatan belanja modal dirangkum sebagai berikut:



Gambar 2.46 Pergerakan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Belanja modal menjadi salah satu indikator penting dalam memahami alokasi dan penggunaan dana oleh pemerintah untuk keperluan

pembangunan dan infrastruktur. Selama periode 2020 hingga 2024, terjadi fluktuasi signifikan dalam realisasi total belanja modal di Kabupaten Labuhanbatu. Kondisi ini menggambarkan dinamika kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, dan tantangan ekonomi yang dihadapi. Pada tahun 2020 belanja modal sebesar Rp 136,62 Miliar. kemudian sedikit menurun di tahun 2021 menjadi sebesar Rp 135,68 Miliar dan di tahun berikutnya bergerak secara konsisten meningkat dengan pertumbuhan realisasi belanja modal sebesar 32,37% pada tahun 2022 sampai dengan 2023. Kemudian di tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar Rp 152,58 Miliar. Belanja modal Kabupaten Labuhanbatu mengalami penyesuaian signifikan akibat pandemi COVID-19, diikuti dengan pemulihan bertahap dan peningkatan yang cenderung agresif pada tahun 2021 sampai dengan 2023, kemudian di tahun 2024 terjadi penurunan yang disebabkan oleh efisiensi anggaran pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu. Pola pergerakan ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam menyeimbangkan antara penanganan krisis dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi infrastruktur. Perubahan dalam alokasi anggaran untuk berbagai sektor juga menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan mendesak dan strategi jangka panjang pemerintah.

Gambaran umum belanja daerah terkait belanja modal pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan pengeluaran untuk belanja tanah sangat rendah sepanjang periode tersebut dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 hanya pada tahun 2023 pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan belanja tanah. Pada tahun 2023, Terdapat sedikit peningkatan belanja tanah menjadi Rp 0,33 Miliar namun di tahun terakhir juga tidak ada belanja tanah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Pergerakan ini menunjukkan bahwa belanja untuk pengadaan lahan bukan merupakan prioritas utama pemerintahan selama periode 2020 sampai dengan tahun 2024. Pengadaan lahan dilakukan dengan jumlah yang sangat terbatas. Secara struktur, belanja tanah memiliki proporsi sebesar 0,14% pada tahun 2023.

Dari sisi belanja peralatan dan mesin, terjadi pergerakan yang

fluktuasi setiap tahunnya dan cukup signifikan. Pada tahun 2020, realisasi belanja ini mencapai Rp 36,38 Miliar kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar Rp 61,55 Miliar namun di tahun berikutnya terjadi penurunan kembali menjadi sebesar Rp 32,78 Miliar pada tahun 2022 meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar Rp 69,75 Miliar dan sedikit menurun di tahun terakhir menjadi sebesar Rp 51,96 Miliar. Pola ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk peralatan dan mesin sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Labuhanbatu. Realisasi kembali menurun menjadi Rp 32,78 Miliar pada tahun 2022. Pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 69,75 Miliar, Kemudian di tahun 2024 realisasi kembali sedikit menurun untuk menunjang perubahan kebutuhan dan prioritas dalam pengadaan peralatan dan mesin. Secara struktur, pengeluaran untuk peralatan dan mesin mengalami pergeseran prioritas belanja yang sangat fluktuatif. Sejalan dengan kebutuhan pengadaan peralatan dan mesin yang intens pada tahun 2021, struktur belanja peralatan dan mesin mencapai puncak tertinggi hingga mencapai 45,35%. Pada tahun 2022 Kembali menurun menjadi 18,11% dan tahun 2023 meningkat menjadi 29,19%, serta di tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 34,06%. Secara rata-rata struktur belanja peralatan dan mesin mencapai 30,65% dari total belanja modal. Belanja peralatan dan mesin memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 9,32% per tahun selama periode 2020 sampai dengan 2024.

Dari sisi realisasi belanja gedung dan bangunan, terjadi penurunan signifikan dari Rp 37,88 Miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 13,26 Miliar pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi Rp 21,36 Miliar dan kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2023 menjadi Rp 53,81 Miliar namun di tahun terakhir mengalami penurunan menjadi Rp 39,01 Miliar pada tahun 2024. Pola pergerakan ini menunjukkan prioritas pembangunan gedung dan bangunan di Kabupaten Labuhanbatu. Secara struktur, belanja gedung dan bangunan memiliki rata-rata sebesar 33,06% selama periode 2020 sampai dengan 2024.

Struktur Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan secara konsisten

merupakan realisasi belanja modal terbesar dengan rata-rata 44,79% per tahun. Pada tahun 2020, realisasi mencapai Rp 48,11 Miliar kemudian meningkat di tahun berikutnya menjadi Rp 51,25 Miliar pada tahun 2021 dan di tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai Rp 119,08 Miliar sekaligus menjadi belanja jalan, irigasi dan jaringan terbesar selama masa periode 2020 sampai dengan 2024. Namun demikian di tahun berikutnya terjadi sedikit penurunan belanja jalan, irigasi dan jaringan menjadi Rp 108,79 Miliar dan kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp 60,69 Miliar. Stabilitas pengeluaran yang besar pada kategori belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan menunjukkan fokus yang kuat pada pengembangan infrastruktur, sekaligus penurunan di tahun terakhir menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengoptimalan berdasarkan kebutuhan dana untuk kemajuan daerah.

Peninjauan dari isi belanja aset tetap lainnya menunjukkan fluktuasi cenderung menurun signifikan terhadap penyerapan belanja. Realisasi pada tahun 2020 mencapai Rp 14,25 Miliar kemudian terjadi penurunan realisasi menjadi Rp 9,62 Miliar pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi penurunan realisasi kembali menjadi Rp 7,84 miliar dan juga menurun menjadi Rp 6,97 Miliar pada tahun 2023 serta di tahun terakhir menurun signifikan menjadi sebesar Rp 0,22 Miliar pada tahun 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa pengeluaran untuk aset tetap lainnya berubah berdasarkan kebutuhan spesifik yang mungkin tidak konsisten dari tahun ke tahun.

2.5.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen penting dalam transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis pembiayaan daerah ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan yang timbul akibat ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja. Pembiayaan daerah mencakup dua kategori utama: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari beberapa elemen,

termasuk Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan digunakan untuk berbagai tujuan seperti Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

Dalam upaya memperoleh gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah dari aspek pembiayaan, langkah awal yang harus dilakukan adalah menilai komponen pembiayaan Kabupaten Labuhanbatu sehingga tergambarkan pola riil realisasi APBD dan pembiayaan. Evaluasi ini melibatkan perbandingan pergerakan pembiayaan daerah selama periode 2020 hingga 2024. Gambaran kinerja keuangan yang dilakukan tidak hanya memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber-sumber pembiayaan yang tersedia, tetapi juga mencerminkan seberapa efektif strategi pembiayaan diterapkan dalam memenuhi kebutuhan anggaran. Melalui evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berupaya mengidentifikasi pola penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan pembangunan daerah. Evaluasi yang komprehensif dan mendalam ini adalah kunci untuk memastikan bahwa strategi pembiayaan yang diterapkan mampu menutupi defisit anggaran dengan efektif dan efisien, sehingga mendukung tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Labuhanbatu. Hasil kinerja penerimaan pembiayaan tersebut dirangkum sebagai berikut:

Tabel 2.64 Surplus (Defisit) Riil Realisasi APBD dan SiLPA Kabupaten Labuhanbatu (Rp Miliar)

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Pendapatan Daerah	1.177,76	1.342,11	1.251,24	1.418,20	1.256,58
Pendapatan Pembiayaan Daerah	0,00	0,13	0,04	0,07	0,00

Dikurangi dengan					
Realisasi Belanja daerah	1.187,86	1.266,14	1.301,84	1.418,29	1.242,14
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,60	6,75	4,48	0,00	0,00
Surplus (Defisit) Riil	-10,70	69,34	-55,04	-0,085	14,44
SiLPA Sebelumnya	31,77	21,06	90,40	35,36	35,35
Penyesuaian APBD	0,00	3,56	35,92	-56,97	-21,76
SiLPA Perhitungan Sebelumnya	31,77	21,40	89,60	34,54	0,00
SiLPA	21,06	90,40	35,36	35,35	49,79

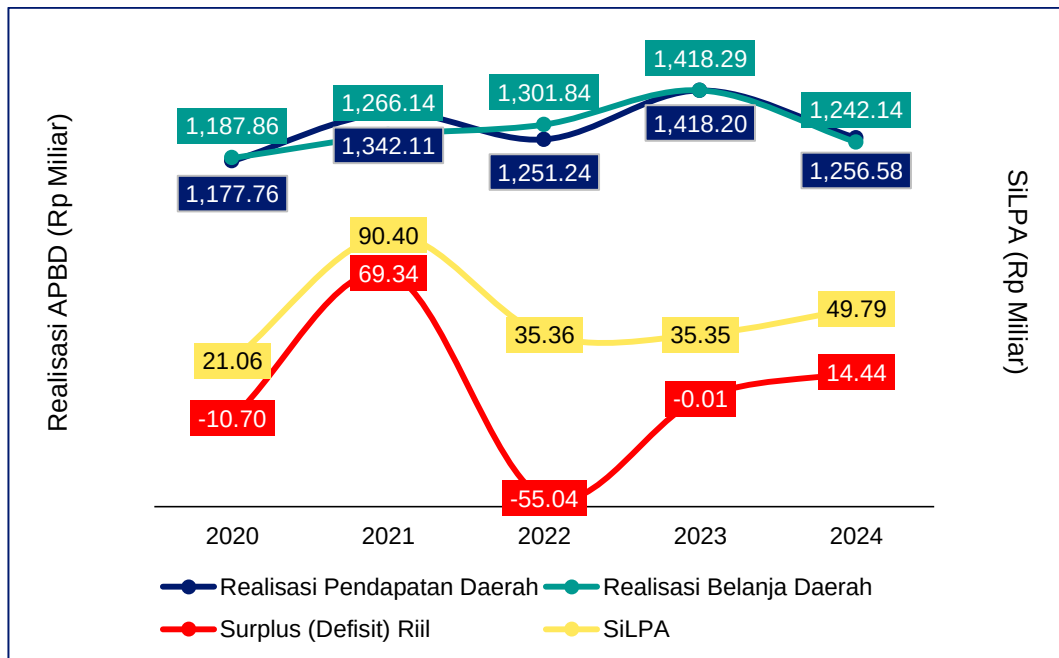
Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Gambaran umum surplus dan defisit riil APBD Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran selama tahun berjalan. Surplus dan defisit menggambarkan kemampuan Kabupaten Labuhanbatu dalam menghasilkan pendapatan daerah kemudian melakukan belanja daerah sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan pendanaan dari sumber -sumber pendapatan secara efektif dan efisien. Pembiayaan, berupa pendapatan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Labuhanbatu menjadi sumber pendapatan dan pengeluaran tambahan sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan di luar pendapatan dan belanja daerah yang terjadi selama tahun berjalan. Surplus atau defisit riil diperoleh setelah menambahkan surplus atau defisit tahun berjalan sehubungan dengan pendapatan dan belanja daerah dengan pembiayaan netto dari aktivitas pembiayaan daerah. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) merupakan dana APBD tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk menutupi defisit riil yang terjadi dan dapat bertambah jumlahnya seiring dengan surplus riil yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu.

Selama periode 2020 sampai dengan 2024, Kabupaten Labuhanbatu cenderung mengalami defisit riil yang mencapai Rp 55,04 Miliar pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan pergerakan agresif dari penyelenggaraan APBD Kabupaten Labuhanbatu dengan pertimbangan ketersediaan SiLPA dari tahun sebelumnya. Keberadaan SiLPA dapat menutupi defisit riil yang terjadi sehingga aktivitas belanja sehubungan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan secara agresif.

SiLPA Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan kesempatan bagi Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan perencanaan APBD secara agresif, di mana pengeluaran untuk belanja daerah dapat disusun lebih besar sampai dengan Rp 58,03 Miliar atau sesuai dengan saldo SiLPA yang tersedia. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu juga perlu mempertimbangkan penggunaan SiLPA untuk meningkatkan efisiensi penganggaran ke depannya. Eksistensi SiLPA menjadi catatan penggunaan pendapatan yang belum optimal untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu. Posisi SiLPA dalam efisiensi perencanaan pembangunan diharapkan mencapai posisi nol ke depannya.

Penyelenggaraan APBD pada tahun 2020 mencapai defisit Riil sebesar Rp 10,70 Miliar yang dapat dipenuhi dari SiLPA tahun sebelumnya. Sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun 2020 menyisakan pendapatan sebesar Rp 21,06 Miliar. Penyelenggaraan APBD cenderung mendekati efisiensi APBD. Namun, pada tahun 2021 pemerintah menghasilkan surplus APBD sehingga SiLPA pada tahun 2022 mencapai Rp 90,40 Miliar. Pada tahun 2023, Kabupaten Labuhanbatu kembali mengalami defisit APBD sebesar Rp 85 juta. Pada tahun 2024, Kabupaten Labuhanbatu mengalami surplus sebesar Rp 14,44 miliar sehingga SiLPA Kabupaten Labuhanbatu bertambah menjadi sebesar Rp 49,79 miliar. Pergerakan SiLPA dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.47 Pergerakan Realisasi SiLPA Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu

Gambar di atas menunjukkan bahwa pergerakan realisasi pendapatan dan belanja Kabupaten Labuhanbatu cenderung bergerak secara sejalan dimana pergerakan belanja masih relatif mendekati dengan pola pergerakan pada pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan APBD selama periode 2020 sampai dengan 2024 masih cenderung konservatif, meskipun Kabupaten Labuhanbatu memiliki SiLPA yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah ketika terjadi defisit riil. Penyelenggaraan APBD tersebut juga mencerminkan pengelolaan manajemen risiko dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis perencanaan yang baik untuk meminimalisir kemungkinan permasalahan keuangan akibat defisit yang terlalu besar. Selain itu, pergerakan SiLPA dirasakan cukup fluktuatif.

2.5.5 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan APBD secara umum tecermin melalui kebijakan pendapatan, pembelanjaan, serta pembiayaan daerah. Dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik, diperlukan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam

memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Setiap langkah dalam pengelolaan ini harus dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan, hingga pertanggungjawaban yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menetapkan mekanisme pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Langkah ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selanjutnya, pada bagian ini akan dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait dengan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

2.5.6 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah berasal dari berbagai sumber. Pemerintah perlu melakukan optimalisasi pendapatan daerah dengan strategi yang efektif, baik dalam hal peningkatan basis pajak maupun dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah daerah harus proaktif dalam menggali potensi pendapatan, melalui pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan retribusi, serta memperbaiki sistem pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam upaya mengevaluasi kebijakan pendapatan daerah yang telah dilaksanakan, maka perlu diulas pendekatan yang telah dilaksanakan selama periode 2020 sampai dengan tahun 2024.

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2020-2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Selama periode tahun anggaran 2020-2024, kebijakan

umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; dan (3) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

1. meningkatkan pendapatan daerah dengan menerapkan sistem pembayaran pajak secara on-line dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
2. meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
3. meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
4. meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
5. meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
7. mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
8. mengembangkan Alternatif – alternatif pembiayaan pembangunan lainnya.
9. melakukan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan DPRD Kabupaten Labuhanbatu, DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan DPR RI.

2.5.7 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara efektif, efisien, adil dan merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam penyediaan pelayanan umum. Oleh karena itu, belanja daerah difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan dasar seperti pelayanan kependudukan,

pendidikan, kesehatan, prasarana dan sarana (infrastruktur), termasuk infrastruktur lingkungan pasar-pasar tradisional dan fasilitas sosial/fasilitas umum lainnya guna mempercepat proses pembangunan di wilayah administratif Kabupaten Labuhanbatu.

Kebijakan belanja daerah selama periode sebelumnya diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Efisiensi dan efektivitas belanja daerah dicapai dengan menyusun prioritas belanja yang tepat sasaran, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran daerah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran merupakan kunci dalam mencegah terjadinya pemborosan dan penyalahgunaan anggaran. Pemerintah daerah juga melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan belanja daerah, guna memastikan bahwa setiap kebijakan belanja mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2019-2023 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain:

1. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
2. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan;
3. Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan KUKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;
4. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan - kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi

yang berlebihan terhadap sumber daya alam;

5. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM);
6. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
7. Kebijakan untuk operasi daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dijangkau oleh masyarakat luas;
 - c. mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - d. mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; dan
 - e. mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.5.8 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan aspek penting lainnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah yang telah dilaksanakan mencakup pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia, seperti pinjaman daerah, obligasi daerah, serta kerjasama dengan pihak swasta. Ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dan mendukung program-program pembangunan yang membutuhkan dana besar. Pemerintah daerah melakukan analisis risiko yang mendalam sebelum memutuskan untuk mengambil pembiayaan, serta memastikan bahwa setiap bentuk pembiayaan dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab.

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas daerah dalam bentuk penyertaan modal atau pemberian pinjaman daerah yang dialokasikan kepada pemberian dana bergulir kepada UMKM. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan piutang daerah.

2.5.9 Kerangka Pendanaan

Evaluasi kinerja keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2020-2024 menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Dengan rata-rata pendapatan transfer sebesar 81,24% dan mencapai 87,42% pada tahun 2023, ini menandakan perlunya strategi untuk meningkatkan derajat kemandirian fiskal daerah. Ketergantungan ini terutama disebabkan oleh kebijakan terkait gaji Pegawai Negeri Sipil dan program pembangunan di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu menyusun strategi yang efektif dalam perencanaan periode RPJMD 2025-

2029. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan fungsi kabupaten sehingga mampu mendukung peningkatan belanja, baik belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, maupun belanja transfer. Dengan demikian, pengelolaan APBD dapat lebih diarahkan pada pembiayaan urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang yang menstimulus kegiatan ekonomi serta sosial budaya masyarakat. Pada periode 2025-2029, belanja daerah akan difokuskan pada program-program penguatan dasar infrastruktur untuk mempersiapkan landasan transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola yang lebih baik. Belanja ini diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya yang akan mendukung percepatan pembangunan daerah.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, Kabupaten Labuhanbatu berupaya untuk menjadikan prioritas utama ke depan adalah peningkatan kemandirian fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan belanja operasi dan belanja modal. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu berupaya mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer dengan menggali potensi sumber pendapatan lokal. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta mengoptimalkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemerintah akan mengupayakan pengkajian ulang terhadap potensi-potensi retribusi daerah, termasuk potensi retribusi daerah dari pemanfaatan parkir di tepi jalan dan pengelolaan aset daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat.

Dari sisi belanja, selama periode RPJMD 2025-2029, belanja daerah diprioritaskan kepada peningkatan infrastruktur sebagai modal dasar transformasi sekaligus memberikan stimulus kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Penggunaan belanja operasi lebih diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, serta bantuan sosial. Sementara itu, belanja modal diarahkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat memperkuat transformasi sosial dan ekonomi daerah.

Prinsip penyelenggaraan APBD didasarkan kepada prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan berpedoman pada klasifikasi belanja sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan menyesuaikan perencanaan APBD dengan ketentuan yang berlaku.

Belanja operasi diproyeksikan akan mengalami peningkatan, terutama dalam hal belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, dan bantuan sosial. Untuk menekan pertumbuhan belanja pegawai, diperlukan rasionalisasi jumlah pegawai dan efisiensi organisasi sesuai dengan kebijakan formasi dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penggunaan belanja lainnya akan diarahkan untuk menstimulus aktivitas pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat secara efisien.

Arah kebijakan belanja daerah juga akan difokuskan pada penanganan isu-isu kesehatan masyarakat, seperti stunting, tuberculosis, dan kematian ibu yang masih tinggi. Prioritas ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan strategi yang matang dan kebijakan yang terarah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu optimis dapat mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer dan meningkatkan kemandirian finansial daerah. Melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien, Kabupaten Labuhanbatu berkomitmen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan merata. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Bersama-sama, kita dapat membangun Kabupaten Labuhanbatu yang lebih mandiri, maju, dan berkelanjutan, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan keuangan yang baik dan amanah.

2.5.10 Proyeksi Pendapatan Daerah

Dalam upaya memperoleh proyeksi pendapatan yang realistis, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan analisis terhadap data realisasi pendapatan daerah sebelumnya. Data historis selama periode 2020 sampai dengan 2024 memberikan gambaran yang jelas tentang pergerakan dan pola pendapatan daerah. Pola ini dapat dijadikan salah satu dasar untuk perencanaan masa depan. Melalui analisis ini, kita dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang paling produktif dan berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah, serta sektor-sektor yang memerlukan perhatian lebih. Selain itu, proyeksi pendapatan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan indikator makroekonomi. Hal ini menjadi langkah strategis yang harus dilakukan dalam proyeksi pendapatan daerah. Indikator makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan indikator lainnya, memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi yang lebih luas. Dengan memahami bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi pendapatan daerah, Pemerintah Daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan responsif. Adapun asumsi-asumsi yang digunakan untuk memproyeksi pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2025-2029, antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu.

Laju pertumbuhan pendapatan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 11,40%. Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020 berada pada realisasi Rp 1.177,76 miliar. Selanjutnya, pendapatan daerah cenderung mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 mencapai Rp 1.418,20 Miliar, namun menurun pada tahun 2024 menjadi Rp 1.256,56 miliar. Asumsi ini telah memperhitungkan penurunan realisasi pendapatan yang terjadi pada tahun 2022 dan 2024. Keberhasilan peningkatan PAD sebelumnya didukung dengan pengoptimalan pendapatan melalui pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah, meskipun pada tahun 2024 pengelolaan PAD menjadi kurang optimal. Sementara itu, retribusi daerah selama lima tahun terakhir masih belum optimal. Dengan mempertimbangkan

penggalan potensi pendapatan asli daerah yang lebih optimal, asumsi pendapatan daerah diproyeksikan akan meningkat.

2. Asumsi indikator makro ekonomi

Dalam upaya memperoleh gambaran yang lebih baik dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah, Kabupaten Labuhanbatu juga melakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator makro. Indikator makro yang digunakan meliputi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan yang terjadi selama lima tahun sebelumnya.

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu wilayah yang tetap mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik pada masa pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun selama periode 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan secara terus menerus, mulai dari 0,09% pada tahun 2020, meningkat menjadi 5,06% pada tahun 2024. Pola indikator makro ini menunjukkan resiliensi perekonomian yang baik dan peluang pertumbuhan yang signifikan di Kabupaten Labuhanbatu. Kondisi ini memungkinkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang yang juga akan mendorong potensi peningkatan PAD dari berbagai sumber-sumber PAD sekaligus menggali potensi pajak, retribusi dan lain-lain PAD yang sah.

Tingkat inflasi di Kabupaten Labuhanbatu tergolong cukup terkendali dan mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2024 tingkat inflasi berada pada tingkat 3,36% yang akan memberikan stimulus terhadap perekonomian dengan pergerakan yang terkendali. Target pemerintah selama lima tahun ke depan juga mengendalikan laju inflasi tetap positif pada angka 2,20 sampai 2,50% agar dapat memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi dan potensi pendapatan daerah yang semakin baik.

Hasil evaluasi dari tingkat pengangguran masih menunjukkan angka tingkat pengangguran terbuka TPT mencapai 5,90% pada tahun 2024. Kondisi ini meningkat dari sebelumnya tahun 2020 berada pada tingkat 6,05%. Kabupaten Labuhanbatu memperoleh surplus tenaga kerja baru

yang membuat tingkat pengangguran menjadi semakin tinggi. Peninjauan dari sisi positif, hal ini memberikan peluang bagi Kabupaten Labuhanbatu untuk mengoptimalkan perekonomian dengan memanfaatkan angkatan kerja yang belum bekerja sehingga dapat mendorong potensi perekonomian dan pendapatan daerah secara signifikan.

Dari sisi kemiskinan, angka kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu mencapai 7,84% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan pola penurunan selama periode 2020 sampai dengan 2024. Indikator makro ini memberikan arah bahwa pemerintah dapat mendorong potensi pendapatan daerah lebih tinggi selama lima tahun ke depan.

3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Kabupaten Labuhanbatu berupaya untuk melakukan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui peningkatan jumlah wajib pajak dan sumber penerimaan pajak serta retribusi daerah. Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan mengoptimalkan titik parkir sebagai sumber penerimaan retribusi parkir di daerah. Ekstensifikasi juga dioptimalkan dengan melakukan pendataan serta pengoptimalan pendataan wajib pajak yang selama ini belum terdata oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Dalam hal intensifikasi pendapatan daerah, pemerintah berupaya mengkaji kembali potensi retribusi dan pajak daerah sehingga dapat memperoleh gambaran nilai optimal atau tarif optimal yang dapat mendukung penerimaan pendapatan daerah sekaligus mengoptimalkan fungsi-fungsi penerimaan pendapatan retribusi daerah.

4. Kebijakan di bidang keuangan negara dan daerah.

Pertimbangan ini didasarkan pada kebijakan keuangan pendapatan transfer baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran berdasarkan kebijakan keuangan negara maupun daerah.

Dalam upaya untuk menyusun perencanaan anggaran yang lebih baik, diperlukan upaya proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu selama satu periode ke depan. Berikut ini adalah proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk tahun anggaran 2026-2030:

Tabel 2.65 Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu

No	Uraian	Baseline 2024	Proyeksi (Rp)				
			2026	2027	2028	2029	2030
01	PENDAPATAN	1.256.575.817.158	1.346.082.399.534	1.394.964.440.286	1.446.954.864.130	1.502.359.083.318	1.561.517.782.465
01.01	Pendapatan Asli Daerah	150.946.950.787	186.135.149.942	206.853.028.126	229.987.158.797	255.825.825.099	284.692.156.872
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	58.114.510.069	74.206.417.907	83.853.252.235	94.754.175.026	107.072.217.779	120.991.606.090
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	5.345.436.235	6.006.132.154	6.366.500.083	6.748.490.088	7.153.399.493	7.582.603.463
01.01.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dipisahkan	12.426.168.386	13.440.143.727	13.977.749.476	14.536.859.455	15.118.333.833	15.723.067.186
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.060.836.096	92.482.456.155	102.655.526.332	113.947.634.229	126.481.873.994	140.394.880.133
01.02	Pendapatan Transfer	1.098.514.252.913	1.152.689.632.403	1.180.781.218.799	1.209.564.210.040	1.239.055.727.972	1.269.273.320.043
01.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.028.077.754.698	1.080.124.191.030	1.107.127.295.805	1.134.805.478.200	1.163.175.615.155	1.192.255.005.534
01.02.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	70.436.498.215	72.565.441.374	73.653.922.994	74.758.731.839	75.880.112.817	77.018.314.509
01.03	Lain-lain Pendapatan yang Sah	7.114.613.458	7.257.617.189	7.330.193.360	7.403.495.294	7.477.530.247	7.552.305.549

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dilakukan dengan menggunakan acuan pertumbuhan tetap dengan menggunakan potensi pertumbuhan. Potensi pertumbuhan didasarkan pada realisasi pertumbuhan rata-rata selama periode 2020-2024 serta faktor-faktor indikator makro ekonomi dan sosial yang berkembang di Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2020 sampai dengan 2024. Dengan optimisme dan perencanaan yang baik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu untuk tahun 2026-2030 direncanakan bersumber dari empat pilar utama, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer diproyeksikan berdasarkan pertumbuhan dan perlambatan kecenderungan dan ketergantungan dari transfer pemerintah pusat dan daerah yang meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya serta pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu juga melakukan proyeksi terhadap lain-lain pendapatan yang sah. Dengan menerapkan strategi yang inovatif dan efisien, pendapatan Kabupaten Labuhanbatu ditargetkan akan mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan persentase potensi pertumbuhan yang signifikan. Peningkatan pendapatan ini tidak hanya mencerminkan kinerja ekonomi yang kuat, tetapi juga komitmen Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) didasarkan kepada proyeksi pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Baseline dalam perhitungan proyeksi didasarkan pada realisasi pendapatan pada masing-masing sumber pendapatan asli daerah. Potensi pertumbuhan pendapatan pajak daerah mencapai 13,00% per tahun. Pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah diproyeksikan tumbuh dengan

tingkat pertumbuhan 6,00% per tahun. Hal ini diproyeksikan dengan mempertimbangkan optimisasi dan pengkajian ulang atas sumber-sumber retribusi daerah di Kabupaten Labuhanbatu. Dari sisi hasil pengelolaan keuangan daerah yang sah terjadi pertumbuhan sebesar 4,00% per tahun. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami pertumbuhan yang signifikan pada periode 2020 sampai dengan 2024. Ke depan diproyeksikan lain-lain PAD yang sah terus tumbuh dengan sedikit penyesuaian potensi pertumbuhan sehingga diperkirakan akan tumbuh pada tingkat 11,00% per tahun.

Peninjauan dari proporsi sumber PAD, Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menjadi penggerak utama dalam menghasilkan pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2025 – 2029. Masih rendahnya sumber PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disebabkan karena investasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada masih belum optimal. Seiring dengan rencana peningkatan Return on Asset dari BUMD, maka diharapkan pendapatan dari sumber ini dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang mampu meningkatkan PAD. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 2029 diproyeksikan meningkat menjadi Rp 284,69 Miliar.

B. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan transfer merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Untuk transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Sedangkan untuk transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Nilai pendapatan transfer Kabupaten Labuhanbatu dari pemerintah pusat diproyeksikan meningkat pada tahun 2026 menjadi Rp 1.152,69 miliar dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2030

mendatang dengan proyeksi sebesar Rp 1.269,27 Miliar. Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mulai berkurang pada pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya. Namun posisi strategis dan rencana pengembangan sektor industri dan pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu mendorong potensi pertumbuhan pendapatan transfer secara umum. Sementara itu, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya tumbuh menjadi Rp 77,02 Miliar.

C. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber utama lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Labuhanbatu adalah Pendapatan Lainnya. Pendapatan lainnya mengacu kepada lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan yang ada dari lain-lain pendapatan yang sah meliputi hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya dan diproyeksikan mengalami peningkatan 1,00% per tahun. Sampai dengan tahun 2030, diproyeksikan pendapatan Kabupaten Labuhanbatu dari sumber ini mencapai Rp 7,55 Miliar.

D. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Upaya pengelolaan dan peningkatan PAD di antaranya melalui:

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak

dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

2. Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah melalui sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
4. Mengkaji ulang pendapatan retribusi daerah terkait dengan potensi retribusi serta upaya dalam mengoptimalkan pendapatan melalui retribusi daerah.
5. Menaikkan pajak melalui peningkatan/penyesuaian tarif dan perluasan subyek dan obyek pajak dengan meninjau ulang beberapa ketentuan Perda tentang pajak dan retribusi daerah.
6. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
7. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
8. Memberikan insentif/bonus dan penghargaan kepada perangkat daerah yang berhasil mencapai atau melampaui target dan menjatuhkan sanksi kepada perangkat daerah yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran.
9. Penerapan dan penegakan ketentuan hukum bagi wajib pajak/retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak/ retribusi yang telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan.
10. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta perangkat daerah penghasil.
11. Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar

memberikan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.

12. Tidak melaksanakan pemungutan terhadap peraturan daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah yang telah dibatalkan oleh pemerintah.
13. Bagian laba yang diperoleh dari PDAM diupayakan untuk direinvestasikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan untuk menunjang Program Penambahan Sambungan Rumah Air Minum.
14. Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.

Dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat di sharing dengan daerah guna meningkatkan bagian dari bagi hasil pajak.
2. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah.
4. Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN dan APBD Provinsi.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan pendapatan transfer.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai perundang-undangan. Kebijakan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

2.5.11 Proyeksi Belanja Daerah

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam memproyeksikan belanja daerah harus memperhatikan asumsi indikator makro ekonomi, tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama kebijakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terkait belanja dan kebijakan pembiayaan.

Proyeksi belanja daerah yang dilakukan pada tahun 2026 sampai dengan 2030 memiliki kecenderungan laju pertumbuhan yang lebih tinggi daripada laju pertumbuhan yang berbeda secara komponen daripada pendapatan belanja. Oleh karena itu, surplus anggaran pendapatan dimungkinkan pada awal perencanaan APBD yang bergerak secara proporsional. Adapun analisis proyeksi belanja daerah diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2.66 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Rp)

No	Uraian	Baseline	Proyeksi				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
02	BELANJA DAERAH	1.242.135.434.894	1.346.082.399.534	1.394.964.440.286	1.446.954.864.130	1.502.359.083.318	1.561.517.782.465
02.01	Belanja Operasi	969.800.857.366	1.036.881.562.340	1.066.276.163.771	1.105.322.439.736	1.148.316.180.663	1.178.849.986.135
02.02	Belanja Modal	152.576.093.032	189.377.038.057	208.826.843.704	221.729.594.541	234.094.536.057	262.669.339.311
02.03	Belanja Tidak Terduga	311.022.100	376.336.741	413.970.415	455.367.457	500.904.202	550.994.622
02.04	Belanja Transfer	119.447.462.396	119.447.462.396	119.447.462.396	119.447.462.396	119.447.462.396	119.447.462.396

A. Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah ke depan diarahkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.
2. Pengelolaan belanja daerah dilakukan dengan berfokus kepada peningkatan kualitas pelayanan publik agar masyarakat dapat menerima manfaat nyata dari pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu
3. Pengelolaan belanja daerah mengoptimalkan fungsi kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan pihak swasta dengan metode public private partnership untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
5. Belanja daerah diprioritaskan untuk program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat.
6. Belanja daerah diprioritaskan pada program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
7. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

8. Pembangunan infrastruktur berbasis dengan kebutuhan yang diperlukan Kabupaten Labuhanbatu. Penyediaan belanja infrastruktur disiapkan dalam dokumen perencanaan dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi. Penyediaan infrastruktur dilakukan dengan studi kelayakan untuk memastikan kebermanfaatan dan keberlangsungan infrastruktur secara jangka panjang dalam pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu.
9. Prioritas pengeluaran belanja daerah dievaluasi secara berkala terkait dengan produktivitas penggunaan anggaran sehingga dapat disusun prioritas yang lebih tepat sasaran dalam penyusunan APBD Kabupaten Labuhanbatu.
10. Penyelenggaraan belanja daerah diimplementasikan dalam bentuk e-government sehingga pengelolaan anggaran dan belanja dapat terintegrasi dan dapat dikelola secara real-time.

2.5.12 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Analisis atas proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran (SILPA). Proyeksi pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pada tiga tahun pertama perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan APBD cenderung memiliki surplus dengan laju pendapatan daerah yang lebih cepat daripada pengeluaran belanja daerah. Pada masa ini pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mempersiapkan perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan dioptimalkan pada tahun keempat dan kelima. Berikut ini adalah besarnya proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Labuhanbatu selama kurun waktu tahun 2026-2030:

Tabel 2.67 Proyeksi Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Rp)

Uraian	Baseline	Tahun					
	2024	2026	2027	2028	2029	2030	
Penerimaan Pembiayaan	35.352.976.487	0	0	0	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0	0	0
Pembiayaan Netto	35.352.976.487	0	0	0	0	0	0

2.5.13 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Adapun kebijakan pembiayaan daerah untuk mengelola surplus dan menutup defisit anggaran diarahkan pada:

1. Surplus anggaran terjadi dengan maksud pengelolaan pendapatan daerah yang akan dikelola untuk kegiatan jangka panjang. Pengelolaan pendapatan daerah berkelanjutan sangat penting untuk memastikan adanya cadangan keuangan yang memadai untuk masa depan. Surplus anggaran dialokasikan dalam bentuk dana cadangan untuk proyek-proyek strategis di masa depan.
2. Dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
3. Pinjaman daerah (jika diperlukan) harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, profesional, dan tepat guna untuk menghindari dampak negatif bagi keuangan daerah.
4. Pada tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran.
5. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian

(prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

6. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
7. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup antara lain: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan ke depan diarahkan pada:
 - a. modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD.
 - b. Pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD dan Dana Bergulir (Kredit Program).

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan adalah suatu keadaan ketika tujuan yang diharapkan tidak terjadi sesuai dengan realita. Permasalahan muncul akibat adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat tercapainya tujuan. Dalam perencanaan pembangunan daerah masih tidak terlepas dari masalah. Rumusan permasalahan pembangunan daerah berasal dari analisis data dan evaluasi capaian pada gambaran umum kondisi daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu untuk jangka menengah sebagai berikut:

Tabel 2.68 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang optimalnya peningkatan kualitas SDM	Menurunnya partisipasi siswa dalam pendidikan	Kurangnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Kurangnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi Kurangnya kemampuan finansial siswa untuk menempuh pendidikan
		Kurangnya kualitas layanan kesehatan	Kurangnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan Kurang meratanya distribusi dokter dan tenaga kesehatan Belum optimalnya akses kesehatan masyarakat Kurangnya inovasi di bidang kesehatan
		Rendahnya kualitas tenaga kerja	Masih rendahnya angkatan kerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi Kurangnya SDM yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Rendahnya upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja
2	Masih tingginya persentase penduduk miskin	Belum optimalnya penanganan PMKS	Kurang optimalnya pengelolaan database PMKS Belum optimalnya pemberian bantuan sosial kepada PMKS Kurang optimalnya pemberdayaan PMKS
3	Belum optimalnya penurunan angka pengangguran	Rendahnya kualitas tenaga kerja	Masih rendahnya angkatan kerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi Kurangnya SDM yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Rendahnya upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja
		Kurangnya lapangan pekerjaan	Masih kurangnya investasi sektor riil Kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha
4	Masih rendahnya kualitas infrastruktur	Kurang optimalnya pengelolaan infrastruktur	Masih banyaknya jalan dalam kondisi rusak Masih adanya saluran irigasi yang rusak Belum optimalnya sistem drainase
		Kurang optimalnya sarana dan prasarana	Masih adanya kawasan kumuh Kurangnya akses rumah layak huni

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup	Kurangnya pengelolaan sampah Rendahnya kesadaran masyarakat	Belum tersedianya tempat pengolahan sampah Belum diterapkannya prinsip 6R Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait sampah
6	Belum optimalnya pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Kurang optimalnya pengelolaan pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata	Belum optimalnya penerapan hilirisasi produk agroindustri Kurangnya keterampilan tenaga kerja dalam mengolah produk pertanian, perikanan, peternakan Kurangnya inovasi dan teknologi pengolahan produk pertanian, perikanan, peternakan Kurangnya daya tarik destinasi wisata Belum optimalnya pembangunan destinasi wisata Kurangnya kualitas SDM pariwisata
7	Belum optimalnya pengelolaan sumber dan pemanfaatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rendahnya kontribusi PAD	Kurang optimalnya pengelolaan sumber PAD Masih belum tergalinya potensi PAD
8	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Rendahnya kualitas pelayanan publik Kurangnya integritas ASN	Kurang optimalnya pengelolaan sistem informasi pemerintahan Belum terintegrasinya data antar perangkat daerah Rendahnya inovasi dalam pemerintahan Masih banyaknya urusan pemerintahan yang menggunakan sistem tradisional Rendahnya kualitas SDM ASN pada pemerintahan Kurangnya ASN yang memiliki keahlian sesuai bidangnya Kurang optimalnya manajemen ASN Belum efisiennya struktur organisasi

Uraian terkait permasalahan pembangunan sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya peningkatan kualitas SDM

Kualitas SDM merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dilihat dari

perkembangannya, IPM Kabupaten Labuhanbatu mengalami tren meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai 75,20 poin. Namun capaian ini masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dengan IPM sebesar 75,76 poin. Pada aspek pendidikan, rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 mencapai 9,50 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP menuju kelas 1 SMA. Hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu secara umum masih berada pada tingkat tersebut. Akan tetapi, harapan lama sekolah meningkat cukup tinggi, di mana pada tahun 2024 mencapai 13,26 tahun atau setara dengan tingkat Diploma I. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Kabupaten Labuhanbatu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menempuh pendidikan, namun secara umum masyarakat menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP menuju SMA. Sementara itu, pada aspek kesehatan yang diukur dengan Usia Harapan Hidup (UHH) meningkat hingga tahun 2024 mencapai 73,13 tahun, namun capaian tersebut lebih rendah dibandingkan provinsi sebesar 73,90 tahun dan nasional yang mencapai 74,15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum ekspektasi hidup masyarakat masih lebih rendah di mana hal ini dapat disebabkan dari kurangnya kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, prevalensi stunting juga masih tinggi, di mana pada tahun 2023 mencapai 20,20 persen. Hal ini menandakan bahwa kualitas layanan kesehatan untuk menangani stunting masih kurang optimal. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa kesadaran orang tua untuk pemenuhan gizi anak yang seimbang juga masih rendah sehingga stunting masih cukup tinggi pada tahun 2023.

2. Masih tingginya persentase penduduk miskin

Kemiskinan merupakan kondisi yang harus dituntaskan karena menyangkut rendahnya kesejahteraan masyarakat. Pada Kabupaten Labuhanbatu, persentase penduduk miskin cenderung menurun dari 8,44 persen pada tahun 2020 menjadi 7,84 persen pada tahun 2024. Capaian ini sedikit lebih baik dibandingkan Provinsi Sumatera Utara sebesar 7,99 persen, bahkan lebih baik dibandingkan nasional yang

masih berada pada angka 9,03 persen. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu masih cukup tinggi. Hal ini menandakan bahwa upaya pemerintah dalam menanggulangi penduduk miskin masih belum optimal. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2023 hanya sebesar 40,08 persen. Hal ini menandakan bahwa masih adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran atau belum diberikan kepada PMKS dalam rangka menangani permasalahan tersebut.

3. Belum optimalnya penurunan angka pengangguran

Pada Kabupaten Labuhanbatu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024 sebesar 5,90 persen, di mana angka ini lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,60 persen dan nasional sebesar 4,91 persen. Hal ini menandakan bahwa masih banyak masyarakat angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Hal ini dapat disebabkan oleh masih kurangnya kualifikasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja. Berdasarkan data dari BPS, angkatan kerja yang merupakan lulusan sarjana atau setara ke atas cenderung menurun dari 12,27 persen pada tahun 2020 menjadi 11,48 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa kualifikasi angkatan kerja Kabupaten Labuhanbatu masih berada pada tingkat SMA/SMK ke bawah.

4. Masih rendahnya kualitas infrastruktur

Kualitas infrastruktur fisik di Kabupaten Labuhanbatu masih memiliki permasalahan, salah satunya adalah kualitas jalan. Meskipun kualitas jalan dalam kondisi baik meningkat dari 42,26 persen pada tahun 2020 menjadi 52,33 persen pada tahun 2023, namun menurun pada tahun 2024 menjadi 49,54 persen, hal ini masih menandakan bahwa sebesar 45,84 persen jalan masih berkondisi tidak baik. Selain itu, saluran irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2023 hanya mencapai 13,25 persen saja. Selain itu, akses sanitasi aman bagi rumah tangga hanya sebesar 0,40 persen dan akses air minum aman hanya 11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan dasar pemerintah berupa infrastruktur masih belum bisa dikatakan baik mengingat masih banyaknya infrastruktur yang rusak

pada Kabupaten Labuhanbatu.

5. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 mencapai 64,47 poin, namun jika dilihat dari aspek penyusunnya, Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2023 hanya mencapai 24,70 poin saja. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lahan pada Kabupaten Labuhanbatu masih kurang baik. Selain itu, timbulan sampah yang terolah juga semakin menurun dari 15,40 persen menjadi 15,30 persen sejak tahun 2020-2023. Hal ini menandakan bahwa sampah yang terdapat pada Kabupaten Labuhanbatu lebih banyak ditumpuk saja tanpa dilanjutkan dengan pengolahan di mana hal ini akan berdampak pada pencemaran lingkungan. Rumah Tangga dengan pelayanan penuh pengumpulan sampah pun pada tahun 2023 hanya mencapai 2 persen saja. Hal ini menandakan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya memperoleh akses pelayanan sampah.

6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2024 sebesar Rp 50.801,78 miliar. Sektor industri pengolahan merupakan kontributor utama dengan peranan mencapai 32,53 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor pertanian sebesar 29,48 persen, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,96 persen. Adapun kontribusi dari ketiga sektor tersebut menggambarkan sektor unggulan dan perlu terus diupayakan optimalisasinya agar memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu. Penerapan hilirisasi hasil pertanian, perikanan, dan peternakan diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun implementasinya masih belum optimal. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meningkat selama 5 tahun terakhir dari 24,43 persen (2020) menjadi 29,48 persen (2024), sementara kontribusi Sektor Industri Pengolahan mengalami penurunan dari 34,73 persen

(2020) menjadi 32,53 persen (2024). Apabila hal ini terus berlanjut, maka akan terjadi peralihan sektor perekonomian menuju daerah pertanian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya inovasi dan teknologi dalam pengolahan produk agroindustri. Di samping itu, keterampilan tenaga kerja dalam mengolah barang mentah menjadi barang jadi masih kurang maksimal. Di samping itu, Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang perlu didorong sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB terus menurun dari 1,43 persen pada tahun 2020 menjadi 1,24 persen pada tahun 2024. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pengelolaan sektor pariwisata pada Kabupaten Labuhanbatu masih belum optimal. Kurang optimalnya pengembangan destinasi wisata menyebabkan masih rendahnya kontribusi pariwisata pada perekonomian.

7. Belum optimalnya pengelolaan sumber dan pemanfaatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah sumber finansial bagi suatu daerah untuk membangun daerahnya. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Labuhanbatu cenderung menurun dari 13,71 persen menjadi 12,01 persen sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Sementara itu performa BUMD sebagai *financial support* daerah masih buruk. Pada tahun 2021, *Return on Asset* (RoA) BUMD sebesar -6,12 persen dan pada tahun 2022 juga bernilai negatif, yakni sebesar -3,05 persen. Hal ini menandakan bahwa BUMD masih belum bisa mencetak keuntungan bersih. Peran BUMD justru memberikan beban bagi finansial daerah. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan sumber pendapatan asli daerah pada Kabupaten Labuhanbatu masih belum optimal

8. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2023 memiliki nilai 2,94 poin. Capaian ini menandakan bahwa pengelolaan SPBE masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya mismatch data antar OPD, serta kurangnya integrasi dan sinkronisasi data. Selain itu,

pengelolaan situs-situs pemerintah masih banyak yang kurang baik. Beberapa situs pemerintah tidak dapat diakses sehingga informasi terhadap publik menjadi semakin tidak terbuka dan akses masyarakat menjadi berkurang terhadap pemerintahan.

Permasalahan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.69 Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintah

Urusan	Masalah
Layanan Dasar	
Pendidikan	1 Kurangnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
	2 Masih perlunya peningkatan kualitas fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dan perlu peningkatan kapasitas sesuai dengan standar
	3 belum dilakukannya pemetaan dan pemerataan guru
	4 belum meratanya pendidikan dan pelatihan guru
	5 belum meratanya rasio guru kompetensi bidang studi
	6 masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
	7 Belum tersedianya kurikulum tentang pendidikan karakter yang mendukung visi kepala daerah
	8 belum optimalnya inovasi bidang pendidikan
	9 Belum optimalnya monitoring dan evaluasi
Kesehatan	1 Akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih belum optimal
	2 Belum tercapainya standar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah sesuai standar internasional dengan sertifikasi akreditasi versi 2012 dan Joint Commision International (JCI)
	3 Belum optimalnya sistem rujukan pasien dari puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
	4 Belum optimalnya pelayanan untuk penderita penyakit tertentu seperti Hipertensi, AIDS, Jantung dll
	5 Belum meratanya masyarakat yang kurang mampu untuk menjadi peserta jaminan kesehatan
	6 Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal
	7 Perilaku yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat
	8 Belum optimalnya cakupan imunisasi bayi yang disebabkan kurang kesadaran masyarakat akan

Urusan	Masalah
	pentingnya imunisasi
	9 Belum optimalnya inovasi di bidang kesehatan
	10 Belum optimalnya monitoring dan evaluasi
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana jalan dalam kondisi baik
	2 Masih rendahnya persentase jalan dalam kondisi baik di wilayah pesisir
	3 Masih rendahnya pemeliharaan jalan kabupaten
	4 Belum seluruhnya jalan lingkungan dapat ditangani
	5 Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan sampah dan limbah domestik
	6 Belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir Sampah
	7 Belum optimalnya sistem drainase dan utilitas secara terpadu yang mengakibatkan terjadinya banjir di perkotaan
	8 Belum tersedianya informasi terkait optimalisasi pemanfaatan ruang
	9 Masih tingginya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang
	10 Masih kurangnya fasilitas taman kota
	11 Belum terpenuhinya kebutuhan prasarana irigasi lahan sawah
	12 Belum terpenuhinya akses air minum layak dan sanitasi layak
	13 Masih rendahnya kualitas SDM tenaga konstruksi
	14 Belum optimalnya inovasi bidang pendidikan
	15 Belum optimalnya monitoring dan evaluasi
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 Masih terdapat kawasan-kawasan kumuh yang belum tertangani dengan baik
	2 Belum optimalnya penanganan sarana dan prasarana serta PSU di permukiman kumuh secara keseluruhan
	3 Belum tersedianya Perda tentang kawasan kumuh
	4 Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni
	5 Belum optimalnya pengelolaan PSU di Perumahan
	6 Pembangunan kawasan permukiman masih kurang memperhatikan aspek tata ruang dan kaidah lingkungan hidup
	7 Minimnya ketersediaan data dan informasi di bidang perumahan rakyat
	8 Belum optimalnya inovasi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
	9 Belum optimalnya monitoring dan evaluasi
Ketentraman, Ketertiban Umum,	1 Masih belum optimalnya implementasi perda

Urusan		Masalah
dan Perlindungan Masyarakat	2	Masih belum optimalnya penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
	3	Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
	4	Masih kurang optimalnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan peraturan daerah dengan benar
	5	Belum memadainya ketersediaan sarana, prasarana dan teknologi penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran
	6	Belum memadainya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia LINMAS dan POL PP serta petugas penanggulangan bencana dan kebakaran
Sosial	1	Belum optimalnya pemetaan dan pendataan terhadap populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	2	Kurang maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan PMKS
	3	Potensi sumber kesejahteraan sosial belum dapat dimanfaatkan secara optimal
	4	Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk penanganan PMKS diluar panti
	5	Kurangnya tenaga pendamping sosial untuk pelayanan diluar panti
	6	Belum adanya perda tentang pelayanan sosial diluar panti
	7	Belum optimalnya inovasi bidang sosial
	8	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi
Layanan Non Dasar		
Tenaga Kerja	1	Belum optimalnya perencanaan dan evaluasi ketenagakerjaan
	2	Terbatasnya lapangan pekerjaan belum mampu menampung jumlah pencari kerja
	3	Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja
	4	Masih rendahnya kreativitas dan produktivitas angkatan kerja dalam menciptakan lapangan usaha baru
	5	Kurangnya keterampilan yang dimiliki angkatan kerja
	6	Masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya Tingkat Partisipasi Angkat Kerja
	7	Masih rendahnya kemampuan pemuda dalam memasuki dunia usaha
	8	Belum optimalnya jaminan keselamatan kerja
	9	Belum memadainya keterampilan dan keahlian tenaga kerja baru, disamping masih minimnya upaya-upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja

Urusan	Masalah
	melalui diklat dan pelatihan tenaga kerja lokal
	10 Belum berkembangnya sinergi kebijakan ketenagakerjaan yang memadukan pemerintah, dunia usaha dan pendidikan guna terciptanya peningkatan penyerapan dan penyaluran tenaga kerja
	11 Belum tersedianya sarana dan prasarana balai latihan kerja
	12 Belum optimalnya inovasi dibidang tenaga kerja
	13 Belum optimalnya monitoring dan evaluasi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Masih tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak
	2 Belum optimalnya penanganan komprehensif terhadap Tindakan kekerasan perempuan dan anak
	3 Kapasitas kelembagaan perlindungan anak masih terbatas dan belum optimalnya upaya pengembangan menuju kota/kabupaten layak anak
	4 Masih perlunya optimalisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan atas partisipasi angkatan kerja perempuan
	5 Belum optimalnya dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan
	6 Belum memadainya ketersediaan data terpilah dan terpadu serta anggaran berbasis gender yang mendukung pengembangan kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak di berbagai bidang
	7 Belum optimalnya kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan
	8 Belum optimalnya inovasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	9 Belum optimalnya monitoring dan evaluasi
Pangan	1 Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pangan
	2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih belum maksimal
	3 Belum terjaminnya ketersediaan dan diversifikasi pangan
	4 Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan
	5 Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah
	6 Belum optimalnya inovasi bidang pangan
	7 Belum optimalnya monitoring dan evaluasi
Lingkungan Hidup	1 Belum optimalnya ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup
	2 Masih terjadinya pencemaran dan perusakan Lingkungan

Urusan	Masalah
	3 Masih adanya kerusakan hutan dan lahan
	4 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan
	5 Masih kurangnya sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup
	6 Belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau
	7 Belum optimalnya pengawasan terhadap izin lingkungan
	8 Pelayanan dan manajemen pengelolaan persampahan masih belum optimal
	9 Masih belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana serta teknologi pengelolaan persampahan
	10 Belum terpenuhinya sarana tempat pembuangan akhir sampah (TPA) yang memadai
	11 Pelayanan persampahan belum menjangkau seluruh masyarakat
	12 Rendahnya produktifitas bank sampah
	13 Belum optimalnya pendataan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal
	14 Belum optimalnya inovasi dibidang lingkungan hidup
	15 Belum optimalnya monitoring dan evaluasi
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan terintegrasi
	2 Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus surat-surat administrasi kependudukan
	3 Kondisi sarana dan prasarana pelayanan kependudukan yang belum optimal
	4 Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia bidang administrasi kependudukan
	5 Belum optimalnya inovasi dibidang catatan sipil
	6 Belum optimalnya monitoring dan evaluasi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Belum optimalnya penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan dan asset desa
	2 Masih belum memadainya kapasitas sumber daya manusia aparatur desa
	3 Belum berkembangnya koordinasi dan sinergi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
	4 Belum terlaksananya kerjasama antar desa dan penataan batas desa
	5 Belum optimalnya upaya peningkatan status desa mandiri
	6 Belum optimalnya integrasi penyusunan perencanaan pemanfaatan anggaran pemerintah

Urusan	Masalah
	desa dan kabupaten
	7 Belum berkembangnya inisiatif pengembangan potensi ekonomi desa melalui BUMDES
	8 Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan desa.
	9 Belum adanya kajian potensi desa wisata
	10 Belum optimalnya inovasi bidang pemberdayaan masyarakat desa
Perhubungan	1 Rendahnya pengadaan dan pembangunan persentase sarana dan prasarana perhubungan
	2 Belum adanya terminal tipe C
	3 Belum optimalnya koordinasi perencanaan dan pembangunan sarana dan prasara dermaga pengangkutan sungai
	4 Kurangnya fasilitas perlengkapan dan keselamatan pengguna jalan
	5 Belum optimalnya pengelolaan pengangkutan umum perkotaan
	6 Masih rendahnya wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas
	7 Belum memadainya ketersediaan lampu penerangan jalan dan traffic light di berbagai titik strategis perkotaan sehingga kurang memberikan estetika dan efek penertiban lalu lintas perkotaan
	8 Belum memadainya ketersediaan rambu-rambu lalu lintas di sekitar wilayah perkotaan
	9 Belum tersedianya kajian lokasi Zona Aman Sekolah (ZOS)
	10 Belum optimalnya peningkatan dan kelayakan Pengoperasian Kendaraan bermotor melalui prasarana pengujian kendaraan
	11 Belum tertibnya pengangkutan barang di perkotaan
	12 Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan yang terintegrasi dengan teknologi informasi
	13 Belum optimalnya inovasi dibidang perhubungan
	14 Belum optimalnya monitoring dan evaluasi
Komunikasi dan Informatika	1 Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta layanan komunikasi dan informatika untuk kegiatan yang produktif
	2 Penggunaan media digital berbasis teknologi Informasi yang terpusat, terpercaya dan real time di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu masih rendah
	3 Informasi yang tersedia pada website perangkat daerah masih bersifat statis dan belum disajikan informasi terkini (update)
	4 Belum terbangunnya smart regency (Kabupaten

Urusan	Masalah
	cerdas)
	5 Belum optimalnya inovasi bidang komunikasi dan informatika
	6 Belum tersedianya command center beserta infrastrukturnya
	7 Belum optimalnya pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)
	8 Belum tersedianya pusat data yang menjadi basis kendali penyelenggaraan informasi pemerintahan daerah
	9 Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1 Kurangnya keterampilan dan kemampuan manajerial pengelola koperasi
	2 Cukup banyaknya koperasi yang tidak aktif
	3 Belum terciptanya produk unggulan UMKM yang berdaya saing
	4 Tidak tersedianya database yang terkini (update) untuk koperasi dan UMKM
	5 Masih terbatasnya jiwa kewirausahaan masyarakat
	6 Masih sulit untuk mendapatkan modal untuk memulai dan mengembangkan usaha
	7 Belum optimalnya fasilitasi UMKM dalam mendapatkan kemudahan legalitas usaha, permodalan, pemasaran (desiminasi produk), kemitraan serta pendampingan dalam mengembangkan usaha
	8 Belum optimalnya penggunaan aplikasi digital dalam pemasaran produk UMKM
	9 Belum optimalnya inovasi bidang koperasi dan UMKM
	10 Belum optimalnya monitoring dan evaluasi
Penanaman Modal	1 Kurangnya informasi dan promosi terkait potensi investasi
	2 Masih lamanya urusan perizinan investasi
	3 Belum optimalnya kompetensi aparatur dalam penggunaan aplikasi investasi
	4 Realisasi investasi masih terbatas
	5 Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan perkembangan realisasi investasi
	6 Kurangnya koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan untuk tujuan peningkatan investasi
	7 Belum tersedianya Mall Pelayanan Publik
	8 Belum tersedianya peta investasi Kabupaten Labuhanbatu
	9 Belum optimalnya inovasi bidang Penanaman

Urusan	Masalah
	Modal dan Perizinan
Kebudayaan	10 Belum optimalnya monitoring dan evaluasi
	1 Kurangnya Pelestarian adat budaya daerah
	2 Belum optimalnya pengelolaan kekayaan cagar budaya dan keragaman budaya
	3 Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana seni dan budaya
	4 Belum optimalnya pembinaan dan pagelaran potensi seni dan budaya tradisional guna mendukung aktualisasi pengembangan ekonomi kreatif
Perpustakaan	5 Kurang memadainya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pelaku kebudayaan dan ekonomi kreatif
	1 Masih rendahnya sarana dan prasarana perpustakaan
	2 Masih rendahnya minat baca penduduk Kabupaten Labuhanbatu
	3 Terbatasnya jumlah dan jenis perpustakaan yang dekat dengan masyarakat serta keberagaman koleksi (termasuk koleksi digital)
Kearsipan	4 Terbatasnya SDM perpustakaan baik kualitas, kuantitas maupun persebaran
	1 Masih rendahnya ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah
	2 Belum munculnya kesadaran arti penting pengelolaan arsip daerah
	3 Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola arsip
	4 Rendahnya tingkat digitalisasi kearsipan daerah
Urusan Pilihan	
Pariwisata	1 Belum optimalnya ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan pariwisata kabupaten
	2 Belum berkembangnya Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) andalan Kabupaten Labuhanbatu
	3 Masih belum dilaksanakannya penataan dan diversifikasi daya tarik pariwisata
	4 Belum adanya event promosi pariwisata yang mampu menjadi daya tarik wisata Kabupaten Labuhanbatu
	5 Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang
	6 Belum optimalnya pembinaan, koordinasi, dan sinergi antar stakeholders kepariwisataan
	7 Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana menuju destinasi wisata di Kabupaten Labuhanbatu

	Urusan	Masalah
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1	Masih rendahnya produktivitas hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan
	2	Rendahnya Indeks Pertanaman (IP) lahan sawah tadah hujan
	3	Berkurangnya lahan pertanian tanaman pangan akibat alih fungsi lahan menjadi tanaman perkebunan
	4	Belum adanya perda lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
	5	Rendahnya persentase luas cakupan jaringan irigasi/rawa dan jaringan pengairan lainnya
	6	Rendahnya kualitas sumber daya pelaku agribisnis pertanian dan peternakan
	7	Belum optimalnya penerapan Teknologi Pertanian dan peternakan
	8	Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani dan peternak dalam hal budidaya, integrasi ternak dan tanaman serta penganekaragaman produk pengolahan hasil pertanian dan peternakan
	9	Manajemen produk mulai dari masa panen sampai dengan system pemasaran belum optimal
	10	Belum optimalnya penanganan kesehatan hewan
	11	Rasio ternak unggul terhadap ternak lokal masih rendah
	12	Masih rendahnya kualitas produk hasil pertanian dan perkebunan daerah
	13	Masih rendahnya jumlah kelompok tani yang termasuk kedalam kelas Madya
Perdagangan	1	Belum optimalnya penanganan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor
	2	Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk unggulandaerah
	3	Belum optimalnya penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa yang memadai
	4	Belum optimalnya penataan, pembinaan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima
	5	Belum optimalnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa
	6	Belum optimalnya upaya revitalisasi pasar tradisional
	7	Belum optimalnya pengendalian fluktuasi harga pada saat hari besar keagamaan
	8	Belum optimalnya uji alat-alat ukur, takar, timbang dan pelengkapannya
Perindustrian	1	Rendahnya daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM)
	2	Pemasaran produk hasil industri kecil masih belum

Urusan		Masalah
		tertata dengan baik dan masih bersifat lokal, yang disebabkan belum terpenuhinya standar mutu produk
	3	Rendahnya penerapan peralatan modern dalam usaha industri kecil dan menengah yang mengakibatkan rendahnya kualitas dan peroduktifitas
	4	Belum efisien dan efektifnya sistem distribusi daerah yang disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi
	5	Belum tersedianya sistem informasi harga
	6	Masih terbatasnya kemampuan permodalan para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM)
	7	Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang industry
	8	Masih rendahnya pelaku IKM yang memiliki ijin usaha
Urusan Penunjang		
Perencanaan Pembangunan	1	Keterbasasan dalam ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perencanaan pembangunan
	2	Keterbatasan SDM dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
	3	Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan
	4	Kurangnya sinergi dan koordinasi antar OPD dalam penyediaan data serta perencanaan program dan kegiatan
	5	Masih kurangnya pemanfaatan data-data pembangunan daerah untuk pengembangan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
	6	Belum optimalnya asistensi aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan daerah dalam Musrenbang dan Forum OPD
	7	Belum optimalnya perencanaan daerah berbasis Tematik, Holistic, Integratif dan Spasial (THIS)
	8	Belum optimalnya kolaborasi antar perangkat daerah dan stakeholders lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
	9	Belum optimalnya perencanaan integrasi peluang sumber-sumber pendanaan non pemerintah seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sesuai dengan prioritas pembangunan daerah
	10	Belum optimalnya inovasi dibidang perencanaan pembangunan daerah
Keuangan	1	Kemandirian keuangan daerah masih rendah karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Urusan	Masalah
	terhadap Pendapatan Daerah masih rendah
	2 Belum optimalnya penatausahaan dan pengelolaan barang dan aset daerah
	3 Masih belum diterapkannya secara optimal Analisis Standar Belanja Daerah (ASB) sebagai instrumen penyusunan APBD untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas anggaran
	4 Terbatasnya kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber- sumber strategis penerimaan daerah
Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan	1 Belum optimalnya SDM dalam hal penyelenggaraan pemerintahan baik
	2 Belum optimalnya pemanfaatan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi
	3 Belum optimalnya sistem manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara
	4 Belum optimalnya inovasi bidang aparatur dan kepegawaian
Pengawasan	1 Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah
	2 Belum optimalnya fungsi pengawasan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
	3 Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan
	4 Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat
Sekretariat Daerah	1 Tata Kelola pemerintahan yang belum optimal
	2 Belum optimalnya kapasitas sumber daya dalam mendukung pelaksanaan tata Kelola pemerintah yang baik
	3 Belum optimalnya Penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
	4 Belum optimalnya monitoring dan pengendalian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
	5 Belum optimalnya penataan kelembagaan pemerintah daerah

2.6.1 Isu Strategis

Isu strategis merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan ke depannya berupa suatu permasalahan yang harus diselesaikan atau tantangan yang kemungkinan dihadapi ke depannya. Isu strategis harus diperhatikan karena apabila tidak direspon maka akan

berdampak besar bagi perkembangan suatu daerah.

A. Isu Strategis Global

Isu strategis global dijelaskan pada gambar berikut



Gambar 2.48 Isu Strategis Global Jangka Menengah

Sumber: World Economic Forum, Risk Global Report 2024

Isu strategis global jangka menengah dijelaskan sebagai berikut:

1. Cuaca ekstrem

Cuaca ekstrem yang terjadi berdampak bagi stabilitas pangan di dunia. Kejadian cuaca ekstrem menyebabkan kerusakan lingkungan di berbagai wilayah di mana akan berdampak bagi ketersediaan pangan, kelestarian

lingkungan, serta keseimbangan ekosistem dunia.

2. Perubahan ekosistem

Perubahan ekosistem dunia akibat aktivitas manusia, seperti deforestasi, urbanisasi, pertanian, dan penangkapan ikan yang berlebihan merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Eksploitasi terhadap sumber daya alam, seperti Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, seperti penebangan hutan menyebabkan degradasi ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati.

3. Biodiversity loss dan gangguan ekosistem

Peningkatan aktivitas manusia yang semakin intens berdampak pada kerusakan lingkungan di mana akan menyebabkan perubahan ekosistem dunia. Penebangan hutan secara paksa dan pembakaran hutan menyebabkan fauna yang terdapat di wilayah tersebut terancam punah dan kehilangan habitatnya, serta bermigrasi ke tempat lain. Pencemaran air akibat limbah pabrik akan merusak ekosistem perairan karena menyebabkan spesies yang hidup di dalam air keracunan. Ekosistem yang rusak juga berdampak bagi kualitas hidup manusia, seperti kurangnya kualitas udara, sumber air bersih, atau sumber daya pangan.

4. Krisis Sumber Daya Alam

Ketersediaan sumber daya alam semakin berkurang seiring dengan pertumbuhan penduduk yang menyebabkan peningkatan permintaan terhadap sumber daya alam. Permintaan yang semakin meningkat ini tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan

5. Misinformasi dan disinformasi

Penyebaran informasi di berbagai media, terutama pada media online akan memunculkan berbagai pandangan. Namun, dengan kebebasan tersebut, informasi yang diberikan dapat berupa informasi yang tidak akurat atau informasi yang menipu.

6. Dampak buruk A.I.

Kehadiran A.I. tidak hanya mempermudah aktivitas manusia atau proses bisnis, namun juga berdampak buruk bagi manusia. Otomasi pekerjaan dan kesenjangan keterampilan muncul akibat perkembangan A.I. yang

sangat cepat ini. Permintaan terhadap tenaga kerja berubah akibat kebutuhan terhadap keterampilan digital. Perkembangan A.I. juga berpotensi memberikan informasi palsu, seperti teknologi deepfake yang dapat digunakan untuk membuat konten yang menyesatkan atau menggiring opini.

7. *Involuntary migration*

Konflik yang terjadi seperti perang Ukraina-Rusia, Palestina-Israel, Invasi Iraq atau kemiskinan ekstrim di suatu negara memaksa orang untuk meninggalkan tempat tinggalnya untuk menghindari konflik yang terjadi pada negaranya dan mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain.

8. *Cyber insecurity*

Cyber insecurity adalah kondisi di mana sistem komputer, jaringan, atau data rentan terhadap ancaman atau serangan. Fenomena ini dapat mengakibatkan kerugian yang fatal baik bagi masyarakat secara luas. Masyarakat menjadi merasa terancam akibat pencurian data pribadi mereka.

9. Polarisasi sosial

Polarisasi sosial merupakan perpecahan atau pemisahan masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang memiliki pandangan, nilai, atau identitas yang sangat berbeda secara politik, sosial, atau budaya. Fenomena ini dapat terjadi di banyak negara dan dapat mempengaruhi stabilitas sosial serta proses demokrasi. Meningkatnya ketegangan antar kelompok sosial dapat memicu konflik atau kekerasan. Hal ini juga dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk mencapai konsensus politik dan mengakibatkan pemerintahan yang kurang stabil.

10. Polusi

Polusi bisa berasal dari berbagai sumber dan memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Emisi yang dihasilkan transportasi, industri, dan pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan penurunan kualitas udara, meningkatnya penyakit pernapasan, dan kontribusi terhadap perubahan iklim. Pembuangan limbah industri, pertanian ke perairan menyebabkan kerusakan bagi ekosistem laut dan

pencemaran air minum. Pembuangan limbah ke tanah juga menyebabkan keracunan tanah, pencemaran air tanah, dan degradasi kualitas tanah untuk pertanian.

B. Isu Strategis Nasional

Perumusan isu strategis nasional berdasarkan RPJMN sebagai berikut:



Gambar 2.49Isu Strategis Nasional

Sumber: RPJMN Teknokratik

Uraian isu strategis nasional dijelaskan sebagai berikut:

1. Dampak Hilirasi

Hilirisasi produk di Indonesia memberikan nilai tambah ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hilirisasi perlu didorong secara merata ke seluruh wilayah untuk meningkatkan perekonomiannya. Pemerintah nasional mendorong investasi berbasis industri manufaktur untuk meningkatkan perekonomian di berbagai wilayah.

2. Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral

Kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah perlu disinkronkan oleh seluruh wilayah agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan mencapai visi yang diharapkan. Kondisi daerah tidak homogen sehingga perlu perencanaan yang matang dan sinergi antar daerah agar pembangunan yang dijalankan berjalan sebagaimana mestinya.

3. Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global

Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka perlu meningkatkan standar produk-produk yang dihasilkan. Persaingan di pasar global menuntut Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Hal ini diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing di mata dunia internasional. Hal ini harus dipersiapkan agar Indonesia berhasil meningkatkan statusnya menjadi negara maju

4. Transisi Energi untuk Mendorong Pemerataan

Bentuk dukungan terhadap ekonomi hijau adalah dengan beradaptasi menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT). Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan dalam akses energi, memajukan ekonomi, dan meningkatkan lingkungan yang berkelanjutan.

5. Negara Maju

Beberapa negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan negara-negara maju pada umumnya sedang mengalami perlambatan pertumbuhan penduduk. Hal ini berdampak pada berkurangnya populasi penduduk usia produktif di negara tersebut sehingga penduduk usia produktif semakin banyak menanggung penduduk usia lansia. Hal ini dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas sektor kesehatan untuk menjadi pariwisata kesehatan bagi penduduk usia lansia.

C. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dihadapkan pada pembangunan dan Pembentukan modal manusia. Modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi dari berbagai risiko siklus hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Transformasi Sosial yang menitikberatkan pada

penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi Sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanan kesehatan, serta responsiveness/ketanggapan sistem kesehatan di seluruh wilayah. Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang sedangkan Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Selanjutnya sistem demokrasi masih prosedural ditandai dengan kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata; permasalahan politik elektoral seperti politik uang, politisasi isu SARA; nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi serta sistem kaderisasi partai politik belum maksimal. Selain hal di atas nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan kualitas sumber daya manusia. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

2. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Nias, dan Bukit Lawang. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, diperlukan pembangunan dan perbaikan jalan, bandara, serta transportasi publik yang lebih terintegrasi. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat informasi wisata yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperpanjang durasi kunjungan mereka. Selain infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif juga menjadi kunci dalam mendukung sektor pariwisata. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kerajinan tangan, kuliner khas, serta seni pertunjukan perlu mendapatkan pembinaan dan akses permodalan yang lebih baik. Digitalisasi usaha ekonomi kreatif, seperti pemasaran berbasis e-commerce dan promosi melalui platform media sosial, juga harus diperkuat agar produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya mendukung industri pariwisata tetapi juga memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya harus menjadi fokus dalam pengembangan sektor ini. Pariwisata berbasis alam dan budaya perlu dikembangkan dengan tetap menjaga ekosistem dan kearifan lokal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku wisata mengenai pentingnya ekowisata serta pengelolaan sampah di kawasan wisata harus ditingkatkan.

3. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspons ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspons dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu

dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (urban sprawl). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara. Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatra masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga. Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan. Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T.

Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut. Permasalahan dari pelayanan dasar mencakup tiga aspek, yakni aspek perumahan dan permukiman, aspek kesehatan dan aspek ketenteraman, ketertiban

umum dan perlindungan masyarakat. Aspek perumahan dan permukiman mencakup akses terhadap layanan sumber air minum, sanitasi dan pengolahan air limbah dan lumpur tinja. Aspek kesehatan mencakup Jaminan Kesehatan Sosial, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan distribusi tenaga kesehatan. Sedangkan aspek kasus kejahatan, rasa aman dan penyalahgunaan narkoba. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri belum memenuhi target, hal ini mempengaruhi akses terhadap layanan air minum dan sanitasi. Pada sisi lain ketersediaan air di Provinsi Sumatera Utara secara total masih surplus, termasuk pada daerah kabupaten/kota. Namun pada lokasi-lokasi tertentu terjadi defisit air seperti pada sebagian wilayah Kota Tanjungbalai, Kota Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Batubara, Serdang Bedagai dst. Kondisi defisit dipengaruhi oleh ketersediaan dan tingkat konsumsi. Ketersediaan air cenderung menurun dari waktu ke waktu, selain karena dampak perubahan iklim juga karena makin terdegradasinya daerah hulu baik karena deforestasi, maupun karena alih fungsi hutan dan lahan. Luasan hutan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana kota-kota utama di Sumatera Utara berada, pada umumnya sudah berada di bawah 30%. Hal ini akan menambah ancaman keberlanjutan ketersediaan air pada masa yang akan datang. Kekurangtersediaan air akan menyebabkan ketidaktercapaian target sanitasi dan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh sampah yang belum tertangani, juga disebabkan oleh sanitasi, air peningkatan kualitas lingkungan juga belum memadai, yang tercermin dari belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik (sertifikasi SNI ISO 14001) serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai. Penurunan kualitas air permukaan cenderung meningkat seiring waktu, mengingat penambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Timbulan sampah akan meningkat, juga limbah cair dan lumpur tinja serta limbah B3.

Peningkatan beban lingkungan ini harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

4. Pembangunan antar daerah serta desa-kota

Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi pull factor manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan

pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan. Perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan green waste dan ruang terbuka hijau. Perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak yang semakin parah mengingat 73% wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim terlebih pada 2% wilayah yang sangat rentan perubahan iklim. Pada sisi lain jasa lingkungan pengatur iklim juga dominan bernilai rendah hingga sangat rendah pada wilayah Pesisir Timur Sumatera. Aspek pencegahan serta penanggulangan bencana mencakup jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung karena bencana, jumlah daerah bencana alam yang diperlengkapi secara khusus, dan penurunan indeks risiko bencana yang belum mencapai target. Aspek-aspek ini belum mencapai target juga dipengaruhi oleh wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi bencana tinggi pada beberapa wilayah seperti potensi banjir tinggi pada pantai utara Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan, potensi kekeringan kelas tinggi pada beberapa kabupaten. Keberadaan potensi bencana yang

tinggi ini belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana. Pada sisi lain jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga sangat rendah terutama pada sisi timur Sumatera Utara dan kepulauan Nias. Mengingat dominan bencana alam di Sumatera Utara adalah bencana hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim serta ketidakmampuan alam menampung dampak perubahan iklim, maka upaya penurunan faktor penyebab perubahan iklim mutlak dilakukan disertai dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam.

6. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalanya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan

7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel,

Transparan dan Kolaboratif Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme

ASN melalui meritokrasi dan penguatan core value. Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasi dalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan teknologi pada masyarakat sipil diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan.

D. Isu Strategis Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun berdasarkan hasil analisis data, serta isu strategis dari tingkat global hingga regional, maka perumusan isu strategis pembangunan jangka menengah pada Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Gambar 2.50Isu Strategis Jangka Menengah Kabupaten Labuhanbatu

Uraian terkait isu strategis Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia sebagai penggerak bagi perkembangan daerah. Maka dari itu, kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Pendidikan dan kesehatan merupakan aspek penting bagi peningkatannya. Dari aspek pendidikan, rata-rata lama sekolah masyarakat masih berada pada tingkat pendidikan SMP menuju ke SMA, sementara dari aspek kesehatan usia harapan hidup juga masih lebih rendah dibandingkan rata-rata

kabupaten/kota lain. Prevalensi stunting pun hingga tahun 2023 masih tergolong tinggi, yakni sebesar 20,20 persen. Maka dari itu, pemerintah harus memperhatikan isu kesehatan tersebut, mengingat rendahnya capaian indikator makro bidang kesehatan dan tingginya angka stunting. Pemerintah harus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, akses, serta inovasi pada bidang pendidikan dan kesehatan yang akan membantu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Labuhanbatu.

2. Pengentasan kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi isu nasional dan global. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin pada Kabupaten Labuhanbatu mencapai 7,84 persen. Masih tingginya angka kemiskinan tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dalam pembangunan jangka menengah ini. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu harus mengidentifikasi penyebab kemiskinan, serta memetakan masyarakat miskin agar program-program bantuan sosial bagi masyarakat miskin dapat diberikan dengan tepat.

3. Daya saing tenaga kerja dan perluasan lapangan pekerjaan

Tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten Labuhanbatu mencapai 5,90 persen pada tahun 2024. Pengangguran yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi pembangunan daerah karena hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Pengangguran yang tinggi dapat disebabkan oleh rendahnya kualifikasi tenaga kerja dan kurangnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan data BPS, angkatan kerja dengan kualifikasi perguruan tinggi hanya sebesar 11,48 persen. Perkembangan *Artificial Intelligence* dan *Internet of Things* dapat berdampak bagi ketersediaan lapangan kerja. Kurangnya daya saing tenaga kerja perlu perhatian bagi pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja mengingat perkembangan zaman yang dinamis sehingga diperlukan keterampilan

yang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

4. Peningkatan sektor unggulan dan pemanfaatan potensi daerah

Kabupaten Labuhanbatu perlu meningkatkan sektor unggulan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi bagi daerahnya. Sektor unggulan yang terdapat pada Kabupaten Labuhanbatu adalah Industri Pengolahan dan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Namun, perkembangan kedua sektor tersebut berbalik. Kontribusi sektor Industri Pengolahan terus menurun, sementara Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terus meningkat. Kabupaten Labuhanbatu perlu mendorong Sektor Industri Pengolahan melalui hilirisasi produk-produk pertanian, perkebunan, dan perikanan. Hal ini harus dilakukan agar produk yang ditawarkan keluar daerah tidak hanya dalam bentuk bahan mentah, namun barang jadi yang bernilai tambah sehingga akan membantu percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Di samping sektor tersebut, Kabupaten Labuhanbatu perlu memanfaatkan sektor lain yang berpotensi sebagai sumber perekonomian daerah, salah satunya adalah Sektor Pariwisata. Pengelolaan destinasi wisata Kabupaten Labuhanbatu hingga saat ini masih belum dikelola secara baik. Sektor pariwisata dapat memiliki dampak yang luas, bukan hanya bagi pendapatan destinasi wisata saja, namun juga terhadap UMKM sekitar lokasi wisata. Maka dari itu, pemerintah perlu memperhatikan sektor pariwisata sebagai potensi sumber ekonomi.

5. Infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Infrastruktur merupakan motor penggerak perkembangan daerah. Kualitas infrastruktur yang baik mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Kabupaten Labuhanbatu perlu meningkatkan kualitas infrastrukturnya mengingat masih banyaknya infrastruktur, seperti jalan dan irigasi dalam kondisi rusak. Pembangunan infrastruktur ke depannya juga harus memperhatikan dampak bagi lingkungan sekitar. Pembangunan yang dilaksanakan harus menjaga agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dan kerusakan Sumber Daya Alam

(SDA). Permasalahan sampah harus menjadi concern bagi pemerintah daerah. Pada tahun 2023 hanya sebesar 15,30 persen sampah saja yang terolah di fasilitas pengolahan sampah. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah karena akan berdampak pada kualitas lingkungan secara jangka panjang. Maka dari itu, pada pembangunan jangka menengah ini, permasalahan terkait sampah harus diselesaikan. Hingga saat ini, Kabupaten Labuhanbatu belum memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mulai membangun fasilitas pengolahan sampah tersebut.

6. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu mengidentifikasi potensi Sumber PAD dan memperbaiki manajemen sumber PAD yang sudah ada saat ini. Data pada 5 tahun ke belakang menunjukkan penurunan tingkat kemandirian daerah dari 13,71 persen menjadi 12,01 persen. Selain itu BUMD yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu masih belum mampu menghasilkan keuntungan. Penurunan PAD dan kerugian yang dialami BUMD menjadi beban bagi kondisi finansial daerah. Maka dari itu, perlu perbaikan dari manajemen sumber PAD, pemanfaatan potensi PAD, serta memperbaiki tata kelola BUMD agar mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah.

7. Tata kelola pemerintahan yang adaptif

Tata kelola pemerintahan perlu beradaptasi dengan perkembangan IPTEK saat ini. Dalam memberikan pelayanan yang prima, pemerintah harus mengadopsi dan mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis IPTEK. Hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah urusan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik sehingga pemerintah lebih transparan. Di samping itu, adaptasi terhadap teknologi juga memperluas jangkauan kepada masyarakat. Di samping itu, pemerintah perlu memperbaiki situs-situs dan aplikasi pemerintahan yang tidak terkelola secara baik. Masih banyak ditemukan situs pemerintahan yang tidak update dan tidak dikembangkan secara berkelanjutan sehingga menyebabkan kesulitan

bagi masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan bagi pemerintah. Integrasi data juga perlu dilakukan antar perangkat daerah agar informasi yang diberikan lebih terpercaya. Di samping itu, pemerintah harus meningkatkan integritas ASN agar mengeliminasi praktik-praktik korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.



BAB III

Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan

3.1 Visi dan Misi

Visi RPJMD merupakan pernyataan strategis yang menggambarkan arah pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Visi ini dirumuskan sebagai gambaran ideal kondisi daerah yang ingin dicapai, dengan mempertimbangkan potensi lokal, tantangan global, dan aspirasi masyarakat. Visi harus bersifat inspiratif, terukur, dan mencerminkan karakteristik unik daerah, sekaligus selaras dengan Visi RPJMN dan RPJMD Provinsi.

Misi RPJMD adalah penjabaran operasional dari visi yang berisi langkah-langkah konkret untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Misi dirancang sebagai strategi menjawab permasalahan utama daerah, seperti kemiskinan, ketimpangan, atau daya saing ekonomi. Setiap misi harus spesifik, realistis, dan terikat indikator kinerja, mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Visi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029 adalah:

LABUHANBATU CERDAS BERSINAR

Makna, dari misi tersebut adalah:

1. **CERDAS** merupakan singkatan dari **C**epat **E**legan **R**esponsif **D**emokratis **A**daptif, **S**inergis. Kabupaten Labuhanbatu sangat responsif dalam menghadapi perubahan yang ada serta mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Kabupaten Labuhanbatu menjadi daerah yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat serta menerima segala aspirasi pembangunan yang disampaikan oleh rakyat dan bertindak cepat dalam memajukan daerah.
2. **Bersinar** berarti terbit/muncul setelah redup cahaya yang menerangi Labuhanbatu secara spontan dan mampu memberi energi bagi masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan dari yang seharusnya dapat dicapai.

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka Kabupaten Labuhanbatu memiliki 7 misi pembangunan jangka menengah, yaitu:

1. Penguatan sumber daya manusia dengan pendidikan dan kesehatan yang

berkualitas untuk semua

Manusia berkualitas adalah modal utama pembangunan daerah di tengah disrupsi global dan revolusi industri 4.0. Transformasi pendidikan yang tidak hanya fokus pada literasi dan numerasi, tetapi mengembangkan kompetensi abad 21, meliputi berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Pemerintah akan membangun Sekolah berkualitas di setiap pelosok daerah dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah, didukung fasilitas digital meliputi jaringan *broadband*, perangkat pembelajaran, dan laboratorium inovasi. Kesehatan masyarakat dikuatkan melalui sistem kesehatan komprehensif berbasis preventif-promotif tanpa mengabaikan kuratif-rehabilitatif. Puskesmas direvitalisasi menjadi pusat layanan kesehatan primer dengan telemedicine dan sistem rujukan terintegrasi. Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) dan Kampung KB diperkuat sebagai intervensi untuk mengatasi masalah kesehatan dan kependudukan.

Tujuan untuk misi pertama ada 2, yaitu:

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Kabupaten Labuhanbatu akan meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif sehingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi atau pun memandang status sosial. Sasaran untuk tujuan tersebut adalah:

- 1) Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah;
- 2) Meningkatnya literasi masyarakat; dan
- 3) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

b. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing

SDM yang tersedia harus dipastikan unggul dan mampu berdaya saing global. Pada pembangunan jangka menengah ini, kualitas SDM akan ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang dibutuhkan ke depannya sehingga mampu memenuhi tuntutan industri di masa mendatang. Ada pun sasaran untuk tujuan tersebut, yaitu:

- 1) Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

2. Meningkatkan kemandirian ketahanan pangan

Kemandirian pangan menjadi fondasi ketahanan daerah yang tak tergantikan. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu membangun sistem pertanian yang berdaya tahan melalui diversifikasi komoditas, penguatan rantai pasok lokal, dan penerapan teknologi pertanian presisi. Berbagai program inovatif seperti Desa Lumbung Pangan, Pembibitan Mandiri, dan Integrasi Pertanian-Peternakan digerakkan oleh petani lokal dan kelompok tani yang telah mendapatkan pelatihan intensif. Kabupaten Labuhanbatu akan mewujudkan kemandirian pangan melalui pendekatan hulu-hilir yang komprehensif dari perbaikan sistem irigasi, dukungan permodalan, hingga jaminan pasar. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset sehingga tercipta varietas unggul adaptif iklim dan pupuk organik berbasis kearifan lokal. Transformasi digital turut diperkuat melalui teknologi pertanian yang mempertemukan petani dengan konsumen, mengurangi rantai distribusi, dan memastikan nilai tambah ekonomi tetap di daerah.

Misi ini menjadi prioritas utama dengan mengedepankan sistem regenerasi petani muda, konservasi lahan produktif, dan diversifikasi pangan berbasis potensi lokal.

Tujuan untuk misi kedua adalah:

- a. Meningkatnya ketercukupan konsumsi pangan masyarakat, di mana Pemerintah akan memastikan ketersediaan pangan dan distribusi yang merata di seluruh wilayah, serta harga pangan yang stabil. Adapun sasaran untuk tujuan tersebut adalah
 - 1) Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau

3. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Tata kelola pemerintahan yang adaptif menjadi kebutuhan mendasar pada era yang disruptif. Transformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh dengan menyederhanakan struktur, menghilangkan duplikasi, dan mengoptimalkan fungsi. Pendekatan *agile governance*

diterapkan melalui gugus tugas lintas sektoral yang adaptif terhadap perubahan, didukung sistem informasi terintegrasi *real-time*. Deregulasi dan debirokratisasi menjadi fokus utama dengan menghapus regulasi yang tumpang tindih, menyederhanakan perizinan, dan memperlancar pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan menjadi tulang punggung efisiensi melalui pengembangan sistem *Government Integrated Digital Services*. Pelayanan satu pintu dikembangkan secara daring dan luring, memungkinkan warga mengakses layanan kapan pun dan di mana pun. Transparansi dan akuntabilitas diperkuat melalui platform pengadaan barang/jasa elektronik, anggaran yang transparan, dan sistem pengaduan masyarakat terintegrasi. Inovasi pelayanan publik terus didorong melalui kompetisi dan laboratorium inovasi yang melibatkan kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Kapasitas aparatur merupakan hal yang penting sehingga akan ditingkatkan melalui program pengembangan kompetensi berkelanjutan berbasis *assessment center*. Budaya kerja berorientasi hasil dan pelayanan ditanamkan melalui perubahan pola pikir dan reformasi mental birokrasi. Pemerintah menjadi fasilitator dan katalisator pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Maka dari itu, tujuan untuk misi ketiga, yaitu:

a. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terus melakukan reformasi terhadap regulasi dan kebijakan yang ada agar mempermudah masyarakat dalam segala urusan sehingga meningkatkan kualitas layanan publik di mata masyarakat. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan terus mendorong inovasi dalam pelayanan, serta meningkatkan kapasitas dan daya saing ASN yang profesional. Perencanaan pembangunan yang disusun juga harus terintegrasi sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin efektif. Ada pun sasaran untuk tujuan tersebut, yaitu:

- 1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital;

- 2) Terwujudnya profesionalitas ASN; dan
 - 3) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan perlindungan sosial dan pengembangan budaya
- Sistem perlindungan sosial yang inklusif menjadi jaring pengaman bagi kelompok rentan di tengah dinamika pembangunan. Program perlindungan sosial dibangun untuk melindungi masyarakat dari masa kelahiran hingga lanjut usia. Pemetaan sosial geospasial dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk mengidentifikasi keluarga prasejahtera secara akurat, menghindari eksklusi maupun inklusi yang keliru. Pendekatan adaptif diterapkan melalui bantuan tunai, bantuan pangan non-tunai, dan subsidi pendidikan-kesehatan yang terintegrasi dengan program pemberdayaan. Kelompok rentan khusus seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, dan anak yatim mendapat perhatian melalui program khusus yang menjamin akses terhadap layanan dasar dan partisipasi sosial. Pengembangan budaya diposisikan sebagai pemersatu kebhinekaan sekaligus sumber identitas dan daya saing daerah. Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dilakukan melalui digitalisasi, dokumentasi, dan revitalisasi praktik budaya. Festival budaya berkala diselenggarakan sebagai wahana ekspresi kreativitas dan transmisi nilai antar generasi. Ruang-ruang budaya seperti sanggar seni, museum, dan pusat kerajinan menjadi ekosistem bagi para pelaku budaya untuk berkreasi dan berinovasi. Diplomasi budaya diperkuat melalui pertukaran seni, residensi seniman, dan *showcase* budaya di kancah nasional-internasional, memperkuat posisi daerah dalam konstelasi budaya global. Perlindungan sosial tidak hanya berfokus pada bantuan temporer tetapi menciptakan resiliensi masyarakat dan keberlanjutan budaya.

Maka dari itu, tujuan untuk misi keempat adalah

- a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial
- Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memastikan program-program sosial yang diberikan tepat sasaran dan menangani permasalahannya.
- 1) Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal);

dan

- 2) Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal.

b. Meningkatnya kualitas keluarga yang harmonis dan berbudaya

Dalam meningkatkan kualitas keluarga, maka setiap keluarga di Kabupaten Labuhanbatu akan diperkuat melalui edukasi parenting dan penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan. Pengarusutamaan gender juga menjadi perhatian agar seluruh masyarakat tanpa diskriminasi dapat memperoleh akses pembangunan yang setara dan terlibat dalam pembangunan daerah. Perlindungan terhadap anak juga akan diperkuat sehingga setiap anak merasa terlindungi dan aman dari berbagai tindakan negatif. Adapun sasaran untuk tujuan ini, yaitu:

- 1) Meningkatnya keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
- 2) Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat;
- 3) Terwujudnya keluarga yang berkualitas;
- 4) Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak; dan
- 5) Terwujudnya berkebudayaan maju.

5. Membangun desa dan menata kota berbasis potensi wilayah secara tematik

Desa-kota yang tumbuh berdasarkan karakteristik wilayahnya menciptakan keberlanjutan ekologis sekaligus ekonomis. Kabupaten Labuhanbatu akan mengembangkan desa pertanian, desa perikanan, dan desa wisata berdasarkan potensi sumber daya alam, keterampilan masyarakat, dan peluang pasar. Penataan kota dilakukan dengan pendekatan komprehensif berbasis *smart city*. Kawasan perkotaan dikembangkan melalui konsep *mixed-use development* yang meminimalkan kebutuhan transportasi, menekan jejak karbon, dan menciptakan *livability* yang tinggi. Ruang terbuka hijau, transportasi, dan jaringan jalan ramah pejalan kaki-pesepeda menjadi prioritas dalam tata ruang. Revitalisasi kawasan kumuh dilakukan dengan pendekatan *community-based development*, memastikan peningkatan kualitas lingkungan tanpa menggusur aspek sosial-budaya setempat.

Integrasi desa-kota yang harmonis akan tercipta melalui koridor ekonomi yang menghubungkan sentra produksi dengan pusat konsumsi. Sistem logistik dioptimalkan untuk memperlancar aliran produk desa ke pasar perkotaan, sementara aliran informasi, teknologi, dan modal mengalir ke desa. Pengembangan kawasan perbatasan kota-desa sebagai *buffer zone* ekonomi menciptakan simbiosis mutualisme pada keduanya.

Maka dari itu, tujuan untuk misi kelima adalah:

a. Meningkatnya desa mandiri

Kabupaten Labuhanbatu akan membangun desa melalui pemanfaatan potensi desa, seperti pertanian, peternakan, atau pun perikanan. Selain itu, Kabupaten Labuhanbatu juga akan mengembangkan desa wisata di mana hal ini juga akan berperan bagi percepatan pertumbuhan ekonomi desa. Pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik juga akan dilakukan pada setiap desa tanpa terkecuali sehingga meningkatkan integrasi antar wilayah. Ada pun sasaran untuk tujuan tersebut, yaitu:

1) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa

b. Meningkatnya pendapatan masyarakat

Petani dan nelayan, serta pembudidaya ikan akan ditingkatkan kesejahteraannya melalui berbagai dukungan, baik insentif atau pu modal kerja yang diberikan oleh Pemerintah Kabuapten Labuhanbatu. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu juga memastikan bahwa pendapatan yang diterima oleh petani, nelayan, dan pembudidaya ikan melebihi pengeluaran dalam kegiatan operasionalnya. Ada pun sasaran untuk tujuan kedua, yaitu:

- 1) Meningkatnya kesejahteraan petani; dan
- 2) Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan

c. Menurunnya luas kawasan kumuh

Kawasan kumuh menjadi permasalahan bagi kesejahteraan masyarakat. Tempat tinggal yang kumuh memberikan ketidaknyamanan pada kehidupan masyarakat dan berpotensi untuk menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam menurunkan kawasan kumuh, maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan berbagai program untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni sesuai dengan permasalahan yang ada. Sasaran untuk tujuan ketiga adalah:

- 1) Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

6. Peningkatan Infrastruktur yang ramah lingkungan dan mitigasi bencana

Infrastruktur yang tangguh menjadi kebutuhan mendasar dalam menghadapi berbagai bencana alam. Pembangunan infrastruktur hijau menjadi prioritas pada setiap aspek pembangunan daerah. Sistem transportasi umum beremisi rendah, ruang terbuka hijau, dan infrastruktur energi terbarukan menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap masa depan Kabupaten Labuhanbatu. Daerah rawan bencana akan ditata melalui pendekatan mitigasi struktur dan non-struktur yang komprehensif. Infrastruktur tidak hanya mempermudah mobilitas ekonomi tetapi juga menjadi benteng pertahanan menghadapi tantangan iklim dan bencana.

Maka dari itu tujuan untuk misi keenam adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan

Pemerintah akan memastikan pembangunan yang dilaksanakan akan memiliki kualitas yang tangguh dan tidak terlalu berdampak bagi kerusakan lingkungan. Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas;
- 2) Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau;
- 3) Terwujudnya kualitas lingkungan hidup;
- 4) Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan; dan
- 5) Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh bencana

7. Pengembangan inovasi daerah dalam mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata

Dalam era disrupsi digital, ekonomi kreatif dan pariwisata menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya tahan tinggi. Kabupaten Labuhanbatu akan membangun ekosistem inovasi melalui pengembangan inkubator kreativitas, akselerator startup, dan ruang kolaborasi yang tersebar di seluruh daerah. Teknologi digital menjadi *enabler* utama, transformasi digital UMKM kreatif dipercepat, ditunjang dengan pelatihan desain, branding, dan pemasaran digital. Pengembangan platform *marketplace* lokal menghubungkan pelaku ekonomi kreatif dengan pasar global tanpa melalui rantai distribusi panjang. Sektor Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru akan dikembangkan menuju konsep *Experience Economy* yang menekankan nilai pengalaman otentik berbasis kearifan lokal. Destinasi wisata direvitalisasi dengan pendekatan tematik (ekowisata, wisata budaya, dan wisata kuliner) yang masing-masing dikembangkan dengan standar internasional namun tetap berakar pada kearifan lokal. Infrastruktur pendukung seperti jalur sepeda, akomodasi, dan pusat

kebudayaan akan dibangun untuk menciptakan ekosistem pariwisata berkelanjutan.

Maka dari itu, terdapat 2 tujuan untuk misi ketujuh, yaitu:

a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah

Dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, maka perlu peningkatan kualitas UMKM yang tersedia di Kabupaten Labuhanbatu sebagai penopang bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini juga didukung melalui pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif, di mana dengan adanya peningkatan daya saing destinasi wisata, maka diharapkan akan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke daerah. Hal ini juga akan berdampak bagi perekonomian setempat. Sektor Industri Pengolahan juga didorong untuk bertumbuh agar semakin banyak produk-produk lokal yang bernilai tambah dan mampu bersaing di dunia ekspor baik tingkat daerah hingga tingkat global. Ada pun sasaran untuk tujuan pertama ini, yaitu:

- 1) Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian;
- 2) Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 3) Meningkatnya daya saing industri; dan
- 4) Meningkatnya nilai tambah perdagangan.

b. Meningkatkan daya saing daerah

Kabupaten Labuhanbatu akan membangun daerahnya menjadi lebih berdaya saing melalui riset dan inovasi. Dalam hal meningkatkan daya saing, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terus membangun dan menggali potensi daerah dan dimanfaatkan menjadi sebuah keunggulan daerah Kabupaten Labuhanbatu. Peningkatan daya saing bukan hanya dari potensi sumber daya alam saja, namun juga mencakup peran sumber daya manusia. SDM yang tersedia di Kabupaten Labuhanbatu, terutama para pemuda akan dilatih untuk memiliki kompetensi digital sehingga mampu bersaing di era disruptif saat ini dan ke depannya. Ada pun sasaran untuk tujuan tersebut, meliputi:

- 1) Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif;
- 2) Meningkatnya kapasitas inovasi daerah;
- 3) Meningkatnya literasi digital masyarakat; dan
- 4) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator, serta target indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi	Target					Transisi (2030)
				Awal						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatkan sumber daya manusia dengan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk semua									
	1.1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	75,20	75,28	75,34	75,48	75,63	75,77	75,91
	1.1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Literasi SD (Poin)	N/A	49,53	50,77	52,03	53,33	54,67	56,03
			Literasi SMP (Poin)	N/A	52,68	54,00	55,35	56,73	58,15	59,60
			Numerasi SD (Poin)	N/A	37,47	38,97	40,52	42,14	43,83	45,58
			Numerasi SMP (Poin)	N/A	36,88	38,35	39,89	41,48	43,14	44,86
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,26	13,45	13,46	13,47	13,48	13,49	13,50
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,50	9,71	9,67	9,63	9,58	9,54	9,50
	1.1.2	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	N/A	60,00	62,74	65,60	68,60	71,73	75,00
	1.1.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	73,130	73,87	74,09	74,32	74,55	74,77	75,00
	1.2	Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,90	5,50	5,40	5,29	5,19	5,10	5,00
	1.2.1	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp juta/jiwa)	218,06	218,65	228,90	239,62	250,85	262,61	274,92
2	Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan									
	2.1	Meningkatnya ketercukupan konsumsi pangan masyarakat	Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan	7,07	6,80	6,12	5,50	4,95	4,45	4,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target					Transisi (2030)	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			(%)								
		2.1.1	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	76,94	78,50	78,80	79,10	79,40	79,70	80,00
3	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien										
	3.1	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	3,88	3,92	3,96	4,00	4,04	4,08	4,15	
	3.1.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	62,94	63,79	64,63	65,48	66,32	67,17	68,30	
	3.1.2	Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	N/A	60,00	63,55	67,32	71,30	75,53	80,00	
	3.1.3	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	N/A	60,00	62,74	65,60	68,60	71,73	75,00	
4	Meningkatkan perlindungan sosial dan pengembangan budaya										
	4.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,84	6,00	5,79	5,58	5,38	5,19	5,00	
	4.1.1	Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	N/A	42,96	47,65	53,15	61,42	66,92	68,00	
	4.1.2	Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	N/A	1,00	1,74	3,01	5,23	9,07	15,75	
	4.2	Meningkatnya kualitas keluarga yang harmonis dan berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	80,00	81,72	82,21	82,71	83,21	83,71	84,22	
	4.2.1	Meningkatnya kesejahteraan	Indeks	N/A	55,00	55,97	56,95	57,95	58,96	60,00	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target					Transisi (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		sosial yang inklusif	Kesejahteraan Sosial (Poin)							
		4.2.2 Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Poin)	N/A	60,00	63,55	67,32	71,30	75,53	80,00
		4.2.3 Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	60,38	60,50	61,28	62,07	62,87	63,68	64,50
		4.2.4 Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	0,403	0,370	0,355	0,340	0,326	0,313	0,300
			Indeks Perlindungan Anak (Poin)	N/A	65,00	65,97	66,96	67,96	68,97	70,00
		4.2.5 Terwujudnya berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	N/A	60,00	61,88	63,82	65,81	67,87	70,00
5 Membangun desa dan menata kota berbasis potensi wilayah secara tematik										
	5.1	Meningkatnya desa mandiri	Persentase Desa Mandiri (%)	6,67	9,33	12,00	14,67	17,33	20,00	22,67
	5.1.1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (%)	0,7072	0,7188	0,7303	0,7424	0,7549	0,7674	0,7800
	5.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Per Kapita (Rp juta)	97,59	100,65	108,78	110,8	112,82	114,14	118,63
	5.2.1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (Poin)	N/A	130,00	133,77	137,66	141,66	145,77	150,00
	5.2.2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	Nilai Tukar Nelayan (Poin)	N/A	110,00	113,74	117,60	121,60	125,73	130,00
	5.3	Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh (%)	N/A	10,00	7,25	5,25	3,81	2,76	2,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target					Transisi (2030)	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		5.3.1	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	N/A	96,66	96,83	97,00	97,16	97,33	97,50
6	Melanjutkan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan meningkatkan mitigasi bencana										
	6.1	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur (Poin)	N/A	67,09	68,44	69,82	71,23	72,67	74,13	
	6.1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Poin)	N/A	40,00	41,83	43,73	45,73	47,82	50,00	
	6.1.2	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas (%)	N/A	75,00	77,25	79,57	81,95	84,41	86,95	
	6.1.3	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	67,62	70,00	74,36	75,15	75,85	76,25	76,85	
	6.1.4	Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	N/A	20,00	21,69	23,52	25,51	27,66	30,00	
	6.1.5	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh bencana	Indeks Risiko Bencana (Poin)	151,20	121,05	118,92	116,84	114,79	112,77	110,79	
7	Mengembangkan inovasi daerah dalam mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata										
	7.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,06	5,46	5,89	6,36	6,87	7,41	8,00	
	7.1.1	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	N/A	40,00	42,63	45,43	48,42	51,61	55,00	
	7.1.2	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	1,24	1,32	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Target					Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		7.1.3	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	32,53	34,24	34,49	34,74	34,99	35,24	35,50
		7.1.4	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	17,96	18,29	18,62	18,95	19,30	19,65	20,00
		7.2	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Poin)	3,43	3,50	3,65	3,90	4,05	4,09	4,12
		7.2.1	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi (%)	N/A	20,00	21,69	23,52	25,51	27,66	30,00
		7.2.2	Meningkatnya kapasitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	54,55	55,21	56,85	58,54	60,28	62,07	63,91
		7.2.3	Meningkatnya literasi digital masyarakat	Indeks Masyarakat Digital (Poin)	45,78	57,34	59,11	60,94	62,82	64,76	66,76
		7.2.4	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	N/A	30,00	33,23	36,80	40,76	45,14	50,00

Tabel 3.2 Penyalarsan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran Per Provinsi)			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029		
	Indikator	2025	2029	Indikator	2025	2029	Indikator	2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30	7,60	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30	7,60	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,46	7,41
2	PDB per Kapita (Rp juta)	78,40	115,30	PDB per Kapita (Rp juta)	78,40	115,30	PDRB per Kapita (Rp juta)	100,65	114,14
3	Kontribusi PDB Provinsi (%)	5,20	5,30	Kontribusi PDB Provinsi (%)	5,20	5,30	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	4,450	4,455
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	2,82 - 3,32	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	2,82 - 3,32	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00	5,19
5	Rasio Gini (Poin)	0,303 - 0,305	0,207 - 0,231	Rasio Gini (Poin)	0,303 - 0,305	0,207 - 0,231	Rasio Gini (Poin)	0,23	0,23
6	Indeks Modal Manusia (Poin)	0,54	0,57	Indeks Modal Manusia (Poin)	0,54	0,57	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	75,28	75,77
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1,00	16,88	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1,00	16,88	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO ₂ Eq)	126.38 2,37	189.67 1,87
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	77,20	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	77,20	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	70,00	76,25
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,50	5,10

3.2 Tema Pembangunan, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tema Pembangunan adalah fokus atau arah utama yang menjadi landasan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan suatu daerah atau negara. Tema pembangunan meliputi berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan, hingga infrastruktur dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan kerangka konseptual dan operasional yang sistematis untuk menerjemahkan visi dan misi pembangunan ke dalam rencana aksi konkret, komprehensif, dan terukur. Konstruksi ini mencakup serangkaian intervensi strategis yang memadukan analisis mendalam terhadap kondisi eksisting, proyeksi masa depan, serta instrumen implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Definisi substantif strategi dan arah kebijakan tidak sekadar dokumentasi administratif, melainkan peta jalan transformatif yang mengarahkan proses pembangunan menuju pencapaian tujuan pembangunan secara sistematis, integratif, dan adaptif.

Implementasi strategi dan arah kebijakan mensyaratkan pendekatan holistik yang mencakup identifikasi komprehensif terhadap tantangan strategis, perumusan intervensi, penetapan prioritas pembangunan, dan desain mekanisme implementasi yang responsif. Keberhasilannya diukur dari kemampuan menciptakan ekosistem pembangunan yang dinamis, fleksibel, dan mampu melakukan adaptasi berkelanjutan terhadap perubahan lingkungan strategis. Pendekatan ini tidak sekadar fokus pada capaian output, melainkan transformasi substansial yang memberikan dampak positif berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam kerangka pembangunan nasional yang bermartabat.

Tabel 3.3 Tema Pembangunan

Uraian	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tema Pembangunan / Arah Kebijakan	Kolaborasi dan Inovasi membangun desa menata kota menuju labuhanbatu cerdas bersinar.	Peningkatan SDM berkualitas dan inovasi daerah menuju pembangunan berdaya saing	Pengoptimalan tata kelola pemerintahan dan perlindungan sosial kepada seluruh masyarakat	Akselerasi Pembangunan Menuju Labuhanbatu Cerdas Bersinar	Penguatan Pembangunan dalam Mengoptimalkan Labuhanbatu Cerdas Bersinar dan Transisi Kepemimpinan Daerah yang Berkelanjutan
Penjelasan	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berupaya untuk memperkuat landasan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola serta mempersiapkan infrastruktur berkelanjutan untuk mempercepat pembangunan sembari mewujudkan ketahanan pangan daerah	Demi mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Cerdas Bersinar maka fondasi utama yang harus diperkuat adalah Sumber Daya Manusia. Selain itu daerah juga berupaya mencapai kemandirian pembangunan melalui inovasi dan mempersiapkan pembangunan wilayah Kota dan Desa yang berdaya saing	Reformasi birokrasi dan tata kelola diperlukan untuk mengoptimalkan pembangunan yang berdaya saing. Selain itu pemerintah juga semakin memperkuat perlindungan sosial kepada masyarakat sehingga dampak dari pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan	Pemerintah fokus dalam mencapai visi yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Labuhanbatu yang Cerdas dan bersinar. Pada tahapan ini seluruh aspek kembali dioptimalkan untuk mencapai bahkan melampaui target yang telah ditentukan.	Sebagai tahun transisi kepemimpinan, Kabupaten Labuhanbatu terus mengoptimalkan Labuhanbatu cerdas bersinar sembari mempersiapkan keberlanjutan pembangunan dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045 dalam jangka panjang.

Tabel 3.4 Strategi dan Arah Kebijakan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan sumber daya manusia dengan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk semua				
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia			
		Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan berkarakter ke seluruh daerah	Penguatan kompetensi guru bersertifikat di seluruh Kabupaten Pemberian insentif berbasis kinerja dan insentif bagi guru yang mau bekerja membangun di wilayah terpencil Penguatan peran keluarga dalam mendukung pembelajaran anak di luar sekolah	
		Meningkatnya literasi masyarakat	Memberdayakan fungsi dan layanan gerakan membaca dan melek literasi	Peningkatan akses literasi masyarakat melalui pojok baca di berbagai wilayah strategis Penguatan literasi digital dan aset buku digital daerah untuk mempermudah perolehan informasi dan meningkatkan minat baca	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Memperkuat kualitas dan akses layanan primer kepada seluruh masyarakat Membangun perilaku preventif terhadap penyakit	Pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh tingkatan masyarakat tidak perlu jauh untuk berobat Perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh masyarakat dan gratis Peningkatan cakupan imunisasi dan gizi cukup khususnya ibu dan anak Penguatan perilaku hidup bersih dan sehat	
		Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing			
		Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Mendorong perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan	Pemberdayaan Industri, UMKM dan wirausaha melalui akses permodalan dan kemudahan berusaha Penguatan balai latihan kerja yang inklusif kepada seluruh masyarakat termasuk disabilitas	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					Penguatan sektor padat karya berbasis keunggulan lokal
2	Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan				
			Meningkatnya ketercukupan konsumsi pangan masyarakat		
		Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Memperkuat ketersediaan pangan masyarakat yang stabil dan terjangkau serta terdiversifikasi		Peningkatan produktivitas pertanian pangan utama Penguatan pemahaman masyarakat melalui diversifikasi pangan utama Peningkatan distribusi dan penyimpanan pangan untuk menjaga stabilitas ketersediaan dan harga pangan
3	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				
			Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih		
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital	Memperkuat sistem pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi dalam layanan publik		Penerapan penuh SPBE terintegrasi pada seluruh organisasi perangkat daerah Pengembangan platform terpadu untuk digitalisasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan Penguatan kapasitas digital SDM di lingkungan birokrasi
		Terwujudnya profesionalitas ASN	Mendorong integritas dan akuntabilitas ASN disertai dengan pengendalian internal Mengoptimalkan transformasi manajemen		Penerapan SPIP secara menyeluruh dan terkendali Perwujudan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan pemerintahan Pengoptimalan peran APIP dalam audit kinerja Penguatan budaya kerja produktif, inovatif yang berorientasi pada pelayanan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				ASN berbasis meritokrasi yang disertai dengan pengembangan kompetensi	Penguatan sistem rekrutmen sampai penilaian kerja berbasis merit
				Memperkuat sistem perencanaan berbasis data	Penguatan perencanaan terintegrasi pada setiap dokumen perencanaan
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Memperkuat pengambilan kebijakan berbasis bukti	Peningkatan kualitas dan basis data untuk pembangunan daerah
					Penguatan perencanaan melalui integrasi partisipatif dan kemampuan daerah
					Penguatan perencanaan daerah melalui kolaborasi lintas stakeholder
4	Meningkatkan perlindungan sosial dan pengembangan budaya				
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial		
			Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)	Meningkatkan cakupan perlindungan bagi pekerja terutama pada sektor informal dengan melibatkan dunia usaha	Penyediaan insentif untuk perlindungan pekerja sektor informal
					Pemberian fasilitas kemudahan pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor informal
					Pengedukasian pentingnya perlindungan sosial bagi seluruh komunitas pekerja informal
			Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal	Memperkuat inklusivitas dan pemberdayaan ekonomi bagi para penyandang disabilitas	Pemberian pelatihan keterampilan vokasional siap kerja yang sesuai dengan penyandang disabilitas
					Pemberian insentif bagi pelaku usaha yang memberikan fasilitas layanan disabilitas menyeluruh
			Meningkatnya kualitas keluarga yang harmonis dan berbudaya		
			Meningkatnya	Memperkuat ketahanan	Penguatan kembali peran lembaga kemasyarakatan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat	keluarga hingga masyarakat melalui konseling	dalam pembangunan Pemberian fasilitas layanan konseling keluarga dan masyarakat Pengembangan pendidikan berkarakter serta kesehatan tingkat keluarga Penyelenggaraan forum-forum kemasyarakatan lintas agama dan budaya Penguatan peran sikamling dalam keamanan lingkungan Pengoptimalan penerangan jalan di seluruh daerah kabupaten Penguatan penyelenggaraan bina keluarga sehat melalui layanan pra dan pasca nikah Pelayanan terpadu bagi kesehatan keluarga melalui KB
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		Memperkuat norma dan nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat	Pengembangan Kabupaten Layan Anak Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dan politik Perlindungan inklusif kepada anak
		Terwujudnya keluarga yang berkualitas		Memperkuat keluarga melalui edukasi berkala	Pendataan dan perlindungan warisan budaya lokal Pemberdayaan komunitas budaya lokal agar lebih produktif dalam pembangunan
		Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak		Memperkuat pelayanan berkesetaraan gender dan memberikan perlindungan anak dalam pelayanan publik	Penguatan festival budaya daerah Pengintegrasian budaya berkarakter dalam kurikulum sekolah
		Terwujudnya berkebudayaan maju		Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dalam ekonomi dan pembagnunan	

5 Membangun desa dan menata kota berbasis potensi wilayah secara tematik

Meningkatnya desa mandiri

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Memperkuat kapasitas desa dalam tata kelola dan pembangunan berbasis potensi desa	Penguatan Ekonomi Lokal melalui BUMDes Penguatan ketahanan sosial dan budaya melalui nilai-nilai gotong royong Penguatan tata kelola serta kelembagaan desa
		Meningkatnya pendapatan masyarakat			
		Meningkatnya kesejahteraan petani		Meningkatkan produktivitas, nilai tambah serta akses pasar bagi petani	Penguatan sistem pertanian terintegrasi di daerah Penguatan hilirisasi serta akses pasar yang lebih baik bagi petani Peningkatan kapasitas kelompok tani dan koperasi tani dalam mengelola lahan pertanian
		Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan		Meningkatkan produktivitas, nilai tambah serta akses pasar bagi nelayan	Penguatan dukungan sarana dan prasarana perikanan modern yang lebih modern dan terintegrasi dalam rantai pasokan Penguatan nilai tambah melalui produk olahan ikan bersama UMKM
		Menurunnya luas kawasan kumuh			
		Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		Menyediakan layanan dan kualitas infrastruktur yang inklusif bersama pemerintah dan masyarakat	Penataan permukiman berbasis kawasan yang memenuhi infrastruktur dasar Pengembangan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah

6 Melanjutkan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan meningkatkan mitigasi bencana

Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan

Meningkatnya akses masyarakat terhadap

Meningkatkan kualitas dan ketercakupannya infrastruktur

Perawatan dan pembangunan jalan yang membangun konektivitas seluruh desa

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			infrastruktur berkualitas	dasar yang inklusif dan berkelanjutan	Pemerataan akses sanitasi dan air bersih kepada seluruh masyarakat Penguatan ketersediaan listrik dan jaringan komunikasi yang menyeluruh Pengintegrasian sistem transportasi wilayah menuju Stasiun Kereta Api Pengoptimalan tertib lalu lintas Kota Pengembangan Halte (Bus Stop) untuk mengoptimalkan layanan transportasi Peningkatan kapasitas daerah dalam pengelolaan persampahan terpadu Pengoptimalan kawasan ruang terbuka hijau fungsional Pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah) Penguatan peran masyarakat dan UMKM dalam menggunakan EBT di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Pengembangan PLTS untuk kebutuhan energi masyarakat dn publik Penguatan infrastruktur daerah peringatan dini bencana Pengembangan peta risiko bencana daerah
			Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Mengembangkan sistem transportasi publik aman dan ramah lingkungan	
			Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Memperkuat sistem pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	
			Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan	Memperkuat pemanfaatan EBT dalam aktivitas strategis daerah	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh bencana	Memperkokoh pengembangan infrastruktur daerah berketahanan lingkungan dan tangguh bencana	
7	Mengembangkan inovasi daerah dalam mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata				
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah		
			Meningkatnya kontribusi	Memperkuat kapasitas	Penguatan keterampilan digitalisasi UMKM menuju

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			UMKM dalam perekonomian	dan daya saing UMKM	pasar yang lebih luas Pengintegrasian UMKM dalam rantai pasokan industri dan kepariwisataan daerah Pengembangan pusat promosi UMKM dengan kolaborasi lintas sektor Pengembangan destinasi wisata unggulan Penguatan pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat ramah wisata Penguatan kebudayaan melalui museum budaya dengan potensi ekonomi kreatif Penguatan sistem logistik dan distribusi bahan baku untuk industri Pengembangan IKM berbasis kawasan dan keunggulan daerah Penguatan sistem informasi harga dan distribusi untuk stabilitas dan efisiensi pasar Penguatan kerjasama untuk meningkatkan kualitas infrastruktur perdagangan
			Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengembangkan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis keunggulan lokal	
			Meningkatnya daya saing industri	Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor industri berkeunggulan lokal	
			Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Mengembangkan sistem perdagangan daerah yang efisien, inovatif dan berorientasi ekspor	
			Meningkatnya daya saing daerah		
			Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif di daerah	Promosi potensi investasi melalui katalog investasi daerah Pemberian insentif dan kemudahan bagi investor terutama yang memberdayakan sektor unggulan dan tenaga kerja lokal
			Meningkatnya kapasitas inovasi daerah	Memperkuat kapasitas dan ekosistem inovasi daerah	Pemberian insentif dan penghargaan bagi perangkat daerah yang menghasilkan inovasi unggul

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				yang inklusif dan berkelanjutan	Pengembangan pusat inovasi daerah untuk membangun kolaborasi kreatif bersama dunia usaha, komunitas dan akademisi
		Meningkatnya literasi digital masyarakat		Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital	Pengembangan pusat belajar digital berbasis komunitas mulai tingkat desa
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga		Memberdayakan pemuda sebagai pembawa perubahan serta prestasi pemuda	Pengintegrasian layanan publik digital yang mudah diakses masyarakat
					Pemberian kaderisasi dan pelatihan kepemimpinan bagi pemuda
					Penguatan fasilitas olahraga serta kelompok olahraga untuk memperkuat prestasi daerah

3.3 Program Prioritas

Program prioritas adalah serangkaian kegiatan strategis yang diseleksi secara sistematis berdasarkan urgensi, dampak, dan kontribusinya terhadap pencapaian visi-misi daerah. Program ini mendapatkan alokasi anggaran, sumber daya manusia, dan perhatian khusus dalam implementasinya sebagai penggerak utama pembangunan daerah dalam RPJMD. Program prioritas berfungsi sebagai instrumen fokus kebijakan, mengarahkan seluruh perangkat daerah untuk berkonsentrasi pada isu-isu fundamental yang menjadi pengungkit transformasi daerah. Berbeda dengan program reguler, program prioritas memiliki indikator kinerja yang terukur, target capaian yang jelas, dan sistem monitoring-evaluasi yang ketat untuk memastikan efektivitas implementasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

Program prioritas menjadi dasar pengalokasian sumber daya yang terbatas secara proporsional dan rasional. Program ini dirumuskan melalui analisis teknokratik yang komprehensif, selaras dengan isu strategis daerah, dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang. Eksekusi program prioritas melibatkan koordinasi lintas sektor, partisipasi banyak pihak, dan evaluasi berkala untuk memastikan adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan.

Tabel 3.5 Program Prioritas RPJMD

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
1	Meningkatkan sumber daya manusia dengan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk semua				
	1.1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	
	1.1.1	Meningkatnya intelegualitas dan karakter anak usia sekolah		Literasi SD (Poin)	
				Literasi SMP (Poin)	
				Numerasi SD (Poin)	
				Numerasi SMP (Poin)	
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	
				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah dalam Pendidikan Menengah (APS)	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	Pengelolaan Pendidikan
				Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Pendidik dan Tenaga Pendidikan
	1.1.2	Meningkatnya literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	
			Meningkatnya layanan perpustakaan	Nilai Tingkat Layanan Perpustakaan Sesuai Standar	Pembinaan Perpustakaan

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator Nasional	Program Prioritas
		1.1.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Pemenuhan Upaya Kesehatan
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
	1.2	Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
	1.2.1	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp juta/jiwa)	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Pelatihan Kerja
2	Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan				
	2.1	Meningkatnya ketercukupan konsumsi pangan masyarakat		Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		2.1.1	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3 Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien					
		3.1	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	
		3.1.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	
			Meningkatnya efektivitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Program perekonomian dan pembangunan
		3.1.2	Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	
			Meningkatnya pengembangan	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Kepegawaian Daerah

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome kompetensi ASN	Indikator	Program Prioritas
		3.1.3	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4 Meningkatkan perlindungan sosial dan pengembangan budaya					
		4.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial	Persentase Penduduk Miskin (%)	
		4.1.1	Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	
			Meningkatnya jaminan sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Perlindungan Sosial
		4.1.2	Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal		

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Rehabilitasi Sosial
4.2		Meningkatnya kualitas keluarga yang harmonis dan berbudaya		Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	
4.2.1		Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial (Poin)	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Indeks Peranan Sosial	Rehabilitasi Sosial
4.2.2		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Poin)	
			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.2.3		Terwujudnya keluarga yang berkualitas		Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Pemberdayaan dan Peningkatan KS
4.2.4		Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak		Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Perlindungan Anak (Poin) Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Perlindungan Khusus Anak
		4.2.5 Terwujudnya berkebudayaan maju		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Pengembangan Kesenian Tradisional
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

5 Membangun desa dan menata kota berbasis potensi wilayah secara tematik

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
	5.1	Meningkatnya desa mandiri		Persentase Desa Mandiri (%)	
	5.1.1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Indeks Desa (%)	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Penataan Desa
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Peningkatan Kerja Sama Desa
	5.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat		PDRB Per Kapita (Rp juta)	
	5.2.1	Meningkatnya kesejahteraan petani		Nilai Tukar Petani (Poin)	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Peningkatan produksi hortikultura	
				Peningkatan produksi komoditas peternakan	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Penyuluhan Pertanian
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan	

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator Beroperasi	Program Prioritas
		5.2.2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	Nilai Tukar Nelayan (Poin)	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	5.3	Menurunnya luas kawasan kumuh		Persentase Luas Kawasan Kumuh (%)	
		5.3.1	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Kawasan Permukiman
6	Melanjutkan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan meningkatkan mitigasi bencana				
	6.1	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan		Indeks Infrastruktur (Poin)	

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		6.1.1 Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Poin)	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Pengembangan Permukiman
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Penyelenggaraan Jalan
		6.1.2 Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		Rasio Konektivitas (%)	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	
		6.1.3 Terwujudnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan	Indeks Kualitas Air	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
				Indeks Kualitas Udara	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Persampahan

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		6.1.4 Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan		Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	
			Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT Porsi EBT dalam Bauran Energi	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
		6.1.5 Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh bencana		Indeks Risiko Bencana (Poin)	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Penanggulangan Bencana
7 Mengembangkan inovasi daerah dalam mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata					
	7.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	7.1.1	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian		Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Pertumbuhan Wirausaha	Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM)
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	Pengembangan UMKM

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		7.1.2 Meningkatkan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%) Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Pemasaran Pariwisata
		7.1.3 Meningkatkan daya saing industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%) Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri
		7.1.4 Meningkatkan nilai tambah perdagangan	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) Nilai Ekspor Barang Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengembangan Ekspor Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		7.2 Meningkatkan daya saing daerah		Indeks Daya Saing Daerah (Poin)	
		7.2.1 Terwujudnya iklim investasi yang		Persentase Peningkatan Investasi (%)	

No	Misi	Tujuan/Sasaran kompetitif	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor	Promosi Penanaman Modal
		7.2.2 Meningkatkan kapasitas inovasi daerah		Indeks Inovasi Daerah (Poin)	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Riset dan Inovasi Daerah
		7.2.3 Meningkatkan literasi digital masyarakat		Indeks Masyarakat Digital (Poin)	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		7.2.4 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan		Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	

No	Misi	Tujuan/Sasaran prestasi olahraga	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

3.4 Arah Pengembangan

Dalam perencanaan pembangunan nasional, Pulau Sumatera diarahkan menjadi Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan sehingga Provinsi Sumatera Utara mengintegrasikan arah pengembangan tersebut dalam dokumen perencanaannya. Kabupaten Labuhanbatu termasuk pada Wilayah Pengembangan (WP) Timur dengan arah pengembangan:

1. Pusat pengolahan hasil perkebunan dan pertanian berbasis ekspor.
2. Infrastruktur energi listrik & jalan untuk mendukung industri sawit dan karet.
3. Peningkatan sektor transportasi dan logistik ke Kuala Tanjung dan Medan.

3.4.1 Pengembangan Bioindustri

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Kabupaten Labuhanbatu harus memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu diarahkan untuk melakukan hilirisasi berbasis agroindustri. Pada tahap pertama (2025-2029), Kabupaten Labuhanbatu diarahkan untuk mengembangkan produk turunan pertama dan kedua dari Kelapa Sawit dan Karet. Produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

Tabel 3.6 Produksi Kelapa Sawit Kabupaten Labuhanbatu (Ton)

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Bilah Hulu	13.034	19.184	17.648	18.312	20.460
Pangkatan	25.534	24.387	24.261	24.898	25.706
Bilah Barat	24.800	26.965	28.297	29.876	34.301
Bilah Hilir	20.340	19.000	19.549	20.179	21.552
Panai Hulu	8.041	7.453	7.785	9.403	9.614
Panai Tengah	7.883	8.439	8.275	8.884	9.355
Panai Hilir	6.991	7.950	8.352	8.683	8.882
Rantau Selatan	3.660	4.481	4.671	4.941	5.162
Rantau Utara	6.570	8.403	8.501	9.229	9.855
Labuhanbatu	116.853	126.262	127.339	134.405	144.887

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

Selama 5 tahun, produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu

meningkat dari 116.853 ton pada tahun 2020 menjadi 144.887 ton pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak hasil produksi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu. Kabupaten Labuhanbatu memiliki potensi kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah. Selain itu, Kabupaten Labuhanbatu memiliki produksi karet yang besar. Perkembangan produksi karet dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Produksi Karet Kabupaten Labuhanbatu (Ton)					
Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Bilah Hulu	7.971	5.947	5.870	5.326	3.779
Pangkalan	1.295	99	103	100	67
Bilah Barat	7.420	7.144	6.850	5.174	3.721
Bilah Hilir	521	205	231	185	141
Panai Hulu	329	107	110	98	41
Panai Tengah	994	604	543	435	337
Panai Hilir	211	119	140	127	93
Rantau Selatan	1.400	1.081	1.086	846	693
Rantau Utara	1.734	1.114	1.117	964	751
Labuhanbatu	21.876	16.420	16.050	13.255	9.623

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

Perkembangan produksi karet selama 5 tahun mengalami penurunan dari 21.876 ton pada tahun 2020 menjadi 9.623 ton pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa perkebunan karet semakin kurang produktif. Namun, komoditas ini masih menjadi komoditas terbesar kedua setelah kelapa sawit. Dari potensi perkebunan tersebut, Kabupaten Labuhanbatu diarahkan untuk menghasilkan produk turunan dari kelapa sawit dan karet, meliputi oleokimia, bioplastik, sabun, kosmetik, produk lateks.

3.4.2 Pengembangan Pariwisata

Kabupaten Labuhanbatu memiliki potensi pada sektor pariwisata. Sektor Pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi yang terdiri dari kumpulan usaha, industri, dan aktivitas yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan. Kabupaten Labuhanbatu memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Maka dari itu, Kabupaten

Labuhanbatu diarahkan untuk mengembangkan Agrowisata dan Wisata Pedesaan.



BAB IV

Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.1 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah merupakan instrumen operasional strategis dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang secara komprehensif menerjemahkan visi, misi, dan rencana pembangunan ke dalam serangkaian kegiatan terukur dan terarah. Konstruksi program ini mencakup perencanaan sistematis, alokasi sumber daya, penetapan indikator kinerja, dan mekanisme evaluasi yang memungkinkan setiap perangkat daerah untuk mengoptimalkan potensi wilayah, mengimplementasikan kebijakan publik, dan mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

Dalam konteks implementasinya, program perangkat daerah berfungsi sebagai *blueprint* transformasi strategis yang menghubungkan aspirasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan target pembangunan daerah. Pendekatan komprehensif ini mensyaratkan fleksibilitas kelembagaan, kemampuan adaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis, serta komitmen berkelanjutan untuk mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Keberhasilan implementasi program perangkat daerah diukur tidak sekadar dari pencapaian indikator kuantitatif, melainkan dari kemampuan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah secara holistik.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Layanan Urusan Wajib Dasar														
b	Pendidikan														
	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD (%) APM SMP (%)	98,84 84,28	99,00 85,00	228.674.63 8.830	99,20 85,98	235.534.877.9 95	99,40 86,97	242.600.924.3 35	99,60 87,97	249.878.952.0 65	99,80 88,98	257.375.320.6 27	100,00 90,00	265.096.580.2 45
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	N/A	87,00	38.112.439 .805	90,00	39.255.812.99 9	95,00	40.433.487.38 9	100,00	41.646.492.01 1	100,00	42.895.886.77 1	100,00	44.182.763.37 4
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks pemerataan guru	N/A	0,55	95.281.099 .512	0,52	98.139.532.49 8	0,47	101.083.718.4 73	0,41	104.116.230.0 27	0,36	107.239.716.9 28	0,30	110.456.908.4 36
		Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidikan	N/A	40,00		45,00		48,75		52,50		56,25		60,00	
	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	N/A	50,00	19.056.219 .902	55,00	19.627.906.50 0	70,00	20.216.743.69 5	85,00	20.823.246.00 5	100,00	21.447.943.38 6	100,00	22.091.381.68 7
2	Kesehatan														
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka kematian ibu (AKI) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	N/A N/A	34,00 13,00	129.462.00 7.053	26,06 12,79	133.345.867.2 65	19,98 12,59	137.346.243.2 83	15,32 12,39	141.466.630.5 81	11,74 12,19	145.710.629.4 99	9,00 12,00	150.081.948.3 84
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	N/A	40,00	38.838.602 .116	40,00	40.003.760.18 0	40,00	41.203.872.98 5	40,00	42.439.989.17 4	40,00	43.713.188.85 0	40,00	45.024.584.51 5
	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	N/A	100,00	64.731.003 .527	100,00	66.672.933.63 3	100,00	68.673.121.64 2	100,00	70.733.315.29 1	100,00	72.855.314.74 9	100,00	75.040.974.19 2
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	N/A	80,00	25.892.401 .411	80,00	26.669.173.45 3	90,00	27.469.248.65 7	100,00	28.293.326.11 6	100,00	29.142.125.90 0	100,00	30.016.389.67 7
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
	Program	Persentase	N/A	60,00	16.697.248	70,00	17.198.165.84	80,00	17.714.110.82	90,00	18.245.534.14	95,00	18.792.900.17	100,00	19.356.687.17

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pengelolaan sumber daya air (SDA)	Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir			.396		8		4		8		3		8
		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	N/A	12,50		15,00		17,50		20,00		22,50		25,00	
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	N/A	30,00	8.348.624.198	40,00	8.599.082.924	50,00	8.857.055.412	60,00	9.122.767.074	70,00	9.396.450.086	80,00	9.678.343.589
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	N/A	88,00	8.348.624.198	90,00	8.599.082.924	92,50	8.857.055.412	95,00	9.122.767.074	97,50	9.396.450.086	100,00	9.678.343.589
	Program pengembangan permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	N/A	60,00	12.522.936.297	65,00	12.898.624.386	68,75	13.285.583.118	72,50	13.684.150.611	76,25	14.094.675.130	80,00	14.517.515.383
	Program penataan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	N/A	65,00	4.174.312.099	70,00	4.299.541.462	77,50	4.428.527.706	85,00	4.561.383.537	92,50	4.698.225.043	100,00	4.839.171.794
	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	N/A	75,00	4.174.312.099	80,00	4.299.541.462	85,00	4.428.527.706	90,00	4.561.383.537	95,00	4.698.225.043	100,00	4.839.171.794
	Program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	58,33	65,00	29.220.184.693	70,85	30.096.790.234	77,22	30.999.693.941	84,17	31.929.684.759	91,75	32.887.575.302	100,00	33.874.202.561
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman														
	Program pengembangan perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	N/A	100,00	2.501.321.044	100,00	2.576.360.675	100,00	2.653.651.495	100,00	2.733.261.040	100,00	2.815.258.871	100,00	2.899.716.638
	Program kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	N/A	100,00	1.786.657.888	100,00	1.840.257.625	100,00	1.895.465.354	100,00	1.952.329.314	100,00	2.010.899.194	100,00	2.071.226.170

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Permukiman yang Sudah Dilengkapi	N/A	80,00	2.143.989.466	85,00	2.208.309.150	87,00	2.274.558.425	93,00	2.342.795.177	97,00	2.413.079.033	100,00	2.485.471.404
	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PSU	N/A	85,00	714.663.155	90,00	736.103.050	95,00	758.186.142	100,00	780.931.726	100,00	804.359.678	100,00	828.490.468
5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat															
	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	N/A	100,00	4.478.504.910	100,00	4.612.860.057	100,00	4.751.245.859	100,00	4.893.783.234	100,00	5.040.596.731	100,00	5.191.814.633
		Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	N/A	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		100,00	
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	70,00		70,00		80,00		90,00		100,00		100,00	
	Program penanggulangan bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	N/A	70,00	8.061.308.837	70,00	8.303.148.102	80,00	8.552.242.545	90,00	8.808.809.822	100,00	9.073.074.116	100,00	9.345.266.340
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	N/A	90,00		90,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	N/A	90,00		90,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Program	Cakupan	N/A	100,00	5.374.205.	100,00	5.535.432.068	100,00	5.701.495.030	100,00	5.872.539.881	100,00	6.048.716.078	100,00	6.230.177.560

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	N/A	100,00	891	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
6	Sosial														
	Program pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	N/A	85,00	1.760.296. 493	90,00	1.813.105.388	100,00	1.867.498.550	100,00	1.923.523.506	100,00	1.981.229.212	100,00	2.040.666.088
		Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	N/A	85,00		90,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana	N/A	85,00		90,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi	N/A	90,00		90,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Lembaga yang Meningkat	N/A	80,00		80,00		90,00		100,00		100,00		100,00	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program rehabilitasi sosial	Kualitas Persentase Disabilitas Terlantar Terpenuhi	N/A	25,00	1.466.913.745	30,00	1.510.921.157	45,00	1.556.248.792	60,00	1.602.936.255	75,00	1.651.024.343	90,00	1.700.555.073
		Persentase Anak Terlantar Terpenuhi	N/A	55,00		60,00		70,00		80,00		90,00		100,00	
		Persentase Lansia Terlantar Terpenuhi	N/A	55,00		60,00		68,75		77,50		86,25		95,00	
		Persentase Gelandangan/Pengemis Terpenuhi	N/A	55,00		60,00		68,75		77,50		86,25		95,00	
		Indeks Kesejahteraan Disabilitas	N/A	0,45		0,55		0,63		0,70		0,78		0,85	
		Indeks Kesejahteraan Lansia	N/A	0,50		0,60		0,66		0,73		0,79		0,85	
	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat Terpenuhi	N/A	100,00	1.466.913.745	100,00	1.510.921.157	100,00	1.556.248.792	100,00	1.602.936.255	100,00	1.651.024.343	100,00	1.700.555.073
		Persentase Peningkatan Kemandirian Ekonomi	N/A	75,00		79,44		84,15		89,13		94,41		100,00	
		Persentase Daerah yang Melakukan Pendataan	N/A	85,00		90,00		92,50		95,00		97,50		100,00	
		Indeks Kebutuhan Dasar	N/A	0,65		0,70		0,78		0,85		0,93		1,00	
		Indeks Keberdayaan Ekonomi	N/A	0,50		0,65		0,74		0,83		0,91		1,00	
		Persentase Korban Bencana Terpenuhi	N/A	100,00	1.173.530.996	100,00	1.208.736.926	100,00	1.244.999.033	100,00	1.282.349.004	100,00	1.320.819.474	100,00	1.360.444.059
	Program penanganan bencana	Persentase Kesiapsiagaan Masyarakat	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Layanan Pemulihan Sosial	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

II Layanan Urusan Wajib Non Dasar

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Tenaga Kerja														
	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase Kabupaten/Kota Menyusun Rencana Tenaga Kerja	N/A	100,00	510.337.830	100,00	525.647.965	100,00	541.417.404	100,00	557.659.926	100,00	574.389.723	100,00	591.621.415
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	N/A	75,00	1.360.900.879	80,00	1.401.727.906	85,00	1.443.779.743	90,00	1.487.093.135	95,00	1.531.705.929	100,00	1.577.657.107
	Program penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	N/A	85,00	1.020.675.659	87,81	1.051.295.929	90,71	1.082.834.807	93,71	1.115.319.851	96,80	1.148.779.447	100,00	1.183.242.830
	Program hubungan industrial	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	N/A	100,00	510.337.830	100,00	525.647.965	100,00	541.417.404	100,00	557.659.926	100,00	574.389.723	100,00	591.621.415
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	N/A	5,00	699.245.336	10,00	720.222.696	17,50	741.829.377	25,00	764.084.258	32,50	787.006.786	40,00	810.616.989
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	47,66	48,00		48,79		49,60		50,41		51,25		52,09	
	Program perlindungan perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	N/A	100,00	874.056.670	100,00	900.278.370	100,00	927.286.721	100,00	955.105.323	100,00	983.758.482	100,00	1.013.271.237
	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	N/A	100,00	349.622.668	100,00	360.111.348	100,00	370.914.688	100,00	382.042.129	100,00	393.503.393	100,00	405.308.495
	Program	Indeks	56,26	57,00	874.056.67	58,00	900.278.370	63,50	927.286.721	69,00	955.105.323	74,50	983.758.482	80,00	1.013.271.237

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pemenuhan hak anak (PHA)	Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	(2023)		0										
	Program perlindungan khusus anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	N/A	100,00	699.245.336	100,00	720.222.696	100,00	741.829.377	100,00	764.084.258	100,00	787.006.786	100,00	810.616.989
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	76,70 (2023)	77,00		78,00		83,50		89,00		94,50		100,00	
3 Pangan															
	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	N/A		1.037.250.957		1.068.368.486		1.100.419.540		1.133.432.127		1.167.435.090		1.202.458.143
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	N/A	87,00	864.375.798	89,46	890.307.072	91,98	917.016.284	94,58	944.526.772	97,25	972.862.575	100,00	1.002.048.453
	Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	N/A		1.037.250.957		1.068.368.486		1.100.419.540		1.133.432.127		1.167.435.090		1.202.458.143
	Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	N/a		518.625.479		534.184.243		550.209.770		566.716.063		583.717.545		601.229.072
4 Lingkungan Hidup															
	Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	N/A	100,00	1.170.333.635	100,00	1.205.443.644	100,00	1.241.606.953	100,00	1.278.855.162	100,00	1.317.220.817	100,00	1.356.737.441
	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	N/A	90,00	2.340.667.269	90,90	2.410.887.288	91,81	2.483.213.906	92,73	2.557.710.323	93,65	2.634.441.633	94,59	2.713.474.882
		Indeks Kualitas Udara	N/A	86,01		86,40		86,79		87,17		87,56		87,95	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	N/A	25,00		25,25		25,50		25,76		26,02		26,28	
	Program pengendalian bahan	Persentase Limbah B3 yang	N/A	55,00	1.755.500.452	60,00	1.808.165.466	67,50	1.862.410.430	75,00	1.918.282.742	82,50	1.975.831.225	90,00	2.035.106.162

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Terkelola													
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan	N/A	78,00	1.170.333.635	80,00	1.205.443.644	85,00	1.241.606.953	90,00	1.278.855.162	95,00	1.317.220.817	100,00	1.356.737.441
	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	77,00	585.166.817	80,00	602.721.822	85,00	620.803.477	90,00	639.427.581	95,00	658.610.408	100,00	678.368.721
	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan	N/A	100,00	585.166.817	100,00	602.721.822	100,00	620.803.477	100,00	639.427.581	100,00	658.610.408	100,00	678.368.721
	Program pengelolaan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	N/A	50,00	4.096.167.722	55,00	4.219.052.753	62,50	4.345.624.336	70,00	4.475.993.066	77,50	4.610.272.858	85,00	4.748.581.044
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
	Program pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	N/A	75,00	1.719.374.361	80,00	1.770.955.592	90,00	1.824.084.260	100,00	1.878.806.787	100,00	1.935.170.991	100,00	1.993.226.121
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	N/A	55,00		60,00		70,00		80,00		90,00		100,00	
	Program pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	N/A	100,00	1.473.749.452	100,00	1.517.961.936	100,00	1.563.500.794	100,00	1.610.405.818	100,00	1.658.717.992	100,00	1.708.479.532
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Akta	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Perceraian yang Diterbitkan													
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	N/A	100,00	982.499.635	100,00	1.011.974.624	100,00	1.042.333.863	100,00	1.073.603.878	100,00	1.105.811.995	100,00	1.138.986.355
	Program pengelolaan profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	N/A	100,00	736.874.726	100,00	758.980.968	100,00	781.750.397	100,00	805.202.909	100,00	829.358.996	100,00	854.239.766
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
	Program penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	N/A		1.416.994.796		1.459.504.640		1.503.289.779		1.548.388.473		1.594.840.127		1.642.685.331
	Program peningkatan kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	N/A	100,00	1.133.595.837	100,00	1.167.603.712	100,00	1.202.631.823	100,00	1.238.710.778	100,00	1.275.872.101	100,00	1.314.148.264
	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	100,00	1.983.792.715	80,00	2.043.306.496	85,00	2.104.605.691	90,00	2.167.743.862	95,00	2.232.776.177	100,00	2.299.759.463
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	N/A	100,00		80,00		85,00		90,00		95,00		100,00	
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga	N/A	100,00	1.133.595.837	80,00	1.167.603.712	80,00	1.202.631.823	80,00	1.238.710.778	80,00	1.275.872.101	100,00	1.314.148.264
		Persentase Fasilitasi Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	N/A	100,00		90,00		95,00		100,00		100,00		100,00	
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
	Program pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,33	2,30	3.121.361.504	2,25	3.215.002.350	2,14	3.311.452.420	2,03	3.410.795.993	1,91	3.513.119.872	1,80	3.618.513.469
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	23,00	22,50		22,00		20,50		19,00		17,50		16,00	
	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	55,90	56,00	4.682.042.257	57,50	4.822.503.524	63,88	4.967.178.630	70,25	5.116.193.989	76,63	5.269.679.809	83,00	5.427.770.203
		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak	16,90	16,00		15,00		13,00		11,00		9,00		7,00	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Terpenuhi (Unmet Need)													
	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Ketahanan Keluarga	N/A	75,00	2.601.134.587	80,00	2.679.168.625	85,00	2.759.543.683	90,00	2.842.329.994	95,00	2.927.599.894	100,00	3.015.427.891
8	Perhubungan														
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat (%)	N/A	50,00	4.709.832.112	51,50	4.851.127.075	53,05	4.996.660.887	54,64	5.146.560.714	56,28	5.300.957.535	57,96	5.459.986.262
		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	N/A	65,00		70,00		77,50		85,00		92,50		100,00	
	Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas Laut (%)	N/A		2.536.063.445		2.612.145.348		2.690.509.709		2.771.225.000		2.854.361.750		2.939.992.602
9	Komunikasi dan Informatika														
	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	N/A	100,00	3.755.330.930	100,00	3.867.990.858	100,00	3.984.030.584	100,00	4.103.551.501	100,00	4.226.658.047	100,00	4.353.457.788
	Program pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	2,94	3,08	3.072.543.488	3,12	3.164.719.793	3,08	3.259.661.387	3,12	3.357.451.228	3,16	3.458.174.765	3,20	3.561.920.008
10	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah														
	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	N/A	55,00	385.739.101	60,00	397.311.274	70,00	409.230.612	80,00	421.507.531	90,00	434.152.756	100,00	447.177.339
	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	N/A	60,00	482.173.876	65,00	496.639.092	73,75	511.538.265	82,50	526.884.413	91,25	542.690.946	100,00	558.971.674
	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	N/A	4,50	385.739.101	5,00	397.311.274	5,75	409.230.612	6,50	421.507.531	7,25	434.152.756	8,00	447.177.339
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan Dukungan	N/A		578.608.651		595.966.911		613.845.918		632.261.296		651.229.135		670.766.009

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Fasilitas Pelatihan													
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	N/A		675.043.427		695.294.729		716.153.571		737.638.179		759.767.324		782.560.344
	Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	N/A		867.912.977		893.950.366		920.768.877		948.391.944		976.843.702		1.006.149.013
	Pengembangan UMKM	Pertumbuhan Wirausaha	N/A												
		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	N/A		964.347.752		993.278.185		1.023.076.531		1.053.768.826		1.085.381.891		1.117.943.348
	Penguatan Badan Hukum Koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	N/A		482.173.876		496.639.092		511.538.265		526.884.413		542.690.946		558.971.674
11	Penanaman Modal														
	Program promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	N/A	5,00	1.121.936.237	10,00	1.155.594.324	12,50	1.190.262.153	15,00	1.225.970.018	17,50	1.262.749.119	20,00	1.300.631.592
	Program pelayanan penanaman modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	N/A	100,00	1.282.212.842	100,00	1.320.679.227	100,00	1.360.299.604	100,00	1.401.108.592	100,00	1.443.141.850	100,00	1.486.436.105
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha	N/A	100,00	801.383.026	100,00	825.424.517	100,00	850.187.252	100,00	875.692.870	100,00	901.963.656	100,00	929.022.566
	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	N/A	100,00	801.383.026	100,00	825.424.517	100,00	850.187.252	100,00	875.692.870	100,00	901.963.656	100,00	929.022.566
12	Kepemudaan dan Olahraga														
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	N/A	4,50	3.874.770.130	5,00	3.991.013.234	5,75	4.110.743.631	6,50	4.234.065.939	7,25	4.361.087.918	8,00	4.491.920.555

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	N/A	5,00	4.359.116.396	10,00	4.489.889.888	11,25	4.624.586.584	12,50	4.763.324.182	13,75	4.906.223.907	15,00	5.053.410.625
	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	N/A	3,00	1.453.038.799	5,00	1.496.629.963	7,50	1.541.528.861	10,00	1.587.774.727	12,50	1.635.407.969	15,00	1.684.470.208
13	Kebudayaan														
	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	N/A	6,00	210.631.601	10,00	216.950.549	12,50	223.459.066	15,00	230.162.837	17,50	237.067.723	20,00	244.179.754
	Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	N/A	55,00	252.757.921	60,00	260.340.659	70,00	268.150.879	80,00	276.195.405	90,00	284.481.267	100,00	293.015.705
	Program pembinaan sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	N/A	70,00	126.378.961	80,00	130.170.329	90,00	134.075.439	100,00	138.097.702	100,00	142.240.634	100,00	146.507.853
	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	N/A	73,00	252.757.921	75,34	260.340.659	77,75	268.150.879	80,23	276.195.405	82,80	284.481.267	85,45	293.015.705
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	N/A	73,00		75,19		77,45		79,77		82,16		84,63	
14	Perpustakaan														
	Program pembinaan perpustakaan	Nilai Tingkat Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional	N/A	82,00	9.050.505.589	85,00	9.322.020.757	88,75	9.601.681.380	92,50	9.889.731.821	96,25	10.186.423.776	100,00	10.492.016.489
15	Kearsipan														
	Program pengelolaan arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	N/A	93,00	13.015.698	95,00	13.406.169	96,25	13.808.354	97,50	14.222.605	98,75	14.649.283	100,00	15.088.761
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan	N/A	70,00	15.184.981	72,10	15.640.530	74,26	16.109.746	76,49	16.593.039	78,79	17.090.830	81,15	17.603.555

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Penyelamatan Arsip													
	Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	N/A	80,00	6.507.849	82,40	6.703.084	84,87	6.904.177	87,42	7.111.302	90,04	7.324.641	92,74	7.544.381
	Akreditasi dan Sertifikasi SDM Kearsipan	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	75,00	8.677.132	77,25	8.937.446	79,57	9.205.569	81,95	9.481.736	84,41	9.766.189	86,95	10.059.174
16	Urusan Statistik														
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik			169.546.00 0		169.546.000		169.546.000		169.546.000		169.546.000		169.546.000
17	Urusan Persandian														
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah			95.406.000		95.406.000		95.406.000		95.406.000		95.406.000		95.406.000
III	Urusan Pilihan														
1	Pariwisata														
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	N/A	20,00	77.748.005	20,00	80.080.445	20,00	82.482.859	20,00	84.957.344	20,00	87.506.065	20,00	90.131.247
	Program pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	N/A	22,00	68.029.504	25,00	70.070.390	31,25	72.172.501	37,50	74.337.676	43,75	76.567.807	50,00	78.864.841
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	N/A	37,00		40,00	0	48,75	0	57,50	0	66,25	0	75,00	0
2	Kelautan dan Perikanan														
	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	8.033,90	12.050,8 5	1.224.318. 753	12.050,8 5	1.261.048.315	18.076,2 8	1.298.879.765	27.114,4 1	1.337.846.158	40.671,6 2	1.377.981.543	61.007,4 3	1.419.320.989
	Program pengelolaan	Jumlah Produksi Perikanan	1.600,67	2.401,01	1.224.318. 753	2.401,01	1.261.048.315	3.601,51	1.298.879.765	5.402,26	1.337.846.158	8.103,39	1.377.981.543	12.155,0 9	1.419.320.989

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	perikanan budaya	Budidaya													
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Luasan Kawasan Konservasi	N/A		816.212.502		840.698.877		865.919.843		891.897.439		918.654.362		946.213.993
	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	N/A		816.212.502		840.698.877		865.919.843		891.897.439		918.654.362		946.213.993
3	Pertanian														
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton)	N/A	2500,00	6.666.286.483	2.500,00	6.866.275.078	2.500,00	7.072.263.330	2.500,00	7.284.431.230	2.500,00	7.502.964.167	2.500,00	7.728.053.092
		Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton)	N/A	2000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	N/A	1500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	N/A	77,00	6.666.286.483	80,00	6.866.275.078	82,50	7.072.263.330	85,00	7.284.431.230	87,50	7.502.964.167	90,00	7.728.053.092
	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	N/A	67,00	3.809.306.562	70,00	3.923.585.759	77,50	4.041.293.331	85,00	4.162.532.131	92,50	4.287.408.095	100,00	4.416.030.338
		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV	N/A	32,50		35,00		42,50		50,00		57,50		65,00	
		Persentase Penanganan Bencana Pertanian	N/A	67,00		70,00		77,50		85,00		92,50		100,00	
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	N/A	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00		90,00	
	Program perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian	N/A	75,00	2.380.816.601	80,00	2.452.241.099	85,00	2.525.808.332	90,00	2.601.582.582	95,00	2.679.630.060	100,00	2.760.018.961

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program penyuluhan pertanian	yang Diterbitkan Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	N/A	75,00	4.285.469. 882	80,00	4.414.033.979	85,00	4.546.454.998	90,00	4.682.848.648	95,00	4.823.334.107	100,00	4.968.034.130
			N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
4	Perdagangan														
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	N/A	35,00	3.363.570. 759	40,00	3.464.477.882	55,00	3.568.412.218	70,00	3.675.464.584	85,00	3.785.728.522	100,00	3.899.300.378
	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	N/A	66,67	3.363.570. 759	66,67	3.464.477.882	77,78	3.568.412.218	88,89	3.675.464.584	100,00	3.785.728.522	100,00	3.899.300.378
	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	N/A	100,00	1.681.785. 379	100,00	1.732.238.941	100,00	1.784.206.109	100,00	1.837.732.292	100,00	1.892.864.261	100,00	1.949.650.189
5	Perindustrian														
	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	N/A	100,00	316.397.07 1	40,00	325.888.983	55,00	335.665.653	70,00	345.735.623	85,00	356.107.691	100,00	366.790.922
	Program pengendalian izin usaha industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	N/A	100,00	210.931.38 1	100,00	217.259.322	100,00	223.777.102	100,00	230.490.415	100,00	237.405.127	100,00	244.527.281
	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	N/A	100,00	175.776.15 1	100,00	181.049.435	100,00	186.480.918	100,00	192.075.346	100,00	197.837.606	100,00	203.772.734
IV	Penunjang Urusan														
1	Perencanaan Pembangunan														
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase	N/A	100,00	4.617.283. 679	100,00	4.755.802.189	100,00	4.898.476.255	100,00	5.045.430.543	100,00	5.196.793.459	100,00	5.352.697.263
			N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	daerah	Keselaras RPJMD dengan Renstra PD													
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	N/A	100,00	3.078.189. 119	100,00	3.170.534.793	100,00	3.265.650.837	100,00	3.363.620.362	100,00	3.464.528.973	100,00	3.568.464.842
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
2	Keuangan														
	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	N/A	30,00	73.168.408 .746	30,00	75.363.461.00 8	30,00	77.624.364.83 8	30,00	79.953.095.78 3	30,00	82.351.688.65 7	20,00	84.822.239.31 7
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	N/A	40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		50,00	
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	N/A	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
		Persentase Penurunan SILPA	N/A	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00	
		Persentase laporan keuangan tepat waktu	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Program	Persentase	N/A	5,00	40.649.115	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pengelolaan barang milik daerah	Penambahan Nilai Aset Tetap			.970										
	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	12,01	12,88	48.778.939.164	13,83	50.242.307.339	14,83	51.749.576.559	15,89	53.302.063.856	17,03	54.901.125.771	18,23	56.548.159.544
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	N/A	75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		100,00	
3	Kepegawaian														
	Program kepegawaian daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	N/A	90,00	5.655.123.401	90,00	5.824.777.103	90,00	5.999.520.416	90,00	6.179.506.029	90,00	6.364.891.210	100,00	6.555.837.946
		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	65,00		65,00		65,00		65,00		65,00		100,00	
		Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	N/A	60,00		60,00		60,00		60,00		60,00		100,00	
		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	N/A	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		100,00	
4	Pendidikan dan Pelatihan														
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	N/A		60.356.970		62.167.679		64.032.709		65.953.691		67.932.301		69.970.271
		Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	N/A												
		Persentase ASN yang Memiliki	N/A												

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Sertifikasi Kompetensi ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	N/A												
5	Penelitian dan Pengembangan														
	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	N/A	80,00	3.627.871.241	80,00	3.736.707.378	80,00	3.848.808.599	80,00	3.964.272.857	80,00	4.083.201.043	100,00	4.205.697.074
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	N/A	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		100,00	
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Daerah	N/A	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		100,00	
6	Pengawasan														

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program penyelenggaraan pengawasan	Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	N/A	100,00	4.635.054.351	100,00	4.774.105.981	100,00	4.917.329.161	100,00	5.064.849.035	100,00	5.216.794.507	100,00	5.373.298.342
	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	N/A	85,00	3.792.317.196	85,00		85,00		85,00		85,00		100,00	
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	N/A	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		100,00	
7	Sekretariat Daerah														
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	N/A	80,00	16.888.056.020	80,00	17.394.697.701	85,00	17.916.538.632	87,00	18.454.034.791	93,00	19.007.655.835	95,00	19.577.885.510
	Program perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	N/A	70,00	20.640.957.358	70,00	21.260.186.079	75,00	21.897.991.661	80,00	22.554.931.411	85,00	23.231.579.354	90,00	23.928.526.734
7	Sekretariat DPRD														
	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	N/A	90,00	78.733.551.783	90,00	81.095.558.337	90,00	83.528.425.087	90,00	86.034.277.839	90,00	88.615.306.174	100,00	91.273.765.360
		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	N/A	85,00		85,00		90,00		93,00		95,00		100,00	
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	N/A	80,00	9.702.509.698	80,00	9.993.584.989	80,00	10.293.392.538	80,00	10.602.194.314	80,00	10.920.260.144	100,00	11.247.867.948
	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan	Persentase Pendidikan Politik dan Pengembangan	N/A	65,00	7.276.882.273	65,00	7.495.188.741	65,00	7.720.044.404	65,00	7.951.645.736	65,00	8.190.195.108	100,00	8.435.900.961

No	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Etika serta Budaya Politik													
	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	N/A	90,00	9.702.509.698	90,00	9.993.584.989	90,00	10.293.392.538	90,00	10.602.194.314	90,00	10.920.260.144	100,00	11.247.867.948
	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	N/A	100,00	12.128.137.122	100,00	12.491.981.236	100,00	12.866.740.673	100,00	13.252.742.893	100,00	13.650.325.180	100,00	14.059.834.935
	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	N/A	100,00	9.702.509.698	100,00	9.993.584.989	100,00	10.293.392.538	100,00	10.602.194.314	100,00	10.920.260.144	100,00	11.247.867.948

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan sistem pengukuran komprehensif yang mengintegrasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai instrumen strategis evaluasi kualitas tata kelola pemerintahan. Konstruksi ini menciptakan kerangka sistematis untuk mengukur efektivitas, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintahan daerah melalui pendekatan yang memadukan standar nasional dengan konteks spesifik lokal.

Indikator Kinerja Utama (IKU) menghadirkan standar baku yang bersifat mandatory, mencakup pengukuran komprehensif terhadap efektivitas pemerintahan, akuntabilitas keuangan, kualitas pelayanan publik, dan capaian program strategis nasional. Sementara itu, Indikator Kinerja Daerah (IKD) memberikan ruang adaptasi yang memungkinkan setiap daerah mengembangkan ukuran kinerja berbasis kekhasan, potensi, dan keunggulan spesifik wilayahnya. Metodologi pengukuran yang digunakan melibatkan proses pengumpulan data komprehensif, analisis multidimensional, verifikasi independen, dan pelaporan berkala untuk memastikan akurasi dan validitas penilaian.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	76,94	78,50	78,80	79,10	79,40	79,70	80,00
2	Indeks Infrastruktur (Poin)	N/A	67,09	68,44	69,82	71,23	72,67	74,13
3	Indeks Risiko Bencana (Poin)	151,20	121,05	118,92	116,84	114,79	112,77	110,79
4	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	75,20	75,28	75,34	75,48	75,63	75,77	75,91
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,90	5,50	5,40	5,29	5,19	5,10	5,00
6	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,06	5,46	5,89	6,36	6,87	7,41	8,00
7	Indeks Daya Saing Daerah (Poin)	3,43	3,50	3,65	3,90	4,05	4,09	4,12
8	Indeks Desa Membangun (%)	0,7072	0,7188	0,7303	0,7424	0,7549	0,7874	0,7800
9	PDRB Per Kapita (Rp juta)	97,59	100,65	108,78	110,80	12,82	114,14	118,63
10	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	3,80	4,10	4,35	4,85	5,20	3,48	3,50
11	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	62,94	63,79	64,63	65,48	66,32	67,17	67,80
12	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,84	6,00	5,79	5,58	5,38	5,19	5,00
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	80,00	81,72	82,21	82,71	83,21	83,71	84,22

Tabel 4.3 Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,87	74,77
2	Kesehatan Ibu dan Anak			Kesehatan Ibu dan Anak			Kesehatan Ibu dan Anak		
a	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	146	94	a Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	146	94	a Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	34,00	11,74
b	Prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada balita (%)	16,4	12,3	b Prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada balita (%)	16,4	12,3	b Prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada balita (%)	13,00	12,19
3	Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (kasus)			Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (kasus)			Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (kasus)		
a	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	90	a Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	90	a Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	75,00	82,90
b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	90	b Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	90	b Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91,00	92,60
4	Cakupan kepesertaan jaminan	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan	98,6	99	Cakupan kepesertaan		

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	kesehatan nasional (%)			kesehatan nasional (%)			jaminan kesehatan nasional (%)		
5	Hasil Pembelajaran			Hasil Pembelajaran			Hasil Pembelajaran:		
a	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	-	-	a	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	-	-		
	- Literasi membaca	6,06-12,12	27,27-30,30		- Literasi membaca	6,06-12,12	27,27-30,30		
	- Numerasi	0,00-3,03	6,06-9,09		- Numerasi	0,00-3,03	6,06-9,09		
b	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	-	-	b	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	-	-	a	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:
	- Literasi membaca	35,99-38,49	41,53-44,03		- Literasi membaca	35,99-38,49	41,53-44,03		- Literasi SD 49,53 54,67
									- Literasi SMP 52,68 58,15
	- Numerasi	33,70-36,20	37,70-40,20		- Numerasi	33,70-36,20	37,70-40,20		- Numerasi SD 37,47 43,83
									- Numerasi SMP 36,88 43,14
c	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15	10,30-10,33	10,83-10,84	c	Rata-rata lama sekolah penduduk	10,3-10,33	10,83-10,84	b	Rata-rata lama 9,71 9,97

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	tahun (tahun)			usia di atas 15 tahun (tahun)			sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)		
	d Harapan Lama Sekolah	13,51-13,63	13,86-13,87	d Harapan Lama Sekolah	13,51-13,63	13,86-13,87	c	Harapan Lama Sekolah	13,45 13,49
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	11,12	11,12-11,40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	11,12	11,12-11,40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	12,25	17,54
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	76,59	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	76,59			
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00	5,19
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	29,27	40,61	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	29,27	40,61	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	42,96	47,65
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	1,00	9,07
11	a Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19,00-19,50	15,40-15,10	a Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19,00-19,50	15,40-15,10	a Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	34,24	35,24
	b Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	5,2	7,8	b Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	5,2	7,8			
12	Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata		
	a Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	2,73	a Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan	2,42	2,73	a Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi	1,32	1,48

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
				dan Minum (%)			Makan dan Minum (%)		
	b Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	421,14	b Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	421,14	b Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang	50	87
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	5,45	5,43	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	5,45	5,43			
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		
	a Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (%)	3,2	3,51	a Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (%)	3,2	3,51	a Proporsi Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	95,25	95,71
	b Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,63	4,06	b Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,63	4,06	b Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	8,00	8,40
	c Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,79	0,81	c Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,79	0,81	c Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,78	1,16
	d Return on Asset (RoA) BUMD (%)	1,24	1,97	d Return on Asset (RoA) BUMD (%)	1,24	1,97	d Return on Asset (RoA) BUMD (%)	0,50	1,29
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
	a Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27-5,56	4,74-5,20	a Tingkat Pengangguran	5,27-5,56	4,74-5,20	a Tingkat Penganggur	5,50	5,10

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
				Terbuka (%)			an Terbuka (%)		
	b Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43	50,4	b Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43	50,4			
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29-61,67	59,48-63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29-61,67	59,48-63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	48,00	51,25
17	Tingkat Penguasaan IPTEK			Tingkat Penguasaan IPTEK					
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	a Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	51,18	a Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	51,18			
	b Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	21,49	b Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	21,49	a Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20,00	27,66
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,9	Indeks Masyarakat Digital	57,34	64,76
20	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	9,5	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	9,5	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	80,00	83,98
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76-30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76-30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,13	23,30
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45-16,54	17,13-17,41	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45-16,54	17,13-17,41	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	42,81	44,24
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
	a Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	2,26	2,33	a Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah (%)	2,26	2,33			
	b Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,	74,36	81,01	b Rumah Tangga dengan Akses	74,36	81,01	a Rumah Tangga	96,66	97,33

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)			Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)			dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)		
	c Persentase Desa Mandiri (%)	8,44	8,93	c Persentase Desa Mandiri (%)	8,44	8,93	b Persentase Desa Mandiri (%)	9,33	20,00
24	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	71,5	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	71,5	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	3,71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	3,71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00	3,16
26	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	4,00	4,40
27	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Integritas Nasional	4,00	4,55
28	Disesuaikan dengan karakteristik daerah. Usulan proksi:			Disesuaikan dengan karakteristik daerah. Usulan proksi:			Disesuaikan dengan karakteristik daerah. Usulan proksi:		
	a Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	70	75,7	a Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	70	75,7	A Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100,00	100,00
	b Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)	60	70	b Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)	60	70	B Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)	100,00	100,00
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	58,5	62	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	58,5	62	Indeks Rasa Aman (Poin)	55,00	72,74

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
30	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,58-85,83	86,83-90,08	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,58-85,83	86,83-90,08	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	70,00	77,89
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)			Rasio Pajak terhadap PDB (%)			Rasio Pajak terhadap PDB (%)	0,15	0,26
32	Tingkat Inflasi (%)	1,80-3,80	1,40-3,70	Tingkat Inflasi (%)	1,80-3,80	1,40-3,70	Tingkat Inflasi (%)	2,30	2,22
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
a	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	33,92	a Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	33,92	A Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB ADHB (%)	2,00	5,91
b	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	0,14	b Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	0,14			
c	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	#####	##### #	c Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	#####	##### ###			
d	Total Kredit/PDRB (%)	25,7	31,49	d Total Kredit/PDRB (%)	25,7	31,49	B Total Kredit/PDR B ADHB (%)	4,00	10,27
34	Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88	Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88	Indeks Akses Keuangan Daerah	4,32	4,39
35	Disesuaikan dengan karakteristik daerah Jumlah Kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/Sister City)			Disesuaikan dengan karakteristik daerah Jumlah Kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/Sister City)			Disesuaikan dengan karakteristik daerah		
36	Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)			Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)			Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)		
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	57,56 - 57,67	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	57,56 - 57,67	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,00	67,87

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	82,62 - 82,79	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	82,62 - 82,79	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,72	83,71
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	60,50	63,68
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,37	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,37	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,37	0,312850857
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	0,581	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	0,581			
42	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup		
a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	A Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	70,00	76,25
b	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10	15	b Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10	15	B Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	5,00	12,04
c	Pengelolaan Sampah			c Pengelolaan Sampah			C Pengelolaan Sampah		
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah (%)	16,00	28	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah (%)	16	28	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah (%)	30,00	41,49
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62,00	100	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62,00	100	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	12,00	19,49

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan (% RT)	Baseline 2025	Target 2029
43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan			Ketahanan Energi, Air dan Pangan			Ketahanan Energi, Air dan Pangan		
	a Ketahanan Energi			a Ketahanan Energi			A Ketahanan Energi		
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	1.282,00	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	1.282,00	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	1.474,00	1.729,49
	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp Miliar)	170,57	141,18	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp Miliar)	170,57	141,18			
	b Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of Undernourishment) (%)	7,35	4,48	b Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of Undernourishment) (%)	7,35	4,48	B Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of Undernourishment) (%)	6,80	4,45
	c Ketahanan Air			c Ketahanan Air			C Ketahanan Air		
	- Kapasitas tampungan air (m3/kapita)			- Kapasitas tampungan air (m3/kapita)			- Kapasitas Air Baku (m3/kapita)	0,40	0,44
	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	40,95	53	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	40,95	53	- Akses rumah tangga terhadap air minum aman (%)	15,00	26,12
44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	152,55 - 147,69	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	152,55 - 147,69	Indeks Risiko Bencana (IRB)	121,05	112,77
45	Persentase Penurunan Emisi			Persentase Penurunan Emisi			Penurunan Emisi Gas		

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	Gas Rumah Kaca (%)			Gas Rumah Kaca (%)			Rumah Kaca (Juta ton eq2)		
a	Kumulatif	10,06	12,92	a	Kumulatif	10,06	12,92		
b	Tahunan	19,04	25,38	b	Tahunan	19,04	25,38	A Tahunan	126.382,37 189.671,87

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator	Baseline			Target			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Aspek Geografi dan Demografi							
1	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	76,94	78,50	78,80	79,10	79,40	79,70	80,00
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	7,07	6,80	6,12	5,50	4,95	4,45	4,00
3	Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh/Kapita)	N/A	1.474,00	1.534,10	1.596,64	1.661,74	1.729,49	1.800,00
4	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	N/A	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45
5	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Aman (%)	N/A	15,00	17,23	19,79	22,74	26,12	30,00
6	Indeks Risiko Bencana (Poin)	151,20	121,05	118,92	116,84	114,79	112,77	110,79
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	67,62	70,00	74,36	75,15	75,85	76,25	76,85
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO2 Eq)	N/A	126.382,37	139.883,21	154.826,29	171.365,67	189.671,87	209.933,64
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	N/A	5,00	6,23	7,76	9,67	12,04	15,00
10	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	N/A	30,00	32,53	35,28	38,26	41,49	45,00
11	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	N/A	12,00	13,55	15,29	17,26	19,49	22,00
12	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,41	1,24	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,06	5,46	5,89	6,36	6,87	7,41	8,00
2	PDRB Per Kapita (Rp juta)	97,59	100,65	108,78	110,80	112,82	114,14	118,63
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,84	6,00	5,79	5,58	5,38	5,19	5,00
4	Gini Ratio (Poin)	0,2510	0,2310	0,2300	0,2290	0,2270	0,2260	0,2250
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,90	5,50	5,40	5,29	5,19	5,10	5,00
6	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	75,20	75,28	75,34	75,48	75,63	75,77	75,91

No	Indikator	Baseline		Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,13	73,87	74,09	74,32	74,55	74,77	75,00
8	Prevalensi stunting (%)	25,4	13,00	12,79	12,59	12,39	12,19	12,00
9	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,50	9,71	9,80	9,87	9,92	9,97	9,99
10	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,26	13,45	13,46	13,47	13,48	13,49	13,50
11	Literasi SD	N/A	49,53	50,77	52,03	53,33	54,67	56,03
12	Literasi SMP	N/A	52,68	54,00	55,35	56,73	58,15	59,60
13	Numerasi SD	N/A	37,47	38,97	40,52	42,14	43,83	45,58
14	Numerasi SMP	N/A	36,88	38,35	39,89	41,48	43,14	44,86
15	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	13,16	60,00	62,74	65,60	68,60	71,73	75,00
17	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	N/A	85,00	85,98	86,97	87,97	88,98	90,00
18	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	N/A	42,96	47,65	53,15	61,42	66,92	68,00
19	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	80,00	81,72	82,21	82,71	83,21	83,71	84,22
20	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	N/A	60,00	61,88	63,82	65,81	67,87	70,00
21	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	60,38	60,50	61,28	62,07	62,87	63,68	64,50
22	Indeks Perlindungan Anak (Poin)	N/A	65,00	65,97	66,96	67,96	68,97	70,00
23	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	91,01	91,50	92,19	92,88	93,58	94,29	95,00
24	Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)	59,07	65,00	68,26	71,68	75,27	79,04	83,00
25	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	0,403	0,370	0,355	0,340	0,326	0,313	0,300
26	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	N/A	30,00	33,23	36,80	40,76	45,14	50,00
III Aspek Daya Saing Daerah								
1	Angka Ketergantungan (Per 100 Penduduk)	47,86	47,65	47,68	47,76	47,88	48,04	48,04
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	32,53	34,24	34,49	34,74	34,99	35,24	35,50

No	Indikator	Baseline		Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (%)	1,24	1,32	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
4	Rasio Kewirausahaan (%)	7,84	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,46	70,00	70,97	71,96	72,96	73,97	75,00
6	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	54,55	55,21	56,85	58,54	60,28	62,07	63,91
7	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	1,03	1,10	1,24	1,40	1,57	1,77	2,00
8	Indeks Akses Keuangan Daerah (Poin)	4,29	4,32	4,34	4,36	4,38	4,39	4,40
9	Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB ADHB (%)	0,16	2,00	2,62	3,44	4,51	5,91	7,75
10	Total Kredit/PDRB ADHB (%)	0,22	4,00	5,06	6,41	8,11	10,27	13,00
11	Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan (Rp miliar)	48,73	96,37	101,19	106,25	111,56	117,14	123,00
12	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	N/A	20,00	21,69	23,52	25,51	27,66	30,00
13	Indeks Masyarakat Digital (Poin)	45,78	57,34	59,11	60,94	62,82	64,76	66,76
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)	23,14	24,13	23,92	23,71	23,51	23,30	23,10
15	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	N/A	42,81	43,16	43,52	43,88	44,24	44,61
16	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	17,96	18,29	18,62	18,95	19,30	19,65	20,00
17	Indeks Infrastruktur (Poin)	N/A	67,09	68,44	69,82	71,23	72,67	74,13
18	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Poin)	N/A	40,00	41,83	43,73	45,73	47,82	50,00
19	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (%)	N/A	96,66	96,83	97,00	97,16	97,33	97,50
20	Persentase Desa Mandiri (%)	6,67	9,33	12,00	14,67	17,33	20,00	22,67
21	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,114	0,150	0,172	0,198	0,227	0,261	0,300
22	Inflasi (%)	3,36	2,30	2,28	2,26	2,24	2,22	2,20
IV	Aspek Pelayanan Umum							
A	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif							

No	Indikator	Baseline		Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	62,94	63,79	64,63	65,48	66,32	67,17	68,00
2	Indeks SPBE (Poin)	2,94	3,00	3,04	3,08	3,09	3,15	3,20
3	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	3,88	3,92	3,96	4,00	4,04	4,08	4,15
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	94,82	94,97	95,12	95,27	95,42	95,57	95,80
5	Indeks Integritas Nasional (Poin)	65,47	78,00	78,78	79,58	80,38	81,18	82,00
B Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial								
1	Persentase Penegakan Perda (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Capaian Aksi HAM (%)	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	N/A	70,00	71,89	73,84	75,84	77,89	80,00
4	Indeks Rasa Aman (Poin)	N/A	55,00	58,98	63,25	67,83	72,74	78,00
5	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Poin)	N/A	60,00	63,55	67,32	71,30	75,53	80,00
C Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan								
1	Indeks Daya Saing Daerah (Poin)	3,43	3,50	3,65	3,90	4,05	4,09	4,12
Indikator Kinerja Kunci								
A Pendidikan								
1	APM SD	98,84	99,00	99,20	99,40	99,60	99,80	100,00
2	APM SMP	84,28	85,00	85,98	86,97	87,97	88,98	90,00
3	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,48	12,25	13,40	14,66	16,04	17,54	19,19
4	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	N/A	65,71	66,41	67,12	67,83	68,55	69,28
B Kesehatan								
1	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	N/A	34,00	26,06	19,98	15,32	11,74	9,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	N/A	75,00	76,90	78,85	80,85	82,90	85,00
3	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	N/A	91,00	91,40	91,79	92,19	92,60	93,00
4	Perentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Na	36	40	50	65	70	70
5	Ratio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap populasi (per 1000 penduduk)	4.07	4.07	4.4	4.5	4.7	4.8	5
6	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	99.00	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna (Persentase)	20	20	20	20	53.33	75	75.00
8	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	83.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	83.33
10	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan Ibu hamil sesuai standar	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
11	Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
12	Persentase bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
13	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
14	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
15	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
16	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar							
17	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
18	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
19	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
21	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
22	Persentase lanjut usia yang mandiri	75.00	77.00	79.00	81.00	83.00	100.00	75.00
23	Persentase desa/kelurahan melaksanakan STBM	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00	40.00
C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Jalan dalam Kondisi Baik (%)	49,54	50,00	53,48	57,20	61,19	65,44	70,00
2	Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	N/A	25,00	30,72	37,74	46,37	56,97	70,00
3	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak (%)	N/A	93,00	93,40	93,79	94,19	94,60	95,00
4	Akses Rumah Tangga terhadap Sanitas Layak (%)	N/A	87,00	88,54	90,12	91,72	93,34	95,00
D Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1	Persentase Rumah Layak Huni (%)	N/A	75,00	75,97	76,96	77,96	78,97	80,00
2	Persentase Luas Kawasan Kumuh (%)	N/A	10,00	7,25	5,25	3,81	2,76	2,00
3	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangan (%)	N/A	10,00	7,25	5,25	3,81	2,78	2,00
4	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah	3,81	3,81	3,83	3,85	3,91	3,93	3,93

No	Indikator	Baseline		Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tidak Layak Huni) (%)							
5	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	75,00	75,00	75,97	76,96	77,96	78,97	80,00
6	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	84,46	84,46	90,00	92,43	93,54	95,41	97,00
7	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	28,21	28,21	28,53	28,66	28,87	28,99	28,15
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	5,00	5,00	6,23	7,76	9,67	12,04	15,00
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
1	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Kasus Narkoba (%)	N/A	50,23	48,05	45,96	43,96	42,05	40,22
3	Persentase Ormas yang Dibina (%)	N/A	60,00	61,88	63,82	65,81	67,87	70,00
4	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan korban kebakaran (%)	100	100	100	100	100	100	100
7	Waktu tanggap (respons time) penanganan kebakaran (menit)	15	15	15	15	15	15	15

No	Indikator	Baseline		Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
F	Sosial							
1	Indeks Kesejahteraan Sosial (Poin)	N/A	55,00	55,97	56,95	57,95	58,96	60,00
2	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	N/A	1,00	1,74	3,01	5,23	9,07	15,75
3	PPKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	N/A	70,00	71,89	73,84	75,84	77,89	80,00
G	Tenaga Kerja							
1	Rasio Lulusan Perguruan Tinggi (%)	11,48	12,25	13,40	14,66	16,04	17,54	19,19
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	TPAK Perempuan (%)	47,66	48,00	48,79	49,60	50,41	51,25	52,09
2	Indeks Perlindungan Khusus Anak (Poin)	N/A	70,00	70,97	71,96	72,96	73,97	75,00
3	Jumlah kasus KDRT (kasus)	N/A	20	15	10	5	0	0
I	Pangan							
1	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	N/A	87,00	89,46	91,98	94,58	97,25	100,00
2	Ketersediaan pangan utama (ton)	N/A	65.000,0 0	65.970,5 8	66.955,6 5	67.955,4 3	68.970,1 4	70.000,0 0
J	Pertanahan							
1	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan.(persen)	0	70	80	87	90	92	93
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (persen)	0	70	80	80	90	95	95
3	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (persen)	0	83	85	87	90	93	98
4	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) (persen) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah	0	82	85	88	90	95	98

No	Indikator	Baseline		Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Absentee. (persen)							
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat. (persen)	0	70	80	87	90	93	95
6	Tersedianya pembangunan lokasi dalam rangka penanaman modal. (persen)	0	76	85	88	90	93	95
K	Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Air	N/A	90,00	90,90	91,81	92,73	93,65	94,59
2	Indeks Kualitas Udara	N/A	86,01	86,40	86,79	87,17	87,56	87,95
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	N/A	25,00	25,25	25,50	25,76	26,02	26,28
L	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Rasio penduduk memiliki KK (%)	N/A	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Kepemilikan Akte Kelahiran (Per 1.000 Penduduk)	N/A	50,00	54,93	60,34	66,29	72,82	80,00
3	Perekaman KTP elektronik (%)	99.60	99.70	99.80	99.85	99.90	100	99.60
4	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA(%)	101	102	103	104	105	106	101
5	Kepemilikan Akta Kelahiran (%)	100	100	100	100	100	100	100
6	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (OPD)	21	22	23	24	25	26	21
M	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Indeks Desa Membangun (%)	0,7072	0,7188	0,7303	0,7424	0,7549	0,7674	0,7800
N	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Total Fertility Rate (Rata-Rata Anak Per Wanita)	2,33	2,30	2,25	2,14	2,03	1,91	1,80
2	Rasio Akseptor KB (%)	64,53	68,00	68,40	68,79	69,19	69,60	70,00

No	Indikator	Baseline		Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diperdakan	1	1	1	1	1	1	1
4	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 24-49 tahun	21,4	22,04	22,7	23,38	24,08	24,8	25,54
5	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate ASFR 15-19	23	24,4	25,13	25,88	26,65	27,44	28,26
6	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	64,53	66,46	68,45	70,51	72,62	74,80	77,05
7	Jumlah stakeholder (Pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam Ppengelola rogram KKBPK	6	6	6	6	8	8	8
8	Persentasi Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	22	22	22	22	22	22	22
9	Persentasi Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	24,62	25,36	25,38	26,14	26,92	27,73	28,56
10	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	2	2	2	2	2	2	2
11	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	60,11	61,91	63,77	65,68	67,65	69,68	71,77
12	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan kota denagn kesertaan Rendah	53,58	55,18	56,84	58,55	60,30	62,11	63,97
13	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	15,64	16,10	16,59	17,09	17,60	18,13	18,67
0 Perhubungan								
1	Rasio konektivitas (%)	N/A	75,00	77,25	79,57	81,95	84,41	86,95
2	Persentase kepemilikan KIR (%)	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Pemasangan rambu-rambu (%)	N/A	70,00	75,18	80,73	86,70	93,11	100,00

No	Indikator	Baseline		Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	0	0	0	0	0	0	0
5	Terlaksananya pelayanan uji berkala	113.56	100	100	100	100	100	100
6	Penetapan tarif fangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0	0	0	0	0	0	0
7	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	100	100	100	100	100	100	100
8	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/kota	1.09	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
P Komunikasi dan Informatika								
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	N/A	80,00	83,65	87,47	91,46	95,64	100,00
Q Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	N/A	0,78	0,86	0,95	1,05	1,16	1,28
2	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	N/A	40,00	42,63	45,43	48,42	51,61	55,00
3	Persentase Koperasi Aktif (%)	N/A	40,00	43,38	47,04	51,02	55,33	60,00
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	N/A	50,00	53,48	57,20	61,19	65,44	70,00
5	Proporsi jumlah UKM non pertanian (%)	N/A	95,25	95,36	95,48	95,59	95,71	95,82
R Penanaman Modal								
1	Persentase Peningkatan Investasi (%)	N/A	20,00	21,69	23,52	25,51	27,66	30,00
2	Jumlah investor PMDN berskala nasional (Perusahaan)	N/A	12	13	15	16	18	20
3	Jumlah investor PMA berskala nasional (Perusahaan)	N/A	5	6	7	8	9	10
S Kepemudaan dan Olahraga								
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	N/A	60	61,88	63,82	65,81	67,87	70
2	Persentase Wirausaha Muda (%)	N/A	30	32,53	35,28	38,26	41,49	45

No	Indikator	Baseline		Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Cakupan Pelatih yang Besertifikasi (%)	N/A	80	83,65	87,47	91,46	95,64	100
4	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	109	20	30	45	65	85	100
5	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	10	15	25	35	50	65
6	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	113	40	40	40	50	60	65
7	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	25	35	40	45	45	45
8	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	13	13	15	25	35	45	60
9	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0	2	2	3	4	5	6
T	Kebudayaan							
1	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	N/A	14,29	17,80	22,17	27,62	34,41	42,86
2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	0	0	5	5	5	6	10
3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	0	0	5	5	5	6	10
4	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	0	0	5	5	5	6	10

No	Indikator	Baseline		Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0	0	2	2	2	3	5
6	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	0	0	4	2	2	3	3
7	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	0	0	0	0	1	1	1
8	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	0	0	0	0	0	0
9	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	0	0	0	0	0	0
10	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0	0	0	0	0	0	0
11	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	0	0	0	0	0	0
12	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0	0	0	0	0	0	0
13	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0
14	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	0	0	1	1	1	1
15	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0	0	0	1	1	1	1
16	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	0	0	1	1	1	1
17	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	0	0	4	4	4	4
18	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	0	0	0	4	4	4	4

No	Indikator	Baseline		Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	0	0	1	0	0	0
20	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan Masyarakat	0	0	0	1	0	0	0
U	Perpustakaan							
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan (Orang)	N/A	21.000	21.745	22.517	23.316	24.143	25.000
2	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat (Orang)	N/A	5	7	9	11	15	20
3	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (persen)	51.194	55	60	65	70	75	80
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (persen)	13.162	15	20	25	30	35	40
V	Kearsipan							
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	N/A	80,00	83,65	87,47	91,46	95,64	
2	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Naional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (persen)	150	50	55	60	70	75	80
3	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggung Jawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Public dan Kesejahteraan Rakyat (persen)	0	10	15	20	25	30	35

No	Indikator	Baseline						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
W	Pariwisata							
1	Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang	N/A	50	57	66	76	87	100
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Orang)	N/A	250.000	274.640	301.709	331.445	364.113	400.000
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang)	N/A	300	382	486	618	786	1000
4	Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	N/A	5,00	5,35	5,72	6,12	6,54	7,00
5	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	9	0	2	2	2	2	2
6	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.	26	0	2	2	2	2	2
7	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	0	10	12	14	16	20	25
8	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0	0	10	10	12	14	18
9	Jumlah promosi event daerah Persentase kegiatan (event), perangkat daerah yang terlaksana di dalam negeri	0		2	2	3	3	3
10	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0
11	Jumlah industry pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0	1	1	1	1	1	1
12	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0	0	4.76	5.95	7.14	8.33	9.52
13	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	0	0	7.14	9.52	11.90	11.90	11.90
14	Jumlah Lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0	0	2	2	2	2	3
15	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	9	0	2	2	2	2	2

No	Indikator	Baseline		Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
X	Kelautan dan Perikanan							
1	Nilai Tukar Nelayan (Poin)	N/A	110,00	113,74	117,60	121,60	125,73	130,00
2	Proporsi PDRB Sub-Sektor Perikanan (%)	N/A	0,72	0,78	0,85	0,92	1,00	1,08
3	Produksi Perikanan (ton)	9.634,57	9.800,00	9.839,68	9.879,52	9.919,51	9.959,68	10.000
4	Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang melakukan Diversifikasi Usaha	2	2	3	4	5	6	7
	Jumlah total prouksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) (Ton)	9	9,100	9,140	9,150	9,160	9,170	9,180
X	Pertanian							
1	Nilai Tukar Petani (Poin)	N/A	130,00	133,77	137,66	141,66	145,77	150,00
2	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	29,48	27,81	26,77	25,78	24,82	23,89	23,00
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Rp juta/kapita)	165,43	170,00	175,62	181,42	187,41	193,60	200,00
4	Produksi Padi (ton)	N/A	105.206,46	106.352,65	107.511,43	108.682,78	109.866,90	111.064,00
5	Produksi Beras (ton)	N/A	60.346,42	61.003,88	61.668,56	62.340,44	63.019,66	63.706,31
6	Produktifitas petanian perhektar pertahun (%)	307,46	310,53	317,74	323,05	329,54	336,13	342,85
7	Persentase Penurunan Kejadian Kasus Hewan Menular (persen)	-26,36	9,64	8,84	8,04	7,34	6,64	5,64
8	Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular (kasus)	172	234	232	230	228	226	223
Y	Perdagangan							
1	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	N/A	80,00	80,98	81,96	82,96	83,98	85,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	36.70%	38.00%	39.00%	40.00%	41.00%	42.00%	43.00%
3	Persentase Kinerja Pupuk	61.60%	62.50%	63.00%	64.50%	66.00%	68.00%	70.00%
4	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.	59.28%	60.00%	61.00%	62.00%	63.00%	64.00%	65.00%
Z	Perindustrian							
1	Proporsi jumlah IKM (%)	N/A	1,26	1,33	1,40	1,48	1,56	1,65
2	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	10.00%	12.50%	15.00%	17.50%	20.00%	22.50%	25.00%
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0.00%	0.00%	20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	100.00 %
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota da	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00 %
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan	0.00%	40.00%	50.00%	60.00%	70.00%	80.00%	100.00

No	Indikator	Baseline		Target				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 %
	terkini							
AA	Perencanaan Pembangunan							
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	N/A	60,00	62,74	65,60	68,60	71,73	75,00
2	Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	-	60,00	62,74	65,60	68,60	71,73	75,00
7	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9								
10	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AB	Keuangan							
1	RoA BUMD (%)	N/A	0,50	0,63	0,80	1,02	1,29	1,63

No	Indikator	Baseline			Target			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (Level)	N/A	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
AC	Kepegawaian							
1	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	N/A	60,00	63,55	67,32	71,30	75,53	80,00
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	18.78	19.20	19.80	20.20	20.80	21.20	21.80
3	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	74,72	75.80	76.20	76.80	77.20	77.80	78
AD	Pendidikan dan Pelatihan							
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	N/A	70,00	75,18	80,73	86,70	93,11	100,00
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	N/A	60,00	66,45	73,60	81,52	90,29	100,00
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	31.5	32	33	34	35	36	37
AE	Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)	N/A	70,00	73,50	77,18	81,03	85,09	89,34
2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	N/A	68,75	78,13	81,25	87,50	93,75	100,00
3	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	100	100	100	100	100	100	100
AF	Pengawasan							
1	Indeks MCP KPK (Poin)	N/A	80,00	80,59	81,19	81,79	82,39	83,00
2	Persentase Tindakanjutan Temuan (%)	N/A	90,00	91,92	93,87	95,87	97,91	100,00
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Terinteg rasi	Terinteg rasi	Terintegr asi	Dikelola (Manag	Dikelola (Manag	Dikelola (Manag	Dikelola (Manage

No	Indikator	Baseline			Target			
		2024 (Integrated)	2025 (Integrated)	2026 (Integrated)	2027 (ed)	2028 (ed)	2029 (ed)	2030 (d)
4	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi
AG	Sekretariat Daerah							
1	Nilai Evaluasi SAKIP (Poin)	B	B	B	B	B	B	BB

Keseluruhan target indikator pembangunan baik Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029, disusun berdasar prioritas. Oleh karena itu, keseluruhan indikator kinerja, menjadi bagian yang terkoneksi dengan misi daerah, program hasil terbaik cepat dan kegiatan strategis daerah. Kegiatan strategis daerah, dapat bersumber dana dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dan CSR.

Kegiatan strategis daerah, juga harus disinkronkan dengan Wilayah strategis daerah. Pembangunan Wilayah Strategis dilakukan melalui Pembangunan wilayah perkotaan dan disesuaikan dengan tematik wilayah. Pembangunan tematik wilayah yang dapat dikembangkan diantaranya :

- a. Kawasan Perkotaan;
- b. Kawasan Desa Berinovasi,
- c. Kawasan Kampung Nelayan Maju,
- d. Kawasan Pariwisata,
- e. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dan
- f. Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Terintegrasi.

Kegiatan strategis daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025-2029, yang disesuaikan dengan misi daerah dan program hasil terbaik cepat dan rencana lokasi dan sumber pendanaannya (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR). Penyajian kegiatan strategis daerah diharapkan dapat lebih mengkonsentrasikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan pada perangkat daerah agar lebih focus pada realisasi pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu. Kegiatan strategis daerah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.5. Kegiatan Strategis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Than 2025-12029

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
1.	Meningkatkan sumber daya manusia dengan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk semua	Fasilitasi pemberian Makan Bergizi Gratis	Dukungan lahan untuk pembuatan dapur umum MBG di 9 Kecamatan	Unit	9	-	-	-	-	9 Kecamatan	Kecamatan dan Desa, BPKAD (Bidang Aset)	-
		Penuntasan UHC BPJS Kesehatan, penuntasan stunting, percepatan penuntasan kasus TB, fasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis, serta penuntasan Puskesmas berstandar nasional dan peningkatan standar RSUD	Peningkatan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98.60	100	100	100	100	15 Puskesmas, Pustu, RSUD	Dinas Kesehatan dan RSUD	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pemberian Makanan Tambahan bagi Bumil KEK, Balita Gizi Kurang :							9 Kecamatan, 23 Kelurahan, 75 Desa	Dinas Kesehatan, DPPKB, Dinas PMD, Bappeda, Kelurahan/Desa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Bumil KEK	Persentase penerima PMT	84	85	86	88	90	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Kesehatan, DPPKB, Dinas PMD	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Balita Gizi Kurang	Persentase penerima PMT	72	75	78	80	85	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Kesehatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			TB CEKAT” – Cari Cepat Kasus TB di Masyarakat	Orang	2700	2700	2700	2700	2700	15 Puskesmas, Pustu, RSUD	Dinas Kesehatan dan RSUD	APBD Kabupaten
			Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	unit	-	-	-	1	-	Rantau Selatan	Dinas Kesehatan	APBN
			Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Pelayanan Kesehatan Bergerak (Mobile Clinic CERDAS LABUHANBATU) atau (CERDAS = Cek Efisien Rutin Dan Akses Sehat Gratis LABUHANBATU)	Orang	30	40	50	60	70	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Kesehatan	APBD Kabupaten

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			TAPAK SEHAT (Transformasi Akses Primer dan Kesehatan Terpadu), melalui :									
			a. Pembangunan Puskesmas ILP di daerah yang padat penduduk dan luas wilayahnya	unit	-	-	2	1	-	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Kesehatan	APBN
			b. Penguatan Puskesmas dengan Renovasi Puskesmas menjadi Puskesmas Integrasi Pelayanan Primer	unit	-	3	2	-	-	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Kesehatan	APBN
			c. Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD									

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Pembangunan Gedung KRIS (Kelas Rawat Inap Standar)	Paket		1		1		Kabupaten Labuhanbatu	RSUD Rantauprapat	Pinjaman Daerah dan DAK
			Pengadaan Alat Kesehatan RSUD	Paket		1	1	1	1	Kabupaten Labuhanbatu	RSUD Rantauprapat	DAK
			Pembangunan Gedung Ruang Bedah, Ruang CSSD, Ruang Rawat Inap Bedah	Paket			1			Kabupaten Labuhanbatu	RSUD Rantauprapat	DAK
			Pembangunan Gedung Instalasi Pelayanan Ibu dan Anak	Paket					1	Kabupaten Labuhanbatu	RSUD Rantauprapat	DAK
		Pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul, Penuntasan Verifikasi data Anak Tidak Sekolah dan solusi penanganannya,	Penyediaan Lahan dan Pengusulan Sekolah Rakyat	Ha		5				Kecamatan Rantau Utara	Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan, BPKAD (Bidang Aset)	Lahan Kabupaten

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
		Penataan Sekolah, Fasilitas Sekolah Inklusi serta Pembangunan Perpustakaan Kabupaten	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB):									
			PAUD	unit		10				Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan dan Desa, BPKAD (Bidang Aset)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			SMP	unit	1	1	1	1		Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan/Desa, BPKAD (Bidang Aset)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Rehab sekolah :									
			PAUD	unit	1	3	3	5	5	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			SD	unit	8	10	10	13	13	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBN, APBD Provinsi,

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
												APBD Kabupaten, CSR
			SMP	unit	6	8	8	10	10	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Penanganan Sekolah yang jumlah siswanya kurang :						20	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBD Kabupaten
			Penggabungan SD	Sekolah	2	1	1	1	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBD Kabupaten
			Peningkatan SD dan SMP menjadi Sekolah Unggulan:									
			SD	Sekolah	1	1	1	1	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBD Kabupaten
			SMP	Sekolah	1	1	1	1	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBD Kabupaten

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Fasilitasi Sekolah Inklusi:									
			PAUD	Sekolah		1	1	1	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			SD	Sekolah	10	10	10	10	10	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			SMP		8	8	8	8	8	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Verifikasi Data Anak Tidak Sekolah dan Solusi Penanganannya	Persentase ATS yang terverifikasi	8944					9 Kecamatan, 23 Kelurahan, 75 Desa	Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan/Desa	APBD Kabupaten
			Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik (BOS Daerah) :									
			PAUD (Usia 5-6)	Siswa		5650	5650	5650	5650	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Kesetaraan (Paket)	Siswa		2434				Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembangunan Perpustakaan Kabupaten Labuhanbatu	Unit			1			Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
2.	Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan	Pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan serta replikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi	Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD)	Dokumen		1				Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pertanian	APBD Kabupaten
			Pemberian Benih Padi Unggul	Kg	10000	12500	15000	17500	20000	7 Desa Kawasan Ketahanan Pangan Desa Berinovasi (Desa Sei Nahodaris, Sei Rakyat, Bagan Bilah, Sei Pelancang, Selat Beting, Sei Siarti dan Meranti Paham), 1 Desa Kawasan Ketahanan Pangan Pertanian Terintegrasi	Dinas Pertanian	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian :									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pompa	Unit		20	20	20	20			APBN, APBD Provinsi, APBD

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
										(Desa Sei Penggantungan)		Kabupaten, CSR
			Hand tractor	Unit		20	20	20	20			APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan kelengkapannya (Saluran Primer, Saluran Sekunder, Pompa Air PLTS, Bangunan Sadap, Bangunan Bagi, Plat Layanan, dan Normalisasi) :									
			Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Paya Bulak Desa Meranti Paham Kecamatan Panai Hulu	Paket		1				Kecamatan Panai Hulu	Dinas PUPR	APBN

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Lobu Rampah Desa Meranti Pahan Kecamatan Panai Hulu	Paket		1				Kecamatan Panai Hulu	Dinas PUPR	APBN
			Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Sei Kerang Kecamatan Panai Hulu	Paket			1			Kecamatan Panai Hulu	Dinas PUPR	APBN
			Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Sei Rengas Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah	Paket			1			Kecamatan Panai Tengah	Dinas PUPR	APBN
			Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Sei Buluh Kecamatan	Paket				1		Kecamatan Bilah Hilir	Dinas PUPR	APBN

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Bilah Hilir									
			Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Sei Tarolat Kecamatan Bilah Hilir	Paket				1		Kecamatan Bilah Hilir	Dinas PUPR	APBN
			Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Selat Beting Kecamatan Panai Tengah	Paket					1	Kecamatan Panai Tengah	Dinas PUPR	APBN
			Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Nahodaris Kecamatan Panai Hulu	Paket					1	Kecamatan Panai Hulu	Dinas PUPR	APBN

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Selat Besar Kecil Kecamatan Bilah Hilir	Paket					1	Kecamatan Bilah Hilir	Dinas PUPR	APBN
			Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani	km		10	10	10	10	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pertanian	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembangunan Kilang Padi (Rice Milling Unit) dan Pembuatan Beras Kemasan Labuhanbatu	Unit		2	2			Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pertanian	APBN, Kemitraan BUMDesMa
			Penangkaran dan Penanaman Bibit Padi Unggul dan Fortifikasi :							Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pertanian	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Penangkaran dari BUMN (SHS)	Lahan (ha)		50				Sei Nahodaris	Dinas Pertanian	Kemitraan dengan BUMN
			Penangkaran dari APBN/APBD Provinsi	Lahan (ha)		50				Sei Rakyat	Dinas Pertanian	APBN, APBD Provinsi
			Pompanisasi Sumur Dalam Tenaga Surya	Unit		5				Kawasan Ketahanan Pangan Desa Berinovasi dan Pertanian Terintegrasi	Dinas Pertanian	APBN
			Pembangunan Pompa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan pemeliharaannya	Unit		1	1	1	1	Kawasan Ketahanan Pangan Desa Berinovasi dan Pertanian Terintegrasi	Dinas Pertanian	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Cakupan Penyuluh Pertanian (%)	30	40	50	60	70	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pertanian	APBN, APBD Kabupaten
			Pembayaran premi asuransi usaha tani padi	Ha/Musim Tanam		1000	2000	3000	4000	Kawasan Ketahanan Pangan Desa Berinovasi dan Pertanian Terintegrasi	Dinas Pertanian	APBN, APBD Kabupaten, CSR
			Pemberian Bibit Ternak Sapi	Ekor	130	130	130	130	130	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pemberian Bibit Ternak Domba Betina	Ekor	30	30	30	30	30	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Pemberian Bibit Ternak Domba Jantan		4	4	4	4	4	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pemberian Bibit Ternak Ayam	Ekor	200	200	200	200	200	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pemberian Bibit Ternak Itik	Ekor	200	200	200	200	200	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembelian Benih (Semen Beku) Sapi Unggul: Limousin, Simental, Brahman, Ongole, Angus, dan Belgian Blue untuk inseminasi	Dosis		6000	6000	6000	6000	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			buatan									
			N2 Cair	Liter		3000	3000	3000	3000	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Penyusunan Roadmap Peternakan Kabupaten Labuhanbatu	Dokumen		1				Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembuatan Kandang Ternak Sapi, Kambing dan Domba	Unit				1		Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
												CSR
			Pembuatan Pabrik Pakan Ternak	Unit				1		Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembibitan dan penanaman rumput makanan ternak ruminansia	Ha			2			Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Rehab Puskesmas	Paket		1				Kecamatan Panai Hulu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembangunan Puskesmas	Paket			1			Kecamatan Bilah Hulu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Pengadaan Obat-obatan hewan	Paket	80	80	120	160	200	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembangunan Pasar Hewan					1		Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN
			Pemberian Bibit Perikanan Budidaya (Lele, Nila, Mas, Gurami, Patin)									
			- Lele	Ekor	50,000	200,000	200,000	250,000	250,000	Kawasan Kampung Budidaya Berkah (Desa Pangkatan, Kec. Pangkatan)	Dinas Kelautan dan Perikanan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			- Nila	Ekor	-	200,000	250,000	250,000	300,000		Dinas Kelautan dan Perikanan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			- Mas	Ekor	-	-	250,000	250,000	250,000		Dinas Kelautan dan Perikanan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			- Gurami	Ekor	-	-	25,000	25,000	30,000		Dinas Kelautan dan Perikanan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			- Patin	Ekor	100,000	150,000	200,000	200,000	300,000		Dinas Kelautan dan Perikanan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pemberian alat tangkap bagi nelayan	Paket	55	55	60	60	60	Kawasan Kampung Nelayan Berkah (Kelurahan Sei Berombang, Desa Sei Sanggul, Desa Sei Sakat dan Desa Sei Baru)	Dinas Kelautan dan Perikanan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Peningkatan perekonomian nelayan melalui sumber diversifikasi olahan hasil tangkapan nelayan	Kali	4	4	4	4	4		Dinas Kelautan dan Perikanan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun	Ha	1000	1000	1000	1000	1000	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pertanian	APBN
			Pengembangan Kebun Induk Kelapa Genjah Hijau Erabolo Labuhanbatu	Ha			7			Desa Meranti Paham	Dinas Pertanian	APBD Kabupaten, APBN, Kerjasama dengan BRIN

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Sarana Prasarana Perkebunan (Pupuk, Pestisida)	Ha	50	100	100	100	100	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pertanian	APBN
			Dukungan terhadap hilirisasi kelapa sawit	Jumlah industri hilirisasi kelapa sawit	1	1	1	1	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pertanian, Dinas Perindag, Dinas PMPTSP, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup	APBD Kabupaten, Investasi Swasta
			Penyusunan RAD Kelapa Sawit Berkelanjutan	Dokumen	1					Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pertanian	DBH Sawit
			Replikasi Penerapan budidaya Kelapa Sawit Berkelanjutan	Desa	13	15	15	16	16	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pertanian, Dinas PMD, Balitbang	APBD Kabupaten
3.	Memperkuat tata kelola pemerintahan	Penataan Perangkat Daerah, PNS dan optimalisasi	Penataan Perangkat Daerah	Perda		1				Seluruh OPD	Kabag Orta, BKPP	APBD Kabupaten

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
	yang efektif dan efisien	pendapatan dan belanja daerah agar lebih efektif dan efisien	Penataan Jabatan Fungsional pada setiap perangkat daerah	Jabatan Fungsional yang disetujui Kemenpan RB	19	43	44			Seluruh OPD	Kabag Orta, BKPP, Seluruh OPD	APBD Kabupaten
			Peningkatan Kompetensi PNS melalui Pelatihan (Struktural dan Fungsional)	Jam/ PNS/Tahun	5	10	15	17	20	Seluruh PNS Kabupaten Labuhanbatu	BKPP	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
			Optimalisasi Pencapaian PAD (Pajak dan Retribusi Daerah)	Capaian PAD (%)	70	75	80	85	90	Kabupaten Labuhanbatu	Bapenda, OPD Penyumbang PAD	APBD Kabupaten
			Optimalisasi APBD dalam Mendukung Kegiatan Strategis Daerah	Persentase KSD yang didukung APBD (%)	30	40	45	50	55	Kabupaten Labuhanbatu	Bappeda, BPKAD	APBD Kabupaten

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
4.	Meningkatkan perlindungan sosial dan pengembangan budaya	Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Peningkatan UCJ BPJS Tenaga Kerja, pemberian asuransi nelayan dan bantuan untuk disabilitas dan orang terlantar	Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	42.96	47.65	53.15	61.42	66.92	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kabag Pemerintahan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembayaran premi asuransi nelayan	Orang	100	150	200	250	300	Kawasan Kampung Nelayan Berkah (Kelurahan Sei Berombang, Desa Sei Sanggul, Desa Sei Sakat dan Desa Sei Baru)	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pemberian Alat Bantu Disabilitas	Penyandang disabilitas		5	10	10	10	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Sosial	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Penyediaan Fasilitas Rumah Singgah Sementara	Unit				1		Kecamatan Rantau Utara	Dinas Sosial	APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Pemberian BLT	Cakupan Masyarakat Miskin (%)	50	60	70	80	100			
		Pelestarian budaya daerah	Renovasi Gedung Kesenian Rantauprapat	Paket	1					Kecamatan Rantau Utara	Disporabudpar	CSR
			Renovasi Gedung Nasional Rantauprapat dan Pembangunan Museum Sejarah dan Budaya Labuhanbatu	Paket			1			Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar, Dinas Pendidikan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
5.	Membangun desa dan menata kota berbasis potensi wilayah secara tematik	Penataaan Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh	Unit	5	35	5	35	5	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Perkim	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Pembangunan Jamban dan Septik Tank (Penuntasan Desa dan Kelurahan STOP BABS)	Desa dan Kelurahan	8	17	16	15	5	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembangunan instalasi dan jaringan air bersih	Sambungan Rumah	1313	2150	2830	2730	2730	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembangunan SPAM IKK Pangkatan	m2	1600					Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Mendukung pembangunan perumahan murah untuk generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah	Unit	-	50	50	50	50	Rantau Utara, Rantau Selatan, dan Bilah Hulu	Dinas Perkim	Kemitraan dengan Swasta

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Peningkatan Jalan Ruas Jl. Ahmad Yani-Jl. Sisingamangaraja Rantauprapat	km		6.1				Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	APBN
			Drainase dalam kota Rantauprapat	km	5	10	10	10	10	Kecamatan Rantau Utara dan Kecamatan Rantau Selatan	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup	APBD Kabupaten
			Perda RPPLH	Dokumen	1	1	1	1	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Lingkungan Hidup	APBD Kabupaten
			TPST Perlayuan	Ha		5				Kecamatan Rantau Utara	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup, BPKAD (Bidang Aset)	APBN, APBD Kabupaten
			TPST	Ha			3	3	3	Sei Berombang/Pasar Tiga, Negeri Lama/Tj. Sarang Elang, Pangkatan/Pematang Seleng	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup, BPKAD (Bidang Aset)	APBN, APBD Kabupaten

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			TPS3R	Unit		3	4	4	4	Sei Penggantungan, Sei Jawi-Jawi, Sei Rakyat, Sei Kasih, Gunung Selamat, Desa Perkebunan Sennah, Sei Siarti, Tj. Harapan, N4 Aek Nabara, Siringoringo, Pulo Padang, Lingga Tiga, Afdeling 2 Rantauprapat, Pangkatan, Aek Buru Selatan, Kp. Dalam	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup, BPKAD (Bidang Aset)	APBN, APBD Kabupaten
			Revitalisasi Bank Sampah	Unit		15	20	25	38	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMD, Desa/Kelurahan	APBD Kabupaten, Dana Desa, BUMDes

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Pengadaan Sarana Persampahan							Kabupaten Labuhanbatu		
			Truk Sampah	Unit	1	1	1	1	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Lingkungan Hidup	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Arm-roll	Unit	6	5	5	5	5	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Lingkungan Hidup	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Betor Sampah	Unit	3	3	3	3	3	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Lingkungan Hidup	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pengaktifan Pusat Daur Ulang	Unit		1				Kabupaten Labuhanbatu	Kemitraan dengan Komunitas Peduli Sampah Lestari Bersinar	Kemitraan dengan Komunitas

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Ha		1				Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
			Truk Tinja	Unit	10					Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Labuhanbatu 2025-2045	Dokumen	1					Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	APBN, APBD Kabupaten
			Penyusunan Revisi RDTR Rantauprapat 2022-2042	Dokumen		1				Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	APBN, APBD Kabupaten

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Penyusunan RDTR Aek Nabara 2027-2047	Dokumen			1			Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	APBN, APBD Kabupaten
			Revitalisasi Taman Binaraga Rantauprapat:							Kabupaten Labuhanbatu		
			Lapangan Senam	Paket	1					Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar	CSR
			Lapangan Basket	Paket	1					Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar	CSR
			Amphiteather	Paket	1					Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar	CSR
			Taman Anak	Paket	1					Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar	CSR
			Selasar	Paket	1					Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar	CSR
			Trotoar	Paket	1					Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar	CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Terminal dalam Kota Rantauprapat	Unit		1				Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Perhubungan	APBD Kabupaten
			Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Unit		5	5	5	5	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Perhubungan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten
			LPJU	Titik	30	100	100	100	100	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Perhubungan	APBD Kabupaten
		Pembangunan Desa	Revitalisasi BUMDes dan Pembentukan BUMDesma (BUMDes Bersama)	Jumlah BUMDesma		1	1	1	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PMD	Dana Desa, APBD Kabupaten
			Pembentukan Satgas Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih	Keputusan Bupati	1					Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PMD dan Dinas Koperasi	APBD Kabupaten

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
6.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan meningkatkan mitigasi bencana	Peningkatan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan (pertanian, peternakan dan perikanan) serta mendukung akses menuju infrastruktur/proyek nasional	Peningkatan Jalan Sei Rakyat - Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah	km		7				Kecamatan Panai Tengah	Dinas PUPR	Inpres (APBN)
			Peningkatan Jalan Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir menuju Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir	km			18			Kecamatan Bilah Hilir	Dinas PUPR	Inpres (APBN)
			Peningkatan Jalan Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir menuju Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir	km				22		Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	Inpres (APBN)
			Peningkatan Jalan Sei Rakyat-Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah	km					32	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	Inpres (APBN)
			Peningkatan Jalan Sei Berombang-Sei Tawar	km			15			Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	Inpres (APBN)

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
			Peningkatan Jalan Sidodadi (Simpang Meranti)-Sidorejo II (Meranti) Kecamatan Bilah Hulu	km		5				Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	Inpres (APBN)
		Peningkatan Mitigasi Bencana	Penyusunan Peta Kawasan Rawan Bencana	Peta	1					Kabupaten Labuhanbatu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	APBD Kabupaten
			Penambahan armada pemadam kebakaran	Truk			1	1		Kabupaten Labuhanbatu	Satpol PP	APBN, APBD Kabupaten, CSR
7	Mengembangkan inovasi, ekonomi kreatif, dan pariwisata	Pengembangan Inovasi Daerah, pembinaan UMKM serta pengembangan pariwisata	Peningkatan inovasi daerah dan replikasi inovasi daerah	Jumlah inovasi daerah	20	35	44	70	105	Seluruh OPD	Balitbang, Seluruh OPD	APBD Kabupaten
			Pembinaan UMKM kreatif dan UMKM kuliner	Peningkatan level UMKM	5	10	15	20	25	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Kop UKM, Dinas Perindag, Disnaker	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET					LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
					2025	2026	2027	2028	2029			
												CSR
			Revisi Riparkab	Perda		1				Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar	APBD Kabupaten
			Penyusunan Masterplan Destinasi Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu	Dokumen		1				Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar	APBD Kabupaten
			Penataan Kota Tua Labuhanbilik	Paket		1	1	1	1	Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Penataan Wisata Pantai Kahona	Paket		1	1	1	1	Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR



BAB V

Penutup

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu disiapkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan di lingkungan wilayah administrasi Kabupaten Labuhanbatu selama lima tahun ke depan, sejalan dengan amanat periodisasi penyelenggaraan RPJPD Tahap I. Dokumen RPJMD diperlukan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis di setiap Organisasi Perangkat Daerah yang diharapkan memberikan kolaborasi dan kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu. Dokumen ini juga memberikan arahan bagi pemangku kepentingan untuk menjalankan peran dan fungsi masing-masing melalui kaidah pelaksanaan.

Demi memastikan terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan cita-cita masyarakat Kabupaten Labuhanbatu, amanat pembangunan jangka panjang serta cita-cita Republik Indonesia, Dokumen RPJMD memberikan kaidah pelaksanaan yang memastikan konsistensi perencanaan dengan pendanaan, kerangka pengendalian serta mekanisme perubahan terhadap perencanaan daerah. Kaidah pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih, fleksibel dan adaptif namun tetap berpegang teguh kepada cita-cita pembangunan daerah.

5.1.1 Konsistensi Perencanaan dengan Pendanaan

Demi menjamin konsistensi perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menyusun RPJMD 2025 – 2029 dengan berpedoman kepada arahan RPJMN 2025 – 2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029 serta amanat yang tertuang dalam RPJPD Labuhanbatu 2025 – 2045. Dokumen RPJMD Labuhanbatu 2025 – 2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya serta Rencana Strategis pada Organisasi Perangkat Daerah sehingga tercapai sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Pemerintah daerah telah mempersiapkan prioritas pembangunan agar dapat memberikan hasil cepat yang menjadi sasaran utama pembangunan daerah. Penyesuaian

penganggaran untuk kegiatan pemerintahan dilakukan berdasarkan prioritas pembangunan.

5.1.2 Kerangka Pengendalian

Penyelenggaraan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu 2025 – 2029 menyertakan kerangka pengendalian yang akan diselenggarakan dalam jangka pendek. Hasil penyelenggaraan pembangunan daerah setiap tahunnya akan dievaluasi dan disampaikan kepada Kepala Daerah. Kerangka pengendalian di Kabupaten Labuhanbatu dibagi menjadi dua bagian, yaitu (1) pengendalian perencanaan, dan (2) pengendalian pelaksanaan.

Pengendalian perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan serta menjadi ketercukupan alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan berbasis perencanaan daerah. Pengendalian pelaksanaan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan sejalan dengan rencana dan memberikan hasil yang sesuai. Pengendalian dilakukan dengan dukungan tatanan regulasi sehingga tercapai sinergi dalam pemantauan, evaluasi, manajemen risiko serta manajemen kinerja pemerintah daerah. Sinergi dilakukan untuk mencapai konsistensi kinerja pemerintah bersama dengan organisasi perangkat daerah. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan pembangunan, maka pemerintah perlu segera mengambil kebijakan adaptif untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap sejalan dengan rencana pembangunan.

5.1.3 Mekanisme Perubahan

Dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu dipersiapkan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah yang adaptif dengan memberikan ruang penyesuaian terhadap ketidakpastian yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah menyadari bahwa periode lima tahun penyelenggaraan pemerintahan memiliki risiko ketidakpastian yang besar yang tidak dapat dipastikan oleh pemerintah daerah. Rentang waktu lima tahun pembangunan memberikan potensi perubahan geopolitik, geoekonomi, faktor bencana serta faktor lainnya yang menjadikan

pembangunan tidak seefektif sebagaimana direncanakan sehingga tahapan-tahapan yang telah dipersiapkan sebelumnya tidak memungkinkan untuk memberikan hasil pembangunan yang optimal. Dalam hal ini rencana capaian dalam RPJMD dapat dimutakhirkan berdasarkan evaluasi-evaluasi terhadap capaian dan penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya.

5.1.4 Transisi Pemerintahan

Demi memastikan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu, Dokumen RPJMD ini juga mengatur arahan pembangunan pada masa transisi kepemimpinan pembangunan daerah menuju penyelenggaraan periode RPJPD 2025-2045 tahap II. Dokumen RPJMD 2025 – 2029 memberikan pedoman yang menjadi fondasi dasar dalam menyelenggarakan masa transisi sebelum adanya RPJPD 2030 – 2034 di Kabupaten Labuhanbatu. Penyelenggaraan pemerintahan disesuaikan dengan amanat RPJPD Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya akan disesuaikan oleh kepala daerah terpilih. Transisi kepemimpinan juga memerlukan Tindakan cepat untuk penyusunan rancangan awal RPJMD periode berikutnya dengan memberikan visi, misi serta program unggulan pembangunan yang selaras dengan RPJPD tahap II. Sembari menyesuaikan perencanaan daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan memedomani arah

5.2 Mitigasi Risiko Pembangunan

Demi mewujudkan pembangunan daerah yang mampu mencapai visi, misi, tujuan serta sasaran daerah dalam jangka menengah yang diselenggarakan selama lima tahun, pemerintah mempersiapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis manajemen risiko. Manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan berupaya mengidentifikasi potensi ketidakpastian dan melakukan pengelolaan sehingga tujuan dan sasaran pembangunan serta mimpi daerah selama periode 2025 – 2029 dapat terwujud sebagaimana mestiknya. Dalam hal ini tahapan manajemen risiko diselenggarakan memedomani empat tahapan utama, meliputi:

1. Penetapan Rencana Pembangunan yang memberikan arah kebijakan serta target-target yang hendak dicapai selama periode pembangunan.

Penetapan target-target pembangunan tersebut menjadi dasar dalam menentukan *gap analysis* berdasarkan kondisi saat ini sehingga diperoleh kesenjangan yang hendak dipenuhi selama periode pembangunan. Hal ini memberikan gambaran tujuan yang jelas yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Penilaian profil risiko Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah perlu mengidentifikasi kemampuan diri dalam mengelola risiko dan menjadikan profil tersebut sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan risiko. Profil risiko juga dilakukan sebagai dasar dalam penilaian risiko terhadap segala bentuk ketidakpastian yang akan mempengaruhi tujuan penyelenggaraan pemerintahan RPJMD 2025 – 2029. Dengan adanya penilaian peluang (*likelihood*) serta dampak jika tidak segera ditangani (*severity*) pemerintah dapat menyusun perencanaan pengelolaan risiko yang lebih baik.
3. Penyusunan rencana mitigasi. Pemerintah dengan profil risikonya menyesuaikan mana risiko yang dapat dikelola dan mana risiko yang harus dimitigasi. Rencana mitigasi dibuat sejalan dengan perencanaan sehingga pemerintah menjadi siap dan sigap dalam menghadapi ketidakpastian yang terjadi selama masa pemerintahan.
4. Tahapan akhir yang dilakukan dalam manajemen risiko adalah pengendalian dan pelaporan kegiatan. Pemerintah berupaya memastikan bahwa implementasi RPJMD sesuai dengan target yang hendak dicapai. Dalam hal ada ketidaksesuaian maka pemerintah dapat mengevaluasi ketidakpastian dan mengelolanya sehingga dapat mencapai target yang diharapkan.

5.3 Kesimpulan

Kabupaten Labuhanbatu telah mempersiapkan rencana pembangunan selama lima tahun ke depan beserta rencana dalam menghadapi masa transisi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 – 2029. Pemerintah mempersiapkan dokumen sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu yang telah

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan dan indikator kinerja yang ditetapkan untuk menjawab tantangan, permasalahan serta isu strategis daerah. RPJMD ini menjadi pedoman dalam menyusun RKPD serta rencana strategis dalam periodisasi tahunan.

Demi mewujudkan visi “Labuhanbatu Cerdas Bersinar” diperlukan dukungan, kesungguhan serta semangat bersama dari seluruh stakeholder dan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.